



PEMERINTAH KABUPATEN
TABALONG



LKPJ

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN

2024

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Tahun Anggaran 2024.

Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati Tabalong ini memuat berbagai aktivitas dan kinerja Bupati dan Wakil Bupati Tabalong selaku Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah mencakup pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Disadari sepenuhnya bahwa apa yang telah dihasilkan mungkin belum seluruhnya memenuhi harapan masyarakat, meskipun sesungguhnya kami bersama seluruh kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong telah berusaha seoptimal mungkin secara totalitas untuk mewujudkan harapan tersebut.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, seluruh stakeholders dan khusus kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Tabalong, atas segala bantuan, dedikasi dan kerja sama yang baik untuk secara bersama-sama membangun Kabupaten Tabalong yang sama-sama kita cintai ini.

Pada kesempatan ini, perlu dan wajib bagi kita untuk secara bersama-sama mengucapkan puji dan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas semua anugerah yang telah diberikanNya kepada kita semua, sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Untuk itu marilah kita berdoa dan berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan kedepannya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk memajukan dan membangun Kabupaten Tabalong ini, kita selalu mendapat ridha, rahmat dan petunjuk dari-Nya. Aamiin

Tanjung, Maret 2025



Ir. H.MUHAMMAD NOOR RIFANI, SH, ST, MT

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
I. PENDAHULUAN.....	I-1
A. Dasar Hukum.....	I-1
B. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I-1
C. Data Umum Daerah.....	I-3
II. PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	II-1
A. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD.....	II-1
B. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah.....	II-2
C. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.....	II-6
D. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	II-10
III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH- AN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	III-1
A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	III-1
B. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	III-382
C. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	III-393
D. Capaian Kinerja Makro Atas Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2024.....	III-434
E. Capaian Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah....	III-445
IV. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	IV-1
V. PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
I.1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Per Kecamatan.....	I-8
I.2.	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tabalong Tahun 2020 s/d 2024.....	I-8
I.3.	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tabalong Per Kecamatan Tahun 2020 s/d 2024.....	I-9
I.4.	Persentase Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tabalong Per Kecamatan Tahun 2020 s/d 2024.....	I-10
I.5.	Data Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2024.....	I-11
I.6.	Data Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2024.....	I-15
I.7.	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024.....	I-19
I.8.	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2024.....	I-20
I.9.	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2024.....	I-22
II.1.	Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan II Dalam APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.....	II-2
II.2.	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Dalam Perubahan APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.....	II-4
II.3.	Proyeksi Perubahan Belanja Kabupaten Tabalong Tahun 2024.....	II-9
II.4.	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024.....	II-11
III.1.	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	III-1
III.2.	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	III-78
III.3.	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan.....	III-179
III.4.	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	III-227
III.5.	Kebijakan Strategis yang Ditetapkan Tahun 2024.....	III-382
III.6.	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	III-393
III.7.	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024.....	III-434

III.8.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024.....	III-436
III.9.	Indikator Kemiskinan Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024.....	III-437
III.10.	Angka Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024.....	III-438
III.11.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024.....	III-439
III.12.	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Tabalong Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024 (persen).....	III-440
III.13.	PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2020 – 2024.....	III-443
III.14.	Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024.....	III-444
III.15.	Persentase Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 (Menurut Bank Dunia).....	III-445
III.16.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Pendidikan Tahun 2020 sampai 2024.....	III-446
III.17.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Pendidikan Tahun 2023 dan 2024.....	III-447
III.18.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Pendidikan Tahun 2023-2024.....	III-449
III.19.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-449
III.20.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Kesehatan Tahun 2020 sampai 2024.....	III-450
III.21.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Kesehatan Tahun 2023 dan 2024.....	III-451
III.22.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Kesehatan Tahun 2023-2024	III-452
III.23.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-453
III.24.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Kesehatan (RSUD) Tahun 2020 sampai 2024.....	III-454
III.25.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Kesehatan (RSUD) Tahun 2023 dan 2024.....	III-454

III.26.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-455
III.27.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020 sampai 2024.....	III-456
III.28.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 dan 2024.....	III-458
III.29.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023-2024	III-459
III.30.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-459
III.31.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020 sampai 2024.....	III-460
III.32.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 dan 2024	III-460
III.33.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-461
III.34.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-461
III.35.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2020 sampai 2024.....	III-462
III.36.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 dan 2024.....	III-462
III.37.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023-2024...	III-463
III.38.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Satpol PP) Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-463
III.39.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (BPBD) Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-464

III.40.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Sosial Tahun 2020 sampai 2024.....	III-465
III.41.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Sosial Tahun 2023 dan 2024.....	III-466
III.42.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Sosial Tahun 2023-2024.....	III-466
III.43.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024...	III-467
III.44.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2020 sampai 2024.....	III-467
III.45.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2023 dan 2024.....	III-468
III.46.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2023-2024.....	III-469
III.47.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-469
III.48.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 sampai 2024.....	III-470
III.49.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 dan 2024.....	III-471
III.50.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2024.....	III-472
III.51.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-472
III.52.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-473
III.53.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Pangan Tahun 2023-2024.....	III-474
III.54.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Pertanian Tahun 2023-2024.....	III-474
III.55.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024..	III-475

III.56.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (Sektor Perikanan) Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-475
III.57.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (Sektor Hortikultura) Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-475
III.58.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020 sampai 2024....	III-476
III.59.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023 dan 2024.....	III-477
III.60.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023-2024.....	III-478
III.61.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-479
III.62.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-480
III.63.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 sampai 2024.....	III-481
III.64.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dan 2024.....	III-482
III.65.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023-2024.....	III-483
III.66.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-483
III.67.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Perhubungan Tahun 2020 sampai 2024.....	III-484
III.68.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Perhubungan Tahun 2023 dan 2024.....	III-486
III.69.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-487
III.70.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai 2024.....	III-488

III.71.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dan 2024.....	III-488
III.72.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-489
III.73.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-489
III.74.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-490
III.75.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Koperasi dan UKM Tahun 2020 sampai 2024...	III-490
III.76.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Koperasi dan UKM Tahun 2023 dan 2024.....	III-491
III.77.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Koperasi dan UKM Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-491
III.78.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 dan 2024.....	III-492
III.79.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-492
III.80.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023-2024.....	III-493
III.81.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-493
III.82.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-494
III.83.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2020 sampai 2024.....	III-495
III.84.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2023 dan 2024.....	III-495

III.85.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-495
III.86.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-496
III.87.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Kepemudaan Tahun 2020 sampai 2024.....	III-497
III.88.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Kepemudaan Tahun 2023 dan 2024.....	III-498
III.89.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-498
III.90.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-499
III.91.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Perpustakaan Tahun 2020 sampai 2024.....	III-499
III.92.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Perpustakaan Tahun 2023 dan 2024.....	III-500
III.93.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-500
III.94.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Perkebunan Tahun 2020 sampai 2024.....	III-501
III.95.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Perkebunan Tahun 2023 dan 2024.....	III-501
III.96.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-502
III.97.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020 sampai 2024.....	III-503
III.98.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 dan 2024.....	III-503
III.99.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-504

III.100.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 sampai 2024.....	III-505
III.101.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 dan 2024.....	III-506
III.102.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023-2024.....	III-506
III.103.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-507
III.104.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Pendapatan Daerah Tahun 2020 sampai 2024.....	III-507
III.105.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2024.....	III-508
III.106.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Pendapatan Daerah Tahun 2023-2024.....	III-509
III.107.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-509
III.108.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-514
III.109.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 sampai 2024.....	III-515
III.110.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dan 2024.....	III-515
III.111.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-516
III.112.	Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Administrasi Pemerintahan Tahun 2020 sampai 2024.....	III-517
III.113.	Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Administrasi Pemerintahan Tahun 2023-2024.....	III-518
III.114.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Administrasi Pemerintahan Tahun 2023-2024.....	III-519

III.115.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan Kabupaten Tabalong (Pada Sekretariat Daerah Tahun 2023-2024.....	III-519
III.116.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan Kabupaten Tabalong (Pada Sekretariat DPRD) Tahun 2023-2024.....	III-521
III.117.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024.....	III-522
III.118.	Daftar Penghargaan Yang Diterima Pemerintah Kabupaten Tabalog Tahun 2024.....	III-522
IV.1.	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2024.....	IV-1
V.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama.....	V-6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Kabupaten Tabalong terbentuk secara sah dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756). Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 Tanggal 14 Juni 1965, yang mendorong daerah persiapan Tingkat II Tabalong ditingkatkan lagi menjadi Daerah Otonomi Tingkat II Tabalong yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah, yang menjalankan roda Pemerintahan sendiri baik eksekutif maupun Legislatif.

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Periode tahun 2019-2024. Visi Kabupaten Tabalong sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong 2019-2024. Pernyataan visi ini juga selaras dan dalam rangka melaksanakan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tabalong sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Tabalong. Mempedomani hal-hal yang diuraikan diatas, maka ditetapkan visi Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, adalah:

“MENUJU KABUPATEN TABALONG YANG LEBIH AGAM AIS,
SEJAHTERA DAN MANDIRI”

Makna dari pernyataan visi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- **Kabupaten Tabalong yang Lebih Agamais;** merupakan pendekatan membumi melalui pembiasaan dalam rangka mengamalkan nilai-nilai agama pada kalangan masyarakat dan aparatur pemerintah daerah untuk hidup lebih agamais dan modern dalam tatanan sosial kemasyarakatan serta produktif dan bermanfaat dalam bekerja. Nilai-nilai agama yang seharusnya mendapat perhatian tersebut seperti kejujuran, kedisiplinan, musyawarah, keikhlasan, kemandirian, profesionalisme, keadilan, amanah, kebersamaan/ persatuan, aspiratif/akomodatif, tawakal dan lain-lain.
- **Kabupaten Tabalong yang Lebih Sejahtera;** merupakan pendekatan lahiriah untuk mencapai suatu keadaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin dengan rasa aman dan nyaman untuk menjadi masyarakat yang lebih baik, makmur, sehat dan damai.
- **Kabupaten Tabalong yang Lebih Mandiri;** merupakan pendekatan kelembagaan dan profesionalitas dalam rangka perkuatan sistem ekonomi, sosial dan budaya yang handal dan dinamis serta mampu bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara lebih bijak dengan memaksimalkan potensi ekonomi yang ada seperti sumber daya manusia yang dioptimalkan, pemanfaatan sumber daya alam lokal, dan pemberdayaan lembaga ekonomi yang ada melalui kerja keras dan inovatif.

Pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong didukung oleh 3 (tiga) misi, yaitu:

a. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Lebih Agamais

Misi ini mengawal kebijakan pembangunan yang diarahkan agar tercapai masyarakat madani yang beretika dan bermoral melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama,

memperkuat kelembagaan keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan. Hal pokok yang menjadi pusat perhatian adalah Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga akan terwujud kualitas sumber daya manusia yang berahlak mulia (Tabalong Berkualitas).

b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Misi ini mengawal pembangunan yang diarahkan agar masyarakat berkemampuan lebih dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya melalui kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian akan terwujud kualitas hidup masyarakat yang peningkatannya dirasakan secara signifikan, serta terjadinya penurunan angka kemiskinan yang nyata (Tabalong Sejahtera).

c. Mewujudkan Kemandirian Daerah

Misi ini mengawal pembangunan yang diarahkan pada tercapainya sistem yang handal dan dinamis yang mampu bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak melalui penguatan kelembagaan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan. Dengan kemandirian inilah akan terwujud kemajuan perekonomian daerah yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas (Tabalong Mandiri)

C. Data Umum Daerah

1. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Tabalong dengan ibukota Tanjung berada di wilayah utara Provinsi Kalimantan Selatan, secara geografis terletak antara 115°9' - 115°47' Bujur Timur dan 1°18' - 2°25' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara	:	Provinsi Kalimantan Timur
Sebelah timur	:	Provinsi Kalimantan Timur

Sebelah selatan : Kabupaten Hulu Sungai Utara
Sebelah barat : Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara administratif, Kabupaten Tabalong yang mempunyai luas wilayah 3.946 KM² atau 394.600 Ha terbagi atas 12 kecamatan, 10 kelurahan, dan 121 desa. Letak Kabupaten Tabalong sangat strategis, berada pada jalur “segitiga emas”, di 3 (tiga) provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Ditinjau dari topografinya, bagian utara merupakan dataran tinggi dan bergunung-gunung, dimana Pegunungan Meratus terbentang dari arah utara ke Selatan bagian timur. Pada bagian tengah merupakan dataran dan bergelombang, sedangkan wilayah bagian selatan didominasi oleh dataran rendah dan rawa.

Iklim dan curah hujan di Kabupaten Tabalong termasuk yang beriklim tropis, musim hujan berkisar antara bulan Oktober sampai dengan bulan April dan musim kemarau atau panas berkisar pada bulan Mei sampai dengan September setiap tahunnya. Sedangkan suhu udara berkisar antara 31°C sampai 37°C pada musim kemarau dan 25°C sampai dengan 30°C pada musim penghujan, dengan curah hujan rata-rata per tahun antara 2.000-3.000 mm.

Jenis tanah Podsolik merah kuning dengan bahan induk batuan endapan yang sifat tanahnya mudah tererosi dan umumnya miskin unsur Hara mendominasi wilayah ini. Kemiringan lerengnya didominasi oleh lahan dengan kemiringan rendah (0-5%), sisanya memiliki kemiringan sedang (15-40%) dan lebih dari 40%. Kedalaman efektif tanah rata-rata lebih dari 90 cm (97,8%), dan sebagian besar tanahnya bertekstur halus.

Luas Kabupaten Tabalong berdasarkan ketinggian tempat tersebar pada berbagai ketinggian yang berbeda. Ketinggian tempat yang paling luas berada pada ketinggian 25-100 m dpl tersebar pada luasan 156.282 Ha atau sekitar 43,5% dari wilayah

Kabupaten Tabalong. Luasan ketinggian terkecil berada pada posisi di atas 1000 m dpl, hanya tersebar pada luasan 2.923 Ha atau 0,80% dari wilayah Kabupaten Tabalong. Sebaran luas yang lain yaitu pada ketinggian 0-7 m dpl meliputi luasan 7.062 Ha atau 1,92%, 7-25 m dpl meliputi luasan 11.688 Ha atau 3,18%, 100-500 m dpl meliputi luasan 82.277 Ha atau 22,39%, dan 500-100 m dpl meliputi luasan 107.233 Ha atau 29,18%. Pada ketinggian 25-100 m dpl semua tanaman tropis dapat tumbuh dengan baik karena tingkat pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh tinggi tempat dan suhu udara. Kondisi ini diindikasikan dengan tingginya prosentase wilayah hutan (64,44%) yang terdapat di Kabupaten Tabalong ditambah dengan jenis-jenis tanaman budidaya lainnya.

Kemampuan tanah berdasarkan kombinasi dan gabungan berbagai faktor seperti kelerengan, kedalaman efektif, tekstur, draenase dan erosi pada berbagai tempat cukup variatif. Berdasarkan kelas lereng 25,77% dari luas wilayah Kabupaten Tabalong atau seluas 94.703 dapat dimanfaatkan untuk budidaya lahan basah yaitu perkebunan dan sawah, 62.836 Ha untuk budidaya tanaman pangan lahan kering, 90.762 Ha untuk perkebunan, 37.590 Ha untuk budidaya hutan produksi dan 46.750 Ha untuk hutan lindung. Berdasarkan kedalaman efektif maka sebagian besar atau 308.685 Ha berada pada kedalaman 90 cm dan sesuai untuk budidaya pertanian. Tekstur tanah 98,75% halus dan sisanya 1,25% bertekstur sedang. Draenase menunjukkan baik karena 350.949 Ha atau 95,51% tidak pernah tergenang, 2,14% tergenang secara periodik dan 2,35% tergenang terus menerus sehingga sangat cocok untuk budidaya pertanian tanaman pangan lahan kering dan perkebunan.

Berdasarkan jenis tanahnya maka 43,17% luas wilayah Kabupaten Tabalong sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan

kering, perkebunan dan kehutan berbasis agroforestri karena jenis tanahnya podsolik merah kuning. Untuk pertanian lahan basah hanya sesuai untuk 5,13% wilayah Kabupaten Tabalong dengan jenis tanah aluvial dan organosol glei humus. Akan tetapi jenis tanah podsolik merah kuning ini memiliki sifat yang sangat rentan yaitu mudah tercuci, peka erosi, permeabilitas rendah dan agregat kurang stabil. Jenis tanah ini tingkat kesuburannya sangat tergantung pada jenis vegetasi yang menjadi penutupnya. Dari segi lingkungan maka penggunaan jenis tanah ini harus dengan sistem siklus unsur hara tertutup. Pola yang sesuai untuk dikembangkan adalah agroforestri yaitu pola pengkombinasian tanaman pertanian dengan tanaman kehutan.

Berdasarkan kondisi geologi maka Kabupaten Tabalong tersusun atas 14 formasi batuan. Formasi batuan terbanyak adalah Tanjung seluas 86.532 Ha atau 23,55% dari seluruh wilayah. Sedangkan formasi yang paling sedikit adalah formasi granit yaitu 172 Ha atau 0,05% dari luas wilayah. Berdasarkan kondisi geologis Kabupaten Tabalong kaya dengan berbagai sumberdaya alam mineral.

Berdasarkan kesesuaian lahan dengan jenis tanaman yang akan dikembangkan maka terdapat 18 sistem lahan dengan 5 tingkat kesesuaian yaitu sangat sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai, tidak sesuai saat ini dan tidak sesuai permanen. Kesesuaian dikaitkan dengan dapat atau tidaknya suatu jenis tanaman dikembangkan. Penggunaan tanah yang diusahakan dari luas wilayah sebesar 41,55% atau 147.156 Ha terdiri dari perkebunan, kebun rakyat, ladang, kolam, pemukiman. Luas tanah yang belum diusahakan seluas 206.968 Ha atau 58,45% terdiri dari hutan negara, padang rumput, rawa, lahan terlantar dan lain-lain. Luas tanah yang belum diusahakan merupakan modal dan potensi untuk

usaha budidaya pertanian dan kehutanan sedangkan yang sudah diusahakan dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Pola wilayah tanah usaha (WTU) berdasarkan kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup yang ada terbagi menjadi 6 WTU yaitu WTU terbatas dengan ketinggian kurang 7 m dpl, permukaan tanah datar sampai sangat datar dan kadang-kadang terkena banjir, wilayah ini untuk perikanan dan persawahan. WTU utama Ia, Ib dengan ketinggian 7-25 m dpl, permukaan tanah datar sampai bergelombang ringan, sesuai untuk perikanan dan persawahan. WTU utama Ic pada ketinggian 25-100 m dpl, permukaan tanah bergelombang, sesuai untuk perkebunan, agroforestri, pertanian tanah kering dan sawah. WTU utama Id pada ketinggian 100-500 m dpl, permukaan tanah bergelombang sampai berbukit, sesuai untuk perkebunan, agroforestri dan pertanian tanah kering. WTU utama II 500-1000 m dpl, keadaan permukaan tanah berbukit dan bergunung, dimanfaatkan sebagai kawasan lindung. WTU terbatas II, ketinggian lebih 1000 m dpl, peruntukan untuk kawasan lindung karena kelerengan lebih dari 40%.

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, penduduk Kabupaten Tabalong sampai tahun 2024 berjumlah sebanyak 264.694 jiwa, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel I.1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Tabalong Tahun 2024
Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2	3
1.	Banua Lawas	21.220
2.	Kelua	25.818
3.	Tanta	24.013
4.	Tanjung	37.577
5.	Haruai	24.567
6.	Murung Pudak	58.451
7.	Muara Uya	24.771
8.	Muara Harus	7.209
9.	Pugaan	7.819
10.	Upau	7.776
11.	Jaro	15.835
12.	Bintang Ara	9.638
	Jumlah	264.694

Sumber : DKB I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Murung Pudak yaitu sebanyak 58.451 jiwa, disusul Kecamatan Tanjung sebanyak 37.577 jiwa dan Kecamatan Kelua 25.818 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Muara Harus yaitu sebanyak 7.209 jiwa.

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Tabalong dari tahun 2018-2022, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.2.
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tabalong
Tahun 2020 s/d 2024

No.	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	7	8
1	Banua Lawas	20.018	20.319	20.763	21.112	21.220
2	Kelua	24.396	24.816	25.324	25.702	25.818
3	Tanta	21.073	21.947	22.875	23.614	24.013
4	Tanjung	35.786	36.472	37.059	37.367	37.577
5	Haruai	23.418	23.829	24.366	24.486	24.567
6	Murung Pudak	52.794	54.471	56.235	57.721	58.451

1	2	4	5	6	7	8
7	Muara Uya	23.084	23.735	24.319	24.668	24.771
8	Muara Harus	6.828	7.007	7.138	7.188	7.209
9	Pugaan	7.379	7.510	7.728	7.811	7.819
10	Upau	7.278	7.400	7.664	7.752	7.776
11	Jaro	14.717	15.228	15.676	15.731	15.835
12	Bintang Ara	8.994	9.170	9.378	9.479	9.638
	Kab. Tabalong	245.765	251.904	258.525	262.631	264.694

Sumber :DKB I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Sedangkan pertumbuhan per kecamatan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.3.

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tabalong Per Kecamatan
Tahun 2020 s/d 2024

No.	Kecamatan	Pertumbuhan Penduduk				
		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	Rata-Rata
1	2	5	6	6		6
1	Banua Lawas	0,0150	0,0219	0,0168	0,022	0,019
2	Kelua	0,0172	0,0205	0,0149	-0,020	0,008
3	Tanta	0,0415	0,0423	0,0323	0,050	0,041
4	Tanjung	0,0192	0,0161	0,0083	0,014	0,014
5	Haruai	0,0176	0,0225	0,0049	0,008	0,013
6	Murung Pudak	0,0318	0,0324	0,0264	0,039	0,033
7	Muara Uya	0,0282	0,0246	0,0144	0,019	0,021
8	Muara Harus	0,0262	0,0187	0,0070	0,010	0,015
9	Pugaan	0,0178	0,0290	0,0107	0,012	0,017
10	Upau	0,0168	0,0357	0,0115	0,015	0,020
11	Jaro	0,0347	0,0294	0,0035	0,010	0,019
12	Bintang Ara	0,0196	0,0227	0,0108	0,028	0,020
	Kab. Tabalong	0,0250	0,0263	0,0159	0,020	0,022

Sumber : DKB I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024 (diolah)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk terbesar selama 5 tahun terakhir (2020 s/d 2024) berada di Kecamatan Murung Pudak yaitu rata-rata sebanyak 1.414 jiwa per tahun, disusul Kecamatan Tanta dengan rata-rata sebanyak 735 jiwa per tahun. Dan Kecamatan terendah angka pertumbuhannya adalah Kecamatan Muara Harus dengan angka pertumbuhan rata-rata sebanyak 95 jiwa pe tahun.

Persentase pertumbuhan penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel I.4.

Persentase Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tabalong
Per Kecamatan Tahun 2020 s/d 2024

No.	Kecamatan	Pertumbuhan Penduduk (persen)				
		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	Rata-Rata
1	2	6		6		7
1	Banua Lawas	1,50%	2,19%	1,68%	2,20%	1,89%
2	Kelua	1,72%	2,05%	1,49%	-2,00%	0,82%
3	Tanta	4,15%	4,23%	3,23%	4,97%	4,15%
4	Tanjung	1,92%	1,61%	0,83%	1,40%	1,44%
5	Haruai	1,76%	2,25%	0,49%	0,82%	1,33%
6	Murung Pudak	3,18%	3,24%	2,64%	3,94%	3,25%
7	Muara Uya	2,82%	2,46%	1,44%	1,86%	2,14%
8	Muara Harus	2,62%	1,87%	0,70%	0,99%	1,55%
9	Pugaan	1,78%	2,90%	1,07%	1,18%	1,73%
10	Upau	1,68%	3,57%	1,15%	1,46%	1,97%
11	Jaro	3,47%	2,94%	0,35%	1,01%	1,94%
12	Bintang Ara	1,96%	2,27%	1,08%	2,77%	2,02%
	Kab. Tabalong	2,50%	2,63%	1,59%	2,00%	2,18%

Sumber : DKB I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

3. Jumlah ASN

Jumlah ASN di Kabupaten Tabalong termasuk tenaga pendidik dan kependidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel I.5.

Data Pegawai Apratur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No.	SKPD	Pendidikan											Golongan Ruang					Jumlah Pejabat		
		SD	SLTP	SLTA	D I	D II	D III	D IV	S1	S2	S3	Jumlah	I	II	III	IV	Jumlah	Struktural	Non Eselon	Jumlah
		(Org)	(Org)	(Org)	(Org)	(Org)	(Org)	(Org)	(Org)	(Org)	(Org)		(Org)	(Org)	(Org)	(Org)		(Org)	(Org)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	1	4	0	0	2	0	52	20	1	80	0	6	26	48	80	17	63	80
a.	UPTD Satuan Pendidikan Nonformal SKB	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11	0	0	1	10	11	0	11	11
b.	Guru TK	0	0	8	0	3	0	0	128	0	0	139	0	3	125	11	139	0	139	139
c.	Guru/Penjaga Sekolah SD/dan sebagainya	3	5	34	0	44	0	0	1.026	15	0	1.127	0	34	785	308	1.127	0	1.127	1.127
d.	Guru/Tenaga Administrasi SMP/ dan sebagainya	2	3	15	0	3	4	1	369	25	0	422	2	9	251	160	422	0	422	422
2.	Dinas Kesehatan	1	0	2	0	0	7	6	23	18	0	57	1	3	37	16	57	9	48	57
a.	UPT Puskesmas	0	1	15	4	1	259	38	150	12	0	480	0	94	329	57	480	0	480	480
b.	UPT Instalasi Farmasi	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	7	0	1	4	2	7	2	5	7
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	0	2	12	1	0	89	16	88	16	0	224	0	24	157	43	224	14	210	224
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	6	0	0	4	1	25	4	0	40	0	3	31	6	40	10	30	40
a.	UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	1	0	0	2	0	10	0	0	15	1	1	13	0	15	10	5	15
5.	Bappedalitbang	0	0	2	0	0	3	2	16	9	1	33	0	1	24	8	33	9	24	33
6.	Dinas Perhubungan	1	2	4	0	0	10	4	7	3	0	31	2	8	17	4	31	13	18	31
a.	UPT Dinas Perhubungan	0	0	0	0	2	2	0	3	0	0	7	0	2	5	0	7	3	4	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.	Dinas Lingkungan Hidup	9	7	23	0	0	7	0	11	8	0	65	8	23	26	8	65	17	48	65
8.	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	0	0	1	0	0	2	2	14	8	0	27	0	3	21	3	27	8	19	27
9.	Dinas Kependudukan dan Capil	0	0	3	0	0	1	1	11	7	0	23	0	0	16	7	23	9	14	23
10.	Dinas Sosial	1	0	4	0	0	2	0	8	3	0	18	1	0	13	4	18	7	11	18
11.	Dinas Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	3	0	10	2	0	15	0	1	10	4	15	6	9	15
a.	UPT Balai Latihan Kerja	0	0	1	0	0	0	0	8	0	0	9	0	1	8	0	9	2	7	9
12.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0	0	0	0	0	2	1	9	2	1	15	0	0	10	5	15	7	8	15
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	3	0	0	1	0	5	2	0	11	0	1	7	3	11	5	6	11
14.	Badan Kesbang dan Politik	0	2	1	0	0	0	0	10	3	0	16	0	2	9	5	16	6	10	16
15.	Dinas P3AP2 & KB	0	0	1	0	0	2	5	10	3	0	21	0	3	13	5	21	9	12	21
16.	Bapenda	0	0	1	0	0	7	1	13	8	0	30	0	6	18	6	30	14	16	30
17.	BPKAD	0	0	2	0	0	5	0	14	7	1	29	0	1	23	5	29	17	12	29
18.	Inspektorat	0	0	1	0	0	4	2	24	10	0	41	0	4	23	14	41	9	32	41
19.	Sekretariat Daerah	3	3	10	0	1	5	7	53	17	0	99	2	13	65	19	99	20	79	99
20.	Sekretariat DPRD	0	0	9	0	0	5	1	11	4	0	30	0	6	19	5	30	5	25	30
21.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	4	1	16	0	0	6	1	31	6	0	65	4	11	42	8	65	19	46	65
22.	Dinas Penanaman Modal & PTSP	0	0	1	0	0	1	1	12	7	0	22	0	1	16	5	22	8	14	22
23.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	1	17	0	0	3	0	11	3	0	35	0	5	25	5	35	16	19	35
24.	BKPSDM	1	0	2	0	0	3	1	13	3	1	24	1	1	17	5	24	7	17	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
25.	Dinas PMD	0	0	2	0	0	2	0	11	5	0	20	0	1	14	5	20	7	13	20
26.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	4	0	0	4	2	13	3	0	26	0	3	19	4	26	7	19	26
27.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	0	0	1	0	0	4	0	14	1	0	20	0	0	16	4	20	9	11	20
a.	UPT. Dinas Perkebunan dan Peternakan	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0	3	3	0	3
28.	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	2	9	0	0	7	6	63	8	0	96	0	12	61	23	96	18	78	96
29.	Dinas Perkim	0	0	3	0	0	1	0	12	4	0	20	0	1	16	3	20	6	14	20
30.	Kecamatan Tanjung	1	0	2	0	0	4	0	6	2	0	15	1	3	9	2	15	8	7	15
a.	Kelurahan Tanjung	0	1	1	0	0	2	0	3	0	0	7	0	1	6	0	7	5	2	7
b.	Kelurahan Jangkung	0	1	2	0	0	0	0	4	0	0	7	0	2	5	0	7	4	3	7
c.	Kelurahan Agung	0	0	2	0	0	0	0	3	1	0	6	0	2	3	1	6	4	2	6
d.	Kelurahan Hikun	0	0	4	0	0	1	0	3	0	0	8	0	3	5	0	8	4	4	8
31.	Kecamatan Murung Pudak	0	0	2	0	0	2	0	5	1	0	10	0	2	7	1	10	7	3	10
a.	Kelurahan Belimbing	1	0	1	0	0	1	0	4	0	0	7	0	1	6	0	7	5	2	7
b.	Kelurahan Belimbing Raya	0	0	2	0	0	0	1	4	0	0	7	0	0	7	0	7	5	2	7
c.	Kelurahan Sulingan	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	6	0	1	5	0	6	5	1	6
d.	Kelurahan Pembataan	0	0	2	0	0	0	0	3	1	0	6	0	0	5	1	6	5	1	6
e.	Kelurahan Mabuun	1	0	0	0	0	1	0	5	0	0	7	0	2	5	0	7	5	2	7
32.	Kecamatan Tanta	1	2	6	0	0	2	1	7	1	0	20	0	8	10	2	20	8	12	20
33.	Kecamatan Kelua	0	0	6	0	0	2	0	6	2	0	16	0	5	9	2	16	8	8	16
a.	Kelurahan Pulau	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	6	0	1	5	0	6	5	1	6
34.	Kecamatan Muara Harus	2	1	3	0	0	2	0	5	2	0	15	1	4	9	1	15	7	8	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
35.	Kecamatan Pugaan	0	1	4	0	0	2	0	4	2	0	13	0	4	7	2	13	6	7	13
36.	Kecamatan Banua Lawas	0	1	6	0	0	2	0	4	3	0	16	0	4	9	3	16	6	10	16
37.	Kecamatan Haruai	0	1	3	0	0	4	0	4	1	0	13	0	5	7	1	13	8	5	13
38.	Kecamatan Bintang Ara	0	0	3	0	0	5	0	2	2	0	12	0	3	7	2	12	8	4	12
39.	Kecamatan Upau	0	0	1	0	0	3	0	5	1	0	10	0	1	8	1	10	8	2	10
40.	Kecamatan Muara Uya	0	0	2	0	0	1	0	7	2	0	12	0	0	11	1	12	7	5	12
41.	Kecamatan Jaro	0	2	6	0	0	1	1	6	0	0	16	1	4	9	2	16	8	8	16
	JUMLAH	33	42	277	5	54	499	102	2404	267	5	3688	25	344	2469	850	3688	464	3224	3688

Sumber: Data Kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, SIMPEG Kab. Tabalong per tanggal 31 Desember

Tabel I.6.

Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No.	SKPD	Pendidikan											Golongan Ruang					Jumlah Pejabat		
		SD	SLTP	SLTA	D I	D II	D III	D IV	S1	S2	S3	Jumlah	V	VII	IX	X	Jumlah	Struktural	Non Eselon	Jumlah
		(Org)	(Org)	(Org)	(Org)	(Org)	(Org)	(Org)	(Org)	(Org)	(Org)		(Org)	(Org)	(Org)	(Org)		(Org)	(Org)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	0	2	1	0	3	0	3	3
a.	UPTD Satuan Pendidikan Nonformal SKB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	Guru TK	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	28	0	0	28	0	28	0	28	28
c.	Guru/Penjaga Sekolah SD/dan sebagainya	0	0	0	0	0	0	0	659	0	0	659	0	0	659	0	659	0	659	659
d.	Guru/Tenaga Admnsitrasi SMP/ dan sebagainya	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	140	0	0	140	0	140	0	140	140
2.	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1
a.	UPT Puskesmas	0	0	0	0	0	101	8	39	0	0	148	0	101	18	29	148	0	148	148
b.	UPT Instalasi Farmasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	0	0	0	0	0	29	2	7	0	0	38	0	29	4	5	38	0	38	38
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1
a.	UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Bappedalitbang	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	4	0	4	4
6.	Dinas Perhubungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	UPT Dinas Perhubungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	4	0	4	4
8.	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	3	0	3	3
9.	Dinas Kependudukan dan Capil	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1
10.	Dinas Sosial	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1
11.	Dinas Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	3	0	3	3
a.	UPT Balai Latihan Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	2	2
14.	Badan Kesbang dan Politik	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1
15.	Dinas P3AP2 & KB	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1
16.	Bapenda	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1
17.	BPKAD	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	5	0	0	5	0	5	0	5	5
18.	Inspektorat	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1
19.	Sekretariat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	10	0	10	10
20.	Sekretariat DPRD	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	2
21.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1
22.	Dinas Penanaman Modal & PTSP	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	2
23.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	1	1	0	2	0	2	2
24.	BKPSDM	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3	0	1	2	0	3	0	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
25.	Dinas PMD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	2
27.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	5	0	5	5
a.	UPT. Dinas Perkebunan dan Peternakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0	0	4	0	0	1	0	28	0	0	33	4	1	28	0	33	0	33	33
29.	Dinas Perkim	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	3	0	3	3
30.	Kecamatan Tanjung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	Kelurahan Tanjung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	Kelurahan Jangkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	Kelurahan Agung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	Kelurahan Hikun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Kecamatan Murung Pudak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	Kelurahan Belimbing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	Kelurahan Belimbing Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	Kelurahan Sulingan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	Kelurahan Pembataan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	Kelurahan Mabuun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kecamatan Tanta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Kecamatan Kelua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	Kelurahan Pulau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kecamatan Muara Harus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
35.	Kecamatan Pugaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kecamatan Banua Lawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Kecamatan Haruai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kecamatan Bintang Ara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kecamatan Upau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Kecamatan Muara Uya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Kecamatan Jaro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	6	0	0	135	13	955	0	0	1109	6	135	934	34	1109	0	1109	1109

Sumber: Data Kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, SIMPEG Kab. Tabalong per tanggal 31 Desember

4. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.7.

Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis Pendapatan	Rencana (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	PENDAPATAN	1.509.631.812.928,00	2.665.576.702.436,00	2.876.285.635.126,64
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	176.327.889.608,00	247.404.526.277,00	264.607.523.905,64
-	Pendapatan pajak Daerah	73.920.283.935,00	85.313.474.000,00	89.780.105.185,00
-	Pendapatan Retribusi Daerah	6.560.454.600,00	111.795.793.776,00	100.474.184.730,33
-	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.800.000.000,00	19.800.883.644,00	14.735.829.206,00
-	Lain- lain PAD Yang Sah	82.047.151.073,00	30.494.374.857,00	59.617.404.784,31
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.327.127.212.947,00	2.278.172.176.159,00	2.611.678.111.221,00
-	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.185.282.862.247,00	2.046.413.738.000,00	2.401.653.905.992,00
-	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-
-	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	141.844.350.700,00	231.758.438.159,00	210.024.205.229,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6.176.710.373,00	140.000.000.000,00	-
-	Pendapatan Hibah	6.176.710.373,00	140.000.000.000,00	-
-	Pendapatan Lainnya	-	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2024

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.876.285.635.126,64 atau mencapai 107,90% dari estimasi pendapatan yang dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp2.665.576.702.436,00. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp264.607.523.905,64 dari estimasi pendapatan setelah perubahan sebesar Rp247.404.526.277,00 atau sebesar 106,95%. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD Yang Sah.

- 2) Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 sebesar Rp2.611.678.111.221,00 dari estimasi pendapatan setelah perubahan sebesar Rp2.278.172.176.159,00 atau 114,64%. Pendapatan transfer tersebut bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.
- 3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan pendapatan hibah dan pendapatan lainnya, dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp0,00 dari estimasi pendapatan setelah perubahan sebesar Rp140.000.000.000,00 atau sebesar 0,00%.

5. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja menurut jenis belanja pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.8.
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis Belanja	Rencana (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5
	BELANJA	1.165.661.589.956,00	3.183.167.179.768,00	2.718.184.089.048,70
1	BELANJA OPERASI	1.165.661.589.956,00	1.784.448.643.144,00	1.550.436.515.684,78
-	Belanja Pegawai	568.649.112.942,00	825.804.659.096,00	729.838.937.687,26
-	Belanja Barang dan Jasa	548.416.848.081,00	843.359.844.543,00	709.644.966.804,52
-	Belanja Bunga	4.453.272.616,00	6.349.580.000,00	4.359.106.254,00
-	Belanja Subsidi	3.265.000.000,00	723.370.000,00	0,00
-	Belanja Hibah	18.113.456.317,00	74.485.739.505,00	73.543.774.939,00
-	Belanja Bantuan Sosial	22.763.900.000,00	33.725.450.000,00	33.049.730.000,00
2	BELANJA MODAL	383.915.542.392,00	1.068.567.900.118,00	846.763.080.563,92
-	Belanja modal Tanah	12.168.847.125,00	51.871.893.222,00	42.619.692.957,00
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.390.517.779,00	128.281.067.573,00	108.059.565.476,00
-	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	54.879.499.638,00	214.678.336.134,00	152.095.305.224,92
-	Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	266.904.976.062,00	666.521.821.413,00	537.443.825.200,00

1	2	3	4	5
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.571.701.788,00	4.499.381.776,00	4.355.098.455,00
-	Belanja Modal BLUD			
-	Belanja Modal dari dana BOMM			
-	Belanja Modal Aset Lainnya		2.715.400.000,00	2.189.593.251,00
-	Belanja Modal Dana BOS			
3	BELANJA TAK TERDUGA	5.412.283.529,00	11.151.143.706,00	1.985.000.000,00
-	Belanja Tak Terduga	5.412.283.529,00	11.151.143.706,00	1.985.000.000,00
	TRANSFER	380.750.846.000,00	318.999.492.800,00	318.999.492.800,00
1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	194.401.423.000,00	194.401.423.000,00	194.401.392.988,00
-	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.395.000.000,00	20.968.300.000,00	20.968.300.000,00
-	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	657.000.000,00		
-	Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya			
2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN			
-	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	186.349.423.000,00	298.031.192.800,00	298.031.192.800,00
-	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya			

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2024

Belanja merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi belanja pada tahun 2024 sebesar Rp2.718.184.089.048,70 dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp3.183.167.179.768,00 atau sebesar 85,39%. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer, dengan realisasi sebagai berikut :

- 1) Realisasi belanja operasi tahun 2024 sebesar Rp1.550.436.515.684,78 atau 86,89% dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp1.784.448.643.144,00. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, bantuan bantuan sosial.
- 2) Realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp846.763.080.563,92 atau 79,24% dari rencana belanja setelah

perubahan sebesar Rp1.068.567.900.118,00. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan Gedung, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal aset tetap lainnya.

- 3) Realisasi belanja tidak terduga tahun 2024 sebesar Rp1.985.000.000,00 atau 17,80% dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp11.151.143.706,00.
- 4) Realisasi transfer tahun 2024 sebesar Rp318.999.492.800,00 atau 100,00% dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp318.999.492.800,00. Belanja transfer terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan.
 - a. Realisasi transfer bagi hasil pendapatan tahun 2024 sebesar Rp20.968.300.000,00 atau 100,00% dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp20.968.300.000,00. Transfer bagi hasil pendapatan terdiri dari transfer bagi hasil pajak daerah dan transfer bagi hasil retribusi daerah.
 - b. Realisasi transfer bantuan keuangan tahun 2024 sebesar Rp298.031.192.800,00 atau 100,00% dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp298.031.192.800,00. Transfer bantuan keuangan terdiri dari transfer bantuan keuangan ke desa dan transfer bantuan keuangan lainnya.

6. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.9.

Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis Pembiayaan	Rencana (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	PEMBIAYAAN			
1	PENERIMAAN DAERAH	258.759.025.949,00	560.285.979.793,00	560.285.979.793,00
-	Penggunaan Sisa Lebih Anggaran (SiLPA)	138.759.025.949,00	560.285.979.793,00	560.285.979.793,00
-	Penerimaan Pinjaman Daerah	120.000.000.000,00	-	-

No.	Jenis Pembiayaan	Rencana (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
2	PENGELUARAN DAERAH	19.000.000.000,00	42.695.502.461,00	42.695.502.461,00
-	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	19.000.000.000,00	42.695.502.461,00	42.695.502.461,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2022

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Realisasi pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp517.590.477.332,00 atau sebesar 100,00% dari rencana pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp517.590.477.332,00. Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Realisasi penerimaan daerah tahun 2024 sebesar Rp560.285.979.793,00 atau sebesar 100,00% dari rencana penerimaan setelah perubahan sebesar Rp560.285.979.793,00. Penerimaan Daerah pada tahun 2024 merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Penerimaan Pinjaman Daerah.
- 2) Realisasi Pengeluaran daerah tahun 2024 sebesar Rp42.695.502.461,00 atau sebesar 100,00% dari rencana pengeluaran daerah setelah perubahan sebesar Rp42.695.502.461,00.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Tabel III.1.

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Dinas Pendidikan

Uusan Pemerintah	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Rincian Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
				Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
				Rp	%	Rp	%		
Urusan Wajib Pemerintah Bidang Pendidikan	Meningkatnya Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Yang Bermutu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86.575.405,-	100	23.112.000,00	26,70	Untuk kegiatan yang di anggarkan pada sub kegiatan ini sudah terealisasi dengan baik tetapi dengan menggunakan anggaran kegiatan pada sub kegiatan lain karena berkaitan dengan realisasi perjalanan dinas	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	467.517.780,00	100	434.638.423,00	92,97	-	-

	Indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIP pada Sekretariat	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	359.498.248.000,00	100	319.194.560.318,00	88,79	-	-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	71.935.356,00	100	68.547.200,00	95,29		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	98.467.200,00	100	92.595.000,00	94,04		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	56.803.104,00	100	56.432.500,00	99,35		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	577.368.476,00	100	496.521.049,00	86,00		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.958.847,00	100	25.400.000,00	79,48		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.488.595.924,00	100	905.219.910,00	60,81		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	280.441.207,00	100	275.727.739,00	98,32		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.990.000,00	100	177.879.948,00	81,98		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.313.265.000,00	100	1.183.126.271,00	90,09		

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.390.000,00	100	127.735.500,00	71,60		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.930.000,00	100	20.074.000,00	42,77		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	330.949.063,00	100	309.616.595,00	93,55		
Urusan Wajib Pemerintah Bidang Pendidikan	Menjamin Peningkatan pengelolaan lembaga Pendidikan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.222.849.772,00	100	2.170.104.297,00	97,63	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2.015.522.200,00	100	1.979.931.920,00	98,23	-	-
			Pengadaan Mebel PAUD	198.119.143,00	100	197.246.000,00	99,56		-
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	360.587.860,00	100	333.023.810,00	92,36		-
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	10.363.748.360,00	100	10.305.839.104,00	99,44		

			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	324.999.806,00	100	230.713.600,00	70,99		-
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	261.143.329,00	100	230.382.000,00	88,22	-	-
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.704.240.000,00	100	5.694.320.000,00	99,83	-	
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	432.340.000,00	100	432.340.000,00	100		
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.064.534.159,00	100	4.690.152.523,00	92,61		
		Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	126.527.084,00	100	116.645.000,00	92,19		
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah NON Formal/Kesetaraan	2.021.010.000,00	100	1.961.414.000,00	97,05	-	-
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.018.164.489,00	100	937.295.052,00	92,06		
Urusan Wajib Pemerintah Bidang Pendidikan	Menjamin Peningkatan pengelolaan lembaga Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	681.120.000,00	100	613.989.254,00	90,14		
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	371.150.000,00	100	371.025.000,00	99,97	-	-
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.005.951.500,00	100	890.725.200,00	88,55	-	-

			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.915.369.251,00	100	7.347.241.467,00	92,82	-	-
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	340.425.000,00	100	313.230.000,00	92,01	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	233.500.000,00	100	232.697.000,00	99,66	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	471.947.000,00	100	470.852.500,00	99,77	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	240.450.000,00	100	240.173.100,00	99,88	-	-
			Pengadaan Mebel Sekolah	2.299.776.730,00	100	2.112.935.000,00	91,88	-	-
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.129.845.467,00	100	2.087.306.306,00	98,00	-	-
			Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	943.110.374,00	100	723.710.819,00	76,74	-	-
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.888.662.318,00	100	1.236.896.800,00	65,49	-	-

			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.127.579.744,00	100	906.798.366,00	80,42	-	-
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	25.691.830.000,00	100	25.688.097.044,00	99,99	-	-
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	460.301.440,00	100	391.749.700,00	85,11	-	-
			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.011.372.000,00	100	1.011.372.000,00	100	-	-
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	137.785.180,00	100	118.320.000,00	85,87	-	-
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	7.583.041.166,00	100	5.091.648.507,00	67,15	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	534.653.350,00	100	510.347.830,00	95,45	-	-
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1.099.364.160,00	100	890.652.179,00	81,02	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.175.085.660,00	100	7.278.779.589,00	89,04	-	-

Urusan Wajib Pemerintah Bidang Pendidikan	Menjamin Peningkatan pengelolaan lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	800.539.728,00	100	718.689.982,00	89,78	-	-
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	231.999.600,00	100	231.900.000,00	99,96	-	-
			Pembangunan Laboratorium	2.318.100.000,00	100	2.318.098.000,00	99,99	-	-
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.427.802.852,00	100	3.976.594.370,00	89,81%	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.775.339.577,00	100	2.579.922.280,00	92,96	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	728.004.882,00	100	697.385.000,00	95,79	-	-
			Rehab Sedang/Berat laboratorium	1.230.520.238,00	100	556.378.000,00	45,21	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.633.208.367,00	100	2.525.969.767,00	95,93	-	-
			Pengadaan Mebel Sekolah	851.441.040,00	100	704.864.865,00	82,78	-	-

			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3.801.170.000,00	100	3.665.378.929,00	96,43	-	-
			Perlengkapan Belajar Peserta Didik	380.242.800,00	100	260.252.432,00	68,44	-	-
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	365.393.750,00	100	362.542.342,00	99,22	-	-
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.395.223.306,00	100	1.947.951.500,00	81,33	-	-
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	705.800.000,00	100	235.600.000,00	33,38	honorarium untuk Program sekolah mengaji tidak bisa direalisasikan dikarenakan regulasi / perbub tidak terbit	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	665.008.411,00	100	312.340.000,00	46,97	Lomba Karya ilmiah Guru SMP tidak dapat direalisasikan	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.912.727.738,00	100	2.178.255.514,00	74,78		

			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9.088.530.000,00	100	8.559.453.033,00	94,18	-	-
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	329.601.365,00	100	294.360.120,00	89,31	-	-
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	65.300.000,00	100	-	-	-	-
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	433.571.873,00	100	368.633.000,00	85,02	-	-
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	299.624.178,00	100	135.081.400,00	45,08	-	-
Urusan Wajib Pemerintah Bidang Pendidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Perhitungan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1.345.902.420,00	100	894.780.961,00	66,48	-	-
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan	8.829.359.499,00	100	6.397.552.240,00	72,46	-	-

			Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan						

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

b. Dinas Kesehatan

Uusan Pemerintah	Kebijakan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Rincian Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
				Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
				Rp	%	Rp	%		
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan kesehatan;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Nilai AKIP (BB)		Nilai AKIP (BB)			
	2. Mengembangkan dan memperkuat jejaring surveilans epidemiologi dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan kewaspadaan dini, guna mengantisipasi ancaman penyebaran penyakit antar daerah yang melibatkan masyarakat hingga ke desa;		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada Dinas Kesehatan (100 %)		Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada Dinas Kesehatan (90 %)		

	3. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya;		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	240.025.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat (10 dokumen)	168.604.758	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat (10 dokumen)	Adanya persepsi ITDA terkait penyerapan anggaran perjadi sesuai koefisien	Koordinasi lebih lanjut dengan BPKAD dan bidang terkait perencanaan di tahun berikutnya
	4. Rasionalisasi tenaga kesehatan;		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	155.997.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (12 laporan)	81.752.442	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (12 laporan)	Sisa Anggaran tidak dapat digunakan karena sesuai koefisien sudah terealisasi, Kebijakan PA untuk perjadi dalam daerah direalisasikan apabila dilaksanakan lebih 8 jam	Lebih mengefektifkan perencanaan anggaran perjadi
	5. Seluruh penduduk Kabupaten Tabalong memiliki jaminan kesehatan;								
	6. Mendorong tercapainya pembiayaan minimal sebesar 10% dari APBD, di luar gaji dan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan public;		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya pentasahaan keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada Dinas		Persentase terlaksananya pentasahaan keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada Dinas		

					Kesehatan (100 %)		Kesehatan (100 %)		
	7. Menjamin ketersediaan data dan informasi kesehatan melalui pengaturan sistem informasi yang komprehensif dan pengembangan jaringan;		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	99.137.303.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (600 orang)	88.131.348.135	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (691orang)	Pertambahan dan pengurangan ASN (mutasi antar SKPD)	Update data ASN dan P3K
	8. Meningkatkan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan dalam jumlah dan jenis yang cukup;		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	238.643.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (12 dokumen)	149.446.250	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (12 dokumen)	Proses e- catalog, pergantian PA di akun e-katalog	Update akun di e-catalog dan RUP
	9. Meningkatkan pengawasan dalam penggunaan dan peredaran obat di masyarakat;								
	10. Meningkatkan kepedulian seluruh komponen masyarakat untuk mengembangkan posyandu, desa siaga dan meningkatnya kesadaran ber-PHBS;		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah (100 %)		Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah (90 %)		

	11. Setiap rumah tangga harus menerapkan pengelolaan air minum yang aman di rumah tangga;		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	127.800.000	Jumlah Dokumen Rekon dan dan Laporan Barang Milik Daerah (12 dokumen)	19.817.200	Jumlah Dokumen Rekon dan dan Laporan Barang Milik Daerah (12 dokumen)		
	12. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi dan material sarana sanitasi yang sehat;								
	13. Pembinaan terhadap pengusaha kuliner;		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada Dinas Kesehatan (100 %)		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada Dinas Kesehatan (95 %)		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	74.062.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (12 dokumen)	60.908.909	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (12 dokumen)		

			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	125.522.000	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	0	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Anggaran baru diperubahan, tidak ada diklat di akhir tahun	Koordinasi dengan bidang kepegawaian dan SDK tentang informasi pelatihan pegawai
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada Dinas Kesehatan (100 %)		Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada Dinas Kesehatan (90 %)		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.759.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (3 paket)	15.575.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (3 paket)		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	185.731.916	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	138.163.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan		
					Kantor yang Disediakan (5 paket)		Kantor yang Disediakan (5 paket)		

			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	157.211.883	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (5 paket)	104.755.779	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (5 paket)		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.234.548	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (12 bulan)	11.663.000	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (12 bulan)		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.221.096.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (12 laporan)	779.748.013	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (12 laporan)	Masih ada kegiatan yang diluar perencanaan dan adanya perubahan peraturan	Lebih teliti dalam merencanakan dan meriview kegiatan tahun sebelumnya
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100 %)		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (90 %)		
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	744.077.576	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (3 unit)	687.555.990	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (3 unit)		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana prasarana perkantoran yang		Persentase sarana prasarana perkantoran yang		

					mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada Dinas Kesehatan (100 %)		mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada Dinas Kesehatan (90 %)		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	471.900.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12 laporan)	443.860.254	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12 laporan)		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.748.146.180	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (12 laporan)	1.538.254.222	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (12 laporan)		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Urusan Kesehatan (9 poin)		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Urusan Kesehatan (9 poin)		

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	554.460.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (3 unit)	336.819.874	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (3 unit)		
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (3 unit)	174.343.336	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (3unit)		
			Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah Dokumen Laporan Analisa Rasio Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD) (3 dokumen)		Jumlah Dokumen Laporan Analisa Rasio Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD) (3 dokumen)		
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	21.329.264.164	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (18 Puskesmas)	17.895.206.599	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (18 Puskesmas)		

		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (130 per 100.000 KH)		Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (161 per 100.000 KH)		
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (8 per 1.000 KH)		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (12 per 1.000 KH)		
					UHC (100 %)		UHC (98,81 %)	Dinamika kependudukan	
					Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (9,5 %)		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (7,9 %)		
					Meningkatnya penemuan penderita penyakit menular (95%)		Meningkatnya penemuan penderita penyakit menular (95%)		
					Meningkatnya penemuan penderita penyakit tidak menular (95%)		Meningkatnya penemuan penderita penyakit tidak menular (95%)		
					Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap (99%)		Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap (99%)		

					Peningkatan fasilitas kesehatan yang terakreditasi (90%)		Peningkatan fasilitas kesehatan yang terakreditasi (85,7%)		
					Persentase orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan memulai pengobatan ARV (79%)		Persentase orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan memulai pengobatan ARV 81 %)		
					Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (Treatment Converage) (90%)		Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (Treatment Converage) (124%)		
					Persentase penurunan jumlah kematian ibu (60%)		Persentase penurunan jumlah kematian ibu (60%)		
					Prevalensi obesitas pada penduduk usia >18 tahun (10%)		Prevalensi obesitas pada penduduk usia >18 tahun (10%)		
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar (Obat		Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi		

					dan Vaksin, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, dan Bangunan/Fasil itas Fisik) (12 kategori)		Standar (Obat dan Vaksin, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, dan Bangunan/Fasi litas Fisik) (12 kategori)		
			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	30.170.015.000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (1 unit)	13.936..536.201	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (1 unit)		
			Pembangunan Puskesmas	10.001.950.000	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (1)	6.505.201.078	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (1)		
			Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	1.956.216.000	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar (10 unit)	1.954.500.000	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar (10 unit)		

			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.284.657.000	Jumlah sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya (13 unit)	2.706.703.510	Jumlah sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya (13 unit)		
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.934.599.126	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (30)	8.842.496.200	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (19)		
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (5 unit)	-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (unit)	Pagu kalibrasi di perubahan dananya dihilangkan dan di pindah ke kegiatan lain karena tidak ada alat yang dilakukan kalibrasi	Menganggarkan kembali kalibrasi tahun berikutnya

			Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	6.360.320.254	Jumlah laporan Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan (50 laporan)	3.983.583.394	Jumlah laporan Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan (25 laporan)		
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	224.000.000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (5 unit)	14.500.000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (5 unit)		
			Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	23.101.000	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diinventarisir masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas (	17.188.000	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diinventarisir masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas (		

			Distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	1.131.645.600	Jumlah Distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan (12 paket)	930.961.448	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya(12 paket)		
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan (100 %)		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan (100 %)		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	608.110.926	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (3561 Orang)	531.756.400	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (3561 Orang)	Masih ada ibu hamil yang memeriksa kehamilan lewat dari trimester 1, sehingga tidak akan mencapai K4 dan K6 dan masih ditemukan ibu hamil yang mengalami komplikasi, KEK, Anemia dan 4T	Penguatan skrining layak hamil dan anc terpadu,serta penguatan deteksi dini risiko pada ibu hamil
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	255.464.552	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan	229.786.000	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan	Masih ada ibu bersalin pada dukun beranak dan tempat persalinan di luar fasyankes	Penguatan tanda – tanda bahaya ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, penguatan kerja sama lintas sektor untuk

									persalinan di fasyankes
					Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (3100 Orang)		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (3093 Orang)		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	334.867.656	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (3100 Orang)	160.780.200	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (2987 Orang)	Adanya anggaran parker BOK tidak bisa diserap	Pihak terkait kejelasan anggaran parkir yang tidak bisa diserap
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	173.109.920	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (18.551 Orang)	153.932.348	Jumlah B alita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (16712 Orang)	Petugas dan kader Sebagian besar belum terlatih untuk kegiatan SDIDTK dan pencatatan pelaporan yang belum sempurna	Validasi data ke puskesmas
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	896.907.034	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (43561 Orang)	833.252.000	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (43561 Orang)	Penguatan anggaran dan koordinasi dengan pihak terkait juga dengan petugas program penjangkaran anak sekolah agar di jadwalkan lebih awal	Koordinasi dengan SKPD terkait
			Pengelolaan Pelayanan	92.712.000	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang	76.644.000	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang		

			Kesehatan pada Usia Produktif		Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (173120 orang)		Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (171383 orang)		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	148.865.325	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (19.000 Orang)	136.930.000	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (18.591Orang)		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	73.952.000	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (16943 orang)	56.712.200	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (16951 orang)		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	339.332.000	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (3424 orang)	283.251.200	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (3429 orang)		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	18.436.000	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan	10.460.000	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan		

					Kesehatan Sesuai Standar (368 orang)		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (306 orang)		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Terduga Tuberkulosis Orang	490.716.192	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (4166 orang)	451,678.200	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (2525 orang)	Alat TCM terbatas, hanya ada di RSUD sedangkan TCM yang ada di Puskesmas kelua alatnya rusak	Sudah lapor ke vendor untuk dibawa alatnya ke Banjarmasin dan dari Komisi I DPRD mengupayakan pengadaan alat TCM
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan Terinfeksi HIV Orang Risiko	125.707.000	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (6445 orang)	75.912.400	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (3966 orang)	Sulitnya menemukan kasus HIV lebih banyak pada populasi kunci (Ponci) dan tingginya data bumil dari provinsi dibandingkan data dari KIA Dinas Kesehatan Tabalong	Menggandeng lintas sektor untuk melakukan kolaborasi dan sinergitas dan memastikan screening ibu hamil telah dilakukan maksima, walau data pusdatin masih tinggi
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penduduk Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) bagi pada Kejadian Luar Biasa (KLB)	26.496.000	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang tertangani (100%)	4.458.000	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang tertangani (100%)	Tidak ada kejadian KLB pada tahun 2024, namun tetap melakukan upaya persiapan potensi adanya KLB	Melakukan Upaya persiapan potensi adanya KLB
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gizi	3.684.047.488	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus pada balita (8%)	2.799.109.171	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus pada balita (7,54%)	Kegiatan terlaksana dengan baik, tetapi angka stunting masih mencapai target	Penguatan PMBA bagi masyarakat

			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	158.187.396	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (3 Dokumen)	136.564.100	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (3 Dokumen)	Tidak sesuai/tidak tersedia kode rekening kegiatan program	Koordinasi penambahan kode rekening kegiatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	931.380.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (10 Dokumen)	840.336.404	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (8 Dokumen)	SDM sanitarian dan fasilitas pendukung masih kurang baik di puskesmas maupun di kabupaten	Pemerataan SDM sanitarian di puskesmas dan pengadaan alat pendukung program pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
			Pengelolaan Promosi Kesehatan	650.024.686	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (12 dokumen)	595.675.100	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (12 dokumen)	Kegiatan terlaksanakan dengan baik tetapi masih perlu optimalkan pencapaian perilaku hidup sehat	Koordinasi dengan lintas sektor dan puskesmas terkait rekap RT sehat dan Germas
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	94.417.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (12 Dokumen)	92.153.400	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (12 Dokumen)		

			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	765.812.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (12 Dokumen)	456.459.653	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (12 Dokumen)	Kegiatan pelaporan melalui SKDR rutin setiap minggu, hanya ketepatan dan kelengkapan laporan perlu ditingkatkan lagi	Melakukan absensi pada puskesmas yang terlambat mengumpulkan laporan SKDR, terutama kalau ada kasus alert
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan Orang Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	46.250.000	Jumlah skrining Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) kesehatan (13602 orang)	25.054.100	Jumlah skrining Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) kesehatan (6280 orang)		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	57.109.000	Jumlah kegiatan skrining NAPZA (3262 orang)	29.794.000	Jumlah kegiatan skrining NAPZA (3315 orang)		
			Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan pasca Krisis Kesehatan	47.932.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (12 dokumen)	15.366.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (12 dokumen)		
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.420.236.189	Persentase penemuan penderita penyakit menular dan tidak menular (95%)	2,768.576.541	Persentase penemuan penderita penyakit menular dan tidak menular (100%)	SPM penyakit menular TB dan HIV belum tercapai karena kendala seperti peralatan dan sulitnya mendapatkan populasi kunci	Meningkatkan kolaborasi terhadap lintas sektor dan adanya perbub untuk screening terhadap penyakit menular/tidak menular

			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41.876.357.000	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (12 dokumen)	40.943.222.237	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (12 dokumen)	Data kepesertaan yang fluktuatif sehingga sulit untuk menetapkan sasaran yang sesuai berpengaruh terhadap serapan anggaran	Melaksanakan rekonsiliasi data kepesertaan untuk meminimalisir penganggaran yang tidak bisa diakomodir
			Pengambilan dan pengiriman specimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/Nasional	142.120.000	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium Rujukan/ Nasional yang di distribusikan (18 spesimen)	32.595.220	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium Rujukan/ Nasional yang di distribusikan (26 spesimen)	Melakukan pengiriman sampel pada penyakit berpotensi KLB seperti polio dan campak	Melakukan survailans aktif pada fasilitas kesehatan
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	183.241.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat (9 dokumen)	132.289.200	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat (8 dokumen)		
			Operasional Pelayanan Puskesmas	2.855.883.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	2.004.670.276	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan		
					Puskesmas (12 dokumen)		Puskesmas (12 dokumen)		
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.924.216.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1.861.317.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja belum terkoordinasi	Melaporkan realisasi belanja dan kegiatan per triwulan

					Facilitas Kesehatan Lainnya (12 dokumen)		Facilitas Kesehatan Lainnya (12 dokumen)		
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	83.340.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (20 fasilitas)	67.382.225	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (13 fasilitas)	Tim TPCB tidak jalan	Koordinasi dengan pimpinan terkait Tim TPCB
			Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	133.960.000	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal (4 laporan)	81.164.700	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal (4 laporan)	Kegiatan pelaporan KIPi belum maksimal capaiannya IDL, IBL, dan Td 2+ masih kurang karena masih adanya ketidakpercayaan Masyarakat terhadap imunisasi, terutama di wilayah selatan	Promosi kesehatan tentang imunisasi harus ditingkatkan, dan pendekatan terhadap tokoh masyarakat
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	462.671.000	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan Dini dan respon Wabah (4 dokumen)	416.696.100	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan Dini dan respon Wabah (4 dokumen)	Pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap kasus penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi (PD3I) telah dilakukan dengan optimal	Tetap melakukan kewaspadaan terhadap PD3I melalui jejaring surveilans di faskes

			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	374.672.910	Persentase kasus kegawatdaruratan yang ditangani (100%)	335.431.000	Persentase kasus kegawatdaruratan yang ditangani (100%)	Belum tersedianya SDM dan tempat untuk menjadi unit kerja TIM PSC 119, sehingga kesulitan untuk menempatkan peralatan medis maupun lainnya	Melakukan kerjasama dan mengadakan pelatihan bagi petugas puskesmas sebagai tenaga jejaring dari PSC Dinas kesehatan
			Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	100.774.560	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (5157orang)	69.186.460	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (5590 orang)	API malaria telah dipertahankan agar >1 permil, tetapi komunikasi dengan perbatasan masih minim dan perlu ditingkatkan	Perlu koordinasi dengan kab. PPU passer, Balangan dan Bartim
			Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	103.271.000	Jumlah tatanan Kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (7 tatanan)	49.174.200	Jumlah tatanan Kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (6 tatanan)		
			Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.428.849.686	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Upaya kesehatan ibu dan anak (4 dokumen)	1.297.145.000	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Upaya kesehatan ibu dan anak (4 dokumen)	Transport rujukan ibu ke RSU tidak diserap karena adanya UHC, dan makan minum di TTK masih ada yang tidak di klaim karena tidak ada pasien yang menginap di TTK untuk perjalanan dinas di globalkan untuk klaim dananya	Mengefektifkan kembali pagi anggaranya

			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (100 %)		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (100 %)		
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.212.278.907	Seluruh puskesmas menjalankan RME (18 puskesmas)	67.492.754	Seluruh puskesmas menjalankan RME (18 puskesmas)	Anggaran di Dinas kesehatan 72.408.000 dengan realisasi 67.492.745 (93,2 %) sisanya tidak terealisasi berupa honorarium pembuat artikel karena tidak dapat direalisasikan sesuai aturan yang berlaku.Untuk anggaran senilai Rp.1.144.786.153, PPTK dan pengelolaan SIK di Dinas Kesehatan tidak mengetahui adanya anggaran tersebut sampai akhir tahun 2024	Perlunya peningkatan koordinasi terkait anggaran SIK dan kegiatan SIK di Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Adanya penambahan tenaga progamer pada dinas kesehatan dan penambahan anggaran untuk kegiatan SIK transpormasi digital bidang kesehatan, pengelolaan website, peningkatan sarana dan prasarana SIK. Peningkatan kualitas internet di dinas kesehatan dan puskesmas, serta peningkatan kualitas SDM di dinas kesehatan dan puskesmas

			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan Pengawasan dan Pembinaan (100 %)		Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan Pengawasan dan Pembinaan (100 %)		
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	162.368.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (18 unit)	117.573.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (18 unit)	Tim TPCB tidak jalan	Koordinasi dengan pimpinan terkait Tim TPCB
			Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	575.003.080	Jumlah dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan (4 dokumen)	256.693.644	Jumlah dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan (2 dokumen)		
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			Rasio Dokter terhadap jumlah penduduk (1 : 2.500 rasio)		Rasio Dokter terhadap jumlah penduduk (1 : 3.975 rasio)		

			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase tenaga Kesehatan yang berijin (100 %)		Persentase tenaga Kesehatan yang berijin (100 %)		
			Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	14.812.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (20 dokumen)	8.694.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (20 dokumen)	kegiatan terlaksana dengan lancar	koordinasi lebih lanjut agar kegiatan berikutnya terlaksana dengan lancar
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Tenaga Kesehatan Sesuai Kompetensi (100 %)		Persentase Tenaga Kesehatan Sesuai Kompetensi (100%)		
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.720.388.020	Jumlah pendidikan pelatihan fungsional tenaga kesehatan dan uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan (150 orang)	1.269.832.415	Jumlah pendidikan pelatihan fungsional tenaga kesehatan dan uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan (144 orang)		
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (100%)		Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (100%)		

			Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	93.720.000	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (1 dokumen)	18.477.200	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (1 dokumen)		
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	7.265.842.400	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (18)	2.154.597.060	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (18)		
			Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	258.392.000	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan (20 dokumen)	156.098.328	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan (20 dokumen)		
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			Persentase Faskes dengan ketersediaan obat esensial (100 %)		Persentase Faskes dengan ketersediaan obat esensial (90 %)		
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha		Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan		Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko		

			Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Optikal, UMOT yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan (100 %)		Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan (100 %)		
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	90.530.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat	35.806.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat		
					Tradisional (UMOT) (150 Dokumen)		Tradisional (UMOT) (17 Dokumen)		
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase sediaan farmasi alkes dan makanan minuman sesuai standart (100 %)		Persentase sediaan farmasi alkes dan makanan minuman sesuai standart (95 %)		

			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	237.036.100	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	62.035.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
					Tangga (20 Dokumen)		Tangga (20 Dokumen)		
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Persentase produk dan sarana produksi makanan dan minuman industry rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut		Persentase produk dan sarana produksi makanan dan minuman industry rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka		

					pengawasan (100%)		tindak lanjut pengawasan (100%)		
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	192.696.000	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (150 unit)		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (150 unit)		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif (100 %)		Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif (100 %)		
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase peningkatan Advokasi, Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor (100 %)		Presentase peningkatan Advokasi, Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor (90 %)		
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	61.723.950	Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan (Aksi) yang dilakukan di	53.948.600	Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan (Aksi) yang dilakukan di	Terlaksana dengan baik telah mencapai target posyandu aktif	Perlu dioptimalkannya pembinaan Posyandu dan Update pelaporan sesuai jadwal

					Kabupaten Tabalong (36 kegiatan)		Kabupaten Tabalong (36 kegiatan)		
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten Kota		Persentase Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (100%)		Persentase Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (100%)		
			Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya Masyarakat (UKBM)	539.968.000	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya Masyarakat (UKBM) (4 dokumen)	421.988.000	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya Masyarakat (UKBM) (4 dokumen)		

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Kesehatan, tahun, 2024

c. RSUD H. Badaruddin Kasim

Uusan Pemerintah	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Rincian Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
				Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
				Rp	%	Rp	%		
Bidang Kesehatan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan : Administasi keuangan perangkat daerah	46.606.465.000	100%	42.281.585.049	91%	Sesuai dengan pelaksanaan	-
			Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.606.465.000	100%	42.281.585.049	91%	Sesuai dengan pelaksanaan	-
			- Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Tunjangan Keluarga PNS - Belanja Tunjangan Jabatan PNS - Belanja Tunjangan Fungsional - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS - Belanja Tunjangan Beras PNS - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS - Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Sesuai dengan pelaksanaan	-

			Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS						
			• Kegiatan Administasi kepegawaian perangkat daerah :	1.044.991.000	100%	531.648.000	51%		-
			• Sub Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	830.872.000	100%	375.000.000	45,13%		-
			• Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.830.000	1 orang x 3 bulan	-	-		
			• Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan kesehatan	31.356.000	1.314 porsi	-	-		
			• Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.000.000	2 orang x 20 jam	-	-		
			• Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	585.000.000	78 orang	375.000.000			
			- Belanja Perjalanan Dinas Biasa • Transport Narasumber • Tiket Pesawat Narasumber • Penginapan Narasumber	173.686.000					

			• Biaya Tiket Pesawat PP • Uang Harian Peserta • Uang Transportasi						
			• Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	214.119.000	100%	156.648.000	45,13%		-
			• Belanja Pakaian Batik Tradisional	214.119.000	643 buah	156.648.000	642 buah		
			• Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	501.348.964	100%	-	-		
			- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah • Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan • Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan • Pembangunan Gedung	501.348.964	1 Paket	-	-		
			• Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.729.881.000	100%	1.473.345.000	85%		

			• Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.729.881.000	12 laporan	1.473.345.000	12 laporan		
			Belanja Jasa Kebersihan • Honorarium tenaga kontrak pramubakti dan cleaning service	806.400.000	32 orang	762.300.000	30 orang		
			Belanja jasa pelayanan kesehatan nagi Non ASN	54.720.000	32 orang	32.380.320	30 orang		
			Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	6.451.200	32 orang	1.020.600	30 orang		
			(DID) Belanja pemasangan baru daya listrik 600 KVa	759.000.000	1 paket	-	-		
			Kegiatan Peningkatan pelayanan BLUD	109.944.696.000	1 Unit Kerja	83.176.704.849	1 Unit Kerja	-	Efektif dan efisiensi dalam kegiatan dan anggaran
			Sub Kegiatan dan Penunjang Pelayanan BLUD	109.944.696.000		92.602.888.228	75,65%	-	Efektif dan efisiensi dalam kegiatan dan anggaran
			Belanja Pegawai BLUD	12.521.005.780	1 tahun	8.937.540.000	1 tahun	-	Efektif dan efisiensi dalam kegiatan dan anggaran
			Belanja Barang dan Jasa BLUD	92.923.690.220	1 tahun	72.458.134.162	1 tahun	-	Efektif dan efisiensi dalam kegiatan dan anggaran

			Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.000.000.000	1 tahun	1.375.066.392	1 tahun	-	Efektif dan efisiensi dalam kegiatan dan anggaran
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.000.000.000	1 tahun	45.964.295	1 tahun	-	Efektif dan efisiensi dalam kegiatan dan anggaran
			Belanja Jaringan Irigasi Jaringan	500.000.000	1 tahun	-	-	-	Efektif dan efisiensi dalam kegiatan dan anggaran
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	11.357.408.761	100%	8.192.289.771	72,13%		
			Sub Kegiatan: Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.102.435.761	100%	6.985.855.771	69,15%	-	
			Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran • 3 Years Service Set Isollete • Aksesoris Pasien Monitor Mx500 • Baterai Defibrillator • Baterai Internal Ventilator • Bulb Sphygmomanometer • Dental Lamp • Display Assembly Repair Ekg	926.975.810	200 unit	-	-		

			• Drip Sensor • Infuse Pump • Fabius Gs Servet (3 Years • Handle Baby Incubator • Lampu Examination • Lampu Slit • Lampu Phototherapy • Manset Sphygmomanometer Adult (Digital) • Manset Sphygmomanometer Adult • Pedal Suction • Power Supply Ventilator • Printer Thermal Ekg • Sparepart Babylog (Filter +Baterai Pack) • Tabung Suction						
			Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Oksigen Central	927.500.000	35 titik	912.170.900	35 titik	-	-
			Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Instrumen Bedah Plastik	280.000.000	2 unit	-	-	-	-
			Belanja Modal Alat Kedokteran Mata • Biometry • Cataract ECCE & Phaco Set • Mikroskop	4.545.791.271	7 unit	3.038.261.271	7 unit	-	-

			• Poroptor • Set mata besar (operasi mata) • Ultrasonic a/b						
			Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis • Elektro Terapi • Infrared Stationary Training Equipment • Quadriceps Bench	383.125.000	3 unit	169.500.000	2 unit	-	-
			Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi Bor Tulang	730.210.000	1 unit	730.000.000	1 unit	-	-
			Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi Radiofrekuensi	799.819.500	1 unit	799.819.500	1 unit	-	-
			Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya • Automatic Tissue Processor & Accessories	564.772.000	1 unit	564.768.000	1 unit	-	-
			Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya • Histocore Arcadia C & Accessories • Histocore Arcadia H & Accessories • Rotary Microtome & accessories • Slide Dryer • Waterbath	773.622.000	6 unit	771.336.100	6 unit	-	-

			Laminar Air Flow (LAF)						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	152.980.000	-	-	-	-	-
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	17.640.000	1 orang x 7 bulan	-	-	-	-
			Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.254.973.000	100%	1.206.434.000	96,13%	-	-
			Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan (Contract Service & Kalibrasi Alat Kedokteran)	1.254.973.000	100%	1.206.434.000	96,13	-	-

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD RSUD H. Badaruddin Kasim, 2024

d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Usan Pemerintah	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Rincian Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
				Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
				Rp	%	Rp	%		
Usan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	- Melakukan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang akuntabel sesuai dengan standar operasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen	113.673.560,-		101.273.049,-			
				27.033.100,-	3 Dokumen	21.021.000,-	3 Dokumen	---	---

	prosedur yang ditetapkan Menyediakan peralatan dan perlengkapan perkantoran serta fasilitas lainnya yang memadai sehingga pelayanan dapat berlangsung lancar		Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86.640.460,- 3 Laporan	80.252.049,- 3 Laporan	---	---
	-		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.363.157.000,- 11.363.157.000,- 56 Orang	10.041.223.454,- 10.041.223.454,- 56 Orang	Dalam beberapa tahun banyak ASN yang pensiun namun tidak ada penambahan ASN	Perlu ada rekrutmen ASN baru karena kekurangan tenaga ASN
	-		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	169.784.000,- 169.784.000,- 20 Orang	90.614.512,- 90.614.512,- 25 Orang	Pelatihan atau Diklat yang diikuti Pegawai banyak yang biayanya ditanggung oleh Penyelenggara	---
	-		Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.382.192.399,- 806.056.839,- 7 Paket 79.756.560,- 2 Paket 496.379.000,- 12 Laporan	1.224.081.319,- 722.730.224,- 7 Paket 65.290.000,- 2 Paket 436.061.095,- 12 Laporan	--- --- ---	--- --- ---

	-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.691.654.280,-		1.448.656.074,-		
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49.775.000,-	12 Laporan	39.620.000,-	12 Laporan	---
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242.000.000,-	12 Laporan	194.136.993,-	12 Laporan	---
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.399.879.280,-	12 Laporan	1.214.899.081,-	12 Laporan	---
	-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.169.833.067,-		954.503.961,-		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	525.070.000,-	41 Unit	441.122.328,-	41 Unit	---
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.750.000,-	93 Unit	74.120.000,-	98 Unit	---
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	192.553.537,-	1 Unit	191.991.033,-	1 Unit	---
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	372.459.530,-	8 Unit	247.270.600,-	6 Unit	Ada 2 unit yang tua yang tidak dapat dilaksanakan pemeliharaan karena spare part yang langka
								Unit yang sudah tua diusulkan untuk hapus buku dan diganti unit baru

	- Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengairan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi serta air baku	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.919.200.480,-		3.419.561.542,-			
	- Pembangunan Tanggul Sungai		805.541.000,-	0,427 km	767.998.842,-	0,406 km	Pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Sedikit terlambat dari rencana awal dikarenakan gagal lelang	Untuk meminimalisir gagal lelang yang mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan pekerjaan, akan dilakukan analisis terhadap penyebab gagal lelang	
	- Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		828.273.000,-	2 Unit	812.096.471,-	2 Unit	Pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Sedikit terlambat dari rencana awal dikarenakan gagal lelang	Untuk meminimalisir gagal lelang yang mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan pekerjaan, akan dilakukan analisis terhadap penyebab gagal lelang	
	- Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		1.349.757.000,-	3 Unit	1.161.748.356,-	3 Unit	Pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Sedikit terlambat dari rencana awal dikarenakan gagal lelang	Untuk meminimalisir gagal lelang yang mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan pekerjaan, akan dilakukan analisis terhadap penyebab gagal lelang	
	- Pemeliharaan infrastruktur sumber daya air agar tetap berfungsi baik dari sarana dan prasarana pengairan maupun pengamanan sumber air baku								

			- Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir (UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah I Kelua) - Rehabilitasi Tanggul Sungai - Rehabilitasi Tanggul Sungai (UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan I Kelua)	206.718.730,- 113.461.158,- 476.801.000,- 138.648.592,-	30 Lembaga 2 Unit 0.247 km 0,3 km	50.016.000,- 113.052.400,- 376.602.613,- 138.046.860,-	30 Lembaga 1 Unit 0.250 km 0,7 km	Pekerjaan telah selesai dilaksanakan. --- Pekerjaan telah selesai dilaksanakan.	Untuk meminimalisir gagal lelang yang mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan pekerjaan, akan dilakukan analisis terhadap penyebab gagal lelang - --
			Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	9.548.460.121,- 4.011.559.000,-	1.364 km	8.692.592.356,- 3.435.698.539,-	1.611 km	Pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Sedikit terlambat dari rencana awal dikarenakan gagal lelang	Untuk meminimalisir gagal lelang yang mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan pekerjaan, akan dilakukan analisis terhadap penyebab gagal lelang

			- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.103.885.000,-	0,338 km	1.020.299.239,-	0,594 km	Pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Sedikit terlambat dari rencana awal dikarenakan gagal lelang	Untuk meminimalisir gagal lelang yang mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan pekerjaan, akan dilakukan analisis terhadap penyebab gagal lelang
			- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah II Haruai)	109.815.180,-	0,3 km	109.688.500,-	2,3 km	---	---
			- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah III Muara Uya)	152.423.940,-	0,3 km	151.151.973,-	1,562 km	---	---
			- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	4.170.777.001,-	3.800 km	3.975.754.105,-	28.98 km	Pekerjaan telah selesai dilaksanakan	--

	Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana air bersih dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten / Kota - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	39.918.746.993,- 199.999.720,- 39.718.747.273,-	 4 Lembaga 1000 SR	37.154.309.579,- 146.281.218,- 37.008.028.361,-	 4 Lembaga 2434 SR	Pekerjaan selesai Pekerjaan selesai	Terlaksana Terlaksana melebihi target
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	7.590.670.606,- 7.420.670.606,- 170.000.000,-	 450 RT 1 Unit	7.399.072.553,- 7.248.122.553,- 150.950.000,-	 682 RT 1 Unit	Pekerjaan selesai ---	Terlaksana melebihi target ---
	Melakukan Pembangunan, peningkatan dan	Program Penataan Bangunan Gedung	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	598.471.906,-		245.542.345,-			

	pemeliharaan ataupun rehabilitasi infrastruktur pelayanan publik untuk mendukung pelayanan masyarakat		di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	598.471.906,-	75 Dokumen	245.542.345,-	81 Dokumen	T elah terlaksana	Terlaksana melebihi target

		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	85.049.846.750,-		53.894.238.941,-			
				85.049.846.750,-	10 Kawasan	53.894.238.941,-	18 Kawasan	Pekerjaan selesai	Terlaksana melebihi target
	- Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap yang berorientasi untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan terutama pada daerah terisolir dan penataan kota dalam wilayah kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan Rekonstruksi Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Pemeliharaan Rutin Jalan Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD) Pemeliharaan Jalan, Jembatan	444.302.805.782,- 188.760.618.673,- 47.258.101.591,- 87.313.385.047,- 30.028.890.000,- 168.056.170,-	 22,0 km 10,0 km 20,0 km 30 km 3 km	354.290.570.314,- 135.881.989.150,- 44.354.673.873,- 73.084.334.571,- 28.572.035.264,- 167.596.140,-	 53,88 km 27,450 km 49,780 km 26,0800 km 3,1 km	 --- --- --- --- ---	Sebagian pekerjaan masih berlangsung di lapangan dan akan segera di selesaikan \
	Melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap agar								Sebagian pekerjaan masih berlangsung di lapangan dan akan segera di selesaikan ----

	kondisi jalan tetap terjamin keselamatan dan kenyamanan penggunaanya		dan Pengairan Wilayah I Kelua)	264.130.545,-	3 km	251.050.748,-	0,260 km	---	---
			Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah II Haruai)	219.995.340,-	3 km	202.632.010,-	0,3 km	---	---
			Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah III Muara Uya)	55.109.535.346,-	13 Unit	44.351.471.584,-	39 Unit	---	---
			Pembangunan Jembatan	8.010.000.000,-	30 Unit	6.898.071.389,-	59 Unit	---	---
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	149.236.730,-	4 Unit	135.925.655,-	2 Unit	---	---
			Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah I Kelua)	197.281.924,-	4 Unit	196.670.500,-	2 Unit	---	---
			Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah II Haruai)	199.891.466,-	4 Unit	32.814.800,-	0 Unit	---	---
			Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah III Muara Uya)	26.623.682.950,-	1,00 km	20.161.304.630,-	0,7400 km	---	---
			Rehabilitasi Jalan						

	Melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap penyedia jasa konstruksi di daerah untuk menunjang kualitas pelaksanaan pembangunan	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	432.604.277,- 125.439.450,- 137.919.347,- 169.245.480,-	70 Orang 50 Orang 8 Lembaga	272.384.603,- 59.300.000,- 57.288.700,- 155.795.903,-	70 orang 50 orang 8 Lembaga	--- --- ---	--- --- ---
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	83.345.794,- 83.345.794,-	2 Dokumen	82.973.000,- 82.973.000,-	2 Dokumen	---	---
			Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi - Pengawasan dan Evaluasi Tertib	51.300.000,- 51.300.000,-	25 Paket Pekerja	50.838.500,- 50.838.500,-	25 Paket Pekerja	---	---

			Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Kontruksi						
	Melakukan pengendalian dalam hal pemanfaatan ruang dengan melakukan monitoring dan evaluasi serta layanan yang professional	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.632.751.072,-		1.513.507.019,-			
	Melakukan penyusunan rencana tata ruang yang komprehensif beserta sistem informasinya		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	711.523.475,-	1 Dokumen	674.208.727,-	1 Dokumen	---	---
			Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	673.132.623,-	3 Dokumen	632.018.577,-	3 Dokumen	---	---
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	248.094.974,-	150 Orang	207.279.715,-	150 Orang	---	---
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	203.338.100,-		184.455.800,-			
			Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	203.338.100,-	1 Dokumen	184.455.800,-	1 Dokumen	---	---

			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	513.915.225,-		497.701.451,-		
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	513.915.225,-	1 Dokumen	497.701.451,-	1 Dokumen	---

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas PUPR, 2024

e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Uusan Pemerintah	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Rincian Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
				Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
				Rp	%	Rp	%		
Wajib pelayanan dasar	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.884.988.000	12 Bulan	5.001.674.423	12 Bulan		
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.884.988.000	12 Bulan	5.001.674.423	12 Bulan		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.746.403.169	Baik	1.746.403.169	Baik		
			- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	764.893.794	12 bulan	764.893.794	12 bulan		

			- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	109.366.775	12 bulan	92.363.470	12 bulan		
			- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	41.612.000	12 bulan	33.834.000	12 bulan		
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	830.531.600	1 buah	675.588.141	1 buah		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.272.614.985	Baik	2.223.690.627	Baik		
			-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.500.000	12 bulan	107.741.869	12 bulan		
			-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.913.638	12 bulan	94.667.027	12 bulan		
			-Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.254.518.705	12 bulan	2.136.476.806	12 bulan		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.321.785.753	Baik	1.290.071.852	Baik		

			-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	515.550.000	12 bulan	515.550.000	12 bulan	515.550.000	
			-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.670.000	12 bulan	34.365.855	12 bulan	34.365.855	
			- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.062.257.223	12 bulan	1.938.199.594	12 bulan	1.938.199.594	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	259.817.913	12 Laporan	256.908.655	12 Laporan	256.908.655	
			-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	259.817.913	12 Laporan	256.908.655	12 Laporan	2.370.053.412	
Wajib pelayanan dasar	Peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan penataan kawasan kumuh	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.515.098.000	1 : 1,48	2.370.053.412	1 : 3,77		
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan			- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	407.448.000	16 unit	389.103.412	16 Unit		

			- Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	2.107.650.000	40 unit	1.980.950.000	38 unit		
Wajib pelayanan dasar Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan penataan kawasan kumuh	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	19.992.725.540	100 %	18.758.782.634	84,12% %		
			-Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	7.089.007.543	207 Unit RTLH	6.780.044.114	307 Unit RTLH		
			-Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU	12.903.717.997		11.978.738.520			
Wajib pelayanan dasar Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan penataan kawasan kumuh	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	8.541.796.000	70 %	8.404.151.481	42,45 %		
			-Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuhdengan Luas	8.541.796.000	500 unit RTLH	8.404.151.481	500 unit RTLH		

			di Bawah 10 (sepuluh) Ha						
Wajib pelayanan dasar Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Kabupaten/Kota	48212.480.902.410	100 %	182.807.221.092	71 %		
			- Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	17.186.745.250	132 dok	15.588.593.199	132 dok		
			- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	133.062.073.171	31, 95 Km	115.503.393.648	31, 95 Km		
			-Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	62.232.083.989	18.237 titik	51.715.234.245	18.237 titik		
Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam satu daerah kabupaten/kota	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.074.000	100%	44.903.200	100%	44.903.200	
			-Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.940.000	3 kasus	22.066.000	4 kasus	30.646.241.742	

Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah daerah	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.339.707.000	100 %	30.646.241.742	100 %	Terbatasnya data dukung aset tanah milik pemda	
			-Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.709.661.840	1 Dokumen	22.857.075.548	1 Dokumen		
Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah kosong	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	260.758.000	1 Dok	199.332.800	1 Dok	199.332.800	
			-Koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agrarian dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	92.160.000	5 Ha	64.982.000	11,32 Ha		
JUMLAH				244.932.452.590		212.472.164.167			

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2024

f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran

Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Rincian Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
				Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
				Rp	%	Rp	%		
Melaksanakan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	75.478.460	11 Laporan	74.180.328	11 Laporan	Tidak ada permasalahan	Selisih pagu karena adanya perbedaan harga SBU dan harga pasar
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.865.302.000	40 orang	6.966.853.058	38 orang	Tidak ada permasalahan	Pembayaran sudah sesuai ketentuan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.050.000	4 Paket	1.550.000	1 Paket	Penyedia tidak bisa menyediakan karena waktunya di perubahan	Agar penganggaran di Induk
			Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	127.991.000	8 orang	119.123.133	8 orang	Sesuai dengan kebutuhan	-
		Administrasi umum perangkat Daerah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	252.455.182	17 Paket	142.046.800	10 Paket	TKDN Belanja modal nya tidak sesuai	Agar penyedia melengkapi TKDN belanja modal

			Penyediaan peralatan rumah tangga	78.139.263	3 Paket	64.899.750	3 Paket	Menyesuaikan dengan harga SSH	-
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	53.120.349	4 Paket	44.295.000	4 Paket	Menyesuaikan dengan harga SSH	-
			Penyelenggaraan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.400.000	2 Dokumen	4.510.000	2 Dokumen	Karena sesuai kebutuhan dan tagihan	-
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	618.314.000	23 Laporan	613.208.644	23 Laporan	Karena penyesuaian harga SBU	-
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	89.400.000	15 Laporan	73.799.706	13 Laporan	Karena sesuai kebutuhan dan tagihan	-
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	765.279.800	121 Laporan	687.260.926	112 Laporan	Karena kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabalong tidak jelas sehingga tidak direalisasikan	Agar Pemerintah memperjelas aturan BPJS ketenagakerjaan khusus pegawai kontrak sesuai dengan aturan yang berlaku
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	467.740.000	22 Unit	442.518.357	22 Unit	Karena penyesuaian harga SBU dan tagihan Bahan Bakar Minyak	-

			Operasional atau Lapangan						
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.470.000	36 Unit	27.080.000	32 Unit	Karena penyesuaian harga SBU	-
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	747.457.768	2 Unit	591.255.683	2 Unit	Karena ada kegiatan yang tidak sempat dibuatkan SP2D dari BUD sehingga anggaran di alihkan ke perubahan tahun berikutnya	Agar penyedia yang bersangkutan lebih mengontrol tiap berkas yang masuk ke BUD
	Program peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.305.040.875	5 Dokumen	2.002.248.609	5 Dokumen	Adanya kekeliruan dalam penyusunan penganggaran untuk beberapa poin dalam pelaksanaan realisasi kegiatan.	Tindak lanjutnya yaitu dengan memperbaiki/ mengubahnya pada anggaran perubahan (APBD-P) untuk disesuaikan dan bisa terserap secara maksimal agar dapat memenuhi target kinerja pada sub kegiatan dimaksud. Namun, secara keseluruhan target kinerja dapat terpenuhi.

			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	178.779.948	60 orang	141.618.605	50 orang	Tidak terlaksana Diklat PPNS, karena tidak adanya minat anggota dan pejabat mengikuti diklat tersebut, juga adanya persyaratan lainnya seperti pendidikan dan unit kerja	Untuk upaya mengatasi permasalahan tersebut diperlukan rekrutmen baru (CPNS) yang berpendidikan S1 dengan Jabatan Polisi Pamong Praja baik fungsional maupun pelaksana
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	215.268.600	100 Dokumen	190.307.221	89 Dokumen	Keterbatasan personil yang menangani	Memanfaatkan personil yang ada
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.841.344.000	51 Kasus	1.836.243.733	59 Kasus	Belum bisa melaksanakan tindakan non yustisi terhadap pelanggar Perda/Perkada	Sementara ini hanya memberikan surat peringatan atau surat teguran kepada pelanggar Perda/Perkada

		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	167.942.738	18 Laporan	87.025.370	18 Laporan	Realisasi capaian kinerja terealisasi sebesar 100%. Adanya sisa anggaran dikarenakan kegiatan yang ada pada kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan pada anggaran sub kegiatan yang lain sehingga anggaran tidak terpakai atau terserap	Akan dilakukan penyesuaian pada Tahun Anggaran Selanjutnya
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	220.099.800	26 Laporan	167.598.616	26 Laporan	Realisasi capaian kinerja terealisasi sebesar 100%. Adanya sisa anggaran dikarenakan kegiatan yang ada pada kegiatan tersebut	Akan dilakukan penyesuaian pada Tahun Anggaran Selanjutnya

								dilaksanakan bersamaan pada anggaran sub kegiatan yang lain sehingga anggaran tidak terpakai atau terserap	
			Pengawasan Aatas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	205.536.378	20 Laporan	148.087.069	20 Laporan	Realisasi capaian kinerja terealisasi sebesar 100%. Adanya sisa anggaran dikarenakan kegiatan yang ada pada kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan pada anggaran sub kegiatan yang lain sehingga anggaran tidak terpakai atau terserap	Akan dilakukan penyesuaian pada Tahun Anggaran Selanjutnya

	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam daerah kab/kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	889.768.320	40 Dokumen	887.807.646	54 Dokumen	-	-
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3.029.145.394	6 Unit	2.980.763.712	6 Unit	-	Selisih pagu karena pihak penyedia ada yang tidak mengenakan PPN

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Satuan Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran, 2024

g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Uusan Pemerintah	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Rincian Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
				Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
				Rp	%	Rp	%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.374.000	100% 9 dok	49.103.000	99,45% 9 dok	Tidak ada	

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.717.717.000	100% 14 org	2.313.419.277	85,12% 14 org	Tidak ada	
			Administrasi Kepegawaian daerah	55.000.000	11 Orang	29.250.000	53,18%	Pelatihan Lebih banyak Di selenggarakan Oleh BPBD Provinsi	Menyiapkan Narasumber Untuk Pelaksanaan Pelatihan Di Kab.Tabalong
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.204.785.961	100%	1.157.265.359	96,00%	Tidak ada	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	665.632.745	100% 12 bulan	581.465.680	87% 12 bulan	Tidak ada	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	893.950.000	100%	882.442.897	98%	Tidak ada	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	154.757.030	100% 150 org	139.032.930	89,84% 150 org	Target sebanyak 150 orang terpenuhi tetapi peserta perempuan sangat sedikit	Agar persamaan gender dimana perempuan juga punya hak untuk mendapatkan informasi kebencanaan
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5.521.328.286	100% 12 bulan	4.714.269.170	85,38%	Hanya Beberapa UPBS Yang Mendapatkan bantuan Perahu Karet	Masih Memerlukan Anggaran Untuk Pengadaan perahu Karet
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	649.109.774	100%	494.693.835	76,21%	Hanya dilakukan Posko Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan, sedangkan Bencana Banjir tidak ada anggaran	Menyiapkan Anggaran Posko Kebakaran Hutan dan Posko Banjir

			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	174.679.525	100% 1 Dokumen	169.417.441	96,98%		

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD BPBD, 2024

h. Dinas Sosial

Uusan Pemerintah	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Rincian Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
				Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
				Rp	%	Rp	%		
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.183.861.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan selama 14 bulan	4.130.612.264	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Pegawai selama 14 bulan	-	-
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.200.000		18.050.000			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	804.092.573	Operasional Kinerja selama 1 tahun	685.181.343	Terpenuhinya kebutuhan operasional Kinerja selama 1 tahun	Setiap pembelian barang dan jasa harus melalui Mbiz Market, kadang ada beberapa barang yang tidak tersedia	Harus lebih teliti dengan melihat katalog barang yang ada di Mbiz market

								disitu, sehingga harus diganti dengan barang lain yang sejenis yang tentu harganya beda dari yang dianggarkan semula	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	434.449.251	Pengadaan Kendaraan Dinas selama 1 tahun	392.020.000	Terpenuhi Kendaraan roda 4	Untuk belanja pengadaan/pembelian kendaraan dinas roda 4 semua dialihkan lewat BPKAD	Harus dipastikan dulu jenis kendaraan yang tersedia untuk memudahkan penganggaran
			Penyediaan jasa penunjang umum urusan Pemerintah Daerah	1.419.607.953	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah selama 12 bulan	1.092.747.504	Terpenuhi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah selama 12 bulan	Pembayaran telepon, listrik dan air tidak sama setiap bulannya serta dalam pengadaan makan minum rapat dan harian pegawai harus menggunakan katalog, dan sebagian penyedia jasa catering masih belum terdaftar di katalog	Harus memastikan dulu apakah catering penyedia sudah terdaftar di katalog atau belum untuk memudahkan pembelanjaan
			Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan	1.146.331.062	Tersedia Sarana dan	914.606.873	Sarana Prasarana dalam	Jasa Pemeliharaan tidak sama setiap tahunnya,	Ditatur dan di data dulu sarana dan prasarana yang ada sehingga kita

			Pemerintah Daerah		Prasarana yang baik		kondisi baik	tergantung kondisi sarana prasarana yang ada	dapat menentukan sarana dan prasarana apa saja yg memerlukan pemeliharaan secara berkala
	Meningkatkan Peran/Partisipasi PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	80.185.000		66.307.440			
			Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	4.035.088.917	PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 188 orang	3.815.789.468	PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 176 orang	Kurangnya keahlian efektifnya peran serta PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Hendaknya diadakan kursus atau diklat untuk menambah pengetahuan dan keahlian PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
	Meningkatkan Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	3.298.984.269	PPKS yang mendapatkan layanan sosial 3.146 rang	2.664.404.357	PPKS yang mendapatkan layanan sosial 2.433 orang	PPKS yang semula direncanakan untuk mendapatkan Layanan Sosial ternyata sudah mendapatkan bantuan sosial dari pusat.	Penetapan Target PPKS yang akan mendapatkan layanan sosial akan lebih dicermati dalam rangka pemerataan

			Pengemis di Luar Panti Sosial					Sehingga berdasar kebijakan, PPKS tidak boleh menerima bantuan berlapis	pemberian bantuan.
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial.	654.102.485	PPKS yang mendapatkan layanan sosial 51 orang	538.585.330	PPKS yang mendapatkan layanan sosial 50 orang	Ada 1 orang yang sudah pindah ke daerah lain yang sehingga tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat	Diharapkan agar terus mendata ulang PPKS yang ada agar mendapatkan layanan sosial yang lebih maksimal
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kegiatan Pemeliharaan Anak anak terlantar	5.566.250.000	Jumlah PPKS (anak terlantar) yang di peliharaan 600 anak	5.554.050.000	Jumlah PPKS (anak terlantar) yang di pelihara 600 anak	Karena masing-masing K/L berbeda-beda dalam perhitungan capaian outputnya	Hendaknya ada standarisasi yang pasti mengenai perhitungan capaian outputnya
			Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	25.472.860.105	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial 4.700 KPM	22.754.917.753	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial 3.880 KPM	Adanya tambahan dana DID yang waktunya sangat mepet di akhir nopember, sehingga tidak bisa terealisasi pada tahun tersebut dan direncanakan akan	Harus terus memperbaharui data kemiskinan desa, minimal 3 bulan sekali, agar yang tidak termasuk di data desa agar bisa didata ulang, hingga bisa di masukkan melalui

								direalisasikan di awal tahun berikutnya	musyawarah desa (musdes)
		Program Penanganan Bencana	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	435.137.600		386.360.367			
			Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	640.729.247	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial 3.000 Jiwa dan 70 KK	539.130.409	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial sekitar 1822 Jiwa dan 70 KK	Jumlah korban bencana Alam dan sosial tidak bisa diprediksi setiap tahunnya	Menganggarkan dengan rata2 jumlah korban bencana alam dan sosial setiap tahunnya
		Program Taman Makam Pahlawan	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1.347.694.001	Pelaksanaan ceremony hari pahlawan dan pemeliharaan 2 TMP. Pemberian Tali Asih untuk Veteran dan Janda Veteran	1.296.711.307	Terlaksana any ceremony hari pahlawan dan terpeliharanya 2 TMP. Pemberian Tali Asih untuk Veteran dan Janda Veteran	Pada saat pembuatan pagar TMP pihak penyedia ternyata masuk kategori non PKP sehingga pajak PPN tidak dibayarkan	Sebelum melakukan Kerjasama hendaknya diteliti dulu apakah penyedia tersebut termasuk kategori PKP atau Non PKP

					seba- nyak 38 orang		sebanyak 38 orang		

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Sosial, 2024

2. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Tabel III.2.

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Dinas Tenaga Kerja

Uusan Pemerintah	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Rincian Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
				Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
				Rp	%	Rp	%		
Dinas	- Pengembangan Teknologi Informasi - Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal - Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					pertanggungjawaban disesuaikan dengan belanja yang dilaksanakan	

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.698.100	10 Dokumen	9.177.000	10 Dokumen		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.788.307.000	14 Bulan	5.599.735.404	14 Bulan		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					pertanggungjawaban disesuaikan dengan belanja yang dilaksanakan	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	8 orang	27.550.005	8 orang		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah					pertanggungjawaban disesuaikan dengan belanja yang dilaksanakan	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.972.312	4 Paket	2.051.000	4 Paket		

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.757.213	12 Paket	99.623.640	12 Paket		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.846.176	12 Paket	30.969.500	12 Paket		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.240.000	12 Dokumen	6.150.000	12 Dokumen		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	487.633.720	75 Laporan	458.818.444	87 Laporan		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					pertanggungjawaban disesuaikan dengan belanja yang dilaksanakan	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	560.000.000	1 unit	559.500.000	1 unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	560.000.000

			Pengadaan Alat Besar	5.100.000.000	7 unit	5.096.300.000	7 unit	Pengadaan Alat Besar	5.100.000.000
			Pengadaan Mebel	74.325.040	5 unit	64.599.098	5 unit	Pengadaan Mebel	74.325.040
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	297.695.043	42 unit	282.520.000	42 unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	297.695.043
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.200.000	12 Laporan	159.873.555	12 Laporan		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	957.371.427	12 Laporan	725.733.179	12 Laporan	Honor PPTK dianggarkan dengan total anggaran gaji, sedngkan pencairan anggaran gaji tidak masuk hitungan untuk honor PPTK	

								gaji Honorer tersisa krn ada yang masuk P3K, diterima kerja di perusahaan, dan meninggal dunia	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					pertanggungjaw aban disesuaikan dengan belanja yang dilaksanakan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	302.270.000	18 Unit	210.924.800	18 Unit		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.650.000	30 Unit	28.001.500	30 Unit		
			Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	331.800.000	2 unit	326.931.957	2 unit		

			atau Bangunan Lainnya						
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					pertanggungjawaban disesuaikan dengan belanja yang dilaksanakan	
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	115.254.726	1 Dokumen	106.371.935	1 Dokumen		
	- Menyelenggarakan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja - Meningkatkan Produktivitas Bagi Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						
	-		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	6.584.300.362	384 Orang	5.828.664.982	368 Orang	Ada 3 pelatihan yang tidak dilaksanakan	

	-		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						
	-		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	87.100.000	60 Lembaga	81.353.176	30 Lembaga	pertanggungjawaban d disesuaikan dengan belanja yang dilaksanakan	
	-		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil						
	-		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	257.151.065	20 Perusahaan	241.666.793	20 Perusahaan	pertanggungjawaban d disesuaikan dengan belanja yang dilaksanakan	
	- Melaksanakan peningkatan upaya penempatan tenaga kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota						
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	1.560.635.956	485 orang	1.453.707.338	510 orang		

			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	70.364.914	20 Orang	54.916.879	20 Orang		
			Perluasan Kesempatan Kerja	1.263.485.052	336 orang	1.170.355.722	336 orang		
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					pertanggungjawaban disesuaikan dengan belanja yang dilaksanakan	
			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	66.210.100	12 Dokumen	57.750.428	12 Dokumen		
			Job Fair/Bursa Kerja	182.892.320	40 orang	170.036.252	156 orang		
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					pertanggungjawaban disesuaikan dengan belanja yang dilaksanakan	
			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	75.433.219	150 orang	63.640.000	122 orang		

	Melaksana kan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					pertanggungjawaban disesuaikan dengan belanja yang dilaksanakan	
	Melaksana kan pembinaan persyaratan kerja		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	267.939.000	12 Laporan	250.934.445	12 Laporan		
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					pertanggungjawaban disesuaikan dengan belanja yang dilaksanakan	

			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.617.000	25 Perkara	64.182.466	11 Perkara		
		JUMLAH		25.978.149.745		23.237.039.498			

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Tenaga Kerja, 2024

b. Dinas P3AP2KB

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (RP)	Kinerja	Anggaran (RP)	Kinerja		
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mengupayakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan yang berkeadilan gender	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja APBD	685.058.500	30%	640.733.357	52%	IPG Dan IDG Menggunakan Angka Realisasi Tahun 2023. Karena untuk IPG dan IDG pada Tahun Berjalan akan rilis pada Tahun di depannya (Tahun 2025) Menunggu dari BPS Pusat.	Koordinasi dgn BPS
			Persentase SKPD yang responsive Gender		100%		100%		
			IDG		75,12		72,54%		
		Advokasi Kebijakan dan	Jumlah Perangkat Daerah yang	283.396.578	42 Perangkat Daerah	268.206.980	41 Perangkat Daerah		-

		Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota						
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Keterwakilan perempuan di legislative	116.502.220	30%	107.831.445	26,27	Perempuan yang duduk dilegislatif untuk periode 2024 s.d 2029 berjumlah 8 orang	Perlu peningkatan SDM Perempuan bagi anggota Parpol Perempuan dan Organisasi Wanita agar bisa menambah jumlah anggota Legislatif Perempuan
			Jumlah Desa sadar hukum		60 Desa		60 Desa		
			Persentase angkatan kerja Perempuan yang Mendapatkan Advokasi		100%		100%		
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	59.320.420	2 Dokumen	55.954.245	2 Dokumen		-
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan politik, Hukum, Sosial dan ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	57.181.800	5 Organisasi	51.877.200	5 Organisasi		-

			Kewenangan Kabupaten/Kota						
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Perempuan	285.159.702	100%	264.694.932	100%		-
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab./Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	218.417.102	160 Orang	209.392.206	160 Orang	Kegiatan Pelatihan Keterampilan sudah Terlaksana, Hanya saja masih Kurangnya Pemahaman Peserta tentang Prosuder Pembuatan Izin Usaha UMKM	Para Peserta Bisa Datang Langsung ke PLUT untuk Konsultasi
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab./Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	66.742.600	2 Dokumen	55.302.726	2 Dokumen		-
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	IPG	402.823.421	86,1	343.795.730	86,47	IPG Dan IDG Menggunakan Angka Realisasi Tahun 2023. Karena untuk IPG dan IDG pada Tahun Berjalan akan rilis pada Tahun di depannya (Tahun 2025) Menunggu dari BPS Pusat.	Koordinasi dgn BPS
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan	Persentase kualitas hidup keluarga	184.365.397	100%	179.941.620	100%		-

		Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab./Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	129.849.768	1 Dokumen	127.356.920	1 Dokumen		-
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab./Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	54.515.629	2 Dokumen	52.584.700	2 Dokumen		-
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab./Kota	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pelayanan Puspaga	218.458.024	12 Kecamatan	163.854.110	12 Kecamatan		-
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab./Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	218.458.024	120 Orang	163.854.110	120 Orang		-
	Mengupayakan Peningkatan	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase SKPD yang mempunyai	180.686.000	100%	166.810.843	100%		-

	Kualitas Keluarga dan Data Informasi	SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Data Terpilah Gender dan Anak						
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang membuat dokumen data gender dan anak	180.686.000	30 SKPD	166.810.843	30 SKPD	Perampangan SKPD, 29 SKPD, 12 Kecamatan. Data diminta hanya ke 29 SKPD. Namun Tidak semua SKPD yang Memuat Data Terpilah Gender dan Anak untuk Pembuatan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	Hanya memuat data SKPD yang mempunyai Data Terpilah Gender dan Anak yang digunakan untuk pembuatan Buku Data Terpilah Gender dan Anak
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab./Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia	180.686.000	1 Dokumen	166.810.843	1 Dokumen		-
	Melaksanakan Upaya Pemenuhan Hak Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak	904.906.747	Utama	834.007..640	-	Evaluasi KLA sebelumnya dilakukan setiap Tahun, mulai Tahun 2024 ini evaluasi dilaksanakan setiap dua Tahun Sekali dan Penghargaan KLA diberikan pada Tahun Ganjil	- Terus berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Tabalong; Evaluasi Lapangan akan dilaksanakan Tahun 2025 Jika Evaluasi Mandiri Memenuhi Syarat "Penghargaan KLA akan diserahkan Tahun 2025
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan/ Desa Layak Anak	488.926.747	100%	451.799.340	100%		- -

		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan dan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	488.926.747	203 Organisasi	451.799.340	203 Organisasi		- -
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	415.980.000	100%	382.208.300	100%		- -
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi PHA bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	240.980.000	1 Dokumen	222.346.400	1 Dokumen		- -
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	1 Dokumen	159.861.900	1 Dokumen		- -

	Melaksanakan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu	339.083.672	100%	301.174.423	100%		- -
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan perempuan yang di tindaklanjuti dan atau diselesaikan dengan perjanjian Bersama	148.075.000	100%	132.483.473	100%		- -
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab./Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	148.075.000	1 Dokumen	132.483.473	1 Dokumen		- -
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab./Kota	Persentase Penanganan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	126.008.672	100%	107.403.400	100%	1. DAK Non Fisik penggunaannya hanya untuk layanan korban, tidak bisa dilakukan untuk sosialisasi maupun belanja modal; 2. Realisasi tergantung pada jumlah kasus yang masuk dan sesuai dengan	- Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa serta berkoordinasi dengan lintas sektor lainnya

								kebutuhan korban; 3. Kasus yang masuk bisa prediksi yang tidak di	
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20.851.047	15 Orang	19.543.400	16 Orang	-	- -
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	105.157.625	15 Layanan	87.860.000	16 Layanan	-	- -
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penanganan Perempuan terhadap tindak kekerasan yang diselesaikan melalui perjanjian Bersama	65.000.000	100%	61.287.550	100%		- -
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab./Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	65.000.000	1 Dokumen	61.287.550	1 Dokumen		- -

		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Anak	521.421.327	68,03	441.514.718	-	Angka tersedia baru untuk Provinsi Kalimantan Selatan, sementara angka untuk Kabupaten belum tersedia	- Terus berkoordinasi dengan Dinas PPPAKB Provinsi Kalimantan Selatan
			Persentase anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu		100%		100%		
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan perjanjian bersama	210.673.000	100%	191.151.800	100%	-	- -
		Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/ Program/ Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan/ Program/ Kegiatan Pencegahan KTA	210.673.000	390 orang	191.151.800	390 Orang	-	-
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tk Daerah Kab./Kota	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang ditindaklanjuti	222.348.327	100%	168.924.618	100%	Jumlah Kasus yang masuk tidak bisa diprediksi	Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa serta berkoordinasi dengan lintas sektor lainnya
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.905.952	45 Orang	24.575.322	45 orang	-	-

		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan Layanan	196.442.375	45 Layanan	144.349.296	45 Layanan	-	-
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.400.000	1 Dokumen	81.438.300	1 Dokumen	-	-
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan KB	Meningkatkan akses pelayanan KB MKJP secara merata dan berkualitas	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentasi pencapaian peserta KB MKJP	5.932.703.522	20%	5.065.298.601	13,58%	Persentase peserta KB MKJP mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 dari 13,26% menjadi 13,58% namun belum memenuhi target Renstra	Terus berupaya meningkatkan jumlah Peserta KB MKJP
			Cakupan peserta KB yang aktif		82,28%		79,32%		
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)		82,28%		79,32%		
			Persentasi kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)		7,57%		5,70		
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab./Kota	Persentase Peserta KB Aktif	2.588.908.000	81,80%	2.311.314.130	77,74%	-	-
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.900.000	24 Laporan	2.820.000	12 Laporan	-	-

		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	615.103.000	1.500 Orang	490.970.000	1.500 Orang	-	-
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.936.455.000	5 Unit	1.809.321.130	5 Unit	-	-
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.450.000	2 Laporan	8.203.000	2 Laporan	-	-
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab./Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Akseptor pada Kampung KB	301.090.000	81,80%	295.711.180	80,56%	-	-
		Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	6.700.000	50 Organisasi	1.800.000	40 Organisasi	-	-
		Integrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi	3.750.000	1 Dokumen	3.738.600	1 Dokumen		

		Lintas Sektor di Kampung KB	Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB						
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB (Kampung)	290.640.000	18 Kampung KB	290.172.580	18 Kampung KB	-	-
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PPKBD Aktif	1.471.450.000	95,4%	1.268.113.418	95,4%	-	-
			Persentase Sub PPKBD Aktif		66,9%		99,74%		
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.471.450.000	890 Orang	1.268.113.418	888 Orang	-	-
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif	1.571.255.522	90%	1.190.159.873	83,36%	-	-
		Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada	380.759.522	50 Organisasi	267.063.376	30 Organisasi	-	-

			Stakeholders dan Mitra Kerja						
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK, sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	60.000.000	2 Dokumen	53.344.500	1 Dokumen	-	-
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	374.496.000	1 Dokumen	253.612.671	1 Dokumen	-	-
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan	180.000.000	10 Laporan	144.000.000	3 Laporan	-	-

			Mini Lokakarya (Minilok)						
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	496.000.000	12 Laporan	408.651.826	8 Laporan	-	-
	Mengupayakan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan anggota bina keluarga yang ber KB (BKB, BKR, BKL)	1.745.365.000	80%	1.641.168.620	89,61%	-	-
			Cakupan anggota UPPKS yang ber KB		92%		92,02%		
		Pelaksanaan Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentasi BKB yang Aktif	494.200.000	100%	422.053.800	100%		
			Persentasi BKR yang Aktif		80%		80%		
			Persentasi BKL yang Aktif		80%		80%		
		Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	86.400.000	7 Laporan/ Dokumen	66.579.000	7 Laporan/ Dokumen		
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	107.800.000	12 Laporan	57.554.800	12 Laporan		

		Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)						
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	300.000.000	25 Unit	297.920.000	25 Unit		
		Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab./Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif	1.251.165.000	90%	1.219.114.820	90%		
		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	41.565.000	12 laporan	9.514.820	12 Laporan		
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Melahirkan, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca	576.000.000	2 Laporan	576.000.000	2 Laporan		

			Salin/Kelahiran Baduta/Balita)						
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) yang Mendapat Pendampingan	633.600.000	2 Laporan	633.600.000	2 Laporan		
	Mengupayakan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju pertumbuhan penduduk	428.031.380	1,45%	385.991.252	1,87%	Pengukuran Kinerja Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) ini karena perhitungan dan rilis angkanya hanya sekali dalam setahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka angka yang dipakai adalah angka LPP tahun sebelumnya sampai dirilisnya angka LPP terakhir (tahun berjalan)	Dalam rangka mengoptimalkan pengendalian penduduk baik dari segi kuantitas terlebih lagi dari segi kualitas maka mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan terus ditingkatkan
			Indeks Pembangunan Keluarga		60,44				
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 th (Age Sfspecific Fertility Rate/ ASFR 15-19)		32				
			Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 th		2,16				
		Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan terbentuk	105.096.352	1 SSK	102.145.500	1 SSK		
			Rapat/ Pertemuan Program Bangsa Kencana		6 Kegiatan		6 Kegiatan		

		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	10.554.560	1 SSK	10.554.200	1 SSK		
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	94.541.792	10 Laporan	91.591.300	10 Laporan		
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah/Kabupaten	Jumlah anak sekolah yang memahami manfaat pendewasaan usia perkawinan	322.935.028	105 orang	283.845.752	105 Orang		
			Persentasi pelaporan tepat waktu		100%		100%		
		Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	32.090.048	3 Dokumen	26.033.325	3 Dokumen		

		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	100.280.000	12 Laporan	100.240.000	12 Laporan		
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	183.900.000	12 Dokumen	150.952.427	12 Dokumen		
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	6.664.980	12 Laporan	6.620.000	12 Laporan		
	Melaksanakan Pelayanan Publik yang berkualitas dan akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Kategori SAKIP	7.737.902.223	A	6.220.242.708	BB	- Belum sepenuhnya Pegawai Merumuskan dan Menetapkan Perencanaan Kinerja yang Selaras dengan Kinerja Instansi; - Belum Sepenuhnya Rencana Aksi Kinerja yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Menghasilkan Rencana Aksi tindak Lanjut; - Pengukuran Kinerja Individu Belum Sepenuhnya memiliki Keterkaitan dengan Kinerja Organisasi, sehingga belum dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment	- Menyempurnakan SKP Pegawai yang didasarkan atas Kinerja Atasannya (Perencanaan Kinerja yang Selaras dengan Kinerja Instansi); - Memastikan Pengukuran Kinerja Individu dapat saling terkait dengan kinerja organisasi, sehingga kedepannya dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment ke setiap individu pegawai; - Meningkatkan Kualitas Laporan kinerja dengan cara mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja
			Nilai SAKIP		80		78,55%		

								ke setiap individu pegawai; - Laporan kinerja belum mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional; - Penyusunan Rencana Aksi sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum didukung dengan hasil evaluasi atas rencana aksi; - Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya dilakukan dalam peningkatan Kinerja; - Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk melakukan Perbaikan dan Peningkatan Capaian Kinerja (Output) dan Outcome.	dengan realisasi kinerja di level Nasional; - Melakukan Pemantauan hasil Evaluasi antar rencana aksi yang telah disusun sebagai tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal; - Melakukan Pemantauan terhadap rencana aksi pertriwulan dan digunakan dalam Upaya peningkatan kinerja internal; - Melakukan Pemantauan terhadap rencana aksi pertriwulan dan digunakan dalam Upaya peningkatan kinerja; - Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk melakukan perbaikan dan peningkatan capaian kinerja (Output) dan capaian outcome
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kepuasan Masyarakat dan Aparatur terhadap	789.535.769	100%	627.486.530	100%	-	-

			pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	139.900.000	12 Laporan	116.136.530	12 Laporan	-	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	649.635.769	12 Laporan	511.350.000	12 Laporan	-	-
		Aministrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum PD	504.993.539	100%	436.048.010	100%	-	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	71.698.841	8 Paket	70.330.427	8 Paket	-	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	19.624.228	2 Paket	16.224.700	2 Paket	-	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	413.670.470	90 Laporan	349.492.883	90 Laporan	-	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.320.000	100%	10.540.541	90%		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.320.000	40 Paket	10.540.541	36 Paket	Jumlah ASN sebanyak 21 Orang, PPPK sebanyak 1 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 14 orang	-

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	295.590.181	100%	269.434.772	100%	-	-
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50.496.362	14 unit	45.274.772	14 Unit	-	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	245.093.819	26 Unit	224.160.000	21 Unit	-	-
		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Alat dan Perlengkapan Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	415.653.301	100%	289.090.839		-	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	376.890.000	33 Unit	261.211.839	33 Unit	-	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29.414.806	44 Unit	19.279.000	33 Unit	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9.348.495	1 Unit	8.600.000	1 Unit	-	-
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Ada Nilai AKIP	10.580.433	80	10.488.100	78,55	SKPD masih belum ada pengukuran kinerja yang memanfaatkan bantuan aplikasi teknologi informasi	Agar meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi tentang aplikasi manajemen kinerja dalam rangka pengukuran kinerja

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	10.580.433	7 Dokumen	10.488.100	7 Dokumen		
			Lap. LKJIP diselesaikan tepat waktu		1		1		
			Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) diselesaikan tepat waktu		1		1		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan Inspektorat/ BPK yang ditindaklanjuti	5.708.229.000	100%	4.844.656.429	100%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.708.229.000	308 Orang/ bulan	4.844.656.429	308 Orang/ Bulan		
	Jumlah			18.877.961.792		16.308.240.405			

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas P3AP2KB, 2024

c. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (RP)	Kinerja	Anggaran (RP)	Kinerja		
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Melakukan upaya – upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun: 1. Padi 2. Jagung 3. Kedelai 4. Bawang merah 5. Cabai rawit Cabai besar	16.706.182.981	4,80 ton / ha 4,05 ton / ha 1,15 ton / ha 7,30 ton / ha 8,80 ton / ha 5,50 ton / ha	15.302.899.59 1	5,00 ton / ha 4,20 ton / ha 1,05 ton / ha 7,20 ton / ha 8,80 ton / ha 5,00 ton / ha		Produktivitas padi pada tahun 2024 di Kabupaten Tabalong adalah 5 ton / ha berdasarkan perhitungan Bidang Sarana TPH

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024

	Menyediakan alsintan dan sarana produksi pertanian lainnya	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah alsintan yang diserahkan kepada masyarakat	13.292.374.587	79 unit	12.264.610.120	79 Unit		Pengadaan alsin sebanyak 79 unit untuk memenuhi permintaan Poktan (Musrenbang) dan Pokir anggota DPRD
	Menyediakan dan mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura yang unggul serta melakukan sertifikasi dan pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah SDG Tanaman yang dilakukan pemurnian dan pelestarian	3.413.808.394	12 VUB	3.038.289.471	12 VUB		Varitas unggul yang telah dikembangkan adalah kamundai / likol, langsung, alpukat mentega, belimbing, durian, jambu kristal, langsung Palembang, manggis, anggrek, jambu citra dan durian gantar bumi.
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Melakukan upaya – upaya untuk meningkatkan cakupan prasarana pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase cakupan yang dapat dilayani oleh prasarana pertanian	15.479.729.118	70%	13.776.958.915	%		Capaian persentase cakupan layanan prasarana pertanian dihitung berdasarkan data Bidang Prasarana TPH
	Menyediakan dan memelihara prasarana pertanian lainnya	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlindungnya lahan pertanian pangan berkelanjutan	94.500.000	6.714 hektar	84.105.000	6.714 hektar		Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tabalong yang dibakukan dan

									dilindungi adalah 6.714 hektar
	Membuat dan memelihara jalan usaha tani serta jaringan irigasi tersier untuk pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pembuatan jalan, jaringan dan irigasi	15.385.229.118	57 unit	13.692.853.915	57 unit		Pembuatan prasarana pertanian meliputi embung, irigasi tersier, jalan usaha tani, dan BPP
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Melakukan upaya – upaya untuk meningkatkan cakupan pencegahan bencana pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase cakupan pencegahan bencana pertanian	815.681.440	40%	725.956.482	42,20%		Luas cakupan lahan yang terlindungi dari bencana pertanian adalah seluas 633 ha (dari layanan UPTD Perlindungan TPH) dan seluas 2.000 ha (dari AOTP)
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota	Luas areal pengendalian bencana pertanian	815.681.440	2.500 hektar	725.956.482	2.633 hektar		Pencegahan bencana pertanian melibatkan lahan tanaman pangan dan lahan hortikultura. Langkah – langkah yang dilakukan dalam melindungi lahan pertanian adalah melaksanakan Gerdal OPT bersama, melaksanakan

									pelatihan pengendalian OPT, melaksanakan SL-PHT Tanaman Pangan dan Hortikultura dan melaksanakan pelatihan pembuatan Pupuk Organik dan Pesnab juga AaPH , Pemberian bantuan light trap dan yellow trap, perbanyakkan APH trichoderma dan pemantauan sebaran pestisida kimia
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Melakukan upaya – upaya untuk meningkatkan nilai / poin kelompok tani	Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan jumlah kelompok tani yang naik nilai kemampuannya	2.480.218.872	35 %	2.207.394.796	35 %		Jumlah Poktan yang dinilai kemampuannya ada 833 poktan. Poktan yang mengalami penurunan nilai kemampuan ada 125 poktan, yang nilai kemampuannya tetap ada 252 poktan dan yang nilai kemampuannya naik ada 456 poktan

	Membina dan meningkatkan kualitas SDM Penyuluh Pertanian serta meningkatkan sarana dan prasarana penyuluhan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang meningkat kelasnya	2.480.218.872	1 Unit	2.207.394.796	0 Unit	Pada tahun 2024 tidak ada BPP yang naik kelas menjadi adhitama karena disebabkan masih kurangnya SDM Penyuluh Pertanian, peningkatan kompetensi SDM Penyuluh Pertanian, sarana dan prasarana BPP serta pengembangan fungsi BPP	Langkah – langkah yang telah dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan kelas BPP menjadi adhitama antara lain peningkatan kompetensi SDM dan peningkatan sarana dan prasarana BPP

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas KP2TPH, 2024

d. Dinas Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (RP)	Kinerja	Anggaran (RP)	Kinerja		
Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	Peningkatan kebijakan dan peraturan bidang lingkungan hidup	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten /Kota						

			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	155.898.020	2 dokumen	151.998.316	3 dokumen (IKPLHD, KLHS RPJMD, RPJPD)	- Kesulitan mencari data sehingga inventarisasi tidak tepat waktu	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pengampu data
Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	Peningkatan kebijakan dan peraturan bidang lingkungan hidup	Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraa n Kajian Lingkungan Hidup strategis						
			Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	600.000.000	2 dokumen KLHS RDTR	527.943.790	2 dokumen KLHS RDTR	- Penyusunan dokumen ini dilaksanakan pada APBDP	Penyusunan dokumen KLHS RDTR agar dilaksanajan di awal tahun anggaran
Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	Peningkatan kebijakan dan peraturan bidang lingkungan hidup	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragama n Hayati Kabupaten/Kota						
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan keanekaragama n hayati	194.380.272	1 dokumen	172.163.481	1 dokumen	Masih perlu Upaya lain untuk pengeloaan kehati terutama sarana dan prasarana	- Meningkatkan koordinasi lintas sektor termasuk lsm lingkungan - Perlu adanya penyusunan dokumen status nilai penting konservasi Mengusulkan kegiatan sarpras kehati
Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	Peningkatan kebijakan dan peraturan bidang lingkungan hidup	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragama n Hayati Kabupaten/Kota						-

			Pengelolaan Kebun Raya	167.136.943	13 ha	125.088.100	13 ha	Status kebun raya yang belum <i>clear and clean</i>	- Melakukan koordinasi kejelasan status lahan kebun raya, - Konservasi dan eksplorasi tanaman tetap dilakukan
Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	Peningkatan kebijakan dan peraturan bidang lingkungan hidup	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						-
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	16.626.178.988	774,65	12.750.653.104	825,46 ha	Banyak usulan untuk Pembangunan RTH yang diusulkan di perubahan	Mengusulkan penambahan petugas seiring luasan pengelolaan RTH - Agar Pembangunan RTH dilakukan di renja induk
Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	Peningkatan Pengendalian pencemaran lingkungan	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						
			Pemberian informasi peringatan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	204.310.654	4 pelaku usaha kegiatan	197.196.774	5 pelaku usaha kegiatan	- Semakin bertambahnya usaha kecil semakin perlu sosialisasi dan informasi terkait limbahnya	- Mengatur system pembuangan limbah industri dan domestik sehingga tidak mencemari lingkungan - Melakukan penyuluhan dan

									Solusi dalam pengelolaan lingkungan
Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	Peningkatan Pengendalian pencemaran lingkungan	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3					-	
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	608.199.930	5 dokumen	523.976.282	5 dokumen	- Layanan dan Operasional UPTD pengelolaan limbah B3 belum maksimal karena masih terbatas dalam sarpras dan SDM	Mengusulkan sarpras dan peningkatatan kapasitas personal pengelola limbah B3 di UPTD pengelolaan limbah B3
Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	Peningkatan Pengendalian pencemaran lingkungan	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3					-	
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan pemenuhan Persyaratan Administrasi dan teknis Penyimpanan	24.000.000	24 pelaku usaha / kegiatan	23.472.500	24 pelaku usaha / kegiatan	- Masih perlu sosialisasi dan penyuluhan terkait pengelolaan limbah B3	Mengusulkan kegiatan sosialisasi untuk pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3

			Sementara Limbah B3						
Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
			Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap tanah, air, udara dan laut	247.048.282	30 titik pantau	218.366.066	30 titik pantau	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah dan limbah rumah tangga secara langsung ke sungai	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi antar SKPD terkait pengelolaan LH, meningkatkan kerjasama dengan komunitas dan masyarakat sekitar bantaran sungai melalui program pembersihan sungai, maupun kampanye dan sosialisasi agar sungai tidak tercemar
Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	Peningkatan Kapasitas Laboratorium	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						

			Pengelolaan Laboratorium	10.370.939.673	225 sampel	7.777.035.222	424 sampel	Laboratorium lingkungan sudah terakreditasi namun SDM masih kurang	Penambahan petugas analis baik melalui formasi CPNS maupun PPPK
Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	Peningkatan Penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan	Pengendalian Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten						
			Pengawasan Usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	159.439.852	40 pelaku usaha / kegiatan	153.452.159	43 pelaku usaha / kegiatan	Exiisting fungsional pengawas LH hanya 2 orang sementara pelaku usaha kegiatan yang harus diawasi sangat banyak	Mengusulkan penambahan pejabat pengawas LH Meningkatkan kapasitas PPLHD yang ada
Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	Peningkatan Penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						

			Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota	134.909.684	10 kasus	92.212.655	11 kasus	Semakin sedikit pengaduan lingkungan terjadi semakin baik dalam pengelolaan lingkungannya	Perlu peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha kegiatan
Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH						
			Pemberdayaan Kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH	156.950.840	1 dokumen	136.751.243	1 dokumen	Raperda pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan MHA masih dalam tahap penyusunan Naskah akademik dan draft raperda	Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait raperda perlindungan dan pemberdayaan MHA
Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						
			Pendampingan Gerakan peduli Lingkungan Hidup	428.125.909	73 sekolah	378.784.324	73 sekolah	Masih perlu ditingkatkan Gerakan PBLH di sekolah dan juga peran serta Masyarakat	Melakukan pembinaan dan sosialisasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan

								dalam PPLH, sehingga jumlah sekolah adiwiyata tingkat Mandiri, Nasional, Provinsi semakin meningkat	Hidup di Sekolah dan masyarakat sebagai implementasi Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Lingkungan Hidup, 2024

h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (RP)	Kinerja	Anggaran (RP)	Kinerja		
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Program pendaftaran penduduk		384.944.400	Cakupan Kepemilikan KTP = 100% KK = 100% KIA = 100% KTP NIK = sudah	297.372.914 (77,25%)	Cakupan Kepemilikan KTP = 99,75% KK = 99,59% KIA = 78,9% KTP NIK = sudah	Masih terdapat anak sekolah yang belum memiliki Kartu Identitas Anak yang berusia 5 tahun keatas s/d 17 tahun kurang 1 hari	Terus melakukan jebol ke desa dan kelurahan, serta sekolah-sekolah dan melaksanakan perekaman penduduk rentan sambil memberikan edukasi terkait pentingnya administrasi kependudukan (KTP, KK dan KIA)

			Pelayanan pendaftaran penduduk	378.914.400	Pelayanan Penerbitan dokumen adminduk = 35.000 dokumen dan 4 laporan pendataan penduduk	291.942.914 (77,05%)	Pelayanan Penerbitan dokumen adminduk = 58.011 dokumen dan 4 laporan pendataan penduduk	Belum melaksanakan Inovasi kawin Perak. Masih dalam tahap melaksanakan PKS dengan instansi terkait. Untuk pelayanan adminduk bagi penduduk rentan dan stunting terjadi efesiensi anggaran karena sama kegiatannya dengan bidang capil	Akan melaksanakan Inovasi Kawin Perak, dan melaksanakan rekam KTP bagi penduduk Rentan terkait administrasi kependudukan
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	6.030.000	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggara-an pendaftaran penduduk dalam rangka tertib administrasi kependudukan = 12 kecamatan	5.430.000 (90,05%)	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggara-an pendaftaran penduduk dalam rangka tertib administrasi kependudukan = 2 kecamatan	Belum terlaksanannya penertibanan KTP elektronik di 10 kecamatan terkendala instansi terkait kantor kecamatan dan muspika terkait Pilkada	Akan ditindaklanjuti di tahun 2025
	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Program Pencatatan Sipil		77.750.000	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran : 70%	63.080.000 (81,13%)	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran : 63,89%	Masyarakat masih kurang memahami pentingnya dokumen akta pencatatan sipil	Melakukan jemput bola pemutakhiran dokumen pencatatan sipil

					Anak 0-18 : 100% Mati : 100% Kawi : 100% Cerai : 100%		Anak 0-18 : 99,11% Mati : 100% Kawi : 100% Cerai : 100%		Melaksanakan jemput bola pelayanan dokumen pencatatan sipil ke desa dan sekolah-sekolah Melakukan input BAKAK semua dokumen akta kelahiran yang diterbitkan di atas tahun 2012
			Pelayanan pencatatan sipil	64.430.000	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil = 19.120 dokumen	54.980.000 (85,33)	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil = 18.894 dokumen	Jumlah penduduk bertambah tetapi dokumen akta kelahiran tidak dilaporkan maka nomor akta tersebut tidak terdaftar di siak terpusat dan masih terdapat nomor akta anak tidak terdaftar di siak karena belum dilakukan input BAKAK	Akan dilakukan penertiban akta kelahiran kepada penduduk pendatang melalui jemput bola door to door bersama aparat desa supaya terdaftar kepemilikan akta kelahirannya di siak terpusat pada tahun anggaran 2025
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	5.850.000	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan	5.850.000 (100%)	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan	Tidak ada	Kegiatan berjalan sesuai dengan rencana

					Sipil = 12 Kec		Sipil = 12 Kec		
			Kegiatan Penyelenggaraa n Pencatatan sipil	7.470.000	Jumlah Pelaksanaa n koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelengg arakan urusan pemerintaha n di bidang agama kabupaten/k ota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan ruk bagi penduduk yang beragama islam = 12 Kec	2.250.000 (36,12%)	Jumlah Pelaksanaan koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelengg arakan urusan pemerintaha n di bidang agama kabupaten/k ota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan ruk bagi penduduk yang beragama islam = 12 Kec	Belanja biaya transport perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi tidak tersedia sehingga anggaran tidak bisa direalisasikan	Dana belanja transport sudah dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2025
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		4.100.616.193	Validitas Data= 100% Nilai SKM = Puas (92.00) Kerjasama pemanfaata n data = 100%	3.528.237.023 (86,04)	Validitas Data= 100% Nilai SKM = Sangat Puas dengan skor nilai (92,27) Kerjasama pemanfaatan	Beberapa skpd/opd masih belum menjawab penawaran pemanfaatan data	Melakukan penawaran ulang pemanfaatan data dan melaksanakan sosialisasi

							data = 26,82% (11 skpd)		pemanfaatan data
			Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	56.508.002	Jumlah skpd yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data = 41 skpd	53.758.542 (95,15)	Jumlah skpd yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data = 11 skpd	Adanya perubahan regulasi pemanfaatan data	Percepatan pembuatan PKS
			Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	269.373.818	Jumlah pelaksanaan SKM = 12 lap survey Jumlah Sosialisasi Piak = 1 laporan Jumlah Inovasi = 1 inovasi	138.067.840 (51,26%)	Persentase pelaksanaan SKM = 12 lap survey Jumlah Sosialisasi Piak = 1 laporan Jumlah Inovasi = 1 inovasi	Pelaksanaan ISO 27001 dinas kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Adminduk	Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Adminduk
			Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	3.774.734.373	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan = 4 dokumen Jumlah laporan hasil pembinaan	3.336.410.641 (88,39%)	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan = 4 dokumen Jumlah laporan hasil pembinaan	Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran	-

					teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan = 5 dokumen Jumlah pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan = 12 survey		teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan = 5 dokumen Jumlah pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan = 12 survey		
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan		74.234.000	Ketersediaan database skala kabupaten = Ada	69.095.169 (93,08%)	Ketersediaan database skala kabupaten = Ada	Tidak ada	-
			Penyusunan Profil Kependudukan	74.234.000	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan dan serta kebutuhan yang lain	69.095.169 (93,08%)	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan dan serta kebutuhan yang lain	Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran	-

					yang tersusun = 3 dokumen Jumlah lapioran data dan profil perkembangan penduduk sebanyak 3 laporan		yang tersusun = 3 dokumen Jumlah lapioran data dan profil perkembangan penduduk sebanyak 3 laporan		
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependuduk-an	Meningkat-nya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota		12.609.235.111	Nilai AKIP A (85,00)	10.340.738.333	Nilai AKIP A (80,40)	Keterlambatan dalam penyusunan Rencana Aksi tahun 2024 Kinerja berjenjang sampai pada level bawah belum berorientasi kepada hasil Belum ada penunjukan pegawai yang ditugaskan untuk memantau capaian kinerja rencana aksi pertriwulan Belum optimalnya pengumpulan data	Segera penyusunan Rencana Aksi tahun 2025 setelah PK di tdd Segera menyusun Sasaran Kinerja Pegawai berjenjang sampai pada level bawah yang berorientasi kepada hasil Segera melaksanakan penunjukan pegawai yang ditugaskan untuk memantau capaian kinerja rencana aksi pertriwulan pada masing-masing bidang Segera menyusun metode yang

								kinerja masing-masing bidang Belum efektifnya pengukuran kinerja berjenjang Dalam menyetujui aktivitas harian pegawai, agar memberlakukan melihat bukti kinerja bawahan SKPD agar melakukan efesiensi anggaran Pimpinan SKPD agar memberikan pemahaman dan penjelasan kepada pegawai agar menjadi peduli terhadap hasil pengukuran kinerja Agar skpd dukcap menindaklanjuti hasil rekomendasi atas hasil evaluasi	mudah dalam menyusun dan mengumpulkan data kinerja masing-masing bidang Menperjelas cara menghitung hasil kinerja masing-masing bidang secara berjenjang sampai dengan staf Menerapkan dan memberlakukan meneliti apa saja yang dikerjakan menunjang kinerja atasan sebelum menyetujui aktifitas yang di ajukan bawahan Segera melaksanakan efesiensi anggaran Segera memberikan pemahaman dan penjelasan kepada seluruh pegawai agar menjadi peduli terhadap hasil pengukuran kinerja Segera menindaklanjuti

								akuntabilitas kinerja internal	hasil rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal
								SKPD dukcapil diharapkan berupaya memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya, dengan melalui pelatihan bagi pegawai yang belum berkompeten	Segera memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya bawahannya melalui pelatihan, bimtek dan sejenisnya bagi pegawai yang belum berkompeten
			Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8.990.080	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah = 8 dok/lap	8.346.700 (92,84%)	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah = 8 dok/lap	Tidak ada	Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana aksi yang telah di buat
			Administrasi keuangan perangkat daerah	6.001.495.956	Terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah = 12 bulan	5.329.264.157 (88,80%)	Terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah = 12 bulan	Tidak ada	Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana aksi yang telah di buat

			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	105.970.000	Terlaksananya kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah = 100%	65.095.000 (61,43%)	Terlaksananya kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah = .67%	Beberapa kali akan dilaksanakan acara sosialisasi/internalisasi dengan mengundang narasumber dari luar instansi, namun materi yang akan disampaikan ternyata telah lebih dahulu diagendakan oleh instansi lain. Beberapa materi yang diagendakan tersebut -Sosialisasi pengarsipan sudah dilaksanakan oleh PT Solusi Arsip Indonesia secara gratis yang di selenggarakan dalam rapat internal -Sosialisasi tata naskah dinas ; sudah dilaksanakan oleh bagian	Internalisasi telah dilakukan oleh pegawai yang di tugaskan mengikuti

								gorden, pembuatan taman tidak dapat dilaksanakan. Pengadaan spanduk/baliho hanya di realisasikan sesuai keperluan	Kelebihan anggaran di jadikan sebagai silfa APBD.
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	790.530.406	Terlaksanan ya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah = 15 paket	511.450.000 (64,70%)	Terlaksanan ya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah = 9 paket	-Belum selesainya pembangunan kantor Disdukcapil sehingga pengadaan barang seperti Kursi sofa costum dan meja partisi tidak dapat dilaksanakan -Terkait pengadaan barang tak berwujud, Adanya pemberitahuan bahwa tidak dibenarkan membangun aplikasi pengarsipan mengingat sudah ada aplikasi SRIKANDI yang	-Di upayakan dianggarkan Kembali apabila bangunan kantor disdukcapil sudah selesai -Tidak merealisasikan anggaran agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

								digunakan saat ini	
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2.359.609.088	Terlaksananya kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah = 12 bulan	1.669.885.601 (70,77%)	Terlaksananya kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah = 12 bulan	Hanya di realisasikan sesuai keperluan Tagihan listrik dan air tidak dapat dibayarkan mengingat bangunan kantor disudutkan belum selesai Belanja pakaian adat daerah dan belanja penghargaan untuk penuntut/ahli waris penuntut berdirinya Kabupaten Tabalong tidak dapat dibayarkan mengingat tidak adanya festival budaya daerah seperti tahun lalu.	Kelebihan anggaran di jadikan sebagai silfa APBD elebihan anggaran di jadikanD
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	396.680.000	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	270.195.016 (70,80%)	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Banyaknya sisa anggaran disebabkan biaya pemeliharaan untuk 4 unit mobil operasional baru tersedia saat	Kelebihan anggaran di jadikan sebagai silfa APBD elebihan anggaran di D

					pemerintahan daerah = 62 unit		pemerintahan daerah = 55 unit	APBD perubahan, sedangkan penganggaran untuk 1 unit mobil berdasarkan standar satuan harga adalah pertahun Belanja pemeliharaan alat dan mesin Hanya di realisasikan sesuai keperluan	
			Jumlah	17.246.779.704		14.298.523.439			

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Dukcapil, 2024

g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Urusan Wajib Bukan Pemerintahan	Pengoptimalan Proses Perencanaan dan Implementasi di DPMD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	10 Dokumen	Anggaran dialihkan ke sub kegiatan lain	

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.307.160.000	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	4.474.167.029	26 Dokumen	-	-
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.334.947.068	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	1.094.807.014	100%		
Urusan wajib bukan pelayanan dasar			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	541.450.799	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.783.491	100%	-	-
Urusan wajib bukan pelayanan dasar			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	527.848.917	Terfasilitasinya pemeliharaan barang milik DPMD	470.743.133	100%		
Urusan wajib bukan pelayanan dasar	Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Desa dan Pembinaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat	1.917.917.209	1. Jumlah BUMDesa yang terbentuk (121 Bumdes) 2. Persentase BUMDesa yang aktif (65%) 3. Persentase BUMDesa yang	1.563.559.331	1.121 BUMDesa 2. 70% 3. 75% 4. 5 Kelompok 5. 30% 6. 1 LPM 7. 4 Kelompok 8. 100% 9. 100% 10. 100%	-	-

			tingkat daerah kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten		Berkembang (60%) 4. Rata-rata jumlah kelompok Binaan LPM (4 kelompok) 5. Persentase LPM aktif (20%) 6. Persentase LPM Berprestasi (1 LPM) 7. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (4 Kelompok) 8. Persentase PKK Aktif (100%) 9. Persentase Posyandu Aktif (100) 10. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (45%) 11. Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat (45%)	11. 100%		

	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.144.628.346	1. Persentase desa dengan perencanaan yang baik (90%) 2. Persentase desa dengan pengelolaan keuangan dan asset yang baik (90%) 3. Persentase desa dengan administrasi umum desa yang baik (90%) 1. Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan dengan baik (90%)	3.779.240.144	1. 90% 2. 90% 3. 90% 90%		
	Pembinaan Penataan dan Pengembangan Kewilayahan Desa	Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	18.164.169.680	1. Persentase Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (100%) 2. Jumlah sarana transportasi yang dibangun (2 buah) 3. Jumlah desa yang telah ditetapkan batas wilayah desa (121 Desa)	18.153.491.678	1. 100% 2. 2 Buah 3. 121 1.		

					4. Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk (1 Kawasan)				
		Program Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	409.399.719	Jumlah Kerjasama Desa yang dibuat (2 Kerjasama)	347.899.161	-		-

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

h. Dinas Perhubungan

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Rutin Pemerintahan (Non Teknis)	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	110.848.445	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. (21 Dokumen).	110.475.839	21 dokumen	-Adanya keterlambatan pengumpulan SPJ dari tiap bidang -Adanya keterlambatan pengumpulan data dari tiap bidang	- Dilakukan pengecheckkan berkala dan saling mengingatkan ke semua bidang yang bersangkutan agar dilakukan pengumpulan SPJ tepat waktu - Memberi Batas waktu pengumpulan data dan komitmen semua bidang dimana kabid selaku penanggung jawab data setiap bidang untuk

									mengumpulkan data tepat waktu
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	7.593.878.000	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. (14 bulan)	6.599.982.094	14 bulan	Hanya dapat dibayarkan sesuai dengan jumlah ASN Tahun 2024, maka target anggaran yang seharusnya 7.593.878.000 dan direalisasikan sebesar 6.599.982.094.	Pagu Anggaran yang diberikan oleh Bapperida untuk gaji dan tunjangan ASN tidak bisa direalisasikan 100%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	103.834.000	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi (100%)	82.506.103	100%	Realisasi Anggaran sesuai dengan jumlah ASN dan Jumlah Pelatihan yang Dikuti Asn pada Tahun 2024	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	975.452.456	Indeks Pelayanan Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan. (78 BB)	888.574.135	(82 BB)	- Belanja Komponen Instalasi listrik sesuai dengan kebutuhan. -Untuk belanja Modal Peralatan maupun perlengkapan kantor sesuai dengan kesepakatan negosiasi harga dengan penyedia dan kontrak	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	4.493.535.644	Indeks Pelayanan Kepuasan Terhadap Layanan	4.324.218.778	(82 BB)	Ada beberapa Non PNS yang resign sehingga anggaran gaji tidak di realisasikan	Menganggarkan sesuai kebutuhan namun tidak dapat di prediksi

					Kesekretariatan. (78 BB)				apabila ada non pns yang resign
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	536.880.326	Indeks Pelayanan Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat (78 BB)	523.695.372	(82 BB)	Disesuaikan dengan Kebutuhan untuk Kegiatan tersebut	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
	1. Meningkatkan aksesibilitas dan pergerakan distribusi orang dan barang dan jasa. 2. Meningkatkan keamanan dan keselamatan lalu lintas jalan, sungai / danau dan Udara. 3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ).	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota.	1.139.999.835	Persentase terhadap perlengkapan jalan yang diusulkan dan direalisasikan. (100%)	936.926.287	100 %	Sudah dilaksanakan 100%, Dibayarkan sesuai dengan Perjanjian Kontrak dengan Penyedia	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi

			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.	24.584.109	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe C. 100%	24.524.109	100%	udah dilaksanakan 100%	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
			Penerbitan Izin Penyelenggara n Dan Pembangunan Fasilitas Parkir.	75.083.249	Persentase Terhadap Penyelenggar aan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang di izinnya diterbitkan sudah terealisasikan. (100%)	74.253.416	100%	Sudah dilaksanakan 100%	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.362.060.225	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang telah melakukan pengujian. (4.500 KBWU)		4.320 KBWU	Kendaraan tidak melakukan uji berkala karena telah diterapkannya penertiban terhadap kendaraan yang Over Dimensi dan Over Load (ODOL), sesuai aturan kemenhub, no SE 21 Thn 2019 tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan/atau	Perlu dilakukan penindakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di jalan, terhadap kendaraan yg terbukti dan dilakukan penyesuaian target jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

								Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension)/ ODOL	
			Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.	4.866.770.015	Persentase Terhadap Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kot a. (100%)	4.743.543.559	100 %	Ada di keterangan	• Ada di keterangan
				Keterangan: Permasalahan : 1. Tugas dan Fungsi Jabatan untuk pelaksanaan Kegiatan yang ada masih banyak tumpang tindih dan tidak bersesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 2. Banyaknya permintaan atau hasil survey yang belum terpenuhi seperti Marka , Rambu-rambu (baik Portabel/ Permanen) dan Traffic Cone dari Instansi dan Masyarakat guna keperluan pengamanan kegiatan yang memanfaatkan jalan; 3. Banyak Marka Jalan/Jebra Cross, Jalur Sepeda, Ruang Henti Kendaraan Roda 2 yang berada di Dalam atau di Luar Wilayah KTL (Kawasan Tertib lalu Lintas) yang belum ada atau sudah Tidak terbaca; 4. Banyak permasalahan kondisi keselamatan pengguna jalan yang harus diselesaikan terkait Manajemen Rekayasa lalu lintas yang harus diselesaikan atas kesepakatan Lintas SKPD dan Instansi Vertikal pemangku kebijakan, baik itu di Wilayah KTL atau Luar KTL; 5. Terkait ATCS yang sekarang sudah menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Tabalong; 6. Adanya keterbatasan anggaran Upaya Mengatasi Permasalahan : 1. Koordinasi Untuk disesuaikan oleh Pemangku Kebijakan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; 2. Dengan dihibahkan sesuai Prioritas; 3. Pelaksanaan Rehab dan Pengadaan menyesuaikan kemampuan Keuangan Daerah dengan Memprioritaskan sasaran dengan menimbang Urgensi dan keselamatan pengguna jalan; 4. Berkoordinasi dengan Instansi terkait melalui rapat-rapat walaupun dari sisi Dana Anggaran Rapat kecil sehingga Menyesuaikan kemampuan Anggaran dan Memprioritaskan sasaran dengan menimbang Urgensi sehingga kadang permasalahan baik dari laporan Masyarakat di himpun untuk di bahas; 5. Perlu Perhatian kepada para operator ATCS dan khususnya Pendanaan untuk Perawatan, Perbaikan dan Pengembangan; 6. Adanya usulan tambahan anggaran.					
			Persetujuan Hasil Analisis	45.000.000	Persentase Hasil Analisis	44.495.300	100 %	Ada di keterangan	• Ada di keterangan

			Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota.		Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang disetujui. (100%)				
				Keterangan: Permasalahan : 1. Pejabat yang seharusnya melaksanakan Tugas dan Fungsi Jabatan untuk pelaksanaan Kegiatan tidak ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong; 2. Dasar Hukum dan Standarisasi pelaksanaan kegiatan yang belum terarah jelas dan teruku; 3. Ketersediaan Data yang sangat minim; 4. SDM Bersertifikat di DISHUB sangat sedikit; 5. Kesadaran pelaku yang seharusnya melakukan ANDALALIN di Kabupaten Tabalong sangat kurang; 6. Adanya keterbatasan anggaran Upaya Mengatasi Permasalahan : 1. Pengisian terhadap Jabatan yang seharusnya ada oleh Pemerintah Daerah; 2. Pembuatan SOP; 3. Hal yang umum terjadi, sehingga kadang dalam pelaksanaan kurang memenuhi target; 4. Pelaksanaan sertifikasi bagi Karyawan yang memenuhi syarat; 5. Pelaksanaan sosialisasi dan penegasan terhadap Perijinan lain yang saling keterkaitan; 6. Adanya usulan tambahan anggaran					
			Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan.	400.762.880	Persentase terhadap permintaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang dipenuhi. (100%)	366.176.660	100 %	1. Adanya keterbatasan anggaran terkait Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan yang berkaitan akan pelaksanaan penugasan personil 2, adanya permasalahan keterbatasan anggaran untuk perbaikan unit operasional (akibat laka) dan BBM yang mengakibatkan sulitnya melaksanakan kegiatan.	1. adanya usulan tambahan anggaran 2. usulan anggaran perbaikan unit atau pengadaan unit baru sebanyak 2 (dua) unit

			Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	1.751.070.208	Persentase terhadap jaringan jalan kabupaten (trayek) yang dapat dilayani angkutan orang/barang (100%)	1.686.432.754	100 %	Sudah dilaksanakan 100%	Namun untuk biaya pemeliharaan angkutan beroda 3 tidak dapat direalisasikan.
			Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.945.410	Persentase terhadap usulan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas yang ditetapkan pemerintah daerah (100%)	32.110.397	100 %	Sudah dilaksanakan 100%	Adanya penambahan 6 Rute yang dijangkau pada tahun 2024
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.991.991	Persentase permintaan izin trayek/ kartu pengawasan yang ditindaklanjuti (100%)	54.106.000	100 %	Sudah dilaksanakan 100%	Adanya penambahan jumlah trayek sebanyak 6 buah pada tahun 2024

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Perhubungan, 2024

i. Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.575.000	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen Persentase Kenaikan Nilai komponen Pelaporan pada Lakip Diskominfo 77,53 BB	50.029.899	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen Persentase Kenaikan Nilai komponen Pelaporan pada Lakip Diskominfo 77,58 BB	Pada prinsipnya semua sudah terlaksana hanya ada item Perjadin yang tidak semua terealisasi	Melakukan evaluasi terhadap rincian kegiatan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.660.095.000	Tersedianya Gaji dan Tunjangan 14 bulan	5.926.082.436	Tersedianya Gaji dan Tunjangan 14 bulan	Penyiapan Gaji dan tunjangan	Anggaran yang tersedia telah terealisasi dan terlaksana
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						

			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60.000.000	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut 30 Orang	38.648.649	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut 29 Orang	Sesuai dengan kebutuhan ASN yang ada di Diskominfo	Penyesuaian harga dgn SBU yg ada dan Jumlah ASN yg masih aktif.
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	243.500.000	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	137.258.000	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Adanya beberapa Diklat dan Pelatihan yang tidak sempat diikuti	Penganggaran dan pemilihan diklat lebih terencana lagi di tahun depan.
			Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.877.900	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Item	8.127.000	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Item	Belum terserapnya anggaran dengan baik.	Adanya Rehab Kantor di Tahun 2024 dan Penganggaran lebih terencana lagi kedepannya
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.616.282	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Macam	49.902.500	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Macam	Penyusunan Angkas di Triwulan III/IV sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaan PBJ Peralatan dan perlengkapan kantor	Penganggaran dan pembagian Angkas di Tahun 2025 lebih selektif dan terencana dengan baik.

			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.087.100	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan 2 item	8.254.437	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan 2 item	Sesuai dengan kebutuhan	Penganggaran lebih terencana lagi
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4 item	1.970.000	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan 4 item	Sesuai dengan kebutuhan	Penganggaran lebih terencana lagi
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	611.011.331	Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Daerah, luar Daerah dan Bimtek	334.291.909	Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Daerah, luar Daerah dan Bimtek	Sesuai dengan kebutuhan dan tidak diikutinya beberapa Bimtek / Diklat.	Penganggaran lebih terencana lagi
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	384.714.182	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	362.100.000	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja barang Sesuai dengan standar harga	Sesuai dengan harga
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	298.200.000	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 item	180.516.078	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 item	Sesuai dengan Tagihan/Struk	Antisipasi Kenaikan Tarif
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	482.673.341	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	407.773.974	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sesuai Kebutuhan	Penganggaran lebih terencana lagi
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	374.510.000	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	216.736.416	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sesuai Kebutuhan	Penganggaran lebih terencana lagi
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	257.172.767	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196.517.829	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan rehab ruangan.	Penganggaran akan dilakukan lebih terencana lagi

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.380.000	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.220.000	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sesuai dengan Kebutuhan	Kedepan akan disesuaikan dengan kebutuhan yang riil.
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota						
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	78.857.496	40 aduan yang terdistribusi kepada SKPD yang menangani	44.165.518	42 aduan yang terdistribusi kepada SKPD yang menangani	SP4N LAPOR belum banyak diketahui oleh masyarakat sebagai wadah untuk pengaduan.	Melakukan sosialisasi SP4N LAPOR yang lebih masif.
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3.226.523.000	2880 Berita informasi publik yang dipublikasikan oleh LPPL	3.013.471.112	7320 Berita informasi publik yang dipublikasikan oleh LPPL	Sesuai dengan Kebutuhan	Penganggaran lebih terencana lagi
			Layanan Hubungan Media	3.990.074.325	3000 Viewer konten berita yang di publikasikan oleh mitra media online dan cetak	3.731.028.325	3023 Viewer konten berita yang di publikasikan oleh mitra media online dan cetak	Sesuai dengan Kebutuhan	Anggaran yang tidak terserap semata utk anggaran berjaga-jaga (buffer) apabila jumlah viewer pembaca melebihi dari target yg ditetapkan dalam MoU kerjasama.

		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota						
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.045.402.026	% Peningkatan jumlah unit kerja di lingkup pemerintah daerah yang terfasilitasi internet Pemerintah Daerah	3.727.712.497	Terjadi peningkatan jumlah unit kerja di lingkup pemerintah daerah yang terfasilitasi internet pemerintah daerah	Masih terjadi beberapa gangguan koneksi internet yang disebabkan oleh force majeure (petir)	Unit Kerja yang terkoneksi menggunakan radio akan diganti dengan kabel optik
			Pengelolaan <i>e-Government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota						
			Penatalaksanaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	379.445.640	% Tersusnya dokumen review Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE	282.456.006	Dokumen Review Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE tersusun 100%	Sosialisasi dokumen kepada seluruh PD masih kurang optimal	Mempersiapkan rencana optimalisasi sosialisasi dokumen kepada seluruh PD

			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	411.520.214	Litbang Aplikasi untuk mendukung pelaksanaan SPBE 20%	349.124.909	Terjadi peningkatan sebesar 250% dari target Litbang Aplikasi	-	-
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	840.952.984	Tersedianya layanan jaringan informasi pada Desa dan fasilitas umum Wilayah Kabupaten Tabalong	537.469.033	Tersedianya layanan jaringan informasi pada Desa dan fasilitas umum Wilayah Kabupaten Tabalong	Anggaran yang dibayarkan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan	Perencanaan Anggaran harus sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	200.968.800	Tersedianya 7 dokumen Kabupaten Tabalong Tahun 2024	153.886.872	Tersedianya 5 dokumen Kabupaten Tabalong Tahun 2024, yaitu : Buku Ringkasan Metadata Statistik Kabupaten Tabalong, Laporan Hasil Penilaian Mandiri EPSS, Laporan Pelaksanaan Bimtek Metadata, dan Laporan Pelaksanaan	Kesalahan identifikasi kewenangan walidata	Walidata bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan statistik dan fasilitasi terhadap pembinaan statistik

							Sosialisasi Pemanfaatan Big Data di Kabupaten Tabalong		
			Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	87.595.000	Meningkatnya kapasitas SDM	53.511.000	Terlaksananya dua kali kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM (Bimtek Penyelenggara n Statistik Sektoral dan Sosialisasi Pemanfaatan Big Data di Kab.Tabalong)	Waktu efektif penggunaan anggaran perubahan tidak memungkinkan untuk melakukan rekrutmen tenaga ahli	Perlu diadakan kembali kegiatan pembinaan yang sama dalam rangka pemahaman dan peningkatan mutu dan kapasitas pengelola data statistic bagi semua OPD
			Membangun Metadata Statistik Sektoral	66.093.756	Tersedianya Dokumen Metadata	17.260.000	Tersedianya Dokumen Metadata Statistik	Kesalahan dalam penyusunan anggaran, yaitu tidak adanya belanja sewa Gedung untuk kegiatan sosialisasi dan pembinaan penyusunan statistik	Memastikan Kembali ketepatan penyusunan rencana kegiatan
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	140.787.276	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan	113.270.087	Terlaksananya dua kali kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM (Bimtek Penyelenggara n Statistik Sektoral dan Sosialisasi Pemanfaatan Big Data di Kab.Tabalong)	Adanya kemungkinan pergantian SDM yang menangani data di masing-masing OPD	Perlu diadakan kembali kegiatan pembinaan yang sama dalam rangka pemahaman dan peningkatan mutu dan kapasitas pengelola data statistic bagi semua OPD

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota						
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	101.866.153	Tersedianya kebijakan tata Kelola keamanan informasi	87.388.047	Tersedianya 3 dokumen rancangan Peraturan Bupati	Proses penetapan memerlukan waktu dan proses yang lebih Panjang karena belum ada KDH definitif	Dilanjutkan tahun 2025
			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	197.129.192	Tersedianya laporan analisis kebutuhan	168.836.072	Tersedianya dokumen laporan analisis kabutuhan	Hasil analisis menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong khususnya dalam lingkup pengelolaan pusat data belum layak dalam hal implementasi ISO 27001:2022	Dilakukan perbaikan tahun 2025

			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	62.313.019	Pengamanan Tehnologi Informasi (IT) Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong 50 Dokumen	31.118.026	Pengamanan Tehnologi Informasi (IT) Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong 50 Dokumen	Kesadaran terhadap keamanan Informasi di tingkat perangkat daerah masih cukup rendah, hal ini dapat dilihat dari rendahnya partisipasi dalam sosialisasi tentang Keamanan Informasi	Diseminasi, sosialisasi, dan pembinaan tentang Keamanan Informasi akan terus ditingkatkan.
	TOTAL			23.490.741.784		20.263.126.631			

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Kominfo, Tahun 2024

j. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatkan Kapasitas Manajemen Usaha	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	74.564.520	67,16%	65.663.070	53,00%	Banyak koperasi yang tidak rutin atau tidak transparan dalam membuat laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, membuat pengawasan menjadi sulit.	memberikan pendampingan langsung kepada koperasi yang mengalami kesulitan dalam menyusun atau melaporkan laporan keuangan.

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatkan kapasitas manajemen usaha	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unti simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	91.148.923	20 KSP/ USP	67.282.809	16 KSP/ USP	Beberapa koperasi tidak memiliki laporan keuangan yang lengkap, jelas, atau terbaru, yang menjadi dasar utama dalam menilai kesehatan koperasi.	memberikan pemahaman dasar tentang laporan keuangan sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mengawasi dan memastikan laporan keuangan yang diberikan pengurus koperasi sudah benar.
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatkan kapasitas manajemen usaha	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	176.038.349	60 orang	146.533.111	60 orang	Setelah bimtek selesai, seringkali tidak ada tindak lanjut atau pendampingan untuk memastikan bahwa peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan sehari-hari koperasi mereka.	Menyediakan layanan pendampingan untuk membantu peserta dalam mengimplementasikan materi yang telah dipelajari.
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing Usaha Koperasi dan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Mikro (Umkm)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan kemudahan Perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pengakuan kepentingan	164.694.960	4 kegiatan	109.575.096	4 kegiatan	Perubahan kondisi pasar atau ekonomi yang tidak terduga (misalnya, inflasi, resesi, atau perubahan regulasi) dapat memengaruhi keuntungan atau kelangsungan usaha yang dijalankan bersama.	Menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan antar mitra untuk memastikan bahwa setiap masalah atau ketidakpuasan dapat dibahas secara konstruktif.

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing Usaha Koperasi dan UMKM	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	1.618.115.000	2 kegiatan	1.149.141.742	2 kegiatan	Banyak UMKM yang belum mampu berinovasi dalam produk atau layanan mereka, sehingga produk yang dihasilkan kurang kompetitif di pasar. Selain itu, mereka juga kurang terbiasa dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas..	Memberikan pelatihan dan insentif untuk UMKM yang melakukan inovasi atau yang berupaya mengadopsi teknologi terbaru.

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, Tahun 2024

k. Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,060,056.00	10 Dokumen	17,433,500.00	10 Dokumen	Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan proses yang terintegrasi oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran	
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan	23,060,056.00	10 Dokumen	17,433,500.00		capaian kinerja tercapai sesuai target yang direncanakan	akan lebih menyesuaikan dengan rencana kegiatan

			ikhtisar Realisasi kinerja SKPD						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,471,987,000.00	14 Bulan	5,047,455,834	14 Bulan		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,471,987,000.00	14 Bulan	5,047,455,834.00		Pembayaran gaji PNS sesuai dengan apa yang tersusun dalam anggaran kas	Pembayaran gaji PNS sesuai dengan apa yang tersusun dalam anggaran kas
			Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	266,632,000	15 orang	190,944,826	15 org	tidak terserapnya anggaran karena honorarium narasumber sesuai dengan serapan dana kontribusi untuk mengikuti diklat kecil,karena diklat yang diikuti hanya perjalanan dinas saja	akan lebih meningkatkan wawasan karyawan/ti di DPMPSTP
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	266,632,000.00	15 orang	190,944,826.00		Kurangnya tenaga ASN yang menguasai bahasa asing khususnya dalam hal promosi penanaman modal	tambahan ASN khususnya yang memiliki keahlian Bahasa dan ASN yang menguasai Informasi Teknologi.
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,896,407,410	111 Item	1,801,886,028	110 item		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	26,117,643.00	2 paket	22,669,000	2 paket	Penyediaan komponen listrik sesuai dengan target	

			n Bangunan Kantor						
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,402,029,799.00	23 paket	1,329,511,000	23 paket	Bertambahnya anggaran karena adanya pergeseran menyesuaikan belanja kegiatan dan tambahan untuk pembelian ginset	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	105,468,780.00	5 paket	90,739,775	5 paket	semua barang persediaan tersedia sampai akhir tahun	Akan mengelola dan menggunakan atk sesuai dengan keperluan
			Peraturan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20,292,626.00	3 paket	20,000,000	3 paket	tercapai sesuai target	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342,498,562.00	110 Laporan	338,966,253.00	110 laporan	anggaran yang ada banyak dimanfaatkan untuk undangan ke provinsi/luar daerah dalam provinsi	akan lebih meningkatkan wawasan sebagai bahan peningkatan pengetahuan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,813,979,200	12 Bulan	1,547,098,970	12 bulan		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	385,900,000.00	12 bln	325,059,628.00	12 bln	tercapai sesuai target ,pembayaran iuran listrik,PDAM dan internet sesuai dengan tagihan	akan lebih meningkatkan kinerja dan sesuai dengan yang telah direncanakan

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,428,079,200.00	12 bln	1,222,039,342.00	12 bln	Target telah tercapai	akan lebih meningkatkan kinerja dan sesuai dengan yang telah direncanakan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	662,394,036	117 Unit	368,393,017	93 Unit		akan lebih meningkatkan pemeliharaan barang milik daerah agar bisa terpelihara
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	379,640,000.00	17 unit	187,989,313.00	17 unit	target tercapai dalam pemeliharaan kendaraan roda 4 ada 5 buah dan 12 unit kendaraan roda 2 namun untuk modifikasi mobil jempol ibi belum terlaksana karena terkendala waktu pelaksanaan	akan lebih meningkatkan pemeliharaan operasional kendaraan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47,564,536.00	105 unit	33,857,000.00	105 unit	Terpeliharanya peralatan dan mesin yang ada d DPMPSTSP dan MPP	akan lebih meningkatkan pemeliharaan peralatan kantor
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	235,189,500.00	1 unit	146,546,704.00	1 unit	Terpeliharanya gedung kantor DPMPSTSP dan MPP serta pembuatan rumahan ginset sesuai dengan perencanaan	akan menganggarkan dana tambahan pemeliharaan gedung kantor

		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi investasi PMDN dan PMA	295,369,000	1,010,000,000,000	228,620,219	3,295,609,227,268.00		
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	47,340,000.00	1 kajian	47,127,632	1 kajian		
			Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kota	47,340,000.00		47,127,632		Pelaksanaan kegiatan diakhir tahun anggran dikarenakan adanya perubahan total rincian kegiatan yang disebabkan pergantian kepala bidang	mengingat masih banyaknya Pelaku Usaha Besar yang bertersosialisasi kewajiban tersebut maka anggaran untuk kegiatan sosialisasi tersebut sangat diperlukan mengingat fakta saat pelaksanaan kegiatan hamper semua Pelaku Usaha Besar tidak memahami kewajiban tersebut bahkan tidak bisa membedakan adakan kemitraan

									dengan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR)
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	248,029,000	1 kajian	228,620,219	1 kajian		
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	248,029,000.00	1 kajian	228,620,219.00		Kurangnya anggaran biaya untuk melakukan kajian potensi investasi untuk semua sektor usaha	sangat diperlukan tambahan anggaran dari pagu yang tersedia mengingat kebutuhan untuk ketersediaan dokumen kajian Pra Feasibility Studi Potensi dan Peluang Investasi Persektor sangat diperlukan sebelum dilanjutkan untuk menjadi dokumen Dokumen Proyek Investasi yang siap ditawarkan (IPRO)
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang berminat menanamkan modal	994,795,999	20 investor	1,357,682,867	20 investor		
			Penyelenggara n Promosi penanaman	994,795,999	20 investor	1,357,682,867	20 investor		Menambah besaran anggaran untuk

			Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						promosi tunggal, sehingga promosi yang dilakukan dapat maksimal serta menganggarkan kegiatan untuk menyusun peta potensi dan peluang investasi dan membuat kajian Investment Project Ready to Offer
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	555,163,270.00	5 kali	549,141,288.00		Kabupaten Tabalong belum memiliki dokumen IPRO (Investment Project to Offer) sebagai produk promosi untuk menarik investor	dalam rangka optimalisasi promosi penanaman modal sangat diperlukan ketersediaan anggaran untuk penyusunan dokumen IPRO (Investment Project Ready To Offer) atau Dokumen Proyek Investasi yang siap ditawarkan yang berskala internasional dan berbasis kebutuhan penanaman modal (investor needs) dan ini mutlak harus dimiliki daerah

									untuk dapat mempromosikan potensinya
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	439,632,729.00	5 kali	397,803,052.00		Penyusunan kajian dilaksanakan pada akhir tahun anggaran dikarenakan adanya perubahan kegiatan inti yang dikarenakan pergantian Kepala Bidang dan PPTK	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Skor Standar Kepuasan Masyarakat	661,512,017	90	410,738,527	95.76	tercapainya kinerja dari target 90 terealisasi 95.76	akan lebih meningkatkan kinerja SKM
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	661,512,017	2500 izin	410,738,527	3620 Izin	capaian melebihi target	Melakukan kegiatan inovasijempol ibu (Jemput Bola Pelayanan Perizinan Berusaha)dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ada diluar kota tanjung untuk membuat izin usaha mereka tanpa jauh-jauh datang meluangkan waktu ke tanjung untuk mengurus izin usaha dan

									dengan bertambahnya sarana untuk kegiatan tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan kegiatan jempol ibu sampai kedesa-desa
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	413,280,256.00	480 Pelaku usaha	287,227,563	571 Pelaku Usaha	target sesuai rencana tercapai dengan	Akan menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	167,332,059.00	127 Kegiatan Usaha	123,510,964	221 Kegiatan Usaha	realisasi anggaran masih banyak tersisa karena honor tim teknis perizinan hal ini disebabkan ada beberapa anggota tim teknis yang promosi dan dimutasi sehingga tidak lagi termasuk dalam tim	akan lebih memaksimalkan anggaran sesuai peruntukannya
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan	80,899,702.00	20 Pelaku Usaha	57.699.202	21 Pelaku Usaha		

			Terpadu Perizinan dan Non Perizinan						
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian pelaksanaan modal dan informasi penanaman modal	867,313,519	84%	597,759,737	68.92%		
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	867,313,519	84%	597,759,737	68.92%	Pelaku usaha tidak ada dilokasi kegiatan usaha, hanya pekerja saja yang berada di lokasi sehingga menyulitkan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	Membuat agenda pamantauan yang jelas sehingga pelaku usaha bisa mengkondisikan waktunya
			Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya]	126,158,976.00	80 kali	11,916,500.00	31 keg usaha	Lokasi tempat usaha yang berpindah pindah	melakukan pendekatan personal kepada pelaku usaha agar pelaku usaha mentaati peraturan yang ada
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	456,940,823.00	90 pelaku usaha	409,378,100.00	313 Pelaku Usaha	Masih banyak pelaku usaha yang belum mengerti tentang Nomor Induk Berusaha	Memberikan pemahaman tentang NIB melalui Bimtek
			Pengawasan Penanaman Modal	284,213,720.00	80 pelaku usaha	176,465,137.00	136 Pelaku usaha	Alamat Usaha yang terdaftar berbeda dengan kegiatan usaha	melakukan pendekatan personal kepada pelaku usaha agar pelaku usaha mentaati

									peraturan yang ada
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengelolaan data dan informasi penanaman modal	1,100,865,164	100%	852,628,602	100%		
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,100,865,164.00	2 sistem	852,628,602	2 sistem		Melaksanakan pengembangan palit online terintegrasi dengan 7 SKPD teknis
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	1,100,865,164.00	2 sistem	852,628,602.00		- Website terkena hacking sehingga menghambat proses penyajian data dan informasi - Ada terjadi selisih spesifikasi yang di rencanakan dengan harga pasar yang tersedia	Pembuatan website bari sesuai saran Dinas Kominfo dan Pengadaan Videotron Outdoor untuk penyeber luasan informasi

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Tahun 2024

I. Dinas Kepemudaaan, Olah Raga dan Pariwisata

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisata	1.777.955.095	1.020.000 Orang	1.460.496.911,00	858.295 Orang		
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata serta Sarana dan Prasarana Pariwisata yang dikembangkan dan terpelihara	1.777.955.095	7 Kegiatan	1.460.496.911,00	7 Kegiatan		
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	263.069.126,00	4 Lokasi	176.730.753,00	3 Lokasi	Ada 1 kegiatan peningkatan wawasan SDM pokdarwis yang tidak dapat terlaksana karena berbarengan dengan kegiatan yang diadakan di Banjarmasin	
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1.228.888.014	7 unit	1.132.619.022,00	7 Unit	-	

			Pariwisata Kabupaten/Ko ta							
			Pemberdayaa n Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Ko ta	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	285.997.955	4 Kegiatan	151.147.136,00	2 kegiatan	Ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Mini Expo Ekonomi Kreatif karena waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan RIPPARDA dan Lomba Destinasi antar Pokdarwis dikarenakan kurangnya minat anggota pokdarwis untuk mengikuti lomba	Akan lebih teliti dan cermat dalam merencanakan waktu pelaksanaan dan melakukan pembinaan kepada anggota pokdarwis
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten	1.949.831.835	3 Persen	1.577.573.546, 00	Belum rilis dari BPS		
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/K ota	Jumlah Kegiatan Pemasaran / Promosi Pariwisata	1.949.831.835	14 Kegiatan	1.577.573.546, 00	8 Kegiatan		
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik	1.491.684.050	4 Kegiatan	1.224.124.993, 00	4 Kegiatan	-	

			dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dalam dan Luar Negeri						
			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	458.147.785	4 dokumen	353.448.553,00	3 dokumen	Terdapat 1 kegiatan yang tidak terlaksana karena ada kegiatan yang dilaksanakan provinsi yang bersamaan dengan kegiatan kabupaten lain (Launching Calender of Event dengan Festival Saijaan)	Melakukan koordinasi dengan Dispar Provinsi mengenai jadwal event sehingga dapat disesuaikan dengan jadwal kabupaten
				J U M L A H	26.643.490.319		23.334.204.702,01			

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Porapar, Tahun 2024

m. Dinas Pendidikan (Bidang Kebudayaan)

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan	Meningkatnya pengelolaan cagar budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.239.613.014,00	100	1.880.773.756,00	83,98	-	-
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.455.546.638,00	100	1.214.511.390,00	83,44	-	-

	Meningkatnya pengelolaan seni budaya daerah	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Perlindungan Cagar Budaya	866.703.193,00	100	807.039.630,00	93,12	-	-

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.252.227	6	66.394.095	6		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.979.000	2 Dokumen	9.930.000	2 Dokumen		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	1.000.000	1 Dokumen	843.800	1 Dokumen		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	1.500.000	1 Dokumen	1.437.420	1 Dokumen		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD	1.250.000	1 Dokumen	1.193.780	1 Dokumen		

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD	1.750.000	1 Dokumen	1.626.560	1 Dokumen		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000	9 Laporan	315.300	Laporan		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.773.227	3 Laporan	51.047.235	Laporan		
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	5.989.613.050		5.617.573.336			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.939.516.000	27 Orang/ Bulan	5.569.308.886	7 Orang/ Bulan	-	-
			Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian / Vertifikasi Keuangan SKPD	114.550	300 Dokumen	102.900	00 Dokumen	-	-
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	199.500	12 Dokumen	179.700	2 Dokumen	-	-

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.196.000	1 Laporan	29.679.150	Laporan	-	-
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	18.392.000	18 Laporan	18.127.200	8 Laporan	-	-
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	195.000	18 Dokumen	175.500	8 Dokumen	-	-
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000		29.650.000			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	1 Orang	29.650.000	Orang	-	-
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	784.396.175		731.838.045			

		Kabupaten/ Kota							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	8.714.301	10 Paket	6.856.000	0 Paket	-	-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.184.009	3 Paket	96.941.600	Paket	-	-
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.380.548	1 Paket	8.267.000	Paket	-	-
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.184.317	4 Paket	18.725.837	Paket	-	-
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	5.964.000	3 Dokum en	5.936.000	Dokume n	-	-
			Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	617.969.000	88 Lapora n	595.111.608	8 Laporan	-	-
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	145.495.173		123.171.169			

			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.710.858	20 Unit	91.081.079	0 Unit	-	-
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.784.315		32.090.090			
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.095.479.000		804.444.225			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.810.000	12 Laporan	92.079.867	2 Laporan	-	-
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	927.669.000	12 Laporan	712.364.358	2 Laporan	-	-
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.803.622.132		1.563.288.846			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	293.110.000	17 Unit	193.736.250	7 Unit	-	-

			Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.842.565	39 Unit	28.321.000	9 Unit	-	-
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.477.669.567	2 Unit	1.341.231.596		Karena Keterbatasan waktu untuk Memproses Tender	Diprogram kembali di waktu yang akan datang
Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar	Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.242.558.336		1.190.170.614		-	-
	Meningkatkan Layanan dan Otomasi Perpustakaan		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	175.253.776	2 Layanan	169.783.899	Layanan	-	-
	Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan		Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar	53.179.750	19 Perpustakaan	42.654.400	9 Perpustakaan	-	-

			Nasional Perpustakaan						
	Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	1.098.595	5 Perpustakaan	1.073.500	Perpustakaan	-	-
	Meningkatkan Layanan dan Otomasi Perpustakaan		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	283.144.726	5 Layanan	271.751.228	Layanan	-	-
	Melaksanakan Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka		Pengembangan Bahan Pustaka	715.780.539	462 Eksemplar	691.627.615	48 Eksemplar	-	-
	Melaksanakan Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	14.100.950	725 Eksemplar	13.279.972	.304 Eksemplar	-	-
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	686.438.675		650.321.020			
	Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	84.571.893	4 Lokus	81.817.000	Lokus	-	-
	Meningkatkan Layanan dan		Pembangunan dan Pemeliharaan	131.963.740	2 Perpustakaan	125.809.886	Perpustakaan	-	-

	Otomasi Perpustakaan		Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
	Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	136.956.638	11 Orang	130.196.150	1 Orang	-	-
	Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	323.153.617	25 Perpustakaan	302.772.984	5 Perpustakaan	-	-
	Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.792.787	1 Orang	9.725.000	Orang	-	-
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembinaan Kearsipan	Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	198.737.393		185.846.069			
	Meningkatkan Pembinaan Kearsipan		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	20.042.380	25 Berkas	19.990.914	.809 Berkas	-	-
	Meningkatkan Pembinaan Kearsipan		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	79.184.104	31 Berkas	78.187.861	.211 Berkas	-	-
			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten / Kota	99.510.909	8 Laporan	87.667.294	1 Laporan	-	-

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Melaksanakan Akuisisi Arsip pada Perangkat Daerah	Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	74.604.860		69.810.541			
	Melaksanakan Akuisisi Arsip pada Perangkat Daerah		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	74.604.860	950 Arsip	69.810.541	.437 Berkas	-	-
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	354.749.520		345.012.623			
	Meningkatkan Sarana dan Prasarana		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Melalui JIKN	263.932.935	50 Pengguna	262.451.323	.113 Pengguna	-	-
	Meningkatkan Sarana dan Prasarana		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	90.816.585	8 Laporan	82.561.300	Laporan	-	-
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Melakukan Pemusnahan Arsip	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	116.446.218		112.614.821			

			yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun						
	Melakukan Pemusnahan Arsip		Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	116.446.218	3851 Arsip	112.614.821	.466 Arsip	-	-
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Melakukan Pemusnahan Arsip	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten / Kota	113.994.428		106.338.740			
			Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	113.994.428	100 Arsip	106.338.740	14 Arsip	-	-
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Melakukan Pemusnahan Arsip	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Digabung dan /atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa / Kelurahan	163.993.186		158.925.115			

			Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	163.993.186	250 Arsip	158.925.115	50 Arsip	-	-

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2024

3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

Tabel III.3.
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan

a. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Bidang Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura)

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Melakukan upaya – upaya untuk meningkatkan layanan Sekretariat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Indeks layanan kesekretariatan	34.191.132.682	B (75)	30.430.108.087	B (77,63)		Indeks Layanan Kesekretariatan dihitung berdasarkan hasil survey pada akhir tahun 2024
	Meningkatkan pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparat perencana		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	535.518.357	15 Dokumen	476.611.338	15 Dokumen		Dokumen perencanaan yang sudah adalah : DPA 2024, LKPJ 2023, LPPD 2023, Monev Renja T4 2023, Laporan Realisasi IKU T4 2023 (Triwulan I), Monev Renja T1 2024, Laporan Realisasi IKU T1 2024 (Triwulan II), RKAP 2024, RKA 2024, Laporan Realisasi IKU T3 2024 dan Monev Renja T3

										(Triwulan III), DPPA 2024, Laporan RUP RKPA 2024, Laporan RUP RKA 2024
	Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan ASN dengan tepat waktu		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	24.233.771.000	14 Bulan	21.568.056.190	14 Bulan		Telah dibayarkan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 119 orang
	Meningkatkan pelaksanaan diklat – diklat formal dan penunjang kompetensi ASN		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Diklat pegawai	284.969.951	29 orang	253.623.256	15 orang	Hanya ada 15 orang yang mengikuti Diklat berbayar pada tahun 2024 dikarenakan kurangnya informasi pelaksanaan Diklat oleh lembaga - lembaga resmi pelaksana Diklat	Akan mencari informasi pelaksanaan Diklat untuk ASN
	Menyediakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2.875.285.083	101 unit	1.695.192.276	101 unit		Untuk perencanaan tahun mendatang akan lebih mencermati syarat TKDN yang dimiliki oleh suatu produk barang
	Menyediakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Belanja Modal Barang Milik Daerah penunjang yang disediakan	1.782.336.252	219 unit	1.586.279.264	219 unit		Untuk perencanaan tahun mendatang akan lebih mencermati syarat TKDN

			Pemerintahan Daerah							yang dimiliki oleh suatu produk barang
	Menyediakan kebutuhan jasa komunikasi, jasa air dan jasa listrik kantor		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa telepon / internet, jasa air dan jasa listrik	2.630.542.400	12 Bulan	2.341.182.736	12 Bulan		Jumlah anggaran telepon, listrik dan air sudah memenuhi kebutuhan selama 1 tahun
	Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan, perlengkapan serta sarana dan prasarana kantor		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor ; kendaraan dinas	1.848.709.639	5 Unit ; 88 Unit	1.645.351.579	5 Unit ; 88 Unit		Gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan adalah aula ruangan Kadis, ruangan kerja ASN, pembuatan taman, rehab gedung BPP Kelua dan penambahan daya listrik kantor Sekretariat
Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan	Melakukan upaya – upaya yang dapat menaikkan indeks ketahanan pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		Indeks ketahanan pangan	1.830.226.289	84,72	1.628.901.397	85,94		Indeks Ketahanan Pangan dihitung oleh Badan Pangan Nasional RI
	Membina kelembagaan lumbung pangan, membangun lumbung pangan di Desa dan membangun infrastruktur		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	Jumlah kelembagaan lumbung pangan yang terbina	1.830.226.289	4 Kelompok	1.628.901.397	4 Kelompok		Lembaga Lumbung pangan yang terbina ini merupakan lembaga yang sudah mapan dalam penyediaan beras sebagai

	kemandirian pangan		Kabupaten / Kota							lumbung pangan di Desa. Kelompok Lumbung Pangan yang terbina adalah : Fajar Menyingsing, Makmur Bersama, Harapan Makmur, dan Usaha Bersama
	Melakukan upaya – upaya yang dapat meningkatkan skor pola pangan harapan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan	937.835.501	89,9	834.673.595	92,65		Skor Pola Pangan Harapan dihitung oleh Bidang Ketahanan Pangan
	Membina Gapoktan dan toko – toko tani, memfasilitasi Gapoktan dengan toko – toko tani dan menyusun rencana kebutuhan pangan lokal		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Terbinanya kelembagaan PUPM	231.681.196	4 Kelompok	206.196.264	4 Kelompok		Pembinaan kelompok PUPM yang sudah dilaksanakan yaitu kepada Gapoktan Bangun Banua, Gapoktan Usaha Bersama, Poktan Maluput dan Poktan Tunas Karya Baru
	Mengembangkan komoditas pangan lokal		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan	Jumlah komoditas pangan lokal yang dikembangkan	706.154.305	4 Komoditas	628.477.331	4 Komoditas		Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang

			Pangan Kabupaten / Kota							memiliki nilai ekonomis di masyarakat yaitu jagung manis, ubi kayu, ubi ungu dan bayam
	Melakukan upaya – upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Desa	Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase Desa Tahan Pangan	305.388.726	100%	271.795.966	100%		Persentase Desa Tahan Pangan dihitung oleh Bidang Ketahanan Pangan
	Menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan Kabupaten		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya peta kerentanan dan kerawanan pangan	305.388.726	1 Dokumen	271.795.966	1 Dokumen		Peta kerawanan dan ketahanan pangan sudah disusun dan didistribusikan
	Melakukan upaya – upaya untuk meningkatkan keamanan konsumsi bahan pangan produk pertanian	Pengawasan Keamanan Pangan		Tingkat keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	291.705.223	90%	259.617.648	90%		Tingkat keamanan PSAT dihitung oleh Bidang Ketahanan Pangan selama melaksanakan uji kimia pada produk pertanian selama tahun 2024
	Membina dan memperkuat lembaga keamanan pangan dan melaksanakan pengawasan terhadap komoditas		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah komoditas PSAT terawasi yang	291.705.223	8 Komoditas	259.617.648	8 Komoditas		Pada tahun 2024 ada 8 komoditas yang diawasi yaitu : cabai tiung, cabai besar, cabai keriting, tomat, terong, kacang panjang, bawang merah, bayam

	pangan segar asal tumbuhan									
Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan	Melakukan upaya – upaya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap	Pengelolaan Perikanan Tangkap		Jumlah produksi perikanan tangkap yang ramah lingkungan	444.719.732	2.163,41 ton	395.800.561	2.163,41 ton		Target produksi diharapkan akan kembali mencapai target dengan adanya hibah sarana penangkapan ikan ramah lingkungan pada tahun 2024
	Menyediakan sarana penangkapan ikan ramah lingkungan		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya sarana penangkapan ikan ramah lingkungan	444.719.732	2.586 buah / set	395.800.561	2.586 buah / set		Pengadaan sarana penangkapan ikan ramah lingkungan tahun 2024 dibiayai oleh APBD Kabupaten Tabalong
	Melakukan upaya – upaya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya		Jumlah produksi perikanan budidaya	9.158.787.232	18.053,2 ton	8.151.320.636	18.075,69 ton		Capaian target produksi perikanan budidaya dapat melebihi target karena pada tahun 2024 telah dilaksanakan hibah sarana budidaya pembesaran ikan sebanyak 29 paket

	Menyediakan sarana produksi budidaya pembenihan dan pembesaran ikan		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Tersedianya sarana produksi budidaya pembesaran ikan	5.174.892.242	29 paket	4.605.734.195	29 Paket		Capaian target produksi perikanan budidaya dapat melebihi target karena pada tahun 2024 telah dilaksanakan hibah sarana budidaya pembesaran ikan sebanyak 29 paket
	Mengembangkan pembenihan dan pembesaran ikan		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi bibit ikan UPTD PBAT	3.983.804.990	600.000 ekor	3.545.586.441	297.910 Ekor	Adanya rehab cekdam di Desa Kambitin Raya dan di Desa Nalui yang mempengaruhi suplai air masuk ke kolam	Melakukan pengurangan aktivitas pembenihan di kolam sesuai volume air yang masuk ke kolam
	Melakukan upaya – upaya untuk mengurangi penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Jumlah kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan	580.534.964	0 Kali	516.676.118	4 Kali	Masih ditemukannya kegiatan penangkapan ikan disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan serta kurangnya aparat pengawasan yang dimiliki oleh Dinas	Pada tahun 2023 telah ditemukan 4 kali kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Aparat Pengawas Perikanan sudah berkoordinasi dengan Polsek Banua Lawas, Polsek Pugaan, Polsek Kelua , Polsek Muara Harus dan Polsek Haruai dalam pengendalian

										penangkapan ikan tidak ramah lingkungan.
	Meningkatkan frekuensi pemantauan / pengawasan lapangan bersama aparat kepolisian dan satpol PP ke kawasan penangkapan ikan dan meningkatkan sarana dan prasarana aparat dan kelompok pengawasan		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	Terlaksananya pemantauan kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan di wilayah Kecamatan	580.534.964	12 Kecamatan	516.676.118	10 Kecamatan		Hingga triwulan IV sudah dilaksanakan pengawasan ke 10 Kecamatan. Hanya ada 2 Kecamatan yang tidak ada laporan dugaan kegiatan perikanan tangkap tidak ramah lingkungan
	Melakukan upaya – upaya untuk meningkatkan jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	1.472.421.422	32 ton	1.310.455.066	37,1 ton		Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan melebihi target karena hasil dari pelaksanaan bimtek pengolahan dan diversifikasi hasil perikanan serta pelaksanaan Gemarikan di sekolah – sekolah dasar
	Mengembangkan produk pengolahan hasil perikanan dan produk hasil perikanan		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha	Terlaksananya bimbingan teknis pengolahan dan diversifikasi produk perikanan	1.472.421.422	2 Kali	1.310.455.066	5 Kali		Bimtek pengolahan hasil perikanan dilaksanakan sebanyak 10 kali

	unggulan / ikonik serta meningkatkan atau memfasilitasi pelatihan dan bimbingan teknik pengolahan ikan		Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas KP2TPH, Tahun 2024

b. Dinas Perkebunan dan Peternakan

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN)	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai AKIP (Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) - Nilai IKM (Nilai indeks kepuasan masyarakat SKPD dan skor indeks layanan kesekretariatan)	14.107.615.188	- BB (Sangat Baik) (78.65) - B (Baik) (76.61)	11.215.482.479	- A (71 - 80) - B (Baik) (Nilai indeks layanan kesekretariatan 81,96 Nilai indeks kepuasan masyarakat 82,67)		
			3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	247.748.954	-10 Dokumen - 10 Dokumen	188.955.849	10 Dokumen 10 Dokumen		

			Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran - Dokumen/Laporan perencanaan dan penganggaran - Dokumen proses pelaporan kinerja						
			3.27.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	247.748.954	-10 Laporan	188.955.849	10 Laporan		

			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)						
			3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah -Administrasi Keuangan Tepat Waktu (Bulan) - IKM - Laporan keuangan (LKPD, LO, PE, LRA, Neraca/tahun) - Laporan PAD	7.257.890.375	- 12 - B - 1 - 12	5.882.301.120	- 88,18		
			3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN -Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.229.289.000	364	5.854.537.797	21 3		
			3.27.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	28.601.375	4 Laporan	27.763.323	4 Laporan		

			-Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)						
			3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan BMD Tepat Waktu	12.854.800	-4 Laporan	35.513.018	4 Laporan		
			3.27.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	36.550.000	4 Laporan	35.513.018	4 Laporan		
			3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian	182.904.000	100%	111.200.000	60,80 %		

			Perangkat Daerah Jumlah SDM Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)						
			3.27.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	182.904.000	10	111.200.000	10		
			3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah -Jumlah Laporan Administrasi Umum (Laporan)	924.453.907	4 Laporan	839.973.840	4 Laporan		
			3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	169.652.384	5	161.689.050	5		

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)						
			3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30.994.800	2	30.908.671	2		
			3.27.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10.998.000	1	10.998.000	1		
			3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	595.849.659	1	544.528.119	1		

			Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)						
			3.27.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	116.959.064	1 Dokumen	91.850.000	1		
			3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan BMD	1.044.381.393	- 10 Unit	891.230.072	10 Unit		

			3 27 01 2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.044.381.393	10	891.230.072	10		
			3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah -Tersedianya Penunjang Urusan (Bulan)	1.334.898.095	-12	1.065.266.725	-12		
			3.27.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	15.000.000	4	15.000.000	4		
			3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.000.000	4	114.895.625	4		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)						
			3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.181.898.095	4	935.371.100	4		
			3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah -Jumlah dan Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Jenis)	3.102.483.664	- 2	2.223.704.873	- 2		
			3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	444.147.300	27	369.540.669	27		

			Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)						
			3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.658.336.364	1	1.854.164.204	1		
		3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-Jumlah kelahiran ternak sapi melalui IB (ekor) -Produktivitas karet; Sheet (ton/Ha)	19.268.642.991	447 1,05 210 464	18.723.843.927	724 1,04 633 854		

			-Produktivitas Lada; Biji kering (kg/Ha) -Produksi kopi; Biji kering (kg/ha)						
			3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pernanian Peningkatan Produksi Tanaman : - Karet (ton) - BOKAR bersih (ton) - Lada (ton) - Hijauan pakan ternak (ha)	1.075.708.106		1.019.094.928			
			3.27.02.2.01.00 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah: -Produksi Karet (ton) -Produksi BOKAR Bersih (ton)	1.075.708.106		1.019.094.928		Produktivitas karet melebihi target namun target Produksi tidak tercapai karena (1) Jumlah TTM/ masih seluas 4.77 (Ha); (2) Penyebaran tanaman karet (contohnya GT menurunkan produksi hingga 30-50%; Pemupukan tanaman belum sesuai anjuran selain karet <i>behaviour peket</i> juga; mewaspadai dampak kebijakan penghapusan pupuk bersubsidi untuk	(1)Angka TTM/TR perlu ditekan melalui Program peremajaan; (2) Pengendalian penyakit tanaman karet melalui penyuluhan cara mengatasi dan menghindari penyakit; (3) Penyuluhan pemupukan tanaman serta peningkatan

			-Produksi Lada (ton) -Penambahan UPPB produsen BOKAR BERSIH (unit)					tanaman karet tahun 2023.	penggunaan pupuk organik buatan sendiri maupun pabrikan untuk tanaman karet.
			3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota Peningkatan Produksi Tanaman : - Karet (ton) - BOKAR bersih (ton) - Lada (ton) - Hijauan pakan ternak (ha)	4.769.270.892	61.000 1.500 215 5	4.669.507.600	61.217,63 937 637 10	- Produksi karet sudah mulai meningkat - produksi Bokar Bersih sampai tahun IV 937 t Angka ini mengala peningkatan d tahun sebelum yakni 903 ton. Nam produksi Bokar bel memenuhi tar tahun 2024 sebe 1.500 ton karet petani kesuli mendapatkan pembeku lateks ya disarankan pemerintah	- Memberi kemudahan kepada petani untuk mendapatkan pembeku lateks yang berkualitas
			3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Luas Lahan yang dibudidayakan untuk tanaman: - Karet (Ha) - Hijauan Pakan ternak (Ha) - Kopi (Ha)	4.769.270.892	280 5 20	4.669.507.600	120 10 35		

			3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a Lain Jumlah ternak Komoditi Strategis yang dikembangkan (ekor) -Sapi -Unggas -Kambing	13.423.663.993	-470 -10.350 -500	13.035.241.399	-470 -41.340 -500		
			3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kot a Lain Jumlah ternak Komoditi Strategis yang dikembangkan (ekor): -Jumlah kambing yang dikembangkan (ekor) -Jumlah sapi yang	13.423.663.993	200 150 10.000	13.035.241.399	200 470 41.340		

			dikembangkan (ekor) -Jumlah Unggas yang dikembangkan (ekor)						
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase cakupan yang dapat dilayani oleh prasarana pertanian (%)	16.821.912.109	70	13.712.456.345	61,9		
			3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Pengembangan prasarana pendukung pertanian: - Perkebunan (%) - Kewan, KVM & Peternakan (%) - Penanggulangan dan pengendalian (%)	16.821.912.109	30 28 12	13.712.456.345	32,257 27,026 2,61		
			3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	319.888.581	2	235.485.086	2		

			-Jumlah Penyusunan Dokumen Masterplan/Ac tion Plan (Dokumen)						
			3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan prasarana pendukung pertanian - Perkebunan (%) - Kewan, KMV & Peternakan (%) - Penanggulan n dan pengendalian (%)	16.502.023.528	30 28 12	13.476.971.259	32,257 27,026 2,61		
			3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pendukung kegiatan:	16.502.023.528	30 28 12	13.476.971.259	32,257 27,026 2,61		

			- Perkebunan (%) - Keswan, KMV & Peternakan (%) - Penanggulangan dan pengendalian (%)						
		3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-Persentase Angka Mortalitas Hewan Strategis (%) -Persentase Penyediaan Daging ASUH (%)	1.293.706.978	≤3 75	1.137.337.692	0,54 75		
			3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Cakupan Vaksinasi terhadap luas area pengendalian	633.530.658	90	593.103.161	90		

			dan populasi untuk menekan Penyakit Zoonosis (%)						
			3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Penyediaan bahan obat- obatan: - Pelayanan aktif service (Ternak Besar) (ekor) - Unggas (ekor) - Vaksin Jembrana (ekor) - Vaksin Rabies (dosis) - Vaksin ND/Flu Burung (dosis)	633.530.658		593.103.161			
					3.150 30.000 1.000 2.000 38.000		5.014 70.000 1.000 2.000 45.100		
			3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	198.655.996	3.150 Ekor 30.000 Ekor 38.000 Dosis 2000 Dosis	194.987.700	3.114 ekor 71.041 ekor 39.112 dosis 1.708 dosis 859 dosis		

			Jumlah Penyediaan jasa medik / paramedik veteriner: - Hewan Ruminansia (aktif service) Jumlah Penyediaan jasa medik / paramedik veteriner: - Unggas Jumlah Penyediaan jasa medik / paramedik veteriner: - Vaksinasi Flu Burung Jumlah Penyediaan jasa medik / paramedik veteriner: - Vaksinasi Rabies Jumlah Penyediaan jasa medik / paramedik veteriner: - Vaksin Jembrana		1000 Ekor				

			3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner -Pelayanan Hewan Ruminansia/Ter nak Besar aktif service (Ekor) -Pelayanan ternak Unggas (Ekor) -Vaksinasi Jembrana (Ekor) -Vaksinasi Rabies (Dosis) -Vaksinasi Flu Burung (Dosis)	198.655.996	3.150 30.000 1.000 2.000 37.000	194.987.700	5.385 66.759 812 1.685 38.809		
			3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Penyediaan Daging ASUH (%)	461.520.324	75	349.246.831	75		
			3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran	394.880.000	75	301.331.389	75		

			Hewan dan Produk Hewan Pengawasan Peredaran hewan dan Produk Hewan ASUH (%)						
			3.27.04.2.04.005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan Jumlah Hewan yang dipotong di RPH (Ekor)	66.640.324	230	47.915.442	250		
		3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Cakupan Pencegahan Bencana Pertanian (%)	1.164.014.637	40	916.363.890	40		
			3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota -Persentase Fasilitas Pengendalian OPT	1.164.014.637	40 75 22	916.363.890	40 75 22		

			Perkebunan (%) -Luasan pencegahan kebakaran lahan (ha) -Persentase Fasilitas Penanggulangan bencana kesehatan hewan (%)						
			3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan -Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	915.010.327	1.000	790.632.465	1.000		

			3.27.05.2.01.03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan -Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha) -Terbentuknya kelompok tani peduli api (KTPA) (Kelompok) -Terlaksananya pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) (Kegiatan)	151.015.571	75 3 2	102.707.161	75 3 2		
			3.27.05.2.01.05 Penanggulan n Pasca	97.988.739	650	23.024.264	0	Sehubungan dengan adanya realokasi	Karena kurangnya anggaran

			Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pernakan dan Kesehatan Hewan Jumlah Ternak Sapi yang diasuransikan (ekor); target betina produktif Sosialisasi asuransi ternak					anggaran pada kementerian pertanian sampai saat ini anggaran AUTS/K (Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau) tidak tersedia dan pedoman umum belum terbit oleh kementerian pertanian	untuk premi maka anggaran tersebut di alihkan untuk menambah premi yang tadi nya Rp 40.000 TA. 2023 menjadi Rp 75.000 TA. 2024

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Perkebunan dan Peternakan, Tahun 2024

c. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (bidang Kepemudaan dan Olahraga)

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai AKIP	7.026.162.938,00	BB	5.896.621.530,01	BB		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja	89.535.466	9 Dokumen	55.989.496,00	9 Dokumen		

			Perangkat Daerah							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.948.984	3 Dokumen	19.119.230,00	3 Dokumen	Untuk konsumsi ra tidak terrealis karena kend proses e katalog ya lambat	Proses e katalog akan dipantau secara berkala dan menambah operator e katalog
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.153.592	1 Dokumen	0	1 Dokumen	Untuk konsumsi ra tidak terrealis karena kend proses e katalog ya lambat tet dokumen te terpenuhi/ tersedia	Proses e katalog akan dipantau secara berkala dan menambah operator e katalog
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.153.592	1 Dokumen	0	1 Dokumen	Untuk konsumsi ra tidak terrealis karena kend proses e katalog ya lambat tet dokumen te terpenuhi/ tersedia	Proses e katalog akan dipantau secara berkala dan menambah operator e katalog
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.378.169	1 Dokumen	0	1 Dokumen	Untuk konsumsi ra tidak terrealis karena kend proses e katalog ya lambat tet dokumen te terpenuhi/ tersedia	Proses e katalog akan dipantau secara berkala dan menambah operator e katalog
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.378.169	1 Dokumen	2.406.000,00	1 Dokumen	Untuk anggaran ra dan cetak ti terrealisasi kare kendala proses katalog yang lam tetapi dokumen te terpenuhi/ tersedia	Proses e katalog akan dipantau secara berkala dan menambah operator e katalog
			Koordinasi dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	22.000.120,	1 Laporan	10.639.204,00	1 Laporan	Untuk anggaran ra dan cetak ti	

			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					terrealisasi karena kendala proses katalog yang lama tetapi dokumen terpenuhi/ tersebut dan untuk anggaran perjalanan di realisasi menyesuaikan keperluan	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.522.840	1 Laporan	23.825.062,00	1 Laporan	Untuk anggaran realisasi dan cetak terrealisasi karena kendala proses katalog yang lama tetapi dokumen terpenuhi/ tersebut dan untuk anggaran perjalanan di realisasi menyesuaikan keperluan	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayar	4.651.418.000	18 orang/14 bulan	3.867.130.019,00	18 orang/14 bulan		-
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayar	4.651.418.000	18 orang/14 bulan	3.867.130.019,00	18 orang/14 bulan	Realisasi menyesuaikan kenaikan pangkat dan berkala pegawai dan tunjangan menyesuaikan tingkat kehadiran dan aktivitas harian	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	452.855.000	14 orang	406.760.057,00	13 orang	-	

			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	452.855.000	14 orang	406.760.057,00	13 orang	-	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah yang terlaksana	1.013.398.023	12 kegiatan	866.281.973,01	12 kegiatan	-	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.996.823	4 paket	2.699.841,00	4 paket	-	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	246.663.961	6 paket	186.875.153,00	6 paket	-	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	39.619.440	2 paket	33.215.315,00	2 paket	-	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28.961.799	5 paket	15.756.802,00	5 paket	Karena masing-masing bidang menganggarkan jumlah untuk biaya fotocop	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	695.156.000	60 laporan	627.734.862,01	60 laporan	-	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Pengadaan Barang Milik	37.655.793	3 unit	33.891.892,00	3 unit	-	

			Urusan Pemerintah Daerah	Daerah yang terlaksana						
			Pengadaam Mebel	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	37.655.793	1 paket	33.891.892,00	1 paket	-	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	403.220.656	2 kegiatan	362.589.394,00	2 kegiatan	-	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	9.000.000	12 laporan	8.416.600,00	12 laporan	-	Pembayaran sesuai dengan tagihan dari PLN, Telkom dan PDAM
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	394.220.656	12 laporan	354.172.794,00	12 laporan	-	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	378.080.000	51 unit	303.978.699,00	51 unit	-	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134.350.000	14 unit	91.471.101,00	13 unit	Realisasi sesuai dengan tagihan jasa pemeliharaan set unit kendaraan	

			atau Lapangan							
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24.720.000	25 unit	5.348.198,00	13 unit	Realisasi sesuai dengan tagihan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	219.010.000	1 unit	207.159.400,00	1 unit	-	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	934.313.082	100 %	370.493.704,00	82,66 %		
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pembinaan Minat Bakat	602.873.845	225 orang	231.504.534,00	28 Orang	Kurangnya informasi yang sampai ke daerah kelurahan	

			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	191.513.266	25 Orang	100.856.584,00	10 Orang	Ada satu kegiatan diprovinsi yang tidak dilaksanakan	Akan melakukan koordinasi dengan pihak propinsi
			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	366.341.027	2 Dokumen	118.336.650,00	1 Dokumen	1. Tenaga konsultan dari perguruan tinggi/ tenaga profesional tidak dapat 2. Kegiatan sosialisasi tidak terlaksana karena instansi personalnya sehingga petugas terkait melaksanakan kegiatan di SKPD n	1. Harus mengatur Kembali anggaran kas sehingga tidak bersamaan waktu triwulan/ bulannya 2. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terlebih dahulu
			Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	25.000.000	10 orang	8.000.000,00	7 orang	Jumlah pemuda berprestasi hanya 5 orang sehingga realisasi menyesuaikan	Diusahakan lebih ditingkatkan pembinaan OKP agar jumlah pemuda yang berprestasi lebih meningkat
			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelaan	20.019.552	20 orang	4.311.300,00	3 orang	1. Karena hanya mengirim perwakilan dari kabupaten sesuai permintaan Dispora Provinsi	

				Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan					2. Permintaan Dispora Provinsi terbatas	
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota	331.439.237	3 kegiatan	138.989.170,00	3 kegiatan		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	134.999.930	80 orang	63.512.902,00	50 orang	Ada 1 Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan penyedia bahan di e katalog	
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	196.439.307	1 Dokumen	75.476.268,00	1 Dokumen		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAAN	Jumlah Atlet Berprestasi	13.750.227.369	70 Orang	12.824.019.011,00	46 orang		

			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia dan termanfaatkan	6.462.650.650	14 Kegiatan	5.849.870.006,00	14 Kegiatan	-	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	6.462.650.650	14 Unit	5.849.870.006,00	14 Unit	-	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten	1.588.839.318	2 Kegiatan	1.466.437.050,00	2 kegiatan	-	
			Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	974.340.068	1 dokumen	861.157.801,00	1 dokumen	-	
			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan	614.499.250	150 orang	605.279.249,00	150 orang	-	

			Penyelenggara aan Kejuaraan	Penyelenggaraan Kejuaran						
			Pembinaan dan Pengembang an Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina	388.092.020	50 orang	327.812.859,00	50 orang	-	
			Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	188.092.420	50 orang	172.432.221,00	50 orang	-	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	199.999.600	1 Dokumen	155.380.638,00		Sehubungan Dengan Rencana Pelaksanaan didalamnya memuat Keg. Bintek kepada seluruh penggiat Olahraga Tetapi karena ada kebijakan maka pelaksanaanya di tiadakan,,sehingg a serapan anggaran tidak maksimal	Tetap melakukan Koordinasi dengan Dispora provinsi kalsel dan tetap belajar & koordinasi dengan Dispora provinsi Kaltim sebagai Pilot Projek percontohan DBON pertama di indonesia
			Pembinaan dan Pengembang an Organisasi Olahraga	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	5.109.999.537	2 kegiatan	4.985.727.938, 00			
			Pengembang an Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan	109.999.937	2 dokumen	16.565.748,00	2 dokumen	Tidak dilaksanakannya pemberian	1. koordinasi dengan pihak koni terkait

				Organisasi Keolahragaan					honorarium Pembina dan pelatih klub, dengan pertimbangan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan anggaran koni	kewenangan koni dan Dispora 2. Kendeppannya memposisikan anggaran dan klub yang masuk ranah Dispora
			Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	4.999.999.600	1 dokumen	4.969.162.190,00	1 dokumen	-	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	200.645.844	1 kegiatan	194.171.158,00	1 kegiatan	-	
			Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	200.645.844	2 dokumen	194.171.158,00	2 dokumen	-	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentasi peningkatan kapasitas dan peran aktif kepramukaan	1.205.000.000	96%	1.205.000.000,00	96%		
			Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Organisasi Kepramukaan	1.205.000.000	1 Organisasi	1.205.000.000,00	1 Organisasi		

			an Organisasi Kepramukaan	Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya						
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Uang Hibah Kepramukaan	1.205.000.000	1 Organisasi	1.205.000.000,00	1 Organisasi		

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Porapar, 2024

d. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

1) Bidang Perindustrian

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Meningkatkan pengembangan IKM	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	68.800.000	70%	14.977.000	70%	1. Dalam melaksanakan kegiatan seringkali terhambat dalam tersedianya panjar/um utk melaksanakan kegiatan. 2. Karena perizinan berusaha terbit secara otomatis melalui oss RBA seringkali	sinkronisasi dan koordinasi intensif dengan bidang layanan dan pengawasan di DPMPTSP Perizinan

								terkendala dalam mengetahui alamat rinci dan nomor telepon yang dapat dihubungi 3. Terbatasnya jumlah pu dengan KBU MT - dan atau ses. Ketentuan /regulasi OSS RBA, Kurangnya kepedulian pu dalam memenuhi komitmen PBSI	
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Meningkatkan pengembangan IKM	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2.498.045.487	40 WUB	1.836.518.018	40 WUB	Dalam melaksanakan kegiatan seringkali terhambat dalam tersedianya panjar/um utk melaksanakan kegiatan. 1. Kurangnya kepedulian pelaku usaha pasca mengikuti kegiatan dalam	Verlap, 1. Sinkronisasi koordinasi intensif dengan PU 2. dilaksanakn moneva pasca kegiatan

								memenuhi target output/outcome kegiatan 2. Seringkali terkendala waktu yang sebagaimana a rancangan berbenturan dengan agenda kegiatan lainnya	
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Meningkatkan pengembangan IKM	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	65.710.000	1Lap/buku	23.005.500	1 Lap/buku	1. Dalam melaksanakan kegiatan seringkali terhambat dalam tersedianya panjar/umutk melaksanakan kegiatan. 1. Seringkali terkendala waktu sebagaimana a rancangan yang berbenturan dengan agenda kegiatan lainnya	Sinkronisasi dan koordinasi intensif dengan pu

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Kop, UKM dan Perindag,, 2024

2) Bidang Perdagangan

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Memberikan fasilitasi dan kemudahan pengembangan usaha dan permodalan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	29.217.771.249	41 Kriteria SNI	26.780.118.016	41 Kriteria SNI	1. kompetensi sdm yang belum memadai, 2. penyedia konstruksi yang kurang optimal 3. sistem aplikasi yang sering mengalami kendala	1. penanganan yang cepat terhadap adanya perubahan pada sistem 2. peningkatan kompetensi SDM, 3. Koordinasi secara terus dengan penyedia dan pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Memberikan fasilitasi dan kemudahan pengembangan usaha dan permodalan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	1.025.085.896	17 Kriteria SNI	861.176.046	17 Kriteria SNI	1. Perubahan dan migrasi sistem penganggaran dan permintaan dana belum matang 2. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan pengelolaan pasar	1. Melaksanakan penyesuaian dan adaptasi terhadap sistem yang baru 2. Terus berupaya Melakukan kegiatan yang meningkatkan kompetensi pengelola pasar rakyat 3. Terus melakukan

								3. Kurangnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi tepat waktu dan tidak menunggak 4. Kendala teknis pelaksanaan kegiatan	sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pedagang dan komunitas pasar 4. Meningkatkan pemahaman akan penguasaan Teknologi dan informasi bagi seluruh pengelola pasar
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Memberikan fasilitasi dan kemudahan pengembangan usaha dan permodalan	Program Perizinan Dan Mendaftar Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	22.000.000	3 izin	0	3 izin	Pelaku Usaha hanya mendaftar ke DPMTSP dan tidak ada tembusan ke DKUPP	sinkronisasi dan koordinasi intensif dengan bidang layanan dan pengawasan di DPMTSP Perizinan
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Memberikan fasilitasi dan kemudahan pengembangan usaha dan permodalan	Program Perizinan Dan Mendaftar Perusahaan	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	24.784.000	8 izin	3.820.000	6 izin	Kurangnya permohonan ijin yang masuk dan kurangnya personil	memberikan pendampingan dalam proses perizinan, seperti membantu pengisian formulir atau memberikan konsultasi hukum.
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Memberikan fasilitasi dan kemudahan pengembangan	Program Perizinan Dan Mendaftar Perusahaan	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman	22.882.000	2 izin	0	2 izin	Kurangnya permohonan ijin yang masuk dan banyak tidak	perlu menyederhanakan prosedur perizinan usaha agar lebih

	usaha dan permodalan		Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat					memenuhi persyaratan	mudah diakses, terutama bagi pengusaha kecil dan menengah
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Memberikan fasilitasi dan kemudahan pengembangan usaha dan permodalan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	60.781.000	12 bulan	25.141.090	12 bulan	Penjadwalan kegiatan yang cukup padat di akhir triwulan, belum ada distributor di Tabalong yang ada pedagang toko besar	Meningkatkan sinergitas dan lebih mempersiapkan jadwal kegiatan lebih dulu, dan dukungan pemda untuk mengajak pelaku usaha berinvestasi ke Tabalong khusus bapokting
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Memberikan fasilitasi dan kemudahan pengembangan usaha dan permodalan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1.100.712.000	12 bulan	269.292.803	12 bulan	Penjadwalan kegiatan yang cukup padat di akhir triwulan, dan jumlah pedagang besar tidak terlalu banyak	Meningkatkan sinergitas dan lebih mempersiapkan jadwal kegiatan lebih dulu.
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Memberikan fasilitasi dan kemudahan pengembangan usaha dan permodalan	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	86.487.000	60%	25.444.706	60%	Penentuan jadwal yang terlalu mepet dengan penutupan anggaran dan hanya satu tempat yang bisa ditebus sehingga hanya sedikit pelaku usaha yang diikuti	Meningkatkan koordinasi dalam pendataan dan pembinaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Memberikan fasilitasi dan kemudahan pengembangan usaha dan permodalan	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	421.875.607	1.725 UTTP	262.225.866	1.195 UTTP	Pelaksanaan layanan tera menyesuaikan dengan masa berlaku UTTP dan kurangnya kesadaran pemilik UTTP untuk melakukan tera / tera ulang, dan kurangnya jumlah personil sehingga tidak bisa membagi tim, kurangnya sdm yang berkopeten untuk melakukan pengawasan dan edukasi	Lebih luas dan lebih sering lagi melakukan sosialisasi tentang layanan tera / tera ulang
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Memberikan fasilitasi dan kemudahan pengembangan usaha dan permodalan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	2 laporan	4.338.000	1 laporan	kurang aktifnya kios pengecer sehingga sulit untuk dilakukan pemantauan	Memberikan informasi kepada pemilik kios tentang aturan dan peraturan yang berlaku di wilayah setempat, seperti izin usaha, peraturan zonasi, dan tata cara penjualan.

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Kop, UKM dan Perindag,, 2024

4. Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel III.4.
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Bapperida

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
PERENCANAAN		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.394.483.915	100%	1.738.553.882	100%	Prgram Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.464.089.396	100%	1.069.414.563	100%	Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	18.792.000	1 Berita Acara	14.297.632	1 Berita Acara	Capaian kinerja pada sub kegiatan ini sudah mencapai 100 persen dari apa yang ditargetkan. Adapun adanya silpa realisasi capaian kegiatan karena padatnya jadwal	akan dilakukan identifikasi kembali terhadap penjadwalan kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih jadwal

								kegiatan sehingga banyak kegiatan sehingga rapat persiapan dan pasca kegiatan tidak terlaksana secara optimal	
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	31.100.000	1 Berita Acara	19.118.362	1 Berita Acara	Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Forum Lintas Perangkat Daerah merupakan sarana komunikasi untuk penyelerasan program kegiatan yang ada di SKPD dengan hasil pelaksanaan kegiatan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik. Kegiatan ini diagendakan dilaksanakan dalam beberapa kali sampai tercapainya kesepakatan.	Akan dilakukan penjadwalan yang lebih intensif agar bisa dilaksanakan secara lebih mendalam dan lebih dari satu kali kegiatan

								pada tahun 2024 kegiatan ini hanya bisa dilaksanakan 1 kali karena padatnya jadwal kegiatan yang harus dilaksanakan. akan tetapi berdasarkan kinerja yang dihasilkan, kegiatan ini sudah dilaksanakan secara optimal dengan tingkat capaian 100 %	
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	278.673.626	1 Berita Acara	156.513.976	1 Berita Acara	Sub kegiatan ini awalnya direncanakan selama 2 hari kegiatan yang terdiri dari Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Tematik sesuai dengan Tema RKPD Kabupaten Tabalong. Akan tetapi pada pelaksanaannya sesuai arahan pimpinan	Akan dilakukan pengkajian kembali terhadap urgensi pelaksanaan Musrenbang Tematik sehingga serapan anggaran bisa dilaksanakan secara optimal

								kegiatan Musrenbang Tematik tidak dilaksanakan sehingga membentuk silpa yang cukup besar pada sub kegiatan ini	
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	282.723.000	1500 usulan	248.922.000	1500 usulan	Pada kegiatan ini dipersiapkan untuk pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan. Adapun capaian kinerja pada kegiatan ini melebihi dari target yang telah ditetapkan.	Untuk tahun 2025 pelaksanaan musrenbang Kecamatan dibebankan pada DPA di masing-masing Kecamatan
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	852.800.770	4 Dokumen	630.562.593	4 Dokumen	Pada kegiatan ini dipersiapkan untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan , dimana untuk tahun 2024 sejumlah 4 dokumen harus dipersiapkan yakni RKPD, RKPDP,	Dokumen Evaluasi RPJMD akan dilakukan penyusunan pada tahun anggaran 2025

								RPJPD dan Teknokratik RPJMD. Kegiatan ini banyak melibatkan peran tenaga ahli yang berperan memberikan masukan terkait perencanaan pembangunan sesuai bidang keahliannya masing-masing. Pada penyusunan RPJMD sesuai dengan regulasi dalam menetapkan isu strategis harus menyertakan hasil evaluasi RPJMD yang sudah dilewati. Akan tetapi sesuai arahan Pemerintah Provinsi untuk pembuatan Evaluasi RPJMD disarankan disusun pada tahun 2025 saja sehingga capaian	

								indikator kinerja sudah mencapai masa akhir tahun RPJMD sehingga mengakibatkan adanya silpa anggaran yang diperuntukan untuk penyusunan dokumen tersebut.	
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	485.249.848	100%	368.314.631	100%	Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	69.124.540	1 Dokumen	28.750.359,00	1 Dokumen	Pada kegiatan ini, kinerja sub kegiatan dapat terpenuhi secara optimal walaupun secara kinerja keuangan realisasinya tidak mencapai target yang diinginkan karena padatnya jadwal kegiatan yang berakibat pada penggabungan kegiatan yang berimplikasi terhadap capaian realisasi keuangan. Untuk	

								perjalanan dinas untuk melakukan study tiru terkait penerapan SDI di Kota Magelang. Akan tetapi karena padatnya jadwal kegiatan perencanaan, banyak kegiatan rapat yang dilakukan penggabungan dengan kegiatan lain sehingga penyerapan anggaran makan minum dapat ditekan untuk dilakukan efisiensi. Sedangkan kegiatan study tiru tidak dilaksanakan karena dilakukan efisiensi dengan mendatangkan narasumber dari Kota Magelang.	ke depan, akan dilakukan penjadwalan kegiatan yang lebih detail sehingga meminimalisir adanya tumpang tindih kegiatan

			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	323.978.479	40 Orang	266.622.272	40 Orang	Pada sub kegiatan ini dipersiapkan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Satu Data dalam rangka pembinaan satu data Kabupaten yang rencananya akan dilaksanakan di Kota Magelang sekaligus benchmarking. Akan tetapi mengacu pada disposisi Pj.Bupati Tabalong bahwa kegiatan Forum Data cukup dilaksanakan di dalam Provinsi saja maka mengakibatkan serapan anggaran menjadi lebih sedikit dari yang sudah direncanakan	Pada sub kegiatan ini, capaian kinerja melebihi dari apa yang telah ditergetkan sebesar 120 orang mendapatkan pembinaan terkait pengelolaan data sektoral daerah sehingga padat dikatakan berjalan secara optimal

			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	92.146.829	1 buku	72.942.000	1 buku	Pada Sub kegiatan telah dilakukan penyusunan buku profil pembangunan daerah. Pada pelaksanaannya besaran harga cetak buku yang telah ditetapkan lebih besar dari harga nego pada proses katalog sehingga ada sisa anggaran yang tidak dipergunakan sebagai bentuk efisiensi anggaran	Capaian kinerja pada sub kegiatan ini telah mencapai 100 persen dimana telah dilakukan pembuatan buku profil pembangunan daerah Kabupaten Tabalong sebagai tolak ukur kinerja sehingga tidak ada kendala yang dihadapi
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	35.553.276	100%	2.686.000	100%	Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	9.790.000	1 dokumen		1 dokumen	Padatnya pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 mengakibatkan banyak pelaksanaan kegiatan yang dipadatkan	Untuk ke depannya akan dilakukan efisiensi terhadap penggunaan sub kegiatan ini sehingga bisa dipergunakan secara optimal.

								dengan kegiatan lainnya sehingga secara kinerja sub kegiatan ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan akan tetapi secara keuangan belum ada realisasi capaiannya	
			Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	9.863.276	1 dokumen		1 dokumen	Kegiatan penerapan tidak bisa dilakukan secara optimal karena kondisi aplikasi SIPD yang sering gangguan dan tidak bisa di prediksi. Akan tetapi terkait kinerja penerapan SIPD di Kabupaten Tabalong pada sisi perencanaan telah dilaksanakan 100 persen	Untuk ke depannya akan dilakukan efisensi terhadap penggunaan sub kegiatan ini sehingga bisa dipergunakan secara optimal.

			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	15.900.000	1 dokumen	2.686.000	1 dokumen	Kegiatan pembinaan tidak bisa dilakukan secara optimal karena kondisi aplikasi SIPD yang sering gangguan dan tidak bisa di prediksi sehingga untuk pelaksanaan pembinaan yang dilakukan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal	Untuk ke depannya akan dilakukan efisiensi terhadap penggunaan sub kegiatan ini sehingga bisa dipergunakan secara optimal.
			Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	409.591.395	100%	298.138.688	100%	Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	13.289.686	2 Laporan	4.825.000	2 Laporan	Kegiatan pengendalian pembangunan dilaksanakan dua kali setiap tahunnya dan mengundang seluruh perwakilan desa/kelurahan, Kecamatan dan SKPD teknis di Kabupaten	Akan dilakukan efisiensi terhadap kegiatan ini menyesuaikan dengan konsep pelaksanaan kegiatan

								Tabalong. Akan tetapi, sesuai arahan pimpinan untuk kegiatan pengendalian hanya mengundang Kecamatan dan SKPD Teknis sehingga menimbulkan adanya silpa pada pengadaan makan-minum kegiatan rapat	
			Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	396.301.709	8 Laporan	293.313.688	8 Laporan	Kegiatan evaluasi pembangunan daerah dilaksanakan setiap triwulan pada tahun anggaran 2024. kegiatan ini melibatkan seluruh SKPD terkait capaian kinerja yang telah dicapai per triwulan tersebut. Pada tahun 2024 evaluasi TW IV karena padatnya jadwal kegiatan tidak bisa	akan dilakukan efisiensi terhadap kegiatan tersebut sesuai konsep pelaksanaan kegiatan

								dilaksanakan pada bulan desember 2024 akan tetapi akan dilaksanakan pada awal tahun 2025 sehingga menyisakan silpa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.562.369.529	100%	2.361.760.610	100%	Prgram Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.687.487.184	100%	1.509.127.359	100%	Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	280.095.000	10 Dokumen	215.202.539	10 Dokumen	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Asistensi Penyusunan Dokumen	2.000.000	10 Laporan	2.000.000	10 Laporan	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang

			Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						direncanakan, terealisasi 100%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	969.857.600	10 Dokumen	905.284.820	10 Dokumen	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2.000.000	10 Laporan	2.000.000	10 Laporan	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	346.109.650	10 Laporan	323.693.600	10 Laporan	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	87.424.934	10 Laporan	60.946.400	10 Laporan	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%

			Daerah Bidang Pembangunan Manusia						
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	292.660.671	100%	291.301.115	100%	Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terrealisasi 100%
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	292.660.671	4 Laporan	291.301.115	4 Laporan	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terrealisasi 100%
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	582.221.674	100%	561.332.136	100%	Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terrealisasi 100%
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	225.602.000	5 Laporan	219.688.858	5 Laporan	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terrealisasi 100%
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	356.619.674	12 Laporan	341.643.278	12 Laporan	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terrealisasi 100%
PENELITIAN DAN		PROGRAM PENELITIAN DAN	PROGRAM PENELITIAN DAN	3.733.953.836	20%	3.224.399.183	20%	Prgram Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang

PENGEMBAN NGAN		PENGEMBANG AN DAERAH	PENGEMBANG N DAERAH						direncanakan, terrealisasi 100%
			Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	385.339.836	20%	267.075.246	20%	Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	60.000.000	1 Laporan	45.820.297	1 Laporan	anggaran yang telah digunakan cukup untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan	dilakukan perencanaan penganggaran yang lebih efektif dan efisien
			Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan / Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	325.339.836	3 Rekomendasi	221.254.949	3 Rekomendasi	anggaran yang telah digunakan cukup untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan	dilakukan perencanaan penganggaran yang lebih efektif dan efisien
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1.350.000.000	20%	1.187.927.027	20%	Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	469.359.616	1 Dokumen	388.378.350	1 Dokumen	anggaran tersisa merupakan PPn kegiatan penelitian yang tidak dibayarkan	dilakukan koordinasi mengenai perhitungan pajak pelaksana swakelola sebelum perencanaan anggaran

			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	440.320.584	1 Dokumen	368.108.183	1 Dokumen	anggaran tersisa merupakan PPn kegiatan penelitian yang tidak dibayarkan	dilakukan koordinasi mengenai perhitungan pajak pelaksana swakelola sebelum perencanaan anggaran
			Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	440.319.800	1 Dokumen	431.440.494	1 Dokumen	anggaran yang telah digunakan cukup untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan	dilakukan perencanaan penganggaran yang lebih efektif dan efisien
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	325.000.000	20%	292.792.793	20%	Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	325.000.000	1 Dokumen	292.792.793	1 Dokumen	anggaran yang telah digunakan cukup untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan	dilakukan perencanaan penganggaran yang lebih efektif dan efisien
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.673.614.000	20%	1.476.604.117	20%	Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	378.477.000	1 Dokumen	287.020.637	1 Dokumen	anggaran yang telah digunakan cukup untuk mencapai target kinerja	dilakukan perencanaan penganggaran yang lebih efektif dan efisien

								yang ditetapkan	
			Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1.041.116.000	1 Laporan	1.027.242.662	1 Laporan	anggaran yang telah digunakan cukup untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan	dilakukan perencanaan penganggaran yang lebih efektif dan efisien
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	118.321.000	1 Laporan	79.984.200	1 Laporan	anggaran yang telah digunakan cukup untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan	dilakukan perencanaan penganggaran yang lebih efektif dan efisien
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	135.700.000	1 Laporan	82.356.618	1 Laporan	ada 5 UMKM yang tidak berhasil didaftarkan mereknya karena banyak kelengkapan yang tidak terpenuhi (kurangnya informasi dari pelaku usaha)	dilakukan sosialisasi pendaftaran dan pendampingan lebih intens terkait hak kekayaan intelektual (merek)
NON URUSAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.823.712.723	A	10.725.544.488	A	Prgram Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	72.518.061	100%	70.538.930	100%	Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang

			Perangkat Daerah						direncanakan, terealisasi 100%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.790.869	7 Dokumen	48.229.130	7 Dokumen	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.035.256	1 Dokumen	2.015.000	1 Dokumen	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.035.256	1 Dokumen	2.015.000	1 Dokumen	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.110.940	1 Dokumen	2.090.000	1 Dokumen	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.110.940	1 Dokumen	2.090.000	1 Dokumen	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.084.800	1 Laporan	2.065.000	1 Laporan	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.350.000	6 Laporan	12.034.800	6 Laporan	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Administrasi Keuangan	8.182.949.866	100%	7.016.318.697	100%	Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang

			Perangkat Daerah						direncanakan, terealisasi 100%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.125.451.000	37 orang/bulan	6.961.312.212	37 orang/bulan	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.499.144	61 Dokumen	2.480.400	61 Dokumen	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.999.899	2 Laporan	23.811.200	2 Laporan	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.999.823	12 Laporan	28.714.885	12 Laporan	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.350.000	100%	6.853.600	100%	Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.350.000	2 Dokumen	3.250.000	2 Dokumen	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	12 Laporan	1.801.800	12 Laporan	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%

			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	4 Laporan	1.801.800	4 Laporan	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, teralisasi 100%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	646.411.000	100%	485.642.328	100%	Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, teralisasi 100%
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	74.440.000	2 Paket	56.600.000	2 Paket	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, teralisasi 100%
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	571.971.000	223 Orang	429.042.328	223 Orang	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, teralisasi 100%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.069.636.598	100%	894.258.505	100%	Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, teralisasi 100%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.806.958	1 paket	21.265.500	1 paket	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, teralisasi 100%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.920.000	50 paket	109.102.700	50 paket	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	Secara fisik seluruh kegiatan dapat terealisasi 100 persen. Analisis Kebutuhan anggaran harus lebih cermat, sehingga anggaran bisa

									lebih di efisiensi
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.000.000	8 Paket	33.180.000	8 Paket	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	Fisik, kinerja secara seluruh yang direncanakan, teralisasi 100%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	33.723.640	8 Dokumen	33.299.000	8 Dokumen	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	Fisik, kinerja secara seluruh yang direncanakan, teralisasi 100%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	780.186.000	12 Laporan	671.170.805	12 Laporan	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	Fisik, kinerja secara seluruh yang direncanakan, teralisasi 100%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	7 Paket	26.240.500	7 Paket	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	Fisik, kinerja secara seluruh yang direncanakan, teralisasi 100%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.211.096.263	100%	996.730.793	100%	Kegiatan Terlaksana dengan baik	Fisik, kinerja secara seluruh yang direncanakan, teralisasi 100%
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.211.096.263	112 Unit	996.730.793	112 Unit	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	Fisik, kinerja secara seluruh yang direncanakan, teralisasi 100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	886.001.317	100%	734.027.433	100%	Kegiatan Terlaksana dengan baik	Fisik, kinerja secara seluruh yang direncanakan, teralisasi 100%

			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.010.000	3 Laporan	4.250.000	3 Laporan	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	124.800.000	4 Laporan	82.949.833,00	4 Laporan	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	Secara fisik seluruh kegiatan dapat terealisasi 100 persen. Analisis Kebutuhan anggaran harus lebih cermat, sehingga anggaran bisa lebih di efeasensikan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	756.191.317	2 Laporan	646.827.600	2 Laporan	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	747.749.618	100%	521.174.202	100%	Kegiatan Terlaksana dengan baik	secara Fisik, seluruh kinerja yang direncanakan, terealisasi 100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	315.100.000	25 Unit	211.603.457	25 Unit	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	Secara fisik seluruh kegiatan dapat terealisasi 100 persen. Analisis Kebutuhan anggaran harus lebih cermat, sehingga anggaran bisa lebih di efeasensikan

			Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	99.430.000	75	54.172.500	75	Sub Kegiatan Terlaksana dengan baik	Secara fisik seluruh kegiatan dapat terealisasi 100 persen. Analisis Kebutuhan anggaran harus lebih cermat, sehingga anggaran bisa lebih di efeasensikan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	327.142.330	1 Unit	249.439.245	1 Unit		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.077.288	11 Unit	5.959.000	11 Unit		

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Bapperida, 2024

b. BPKAD

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	31.121.870	11 Dok	27.359.700	11 Dok	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Akan dikoordinasikan untuk penambahan anggaran

				yang disusun						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaa n perangkat daerah	4.254.000	2 Dok	4.063.800	2 Dok		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	12.529.550	8 Dok	12.309.600	8 Dok	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Akan dikoordinasikan untuk penambahan anggaran
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun	14.338.320	1 Dok	10.986.300	1 Dok		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disusun	14.908.249.115	3 Lap	7.678.639.798	3 Lap	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Akan dikoordinasikan untuk penambahan anggaran
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	14.897.952.015	58 Org	7.668.643.198	34 Org	Adanya Mutasi ketempat lain	Akan dikoordinasikan untuk penambahan ASN
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	10.297.100	3 Lap	9.996.600	3 Lap	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Akan dikoordinasikan untuk penambahan anggaran
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administra si Kepegawai	638.643.940	100%	339.140.000	100%	Tidak terealisasinya perjalanan dinas dan	Akan dikoordinasikn

				an Perangkat Daerah					honor narasumber	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Ketersediaan pakaian dinas bagi pegawai	17.649.000	54	16.575.000	100%	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Akan dikoordinasikan untuk penambahan anggaran
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan pelatihan yang dikirim	52.350.000	7 Org	32.965.000	7 Org	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Akan dikoordinasikan kembali kepada pelaksana kegiatan
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	568.644.940	100%	289.600.000	100%	Adanya honor Narasumber yang tidak dibayarkan karena tidak dilaksanakan dalam acara tersebut	Akan dikoordinasikan kembali kepada pelaksana kegiatan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	2.224.693.938	100%	1.570.400.329	100%	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Akan dikoordinasikan dengan Tim Penyusun Satuan harga
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase penerangan bangunan kantor terpenuhi	20.570.000	100%	16.275.000	100%	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Akan dikoordinasikan dengan Tim Penyusun Satuan harga
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	359.039.300	40 Item	318.850.500	40 Item	Masih adanya stock opname tahun lalu sehingga tidak direalisasi	diharapkan belanja lebih selektif lagi

				yang terpenuhi						
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	115.938.000	100%	49.465.000	100%	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Akan dikoordinasikan dengan Tim Penyusun Satuan harga
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan iklan yang terpenuhi setiap bulannya	110.413.638	12 Bulan	76.933.000	12 Bulan	Belum terealisasi iklan tidak sepenuhnya	diharapkan belanja lebih selektif lagi
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan	1.618.733.000	97 Org Keg	1.108.876.829	97 Org Keg	Target untuk perjalanan luar provinsi dipergunakan untuk perjalanan dalam provinsi saja.	Agar lebih selektif dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah.
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.107.048.348	100%	18.495.153.571	100%	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Diharapkan belanja lebih selektif lagi
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan	17.845.461.000	-	16.922.080.000	-	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Diharapkan belanja lebih selektif lagi
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan	2.261.587.348	20 Item	1.573.073.571	20 Item	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak	Diharapkan belanja lebih selektif lagi

				n kantor yang tersedia					dapat direalisasikan	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.439.570.503	100%	1.128.252.988	100%	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Akan dikoordinasikan dengan Ti Penyusun Satuan harga
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang tersedia	9.740.500	805 Lbr	9.500.000	905 Lbr		Diharapkan belanja lebih selektif lagi
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air dan telpon yang terbayar	362.100.000	48 Rek Bulan	296.145.553	48 Rek Bulan		Diharapkan belanja lebih selektif lagi
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	1.067.730.003	12 Bulan	822.607.435	12 Bulan	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Akan dikoordinasikan dengan Ti Penyusun Satuan harga
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.602.718.980	100%	1.203.374.408	100%	Belanja service tidak direalisasikan sepenuhnya	Diharapkan PPT agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah kendaraan dinas yang diurus izin nya dan kendaraan	764.270.000	38 Unit	453.572.524	38 Unit	Belanja service tidak direalisasikan sepenuhnya	Diharapkan PPT agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya

			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dinas yang layak jalan						
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase peralatan kerja dan mesin yang diperbaiki	136.140.000	100%	51.747.000	100%	Belanja service tidak direalisasikan sepenuhnya	Diharapkan PPT agar leb memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara dengan baik	702.308.980	1 Buah	698.054.584	1 Buah		
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	Meningkatkan tata kelola keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penganggaran an keuangan daerah	722.059.357	100 Dok	586.191.498	100 Dok	Masih ada belanja yang tidak direalisasikan	Diharapkan PPT agar leb memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS tepat waktu	144.530.920	2 Dok	136.895.838	2 Dok	Perjalanan dinas tidak semuanya direalisasikan	Diharapkan PPT agar leb memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS waktu	138.843.800	2 Dok	88.725.736	2 Dok	Belanja makan minum rapat tidak semuanya direalisasikan	Diharapkan PPT agar leb memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	190.312.046	46 Dok	168.810.024	46 Dok	Belanja makan minum rapat tidak semuanya direalisasikan	Diharapkan PPT agar leb memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya

			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang tersusun	-		-			
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda APBD yang tersusun	106.175.591	2 Dok	70.960.000	2 Dok	Perjalanan dinas tidak semuanya direalisasikan	Diharapkan PPT agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen APBD Perubahan yang tersusun	112.169.000	2 Dok	96.297.900	2 Dok	Belanja cetak dan penggandaan buku tidak semuanya direalisasikan	Diharapkan PPT agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
			Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Cakupan SKPD yang dilakukan pembinaan dalam penyusunan anggaran	30.028.000	100%	24.502.000	100%	Perjalanan dinas tidak semuanya direalisasikan	Diharapkan PPT agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah	998.967.622	60 Dok	253.774.487	60 Dok	Masih ada belanja yang tidak direalisasikan	Diharapkan PPT agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya

			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi kas daerah dan anggaran kas SKPD tepat waktu	150.380.000	12 Lap	3.060.000	12 Lap	Masih ada belanja yang tidak direalisasikan	Diharapkan PPT agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentasi penerbitan anggaran kas dan SPD yang sesuai dengan Kasda	132.984.660	100%	0	100%	Keterbatasan waktu, dan kekurangan SDM bidang Ase	Diharapkan PPT agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer tepat waktu	159.936.663	12 Lap	103.470.777	12 Lap	Belanja perjalanan dinas tidak direalisasikan	Diharapkan PPT agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/P emotongan dan	Jumlah dokumen kasda dan PFK yang telah direkon	146.500.000	24 Dok	38.647.300	24 Dok	Masih ada belanja yang tidak direalisasikan dan Keterbatasan waktu, dan kekurangan SDM bidang Ase	Diharapkan PPT agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya

			Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen rekonsiliasi data penerimaan dan pengelolaan kasda tepat waktu	208.397.000	12 Dok	41.609.950	12 Dok	Adanya belanja yang tidak direalisasikan	Diharapkan PPT agar leb memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentasi berkas SPP dan SPM yang dinyatakan lengkap dan sah	200.769.299	100%	66.986.460	100%	Adanya belanja yang tidak direalisasikan	Diharapkan PPT agar leb memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	1.144.885.500	100%	682.186.624	100%	Adanya belanja yang tidak direalisasikan	Diharapkan PPT agar leb memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah laporan rekonsiliasi SKPD	286.818.000	12 Lap	190.716.420	12 Lap	Adanya belanja yang tidak direalisasikan	Diharapkan PPT agar leb memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya

			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah draf Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	132.192.500	2 Dok	88.885.325	2 Dok	Belanja makan minum rapat tidak semuanya direalisasikan	Diharapkan PPT agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah draf raperda dan raperbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	413.325.000	2 Dok	298.277.452	2 Dok	Belanja honor narasumber tidak semuanya direalisasikan	Diharapkan PPT agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah draf laporan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK	100.000.000	1 Dok	18.756.297	1 Dok		
			Pembinaan Akuntansi,	Kemandirian PPK/Kasuba	212.550.000	82 Org	85.551.130	82 Org	Adanya belanja yang	Diharapkan PPT agar lebih

			Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	g dalam menyusun Laporan Keuangan berbasis Akrua					tidak direalisasikan semua	memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	Meningkatkan pengelolaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian nilai aktiva tetap BMD dengan Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten	3.168.680.238	100%	2.351.013.306	100%	Adanya belanja yang tidak direalisasikan semua	Diharapkan PPT agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
			Penyusunan Standar Harga	Persentase pengelolaan barang milik daerah	146.209.800	1 Dok	72.811.494	1 Dok	Adanya belanja yang tidak direalisasikan semua	Diharapkan PPT agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penyusunan standar harga sesuai ketentuan	301.366.000	2 Dok	211.509.660	2 Dok	Belanja perjalanan dinas tidak semuanya direalisasikan	Diharapkan PPT agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penyusunan perencanaan kebutuhan BMD sesuai ketentuan	624.018.670	1 Dok	457.221.760	1 Dok	Adanya belanja yang tidak direalisasikan semua	Melakukan pembinaan kepada semua pengurus barang SKPD
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Penghapusan BMD	610.092.930	1 Dok	422.279.800	1 Dok	Adanya belanja yang tidak direalisasikan semua	Melakukan pembinaan kepada semua pengurus barang SKPD

				sesuai ketentuan						
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan inventarisasi BMD sesuai ketentuan	1.146.607.750	10 Persil	914.163.938	10 Persil	Adanya belanja yang tidak direalisasikan semua	Diharapkan PPT agar leb memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah pemindahtanganan dan sertifikasi tanah pemerintah daerah	76.248.000	2 Dok	34.392.000	2 Dok	Keterbatasan waktu,dan kekurangan SDM bidang Ase	Diharapkan PPT agar leb memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan penilaian BMD sesuai ketentuan	264.137.088	2 Dok	238.634.654	2 Dok	Adanya belanja yang tidak direalisasikan semua	Diharapkan PPT agar leb memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD BPKAD, 2024

c. Badan Pendapaatan Daerah

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
Keuangan	Terus meng Up to date regulasi mengenai pajak dan retribusi daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah							

			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10.200.000	4 Dokumen	10.183.000	5 Dokumen	Adanya kesalahan dalam menentukan target awal kinerja	Akan lebih matang dalam perhitungan penetapan target kinerja
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	508.309.000	11 Dokumen	457.703.874	17 Dokumen		
	Melakukan kegiatan sosialisasi kepada OPD pengampu retribusi mengenai sistem operasional prosedur proses bisnis retribusi daerah		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	854.827.106	4 Laporan	616.312.417	4 Laporan		
	Melakukan pendataan, pembinaan dan		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan						

	pengawasan serta melakukan sosialisasi peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait pajak daerah kepada para pelaku usaha yang usahanya menjadi objek pajak daerah			dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	216.190.380	4 Laporan	98.268.372	4 Laporan		
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	396.698.000	22 Laporan	302.477.544	22 Laporan		
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	563.491.263	2750 OP	517.286.960	2838 OP		
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	567.126.100	132 Dokumen	406.976.198	132 Dokumen		
			Pelayanan	Jumlah		12520		12034		

			dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	358.903.225	Layanan	317.972.706	Layanan		
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	239.248.200	13.750 Dokumen	237.507.358	14.867 Dokumen		
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	705.856.000	4 Dokumen	649.119.582	4 Dokumen		
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	414.493.991	5 Dokumen	370.753.959	5 Dokumen		
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan	201.862.232	4 Laporan	164.810.165	6 Laporan	Adanya kesalahan dalam menentukan target awal kinerja	Akan lebih matang dalam perhitungan penetapan target kinerja

			Retribusi Daerah	n Pengelolaan Retribusi Daerah						
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	112.978.200	4 Laporan	86.709.180	4 Laporan		
	Peningkatan kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.109.000	34 Dokumen	79.402.045	34 Dokumen	Rendahnya realisasi anggaran disebabkan adanya belanja perjalanan dinas yang tidak terealisasi dikarenakan adanya efisiensi anggaran	Akan lebih matang dalam perhitungan perencanaan penganggaran
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima	10.613.227.000	30 Orang	9.557.258.838	30 Orang		

			ASN	Gaji dan Tunjangan ASN						
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	58.075.276	3 Paket	47.720.636	3 Paket		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150.000.000	30 Orang	91.760.000	28 Orang	Rendahnya serapan anggaran dikarenakan penambahan pagu sub kegiatan ini dilaksanakan pada saat APBDP 2024 disahkan, yaitu pada bulan Oktober, sehingga dengan waktu yang singkat dan banyaknya kegiatan tambahan pada APBDP 2024 di Bidang, mengakibatkan beberapa orang yang	Akan lebih matang dalam perhitungan perencanaan penganggaran

									semula direncanakan ikut Bimtek, tidak dapat mengikutinya.	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18.292.425	4 Paket	1.862.600	4 Paket	Rendahny a Serapan Anggaran dikarenakan Komponen Listrik masih baik dan tidak ada yang perlu di ganti.	Akan lebih matang dalam perhitungan perencanaan penganggaran
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	umlah Paket Peralatan dan Perlengkap a n Kantor yang Disediakan	1.021.344.975	4 Paket	691.998.178	4 Paket	Rendahnya Serapan Anggaran dikarenakan adanya Penambahan Pagu Anggaran di APBDP 2024 dengan waktu yang cuma singkat sedangkan Pembelian menggunakan Purchasing dan Kegiatan ini sebagian	Akan lebih matang dalam perhitungan perencanaan penganggaran

									punya bidang cuma penempatan nya ada di sekretariat.	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100.238.558	4 Paket	35.152.631	4 Paket	Pembelian Sudah di laksanakan dan sesuai dengan peruntukkannya rendahnya serapan anggaran ini dikarenakan tidak semua volume barang cetakan yang digunakan	Akan lebih matang dalam perhitungan perencanaan penganggaran
			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.198.071.000	184 Laporan	1.037.229.313	171 Laporan		
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	286.661.135	3 Paket	263.468.170	3 Paket		
			Pengadaan Barang Milik							

			Daerah Penunjang							
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	437.425.361	28 Unit	380.582.000	28 Unit		
			Urusan Pemerintah Daerah							
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	456.091.135	40 Unit	351.192.800	39 Unit		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	4 Laporan	4.750.000	4 Laporan		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	183.000.000	12 Laporan	149.417.755	12 Laporan		

				Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	81.340.189	4 Laporan	34.389.000	4 Laporan	Rendahnya Serapan Anggaran dikarenakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin masih baik sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan.	Akan lebih matang dalam perhitungan perencanaan penganggaran
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.202.959.200	12 Laporan	1.074.283.297	12 Laporan		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang		45 Unit		29 Unit	Rendahnya serapan dana disebabkan karena sebagian besar kendaraan	Akan lebih matang dalam perhitungan perencanaan penganggaran dan penentuan target kinerja

			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	471.990.000		254.324.685		perorangan dinas atau kendaraan jabatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong masih dalam kondisi baru, jadi masih ada service gratis dari showroomnya dan Sebagian masih belum memerlukan service yang besar	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	972.451.321	1 Unit	878.316.280	1 Unit		

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Bapenda, 2024

d. BKPSDM

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	- Penggunaan aplikasi pendukung pelayanan kepegawaian yang berbasis internet. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota		Nilai IKM Kesekretaria tan (Nilai)	8.873.597.777	90	8.087.771.221	hasil survei kepuasan didapatkan nilai indeks kepuasan sebesar = 89,84	kurangnya ASN yang ikut serta dalam melakukan survei kepuasan layanan kepegawaian	melakukan surv melalui aplika berbasis web da juga denga dikirim ke group whatsapp
	- Melaksanak an pendidikan dan pelatihan bagi aparatur									
	- Pemenuhan kebijakan Teknis Disiplin ASN									
	- Sosialisasi /penyebarluas an regulasi terkait disiplin ASN									
	- Peningk atan Kualitas Pengawasan & Pembinaan disiplin ASN		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaa n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	101.317.400	100%	77.678.403	dari target 8 dokumen telah disusun 8 dokumen perencanaan dan laporan kinerja sehingga terealisasi 100%	adanya keterlambatan daam pengumpulan data dukung penyusunan dokumen	melakukan pengumpulan data dukun menggunakan teknologi informasi berup google sheet

	- Implementasi kebijakan melalui penerapan reward & punishment		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.745.110	5 Dokumen Perencanaan	25.543.500	5 Dokumen Perencanaan	adanya keterlambatan dalam pengumpulan data pendukung penyusunan dokumen	melakukan pengumpulan data pendukung menggunakan teknologi informasi berupa google sheet
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.572.290	3 Dokumen laporan kinerja	52.134.903	3 Dokumen Laporan Kinerja	adanya keterlambatan dalam pengumpulan data pendukung penyusunan dokumen	melakukan pengumpulan data pendukung menggunakan teknologi informasi berupa google sheet
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	5.726.964.830	100%	5.313.113.096	Realisasi Gaji dan Terbayarkan selama 14 bulan = 100%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	5.652.684.000	27 Orang	5.243.690.150	jumlah penerima gaji per bulan desember	tidak tercapainya target dikarenakan ada beberapa	melakukan perubahan target kinerja dan anggaran pada

				Tunjangan ASN				2024 adalah 27 orang	pegawai yang di mutasi	waktu melakukan perubahan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	74.280.830	12 Laporan	69.422.946	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 12 laporan		
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	529.844.848,00	100%	453.613.663,00	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 100%		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	53.370.848,00	41 steel	48.380.000	Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan sebanyak 41 steel		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	476.474.000,00	41 orang	405.233.663	Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan sejenisnya		

				dan Pelatihan				ada sebanyak 41 orang		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	1.283.652.043	100%	1.089.443.898	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah 100%		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23.213.730	2 Paket	14.309.000	komponen instalasi listrik yang telah disediakan adalah sebanyak 113 buah		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	595.905.429	15 buah	521.439.220	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan adalah 15 paket		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.000.000	1 paket	2.400.000	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan adalah 1 paket		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11.137.129	4 Paket	10.890.000	Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan adalah 1 paket		
			Penyediaan Barang	Jumlah Paket	72.706.755	4 Paket	52.286.874	paket barang cetakan yang		

			Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				disedikan adalah 4 paket paket		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.640.000	1163 Dokumen	5.310.000	koran/surat kabar yang disediakan sebanyak 1161 Eksemplar		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	569.049.000	20 Laporan	482.808.804	laporan perjalanan dinas sebanyak 191 Laporan		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretaria tan	657.754.900	90	619.100.925	hasil survei kepuasan didapatkan nilai indeks kepuasan sebesar = 89,84		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000	1 Laporan	5.000.000	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat berjumlah 1 laporan		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	118.200.000	1 Laporan	108.824.581	laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik		

				air, dan listrik				berjumlah 1 laporan		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	533.554.900	1 Laporan	505.276.344	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan berjumlah 1 laporan		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretaria tan	574.063.756,00	90	534.821.236,00	hasil survei kepuasan didapatkan nilai indeks kepuasan sebesar = 89,84		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	233.510.000	20 Unit	208.466.865	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya berjumlah 20 Unit		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43.370.000	65 Unit	37.565.000	peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharahan dalam 1 tahun adalah 65 buah		
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Jumlah Gedung	297.183.756	3 Unit	288.789.371	gedung kantor yang		

			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				dipelihara dalam 1 tahun adalah 3 buah gedung		
		Program Kepegawaian Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi kepegawaian Daerah	5.162.529.993	90	4.524.526.428	hasil survei kepuasan terhadap layanan kepegawaian adalah 90,74		
			Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan, Pemberhentian, & Informasi Kepegawaian	2.050.571.141	90	1.747.542.536	hasil survei kepuasan terhadap layanan kepegawaian adalah 91,32		
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	28.583.000	1 dokumen	12.140.400	Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN adalah 1 dokumen		
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan	97.256.430	1 Dokumen	77.805.144	Dokumen hasil Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan		

				Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				PNS dan PPPK adalah 1 dokumen		
			Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	516.563.760	1 Laporan	470.201.147	laporan hasil evaluasi pengadaan ASN adalah 1 laporan		
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	661.853.075	1 Dokumen	520.985.615	Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian adalah 1 dokumen		
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	616.331.076	1 Lembaga	567.742.793	1 lembaga yang telah difasilitasi yang lembaga korpi		
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	129.983.800	1 Dokumen	98.667.437	dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian tahun 2024 sebanyak 1 dokumen		
			Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Mutasi dan Promosi ASN	779.263.852	90	680.206.497	hasil survei kepuasan terhadap layanan kepegawaian adalah sebesar 91,32		

			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	185.719.217	1 Dokumen	188.243.136	Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah sebanyak 1 dokumen		
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	326.961.387	800 Dokumen	319.046.937	dokumen keputusan Kenaikan Pangkat ASN selama tahun 2024 sebanyak 659 dokumen	banyak usulan kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional wajib melalui i-mut jadi terhambat dari usulan tahun 2024 sebanyak 1041, 382 ditolak dan 659 yang dapat diproses kenaikan pangkat	pengusulan kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional yang naik jabatan terlebih dahulu mengusulkan kenaikan jabatan sehingga tidak mengurangi dan proses kenaikan pangkat
			Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	266.583.248	1 Dokumen	172.916.424	Dokumen laporan Hasil Pengelolaan Promosi ASN sebanyak 1 dokumen		

			Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Peningkatan Pendidikan	1.837.740.748,00	100%	1.615.715.457,00	PNS yang menyelesaikan pendidikan telah diberikan pencantuman gelar dengan capaian i 100%		
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	660.650.300	70 orang	595.448.318	68 PNS yang melakukan pencantuman gelar, 55 PNS yang mengikuti uji kompetensi, dan 203 PNS yang mengikuti Assesment/ Pemetaan Kompetensi		
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1.177.090.448	60 Orang	1.020.267.139	152 orang PNS yang mendapatkan SK untuk melanjutkan pendidikan		
			Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja ASN	494.954.252,00	90	481.061.938,00	hasil survei kepuasan terhadap layanan kepegawaian adalah 90,74		
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian	102.108.002	4 Dokumen	93.995.300	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi		

				dan Evaluasi Kinerja Aparatur				Kinerja Aparatur sebanyak 4 Dokumen Laporan		
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	145.033.950	100 PNS	141.651.034	selama tahun 2024 telah diberikan penghargaan satya lencana kepada 130 orang ASN		
			Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	202.327.300	4650 Dokumen	200.037.300	telah diberikan pembinaan kedisiplinan kepada 5 orang yang melakukan pelanggaran dan telah diberikan hukuman disiplin		
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	22.475.000	1 Dokumen	22.368.304	dokumen Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN sebanyak 1 dokumen		
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	23.010.000	10 Dokumen	23.010.000	Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 11 Dokumen		

		Program Pengembangan Sumber Daya manusia		Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	2.805.220.762	100%	2.695.245.776	100%		
			Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pengembangan Kompetensi teknis (Persen)	869.854.460	100%	739.440.662	dari 127 orang yang mengikuti diklat seluruhnya dinyatakan lulus sehingga didapatkan realisasi 100%		
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	869.854.460	100 Orang	739.440.662	selama tahun 2024 ada 117 ASN yang mengikuti diklat teknis		
			Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pengembangan manajerial dan fungsional (Persen)	1.935.366.302	100%	1.955.805.114	dari 637 ASN yang mengikuti diklat teknis, fungsional dan diklat kepemimpinan semuanya		

								dinyatakan lulus sehingga didapatkan capaian 100%		
			Penyelenggara an Pengembang an Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelengg araan Pengemban gan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpin an, dan Prajabatan	1.935.366.302	2 Laporan	1.955.805.114	Laporan Hasil Penyelenggar aan Pengembang an Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpina n, dan Prajabatan sebanyak 2 Laporan kegiatan		
			Pengembang an Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase Pengemban gan Kompetensi Pemerintah an Dalam Negeri		100%	-			
			Penyelenggara an Pengembang an Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengemban gan Kompetensi Pemerintah an Dalam Negeri	-	-	-	-	Anggaran dipindahkan ke subkegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN karena sekolah kedinasan	

									kepomongpraj aan harus disertai dengan pencantuman gelar	

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD BKPSDM, Tahun 2024

e. Sekretariat Daerah

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Nilai AKIP; Indeks Pelayanan Kesekretariatan; Prosentase SAKIP SKPD yang Berpredikt BB; Persentase tingkat pelayanan protokol dan komunikasi kepala daerah / wakil kepala daerah	Rp38.737.275.675,00	73; 90; 50%; 100%	Rp.47.948.630.072,00	72; 89; 35%; 100%		

	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, anggaran dan pelaporan dengan seluruh bagian di sekretariat daerah kab. Tabalong		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Rp77.842.173,00	118 Dokumen	Rp69.991.700,00	118 Dokumen		
	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, anggaran dan pelaporan dengan seluruh bagian di sekretariat daerah kab. Tabalong		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp33.588.203,00	26 Dokumen	Rp30.399.500,00	26 Dokumen		
	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, anggaran dan pelaporan dengan		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Rp5.710.920,00	30 Dokumen	Rp5.670.000,00	30 Dokumen		

	seluruh bagian di sekretariat daerah kab. Tabalong			DPA-SKPD						
	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, anggaran dan pelaporan dengan seluruh bagian di sekretariat daerah kab. Tabalong		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp6.977.050,00	12 Laporan	Rp6.510.000,00	12 Laporan		
	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, anggaran dan pelaporan dengan seluruh bagian di sekretariat		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp31.566.000,00	50 Laporan	Rp27.412.200,00	50 Laporan		

	daerah kab. Tabalong									
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Rp24.287.525.169,00	1060 Dokumen	Rp22.253.995.332,00	1060 Dokumen		
	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dengan seluruh bagian di sekretariat daerah kab. Tabalong		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp24.099.067.000,00	114 Orang / bulan	Rp22.084.227.817,00	105 Orang / bulan		
	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dengan seluruh bagian di sekretariat daerah kab. Tabalong		Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Rp164.218.747,00	1000 Dokumen	Rp149.873.687,00	1000 Dokumen		

	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dengan seluruh bagian di sekretariat daerah kab. Tabalong		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Rp24.239.422,00	24 Laporan	Rp19.893.828,00	24 Laporan		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum dan Perkantoran	Rp277.200.000,00	100 %	Rp252.000.000,00	100 %		
	Memberikan fasilitasi pelayanan tata usaha dan kepegawaian		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp277.200.000,00	1 Dokumen	Rp252.000.000,00	1 Dokumen		

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksana nya Pelayanan Administra si Kepegawai an lingkup Sekretariat Daerah	Rp190.273.000,00	100 %	Rp168.585.586,00	100 %		
	Memberikan fasilitasi pelayanan perlengkap an kerja aparatur setda		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap an	Rp287.210.000,00	2 Paket	Rp168.585.586,00	2 Paket		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksana nya Pelayanan Administra si Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Rp2.950.681.981,00	100 %	Rp540.000.000,00	100 %		
	Memberikan fasilitasi pelayanan perlengkap an kerja aparatur setda		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp75.615.000,00	2 Paket	Rp245.427.017,00	2 Paket		

	Memberikan fasilitas pelayanan perlengkapan kerja aparatur setda		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp190.000.000,00	11 Paket	Rp2.804.254.510,00	11 Paket		
	Memberikan fasilitas pelayanan perlengkapan kerja aparatur setda		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp4.668.683.000,00	1 Paket	Rp62.517.117,00	1 Paket		
	Memberikan fasilitas pelayanan kedinasan terhadap KDH dan WKDH		Fasilitas Kunjungan Tamu		Rp6.485.048.600,00	1 Laporan	Rp190.000.000,00	1 Laporan		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp2.079.000.000,00	6 Laporan	Rp4.594.629.457,00	6 Laporan		

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana nya Penyediaa n Jasa Penunjang lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Rp4.406.048.600,00	100 %	Rp5.648.731.198,00	100 %		
	Memberikan fasilitasi pelayanan perlengkap an kerja aparatur setda		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp10.323.272.453,00	9 Laporan	Rp1.887.823.138,00	9 Laporan		
	Memberikan fasilitasi pelayanan tata usaha dan kepegawaian		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp1.934.550.000,00	2 Laporan	Rp3.760.908.060,00	2 Laporan		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana nya Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp200.335.000,00	100 %	Rp7.703.412.391,00	100 %		

				Pemerintah Daerah						
	Memberikan fasilitas pelayanan perlengkapan kerja aparatur setda		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp8.188.387.453,00	5 Unit	Rp1.574.007.630,00	5 Unit		
	Memberikan fasilitas pelayanan perlengkapan kerja aparatur setda		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp777.725.000,00	4 Unit	Rp181.085.588,00	4 Unit		
	Memberikan fasilitas pelayanan perlengkapan kerja aparatur setda		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Rp177.725.000,00	8 Unit	Rp5.948.319.173,00	8 Unit		

			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan serta Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibayarkan	Rp600.000.000,00	14 bulan	Rp565.961.520,00	14 bulan		
	Memberikan fasilitas pelayanan kedinasan terhadap KDH dan WKDH		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp4.141.755.210,00	2 Orang / Bulan	Rp25.961.520,00	2 Orang / Bulan	Gaji KDH stop di bulan April	
	Memberikan fasilitas pelayanan kedinasan terhadap KDH dan WKDH		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp2.713.397.210,00	2 Orang / Bulan	Rp540.000.000,00	2 Orang / Bulan		

			Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terfasilitasi nya ke rumah tangga an Sekretariat Daerah	Rp0,00	100 %	Rp3.503.638.007,00	100 %		
	Memberikan fasilitas pelayanan kedinasan terhadap KDH dan WKDH		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Rp1.428.358.000,00	14 Paket	Rp2.118.232.511,00	14 Paket		
	Memberikan fasilitas pelayanan kedinasan terhadap KDH dan WKDH		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Rp1.013.839.350,00	9 Paket	Rp0,00	9 Paket		
	Memberikan fasilitas pelayanan perlengkapan kerja aparatur setda		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Rp297.328.150,00	2 Paket	Rp1.385.405.496,00	2 Paket		

			Penataan Organisasi	Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik	Rp305.766.000,00	100 %	Rp952.983.651,00	100 %		
	Melaksanakan evaluasi, analisis jabatan dan atau beban kerja SKPD berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp410.745.200,00	4 Dokumen	Rp285.580.769,00	4 Dokumen	Sosialisasi Sistem Kerja tidak jadi dilaksanakan karena Narasumber tidak bisa hadir	Akan dilakukan rasionalisasi dengan koordinasi dengan instansi terkait
	Melengkapi regulasi bidang ketatalaksanaan dan peningkatan pemahaman perangkat daerah terhadap kualitas pelayanan publik		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp1.393.157.287,00	5 Laporan	Rp299.467.884,00	4 Laporan		

	Meningkatkan efektivitas fungsi koordinasi antar perangkat daerah sesuai dengan tupoksi		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp636.585.465,00	3 Dokumen	Rp367.934.998,00	8 Dokumen	Persiapan Peningkatan Nilai SAKIP dengan KemenPAN RB tidak dilaksanakan karena wewenangny a pindah ke Bapperida	
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Pelayanan Ke Protokol an Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Rp332.670.000,00	100 %	Rp1.336.592.148,00	100 %		
	Fasilitasi dan koordinasi pelayanan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Rp423.901.822,00	299 Laporan	Rp599.342.118,00	299 Laporan	Pajak PPN sebagai SILPA dan efesiensi	
	Fasilitasi peliputan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp287.210.000,00	280 Laporan	Rp326.561.173,00	280 Laporan		

	Fasilitasi dan Koordinasi pengelolaan informasi melalui media massa dan media elektronik serta dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp2.950.681.981,00	312 Laporan	Rp410.688.857,00	312 Laporan		
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang Disusun Tepat Waktu; Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan; Persentase Pembentukan Produk Hukum	Rp75.615.000,00	100%; 100%; 100%	Rp245.427.017,00	100%; 100%; 100%		

	Fasilitasi dan Koordinasi pengumpulan data untuk penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan		Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	Rp190.000.000,00	100 %	Rp2.804.254.510,00	100 %		
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp4.668.683.000,00	17 Dokumen	Rp62.517.117,00	14 Dokumen		
	Fasilitasi dan Koordinasi pengumpulan data untuk penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan kegiatan di		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp6.485.048.600,00	5 Dokumen	Rp190.000.000,00	5 Dokumen	1. Kunker KDH ke Kecamatan / Desa hanya dilakukan 1 kali 2. Pemeliharaan Pilar Batas Kab tidak semua rusak parah	1. Tahun 202 Kunker aka ditambah (Bunga Desa minimal 1 bulan 1 kecamatan 2. Temu warga di pendopo pe 3 bulan sekali

	bidang administrasi kewilayahan									
	Fasilitasi dan Koordinasi pengumpulan data untuk penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan kegiatan di bidang otonomi daerah dan kerjasama		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp2.079.000.000,00	3 Dokumen	Rp4.594.629.457,00	3 Dokumen		
			Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp4.406.048.600,00	100 %	Rp5.648.731.198,00	100 %		
	Fasilitasi dan Koordinasi pengumpulan data untuk penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp10.323.272.453,00	2 Dokumen	Rp1.887.823.138,00	2 Dokumen		

	n serta pelaksanaan kegiatan di bidang otonomi daerah dan kerjasama									
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Implementasi Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	Rp1.934.550.000,00	100 %	Rp3.760.908.060,00	100 %		
	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan keagamaan		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp200.335.000,00	20 Dokumen	Rp7.703.412.391,00	20 Dokumen	1. Pajak PPN sebagai SILPA 2. Efisiensi Perjadin dan Makan minum	
	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Rp8.188.387.453,00	136 Dokumen	Rp1.574.007.630,00	136 Dokumen	1. Hibah (780jt) karena Pergantian Kepengurusan, penambahan perubahan dari risalah tapi sudah dianggarkan	Perlu dilibatkan di finishing

				yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB					di induk, penerima hibah tidak melengkapi berkas pencairan 2. Efisiensi Perjadin dan Makan minum	
	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, pariwisata, kesehatan dan tenaga kerja		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahter	Rp 777.725.000,00	24 Dokumen	Rp 181.085.588,00	24 Dokumen	Efisiensi Perjadin dan Makan minum	

				aan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas						
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terfasilitasi nya dan Terkoordinasinya Produk dan Layanan Hukum	Rp177.725.000,00	100 %	Rp5.948.319.173,00	100 %		
	Memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan sosialisasi regulasi sesuai tugas pokok dan fungsinya		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Rp600.000.000,00	280 Dokumen	Rp565.961.520,00	280 Dokumen	Kendala Eksternal : SKPD tidak siap, DPRD (penjadwalan karena Pemilu), Biro Hukum Prov dan Kemenhumh	SK Properd akan dijadwalkan

									am baru dari 20 hanya 9 jadi Perda	
	Memberikan fasilitasi dalam penyelesaian kasus hukum sesuai tugas pokok dan fungsinya		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatk an Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp4.141.755.210,00	12 Kasus	Rp25.961.520,00	12 Kasus	Register perkara sesuai kasus sehingga silpa	2 Kegiatan untuk Banku masyarakat miskin
	Memberikan fasilitasi dalam sosialisasi regulasi sesuai tugas pokok dan fungsinya		Pendokument asian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumen tasi	Rp2.713.397.210,00	690 Dokumen	Rp540.000.000,00	690 Dokumen	Perjadin ke Kecamatan ttg Paralegal Justice Award tidak dilaksanakan	PJA aka dilakukan 2025 da Lomba Kadarkum
		Program Perekonomian dan Pembangunan		Persentase Tingkat Sinkronisa si dan Penyelaras an Sektor Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Administra si Pembangu nan; Persentase Tingkat Pelayanan	Rp0,00	100%; 100%	Rp3.503.638.007,00	100%; 100%		

				Pengadaa n Barang dan Jasa						
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomia n	Terlaksana nya Singkronis asi dan Penyelaras an Kebijakan Perekono mian	Rp1.428.358.000,00	100 %	Rp2.118.232.511,00	100 %		
	Monitoring dan evaluasi serta fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang sarana perekonomia n		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisa si, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaa n BUMD dan BLUD	Rp1.013.839.350,00	4 Dokumen	Rp0,00	4 Dokumen		
	Monitoring dan evaluasi serta fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang sarana perekonomia n		Pengendalian dan Distribusi Perekonomia n	Jumlah Laporan Hasil Pengendali an dan Distribusi Perekono mian	Rp297.328.150,00	2 Laporan	Rp1.385.405.496,00	2 Laporan	Waktu tidak cukup untuk operasi pasar dan sidak ke produsen	

	Monitoring dan evaluasi serta fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang sarana perekonomian		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp305.766.000,00	1 Dokumen	Rp952.983.651,00	1 Dokumen	Studi Banding tentang Makanan disajikan dalam bentuk kalengan tidak jadi	Telah dianggarkan 2025
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan Daerah	Rp410.745.200,00	100 %	Rp285.580.769,00	100 %		
	Monitoring dan evaluasi serta fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam Administrasi Pembangunan		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Rp1.393.157.287,00	2 Dokumen	Rp299.467.884,00	2 Dokumen	Monev Program Pembangunan tidak sempat dikerjakan karena tumpang tindih dengan Bapperida	Ekobang Monev Proye Strategis da APBN, APB Prov dan Kab

	Monitoring dan evaluasi serta fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam Administrasi Pembangunan		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp636.585.465,00	4 Laporan	Rp367.934.998,00	4 Laporan		
	Monitoring dan evaluasi serta fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam Administrasi Pembangunan		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp332.670.000,00	2 Laporan	Rp1.336.592.148,00	2 Laporan		
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terkoordinasi, Selaras dan Sinkronisasinya Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp423.901.822,00	100 %	Rp599.342.118,00	100 %		

	Monitoring dan evaluasi serta fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang Sumber Daya Alam		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Rp287.210.000,00	2 Dokumen	Rp326.561.173,00	2 Dokumen		
	Monitoring dan evaluasi serta fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang Sumber Daya Alam		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral,	Rp2.950.681.981,00	2 Dokumen	Rp410.688.857,00	2 Dokumen		

				Lingku n Hidup, Kominfo, Perhubung an, Statistik, Persandian						
	Monitoring dan evaluasi serta fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang Sumber Daya Alam		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisa si, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumaha n Rakyat dan Kawasan Permukima n, Pertanaha n	Rp75.615.000,00	2 Dokumen	Rp245.427.017,00	2 Dokumen		

			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp190.000.000,00	100 %	Rp2.804.254.510,00	100 %		
	Fasilitasi dan konsultasi pengadaan barang dan jasa		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pengadaa n Barang dan Jasa	Rp4.668.683.000,00	150 Dokumen	Rp62.517.117,00	150 Dokumen		
	Fasilitasi pendataan dan dokumentasi pengadaan barang dan jasa		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaa n Secara Elektronik	Rp6.485.048.600,00	3 Dokumen	Rp190.000.000,00	3 Dokumen	Pembekalan Anggota DPRD baru ditunda Waktu pendaftaran TKDN	Dimasukkan perubahan 2025 untu pembekalan anggota DPR baru
	Fasilitasi dan sosialisasi tentang pengadaan barang dan jasa		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi v g Pengadaa n Barang dan Jasa	Rp2.079.000.000,00	150 Orang	Rp4.594.629.457,00	150 Orang		

JUMLAH	Rp213.415.143.789,00		Rp110.242.556.438,00			

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah, Tahun 2024

f. Sekretariat DPRD

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatkan kualitas pelayanan tugas dan fungsi DPRD yang cepat, transparan dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	44.629.056.304	100%	36.393.959.288	97,36		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen yang dihasilkan	358.376.418	100%	290.578.438	100,00		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	358.376.418	33 laporan	290.578.438	100,00		

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.023.164.558	100%	5.589.216.701	100,00		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.023.164.558	34 org/bln	5.589.216.701	100,00		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	3.525.535.281	100%	2.011.470.917	83,94		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23.346.325	4 Paket	19.441.000	100,00		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	726.530.332	4 Paket	524.252.700	300,00		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	855.747.000	12 Paket	644.450.500	100,00		
			Penyediaan Barang	Jumlah Paket	111.172.824	16 Paket	67.387.400	87,50	Item harga satuan	Tim SBU & SS agar dap

			Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					SIPD terlalu tinggi & dgn adanya pemberitahuan Non PKP menyebabkan silpa	menyesuaikan harga pada SIPD dan melakukan perencanaan lebih cermat lagi
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.808.738.800	190 Laporan	755.939.317	69,47	Pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan instruksi Pimpinan	Perjalanan dinas berdasarkan tupoksi masing masing pegawai
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang milik daerah yang diadakan	4.266.929.576	100%	2.611.624.143	88,00		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.266.929.576	125 Unit	2.611.624.143	88,00		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa urusan Set DPRD & DPRD	2.882.800.945	100%	2.606.037.086	100,00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	464.584.110	48 Laporan	464.584.110	100,00		

				Listrik yang Disediakan						
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.418.216.835	13 Laporan	2.141.452.976	100,00		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat/perlengkapan Kantor yang dipelihara	3.580.817.235	100%	2.417.728.130	84,95		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	830.914.000	37 Unit	408.993.672	91,89	Efisiensi dlm pemeliharaan	disesuaikan di penganggaran
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100.931.835	49 Unit	39.225.000	61,22		disesuaikan di penganggaran
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	2.648.971.400	49 Unit	1.969.509.458	83,67		

				Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi						
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	22.713.985.068	100%	20.090.244.812	98,40		
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	21.360.985.068	30 Org/Blm	19.243.082.882	100,00		
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1.320.000.000	4 Paket	847.161.930	75,00		
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	33.000.000	30 Org	-	0,00	Anggota DPRD menginginkan Medical Check Up di luar prov	Agar dpt merubah Perbup dg penyesuaian harga satuan Me
			Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya layanan administrasi DPRD	1.277.447.223	100%	777.059.061	93,57		
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan	342.395.200	25 Laporan	302.100.000	76,00		

				Konsultasi DPRD						
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	935.052.023	12 Paket	474.959.061	100,00	Efisiensi dlm pelaksanaan	disesuaikan dl penganggaran
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			39.434.148.346	100%	27.652.273.224	93,55		
				Persentase Tingkat Pelayanan Persidangan , Kehumasan dan Legislasi DPRD	34.161.114.604	100%	22.981.695.369	93,13		
				Persentase Tingkat Pelayanan Anggaran, Pengawasa n dan Aspirasi/Res es	5.273.033.742	100%	4.670.577.855	96,25		
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentuka n Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	9.560.141.400	100%	6.105.200.528	100,00		
			Penyusunan dan Pembahasan Program	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan	375.000.000	8 Dokumen	179.295.542	100,00	kegiatan berdasarkan Banmus DPRD	Koordinasi dg DPRD dpt leb baik lagi

			Pembentukan Peraturan Daerah	dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah						
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	69.996.820	8 Dokumen	47.377.600	100,00		
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Kajian Perundang-Undangan	9.115.144.580	32 Dokumen	5.878.527.386	100,00		
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	615.066.458	100%	345.520.128	100,00	kegiatan berdasarkan Banmus DPRD	Koordinasi dg DPRD dpt lebih baik lagi
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	13.544.100	1 Dokumen	3.660.000,00	100,00		
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	26.640.757	1 Dokumen	15.084.900	100,00		
			Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen	71.737.596	1 Dokumen	17.373.900	100,00		

				Hasil Pembahasan APBD						
			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	70.251.085	1 Dokumen	52.460.000	100,00		
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	432.892.920	1	256.941.328	100,00		
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tingkat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	350.800.000	100%	99.453.617	43,62	Realisasi msh rendah karena ada perubahan kebijakan/prioritas/agenda kegiatan	Memperkuat koordinasi dg Risalah dan Komisi DPRD untuk kepastian jadwal
			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	44.800.000	18 Laporan	12.017.000	27,78		Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan	44.000.000	20 Laporan	16.942.000	40,00		

				n Bidang Infrastruktur						
			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasa n Urusan Pemerintah n Bidang Kesejahtera an Rakyat	39.300.000	17 Laporan	17.388.000	52,94		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Urusan Pemerintah n Bidang Perekonomi an	44.400.000	17 Laporan	10.210.000	29,41		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Urusan Pemerintah n Bidang Sumber Daya Alam	47.800.000	19 Laporan	17.609.000	42,11		
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasa n Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	19.800.000	2 Laporan	9.552.617	100,00		

			Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	110.700.000	18 Laporan	15.735.000	44,44		
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	3.526.911.204	100%	1.472.917.801	95,22		
			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2.587.920.980	40 Dokumen	840.413.783	95,00		
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	938.990.224	98 Dokumen	632.504.018	93,88		
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi	4.223.067.284	100%	4.146.674.100	100,00		
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	60.779.884	60 Laporan	54.260.000	100,00		
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok	43.166.480	3 Dokumen	3.334.100	100,00		

				Pikiran DPRD yang Disusun						
			Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Reses	4.119.120.920	60 Dokumen	4.089.080.000	100,00		
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaa n dan Pengawasa n Kode Etik DPRD yang difasilitasi	84.100.000	100%	78.930.010	100,00		
			Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Kode Etik DPRD	84.100.000	2 Laporan	78.930.010	100,00		
			Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Tersusunny a Bahan Komunikasi dan Publikasi	12.075.000	100%	2.482.000	100,00		
			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12.075.000	1 Dokumen	2.482.000	100,00		
			Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi	21.061.987.000	100%	15.401.095.040	89,66		
			Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Dokumen	21.061.987.000	290 Dokumen	15.401.095.040	89,66		

			Pelaksanaan Tugas DPRD	Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						
					84.063.204.650		63.970.569.690			

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Sekretariat DPRD, Tahun 2024

g. Inspektorat

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Urusan pengawasan	2. Meningkatkan kepatuhan penyelesaian tindak lanjut Eksternal dan Internal	1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.757.500	Terlaksananya penyusunan perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 9 dokumen	23.784.500	Terlaksananya penyusunan perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 9 dokumen		
	3. Meningkatkan Mutualitas SPIP perangkat daerah	2. Program Penyelenggaraan Pengawasan							
	4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja entitas	3. Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.821.875.000	Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan & pelatihan berdasarkan tupoksi 100%	1.179.455.018	Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan & pelatihan berdasarkan tupoksi 100%		
	5. Terwujudnya zona integritas dengan		Administrasi Umum	1.384.141.349	Terlaksananya Rapat	788.866.882	Terlaksananya Rapat		

	predikat WBK 6. Meningkatnya kapabilitas APIP.		Perangkat Daerah		Koordinasi		Koordinasi		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.695.653.000	Tersedianya penggajian Karyawan 100%	10.956.122.141	Tersedianya penggajian Karyawan 100%		
			Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	682.186.280	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor 100%	589.217.192	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor 100%		
			Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda	422.222.987	Tersediaan peralatan fasilitas kantor 100%	401.620.000	Tersediaan peralatan fasilitas kantor 100%		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	296.532.019	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah 100%	170.291.238	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah 100%		
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.062.356.110	Persentase jumlah kegiatan pengawasan internal 100%	389.435.493	Persentase jumlah kegiatan pengawasan internal 100%		
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	278.194.000	Persentase Jumlah Kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu 100%	134.296.990	Persentase Jumlah Kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu 100%		

			Pendampingan dan Asistensi	934.295.330	Persentase implementasi Rencana Aksi Pencegahan korupsi pada 8 area intervensi 100%	527.885.205	Persentase implementasi Rencana Aksi Pencegahan korupsi pada 8 area intervensi 93%		

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Inspektorat Daerah, Tahun 2024

h. Badan Kesbangpol

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Unsur Pemerintahan Umum	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2019	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	122.169.000	Tersusunnya 8 Dokumen DPA, DPA Perubahan. Dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Perjanjian Kinerja, Renja, Renstra	122.040.600	Tersusunnya 8 Dokumen DPA, DPA Perubahan. Dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Perjanjian Kinerja, Renja, Renstra	-	-
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun	4.862.191.000	Pembayaran gaji ASN selama 12 bulan	3.943.780.878	Pembayaran gaji ASN selama 12 bulan	-	-
			Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen	62.625.000	Pelaksanaan bimbingan	52.869.230	Pelaksanaan bimbingan teknis	-	-

			n Perangkat Daerah	kepegawaian perangkat daerah yang disusun		teknis dan pengadaan pakaian dinas		dan pengadaan pakaian dinas		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	825.051.660	Penyediaan alat listrik, alat tulis kantor, barang cetakan penggandaan, serta perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, luar daerah luar provinsi selama 12 bulan	797.029.818	Penyediaan alat listrik, alat tulis kantor, barang cetakan penggandaan, serta perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, luar daerah luar provinsi selama 12 bulan	-	-
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	121.742.908	Pengadaan alat penyimpan perlengkapan kantor, mebeleur, alat pendingin, meja kursi pejabat, personal computer, dan peralatan computer lainnya	107.992.253	Pengadaan alat penyimpan perlengkapan kantor, mebeleur, alat pendingin, meja kursi pejabat, personal computer, dan peralatan computer lainnya		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	860.139.362	Pembayaran telepon, sumber daya air, listrik, internet, materai, dan honorarium tenaga kontrak	687.494.891	Pembayaran telepon, sumber daya air, listrik, internet, materai, dan honorarium tenaga kontrak	-	-

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor	600.105.351	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 serta pemeliharaan sarana prasarana pendukung gedung kantor	590.432.178	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 serta pemeliharaan sarana prasarana pendukung gedung kantor	-	-
Unsur Pemerintahan Umum	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2019	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan	2.070.086.118	Sosialisasi para pelajar SLTA/ sederajat	1.491.575.314	Sosialisasi para pelajar SLTA/ sederajat	Jumlah peserta sosialisasi masih terbatas dan peserta selama ini hanya para pelajar SLTA/ sederajat, belum mencakup elemen masyarakat dan hanya dilakukan di Kabupaten/ kota	Di perlukan ketersediaan anggaran/ penambahan anggaran
Unsur Pemerintahan Umum	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2019	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik	29.545.193.568	Untuk pelaksanaan kegiatan pembayaran bantuan keuangan kepada 10 parpol (Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, PKS, PKB, PDIP, PPP, Nasdem,	29.151.468.023	Untuk pelaksanaan kegiatan pembayaran bantuan keuangan kepada 10 parpol (Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, PKS, PKB, PDIP, PPP, Nasdem, Berkarya) yang memperoleh kursi legislative DPRD	Kurangnya SDM yang ada dikepengurusan parpol dalam pembuatan SPJ terutama dalam pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, adanya pergantian kepengurusan	Melakukan bimtek pengelolaan keuangan parpol, melakukan pembimbingan kepada pengurus parpol dalam melakukan pembuatan SPJ sesuai dengan

		Budaya Politik	n Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			Berkarya) yang memperoleh kursi legislative DPRD Kab. Tabalong periode 2019-2024 TA.2024, Bimbingan teknis pengelolaan keuangan partai politik, pemantauan politik daerah, penyuluhan kepada masyarakat dan pemantauan pemilihan kepala desa		Kab. Tabalong periode 2019-2024 TA.2024, Bimbingan teknis pengelolaan keuangan partai politik, pemantauan politik daerah, penyuluhan kepada masyarakat dan pemantauan pemilihan kepala desa	dalam parpol, masih kurangnya jumlah bimtek yang dilakukan kepada parpol, terlambatnya laporan camat kepada Badan Kesbangpol, kurangnya jumlah sosialisasi yang dilaksanakan ke kecamatan, sehingga tidak semua elemen masyarakat dapat mengikutinya, kurangnya jumlah dana yang tersedia.	ketentuan dan peraturan yang berlaku, melakukan pemantauan secara langsung ke kecamatan, melakukan sosialisasi ke sekolah/kecamatan, secara optimal, melakukan upaya usulan penambahan dana kegiatan untuk mendukung program dan kegiatan dibidang politik.
Unsur Pemerintahan Umum	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2019	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan LSM dan ormas	760.171.000	Pertemuan/diskusi publik LSM dengan SKPD Pemkab Tabalong, Peningkatan wawasan Kebangsaan anggota LSM keluar daerah (Surabaya)	528.144.600	Pertemuan/diskusi publik LSM dengan SKPD Pemkab Tabalong, Peningkatan wawasan Kebangsaan anggota LSM keluar daerah (Surabaya)	Masih kurangnya jumlah pertemuan dengan SKPD yang dilakukan 1 tahun, kemampuan SDM anggota LSM masih cukup rendah, masih kurangnya pembinaan terhadap ormas khususnya	Melakukan penggabungan kepada SKPD dalam kegiatan diskusi public, melakukan peningkatan wawasan kebangsaan kepada anggota LSM kalau perlu disertai bimtek, perlunya melakukan

									LSM, sulitnya melakukan pendataan keberadaan ormas untuk dijadikan data yang valid	pembinaan dan pengawasan secara intens kepada ormas khususnya kepada LSM, melakukan upaya usulan penambahan dana kegiatan untuk mendukung program dan kegiatan dibidang ormas.
Unsur Pemerintahan Umum	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2019	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi	1.046.429.420	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosialisasi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang	564.044.827	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosialisasi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama dan	Kurangnya sosialisasi dan monitoring ke lapangan	Di perlukan ketersediaan anggaran

						ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.		fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.		
Unsur Pemerintahan Umum	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2019	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah penanganan konflik sosial dengan forum-forum di kabupaten tabalong	8.875.664.000	Melaksanakan rapat forum-forum dan tim-tim FPK (forum pembauran kebangsaan), FKDM (forum kewaspadaan dini masyarakat), tim terpadu penanganan konflik sosial dan tim kewaspadaan pemerintah daerah di kabupaten dan di kecamatan, melaksanakan monitoring hari raya idul fitri, hari natal dan tahun baru.	8.013.919.459	Melaksanakan rapat forum-forum dan tim-tim FPK (forum pembauran kebangsaan), FKDM (forum kewaspadaan dini masyarakat), tim terpadu penanganan konflik sosial dan tim kewaspadaan pemerintah daerah di kabupaten dan di kecamatan, melaksanakan monitoring hari raya idul fitri, hari natal dan tahun baru.	Tim dan forum-forum daerah yang di daerah menangani deteksi dini dan penanganan konflik belum bekerja maksimal. Pada kegiatan penanganan orang asing masih adanya data yang tidak sinkron antar instansi terkait.	Koordinasi tim pemantau yang di bentuk harus bekerja maksimal.

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Badan Kesbangpol, Tahun 2024

i. Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Bidang Penanaman Modal)

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,060,056.00	10 Dokumen	17,433,500.00	10 Dokumen	Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan proses yang terintegrasi oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran	
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	23,060,056.00	10 Dokumen	17,433,500.00		capaian kinerja tercapai sesuai target yang direncanakan	akan lebih menyesuaikan dengan rencana kegiatan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,471,987,000.00	14 Bulan	5,047,455,834	14 Bulan		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,471,987,000.00	14 Bulan	5,047,455,834.00		Pembayaran gaji PNS sesuai dengan apa yang tersusun dalam anggaran kas	Pembayaran gaji PNS sesuai dengan apa yang tersusun dalam anggaran kas
			Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	266,632,000	15 orang	190,944,826	15 org	tidak terserapnya anggaran karena honorarium narasumber sesuai dengan serapan dana kontribusi untuk mengikuti diklat kecil,karena diklat	akan lebih meningkatkan wawasan karyawan/ti di DPMPTSP

								yang diikuti hanya perjalanan dinas saja	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	266,632,000.00	15 orang	190,944,826.00		Kurangnya tenaga ASN yang menguasai bahasa asing khususnya dalam hal promosi penanaman modal	tambahan ASN khususnya yang memiliki keahlian Bahasa dan ASN yang menguasai Informasi Teknologi.
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,896,407,410	111 Item	1,801,886,028	110 item		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26,117,643.00	2 paket	22,669,000	2 paket	Penyediaan komponen listrik sesuai dengan target	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,402,029,799.00	23 paket	1,329,511,000	23 paket	Bertambahnya anggaran karena adanya pergeseran menyesuaikan belanja kegiatan dan tambahan untuk pembelian ginset	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	105,468,780.00	5 paket	90,739,775	5 paket	semua barang persediaan tersedia sampai akhir tahun	Akan mengelola dan menggunakan atk sesuai dengan keperluan
			Peraturan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20,292,626.00	3 paket	20,000,000	3 paket	tercapai sesuai target	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342,498,562.00	110 Laporan	338,966,253.00	110 laporan	anggaran yang ada banyak dimanfaatkan untuk undangan ke provinsi/luar daerah dalam provinsi	akan lebih meningkatkan wawasan sebagai bahan peningkatan pengetahuan

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,813,979,200	12 Bulan	1,547,098,970	12 bulan		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	385,900,000.00	12 bln	325,059,628.00	12 bln	tercapai sesuai target ,pembayaran iuran listrik,PDAM dan internet sesuai dengan tagihan	akan lebih meningkatkan kinerja dan sesuai dengan yang telah direncanakan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,428,079,200.00	12 bln	1,222,039,342.00	12 bln	Target telah tercapai	akan lebih meningkatkan kinerja dan sesuai dengan yang telah direncanakan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	662,394,036	117 Unit	368,393,017	93 Unit		akan lebih meningkatkan pemeliharaan barang milik daerah agar bisa terpelihara
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	379,640,000.00	17 unit	187,989,313.00	17 unit	target tercapai dalam pemeliharaan kendaraan roda 4 ada 5 buah dan 12 unit kendaraan roda 2 namun untuk modifikasi mobil jempol ibi belum terlaksana karena terkendala waktu pelaksanaan	akan lebih meningkatkan pemeliharaan operasional kendaraan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47,564,536.00	105 unit	33,857,000.00	105 unit	Terpeliharanya peralatan dan mesin yang ada d DPMPTSP dan MPP	akan lebih meningkatkan pemeliharaan peralatan kantor

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	235,189,500.00	1 unit	146,546,704.00	1 unit	Terpeliharanya gedung kantor DPMPSTSP dan MPP serta pembuatan rumahan ginset sesuai dengan perencanaan	akan menganggarkan dana tambahan pemeliharaan gedung kantor
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi investasi PMDN dan PMA	295,369,000	1,010,000,000,000	228,620,219	3,295,609,227,268.00		
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	47,340,000.00	1 kajian	47,127,632	1 kajian		
			Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kota	47,340,000.00		47,127,632		Pelaksanaan kegiatan diakhir tahun anggran dikarenakan adanya perubahan total rincian kegiatan yang disebabkan pergantian kepala bidang	mengingat masih banyaknya Pelaku Usaha Besar yang bertersosialisasi kewajiban tersebut maka anggaran untuk kegiatan sosialisasi tersebut sangat diperlukan mengingat fakta saat pelaksanaan kegiatan hamper semua Pelaku Usaha Besar tidak memahami kewajiban tersebut bahkan tidak bisa membedakan adakan kemitraan dengan tanggung

									jawab sosial Perusahaan (CSR)
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	248,029,000	1 kajian	228,620,219	1 kajian		
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	248,029,000.0 0	1 kajian	228,620,219.00		Kurangnya anggran biaya untuk melakukan kajian potensi investasi untuk semua sektor usaha	sangat diperlukan tambahan anggaran dari pagu yang tersedia mengingat kebutuhan untuk ketersediaan dokumen kajian Pra Feasibility Studi Potensi dan Peluang Investasi Persektor sangat diperlukan sebelum dilanjutkan untuk menjadi dokumen Dokumen Proyek Investasi yang siap ditawarkan (IPRO)
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang berminat menanamkan modal	994,795,999	20 investor	1,357,682,867	20 investor		
			Penyelenggaraan Promosi penanman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	994,795,999	20 investor	1,357,682,867	20 investor		Menambah besaran anggaran untuk promosi tunggal, sehingga promosi yang dilakukan dapat maksimal serta menganggarkan kegiatan untuk menyusun peta potensi dan peluang investasi

									dan membuat kajian Invesment Project Ready to Offer
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	555,163,270.00	5 kali	549,141,288.00		Kabupaten Tabalong belum memiliki dokumen IPRO (Investment Project to Offer) sebagai produk promosi untuk menarik investor	dalam rangka optimalisasi promosi penanaman modal sangat diperlukan ketersediaan anggaran untuk penyusunan dokumen IPRO (Investment Project Ready To Offer) atau Dokumen Proyek Investasi yang siap ditawarkan yang berskala internasional dan berbasis kebutuhan penanaman modal (investor needs) dan ini mutlak harus dimiliki daerah untuk dapat mempromosikan potensinya
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	439,632,729.00	5 kali	397,803,052.00		Penyusunan kajian dilaksanakna pada akhir tahun anggran dikarenakan adanya perubahan kegiatan inti yang dikarenakan pergantian Kepala Bidang dan PPTK	

		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Skor Standar Kepuasan Masyarakat	661,512,017	90	410,738,527	95.76	tercapainya kinerja dari target 90 terealisasi 95.76	akan lebih meningkatkan kinerja SKM
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	661,512,017	2500 izin	410,738,527	3620 Izin	capaian melebihi target	Melakukan kegiatan inovasijempol ibu (Jemput Bola Pelayanan Perizinan Berusaha)dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada msyarakat yang ada diluar kota tanjung untuk membuat izin usaha mereka tanpa jauh-jauh datang meluangkan waktu ke tanjung untuk mengurus izin usaha dan dengan bertambahnya sarana untuk kegiatan tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan kegiatan jempol ibu sampai kedesa-desa
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis	413,280,256.0 0	480 Pelaku usaha	287,227,563	571 Pelaku Usaha	target tercapai sesuai dengan rencana	Akan menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana

			Risiko Terintegrasi secara Elektronik						
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	167,332,059.00	127 Kegiatan Usaha	123,510,964	221 Kegiatan Usaha	realisasi anggaran masih banyak tersisa karena honor tim teknis perizinan hal ini disebabkan ada beberapa anggota tim teknis yang promosi dan dimutasi sehingga tidak lagi termasuk dalam tim	akan lebih memaksimalkan anggaran sesuai peruntukannya
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	80,899,702.00	20 Pelaku Usaha	57.699.202	21 Pelaku Usaha		
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian pelaksanaan modal dan informasi penanaman modal	867,313,519	84%	597,759,737	68.92%		
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	867,313,519	84%	597,759,737	68.92%	Pelaku usaha tidak ada dilokasi kegiatan usaha, hanya pekerja saja yang berada di lokasi sehingga menyulitkan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	Membuat agenda pamantauan yang jelas sehingga pelaku usaha bisa mengkondisikan waktunya
			Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha	126,158,976.00	80 kali	11,916,500.00	31 keg usaha	Lokasi tempat usaha yang berpindah pindah	melakukan pendekatan personal kepada pelaku usaha agar

			dalam merealisasikan kegiatan usahanya]						pelaku usaha mentaati peraturan yang ada
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	456,940,823.00	90 pelaku usaha	409,378,100.00	313 Pelaku Usaha	Masih banyak pelaku usaha yang belum mengerti tentang Nomor Induk Berusaha	Memberikan pemahaman tentang NIB melalui Bimtek
			Pengawasan Penanaman Modal	284,213,720.00	80 pelaku usaha	176,465,137.00	136 Pelaku usaha	Alamat Usaha yang terdaftar berbeda dengan kegiatan usaha	melakukan pendekatan personal kepada pelaku usaha agar pelaku usaha mentaati peraturan yang ada
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengelolaan data dan informasi penanaman modal	1,100,865,164	100%	852,628,602	100%		
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,100,865,164.00	2 sistem	852,628,602	2 sistem		Melaksanakan pengembangan palit online terintegrasi dengan 7 SKPD teknis
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	1,100,865,164.00	2 sistem	852,628,602.00		- Website terkena hacking sehingga menghambat proses penyajian data dan informasi - Ada terjadi selisih spesifikasi yang di rencanakan dengan harga pasar yang tersedia	Pembuatan website bari sesuai saran Dinas Kominfo dan Pengadaan Videotron Outdoor untuk penyeber luasan informasi

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Tahun 2024

j. Kecamatan

1) Kecamatan Tanjung

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec. Tanjung 2021-2024)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		12.017.808.961	A	11.157.589.098	-	Belum ada hasil penilaian Sakip dari inspektorat	Melakukan koordinasi dengan Inspektorat terkait hasil penilaian sakip Kecamatan
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.626.020	26 dok	46.673.500	26 dok		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.157.261.776	100%	7.676.098.901	100%	Kelebihan pada Belanja Tunjangan Fungsional PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Perlu koordinasi dengan bidang anggaran terkait penepatan pagu dengan jumlah ASN yg ada di kecamatan
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.100.912	2 dok	8.000.000	2 dok		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.690.313.049	100%	1.494.941.794	100%	Masih merujuk pada undangan bimtek/sosialisasi/workshop	Akan lebih banyak berkoordinasi dan konsultasi serta

								yang masuk ke kecamatan	keikutsertaan terkait undangan yang ada
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.067.264.916	100%	980.812.586	100%	Realisasi air, listrik dan internet sudah sesuai dengan jumlah tagihan tiap bulannya	Dalam penyusunan anggaran untuk rekening belanja tersebut akan lebih mendekati dengan realisasi tiap bulannya
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.045.242.288	12 bln	951.062.317	12 bln	Untuk pelaksanaan rehab gedung masih terkendali lambatnya kelengkapan dokumen pihak ke 3 yang di minta	Kedepannya akan lebih berkoordinasi dengan pihak ke 3 untuk pengadaan rehab terkait kelengkapan dokumen
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		445.916.859	73,96	436.963.108			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	162.033.479	1 Keg	155.358.108	1 Keg	Ada beberapa rincian belanja yang belum terakomodir untuk kegiatan MTQ	Tetap berusaha melaksanakan kegiatan secara optimal dan berupaya untuk memasukan rincian belanja di maksud dalam pagu selanjutnya
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	283.883.380	12 bln	281.605.000	12 bln		

			Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1.700.181.992	75,8	1.393.374.936	75,8		
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan kelurahan	463.011.698	310 Keluarga	357.653.170	310 Keluarga	Rakor PKK belum maksimal pelaksanaannya	Meningkatkan koordinasi dengan semua kader PKK di desa agar pelaksanaan kegiatan PKK kecamatan dapat berjalan
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.237.170.992	100%	1.035.721.766	83,72%	Tidak terlaksananya beberapa pemberdayaan dikelurahan karena deadline waktu pelaksanaan	Untuk selanjutnya pada angkas di laksanakan pada triwulan2 awal
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		91.856.224	97,64	87.791.351	97,64		
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	91.856.224	12 Bulan	87.791.351	12 Bulan	Tidak tentu nya jadwal rakor Forkopimca	Menyusun jadwal rakor dengan forkopimca tiap bulan nya
		Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum		476.390.636	82,23	431.143.035	82,23		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	476.390.636	2 keg	431.143.035	2 keg	Pelaksanaan Upacara HUT RI dan Hari Jadi	Tetap ikut Melaksanakan Peringatan HUT RI

			Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					Kabupaten dilaksanakan secara sederhana mengingat pagu anggaran yang terbatas	dan Hari jadi kabupaten dengan lebih maksmlial dan meriah
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		90.628.000	84,59%	75.308.500	84,59		
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90.628.000	11 Desa	75.308.500	11 Desa	Masih belum optimalnya kegiatan pendampingan pembinaan ke desa	Menambah pelaksanaan pendampingan pembinaan ke desa

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Kecamatan Tanjung, Tahun 2024

2) Kecamatan Murung Pudak

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi		permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Fungsi Penunjang	Peningkatan kinerja aparatur kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.661.000	8 Dokumen	1.839.399	8 Dokumen	Satuan harga barang yang tidak sesuai dengan SBU	membuat daftar rencana usulan penyesuaian harga dalam SBU
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.323.455.000	20 Dokumen	7.734.051.000	20 Dokumen	Realisasi untuk Belanja Pegawai Sesuai dengan jumlah pegawai kec. Murung Pudak	Akan Lebih Cermat lagi dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024

									rekening belanja tersebut
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	850.684	3 Dokumen	0,00	3 Dokumen	Keterbatasan SDM dan perlu di tambah hingga di tingkatkan lagi kualitasnya.	Memaksimalka n dengan anggaran yang tersedia namun tidak mengurangi aoutcome/target t capaian
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	772.299.814	100 %	821.830.321	100 %	Realisasi rekening Belanja makan dan minum harian pegawai sesuai dengan jumlah pegawai kecamatan haruai	Akan Lebih Cermat lagi dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk rekening belanja tersebut
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	1.185.273.055	10 Unit	922.233.045	10 Unit	Kendala pada penyesuain proses terbaru pengadaan bar ang yang akan dibeli terutama terkait dengan standar harga dan juga terkait dengan TKDN.	Meningkatkan kemampuan SDM di Kec. Murung Pudak.
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.346.374.245	100 %/ 1 Laporan	1.109.909.101	100 %/1 Laporan	Realisasi Rekening Air, Listrik, Intern et sesuai dengan Jumlah Tagihan	Akan Lebih Cermat lagi dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk rekening belanja tersebut

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	973.078.873	61 Unit	819.419.196	61 Unit	Besaran Tagihan untuk STNK sehingga diperlukan penyesuaian satuan harga yang ada di SBU .	Terus melakukan Updating dan penyesuaian harga dalam SBU sesuai dengan perkembangan tingkat kenaikan harga yang berlaku.
Penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kinerja aparatur kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	136.893.736	1 Laporan	106.543.028	1 Laporan	Pelaksanaan HUT RI yang terlaksana dengan baik dan lancar.	Memaksimalkan dengan anggaran yang tersedia namun tidak mengurangi outcome/target capaian
Kesejahteraan rakyat	Peningkatan kinerja aparatur kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	204.519.944	3 Laporan	845.353.820	3 Laporan	pelaksanaan MTQ yang dilaksanakan sesuai dengan harapan	Memaksimalkan dengan anggaran yang tersedia namun tidak mengurangi outcome/target capaian
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	596.989.252					
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	136.009.800					

Pembinaan kelembagaan, aparatur dan kewilayahan	Peningkatan Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	31.950.000	13 Lembaga Kemasyarakatan	13.330.000	13 Lembaga Kemasyarakatan	wilayah kerja kecamatan Haruai sangat Luas sedangkan SDM di Kecamatan Murung Pudak terbatas, sehingga diperlukan peningkatan SDM.	Memaksimalkan personil yang ada dan lebih mengintensifkan pelaksanaan kegiatan
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	589.501.715	9021 Keluarga	465.941.315	9021 keluarga	wilayah kerja kecamatan Haruai sangat Luas sedangkan SDM di Kecamatan Murung Pudak terbatas, sehingga diperlukan peningkatan SDM.	Memaksimalkan personil yang ada dan lebih mengintensifkan pelaksanaan kegiatan
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.482.935.834	5 Kelurahan	2.364.566.635	5 Kelurahan		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	83.796.000	13 Dokumen	56.780.000	13 Dokumen	Keterbatasan SDM	Memaksimalkan dengan anggaran yang tersedia namun tidak mengurangi outcome/target capaian
Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat	Perbaikan forum koordinasi pimpinan	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	166.350.689	12 Patroli Terpadu/ 12 Laporan	133.783.000	12 Patroli Terpadu/ 12 Laporan	Masih banyak kegiatan yg belum terakomodir dalam kegiatan	Tetap berusaha melaksanakan kegiatan secara optimal dan berupaya

	kecamatan dalam pencegahan konflik wilayah	KETERTIBAN UMUM						yg memerlukan anggaran dalam pelaksanaannya	untuk memasukan anggaran dalam anggaran selanjutnya
J U M L A H				17.218.020.826		15.399.458.333	89,44%		

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Kecamatan Murung Pudak, Tahun 2024

3) Kecamatan Tanta

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Fungsi Penunjang	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan	PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 10.250.483		Rp 9.808.100			
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pegawai		Penyusunan Dokume Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 1.849.387	22 Dokumen	Rp 1.776.800	22 Dokumen		Menyesuaikan dengan standar harga dalam SSH/SBU
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1.000.266	2 Dokumen	Rp 999.000	2 Dokumen	Harga SBU tidak sesuai dengan riil	Menyesuaikan dengan SSH/SBU
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 1.850.392	6 Dokumen	Rp 1.740.200	6 Dokumen	Harga barang tidak sesuai dengan SBU	Menyesuaikan dengan SSH/SBU

			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 1.799.743	6 Dokumen	Rp 1.699.500	6 Dokumen	Harga barang tidak sesuai dengan SBU	Menyesuaikan dengan SSH/SBU
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 1.900.309	6 Dokumen	Rp 1.814.900	6 Dokumen		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.850.386	2 Laporan	Rp 1.777.700	2Laporan		
			Administrasi Umum Keuangan Daerah	Rp 3.39 2.710.000		Rp 3.128.464.714			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.392.710.000		Rp 3.128.464.714			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 572.510.646		Rp. 540.585.673			
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	Rp 229.279.601	10 Paket	Rp 203.465.757	10 Paket	Harga barang tidak sesuai dengan SBU	Harga menyesuaikan dengan SSH/SBU
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 15.195.500	4 Paket	Rp 14.955.200	4 Paket	Harga barang Riil tidak sesuai dengan SSH/SBU	Harga menyesuaikan dengan SSH/SBU
			Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Rp 15.0 03.545	10 Paket	Rp 14.0 02.000	10 Paket	Harga barang Riil tidak sesuai dengan SSH/SBU	Harga menyesuaikan dengan SSH/SBU
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Rp 6.00 0.000	2Dokumen	Rp 6.00 0.000	2 Dokumen	Harga barang Riil tidak sesuai dengan SSH/SBU	Harga menyesuaikan dengan SSH/SBU

			Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 307. 032.000	12 Laporan	Rp 302.162.716	12 Laporan	Harga barang Riil tidak sesuai dengan SSH/SBU	Harga menyesuaikan dengan SSH/SBU
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 267.273.000		Rp 243.903.021			
			Penyediaa JasaKomunikasi, Sumber Air dan Listrik	50.400.000	12 Bulan	Rp 42.858.021	12 Bulan	Tagihan air sesuai dengan jumlah tagihan	Penyusunan perencanaan anggaran utk rekening tersebut lebih besar menurut SSH/SBU
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.873.000	12 Laporan	201.045.000	12 Laporan	Jaminan kesehatan non ASN,masing2 sdh ditanggung Kepala Keluarga	Mengoptimalkan Kegiatan dengan menggunakan Anggaran yang ada
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.745.856		83.231.850			Mengoptimalkan Kegiatan dengan menggunakan Anggaran yang ada
			Pengadaan Mebel	Rp. 7.753.856	1 unit	6.981.982	1 unit	Harga Riil beda debgan SSH/SBU	Mengoptimalkan Kegiatan dengan menggunakan Anggaran
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.992.000	1 unit	76.249.868	1 unit	Sesuai RAB, bahan yg diperlukan sesuai jumlah tagihan	Memanfaatkan dan memaksimalkan dana yang ada

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 252.722.000		Rp 247.753.359			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 110.249.000	12 unit	Rp 106.449.008	12 unit		
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	142.473.000	1 Unit	141.304.351	1 unit		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Umum	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	164.648.241		156.918.700			
			Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan - Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	164.648.241	3 Laporan	156.918.700	3 Laporan	Harga SBU /SSH beda dengan harga riil,	Mengoptimalkan Kegiatan dengan menggunakan Anggaran yang ada
	Meningkatnya Pengendalian Pembanguna n Daerah di Kecamatan/Ke lurahan	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	122.102.857		108.102.001			Mengoptimalkan Kegiatan dengan menggunakan Anggaran yang ada

			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	14.977.088	14 Laporan	8.800.000	14 Laporan		Mengoptimalkan Kegiatan dengan menggunakan Anggaran yang ada
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	107.125.769		99.302.001			
			Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam keterlibatan perencanaan Kehidupan menuju keluarga berkualitas	107.125.769	100 Keluarga	99.302.001	100 Keluarga		Mengoptimalkan Kegiatan dengan menggunakan Anggaran yang ada
	1. Meningkatkan Kerukunan Hidup Bermasyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	89.750.396		78.506.000			
	2. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	89.750.396	14 Laporan	78.506.000	14 Laporan	Adanya gangguan ketentraman dan ketertiban	Koordinasi dengan Polsek, Koramil serta seluruh aparat desa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	207.493.086		200.885.000			Mengoptimalkan Kegiatan dengan menggunakan Anggaran yang ada

			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Reublik Indonesia	207.493.086	100 orang	200.885.000	100 orang	penganggaran apel HKN/dilaksanakan setiap bulan, sedangkan pelaksanaan kadang tidak setiap bulan	menyesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan,
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		50.304.435		34.212.000			Mengoptimalkan Kegiatan dengan menggunakan Anggaran yang ada
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48.320.751	14 Dokumen	32.637.000	14 Dokumen		Mengoptimalkan Kegiatan dengan menggunakan Anggaran yang ada
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.983.684	14 Laporan	1.575.000	14 Laporan	Monitoring dan Evaluasi pembangunan di desa yang akses jalan yg sulit	Mengoptimalkan Kegiatan dengan menggunakan Anggaran yang ada

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Kecamatan Tanta, Tahun 2024

4) Kecamatan Haruai

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Fungsi Penunjang	Peningkatan kinerja aparatur kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.547.650	8 Dokumen	5,463.800,00-	8 Dokumen	Satuan harga barang yang tidak sesuai dengan SBU	membuat daftar rencana usulan penyesuaian harga dalam SBU
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.477.298.562	20 Dokumen	2.351.852.945,00-	20 Dokumen	Realisasi untuk Belanja Pegawai Sesuai degan jumlah pegawai kec.haruai	Akan Lebih Cermat lagi dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk rekening belanja tersebut
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.799.550	3 Dokumen	0,00	3 Dokumen	Keterbatasan SDM dan perlu di tambah hingga di tingkatkan lagi kualitasnya.	Memaksimalkan dengan anggaran yang tersedia namun tidak mengurangi aoutcome/target capaian
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.498.899,-	100 %	298.860.075,00-	100 %	Realisasi rekening Belanja makan dan minum harian pegawai sesuai dengan jumlah pegawai kecamatan haruai	Akan Lebih Cermat lagi dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk rekening belanja tersebut
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	138.188.201,-	10 Unit	117.927.928,00-	10 Unit	Kendala pada penyesuain proses terbaru pengadaan barang yang akan dibeli terutama terkait dengan standar harga dan juga terkait dengan TKDN.	Meningkatkan kemampuan SDM di Kec. Haruai.

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.800.000,-	100 %/ 1 Laporan	280.422.309,00-	100 %/1 Laporan	Realisasi Rekening Air,Listrik,Internet sesuai dengan Jumlah Tagihan	Akan Lebih Cermat lagi dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk rekening belanja tersebut
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.350.000,-	61 Unit	116.636.421,00-	61 Unit	Besaran Tagihan untuk STNK sehingga diperlukan penyesuaian satuan harga yang ada di SBU .	Terus melakukan Updating dan penyesuaian harga dalam SBU sesuai dengan perkembangan tingkat kenaikan harga yang berlaku.
Penyelenggaraa n pemerintahan	Peningkatan kinerja aparatur kecamatan	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	125.444.731,-	1 Laporan	120.933.000,00-	1 Laporan	Pelaksanaan HUT RI yang terlaksana dengan baik dan lancar.	Memaksimalkan dengan anggaran yang tersedia namun tidak mengurangi outcome/target capaian
Kesejahteraan rakyat	Peningkatan kinerja aparatur kecamatan	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	110.248.500,-	3 Laporan	103.972.000,00-	3 Laporan	pelaksanaan MTQ yang dilaksanakan sesuai dengan harapan	Memaksimalkan dengan anggaran yang tersedia namun tidak mengurangi aoutcome/target capaian
Pembinaan kelembagaan, aparatur dan kewilayahan	Peningkatan Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.800.000,-	13 Lembaga Kemasyar akatan	7.800.000,00-	13 Lembaga Kemasyar akatan	wilayah kerja kecamatan Haruai sangat Luas sedang kan SDM di Kecamatan Haruai terbatas, sehingga diperlukan peningkatan SDM.	Memaksimalkan personil yang ada dan lebih mengintensifkan pelaksanaan kegiatan
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat	83.880.269,-	9021 Keluarga	82.078.000,00-	9021 keluarga	wilayah kerja kecamatan Haruai sangat Luas sedang kan SDM di Kecamatan Haruai	Memaksimalkan personil yang ada dan lebih mengintensifkan pelaksanaan kegiatan

			Kecamatan dan Kelurahan					terbatas, sehingga diperlukan peningkatan SDM.	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.445.000,-	13 Dokumen	53.425.000,00-	13 Dokumen	Keterbatasan SDM	Memaksimalkan dengan anggaran yang tersedia namun tidak mengurangi aoutcome/target capaian
Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	Perbaikan forum koordinasi pimpinan kecamatan dalam pencegahan konflik wilayah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90.065,000,-	12 Patroli Terpadu/ 12 Laporan	85.767.838,00-	12 Patroli Terpadu/ 12 Laporan	Masih banyak kegiatan yg belum terakomodir dalam kegiatan yg memerlukan anggaran dalam pelaksanaannya	Tetap berusaha melaksanakan kegiatan secara optimal dan berupaya untuk memasukan anggaran dalam anggaran selanjutnya
J U M L A H				3.890.366.362		3.625.139.316,00-	93,18%		

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Kecamatan Haruai, Tahun 2024

5) Kecamatan Muara Uya

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Administrasi perkantoran	Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec. MUARA UYA 2021-2024)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	503.074.147	4 Keg	466.068.374	4 Keg.	- masih terdapat barang yg belum tercukupi volumenya	- memetakan kebutuhan barang dan meminta penambahan anggaran pada kegiatan ybs, untuk mencukupi volume kebutuhan

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.743.961.620	3 Keg	2.566.284.437	3 Keg	- serapan anggaran tidak maksimal karena tidak ada penambahan karyawan baru	- akan mengidentifikasi pegawai lebih awal dan detail sehingga akan teridentifikasi anggaran tidak terserap
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.997.956	3 dok	2.910.000	3 dok	masih terdapat barang yg belum tercukupi karna minimnya anggaran pengadaan	- akan mengidentifikasi keperluan pengadaan barang –barang kantor
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	448.169.386	3 Unit	385.476.378	3 Unit	masih terdapat barang yg belum tercukupi karna minimnya anggaran pengadaan	- akan mengidentifikasi keperluan pengadaan barang –barang kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	625.037.930	35 buah	533.531.890	35 buah	- masih terdapat barang yg belum tercukupi volumenya	- memetakan kebutuhan barang dan meminta penambahan anggaran pada kegiatan ybs, untuk mencukupi volume kebutuhan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	327.806.715	6 Item	295.589.964	5 item	- masih terdapat anggaran yang belum terakomodir tidak dikarnakan tidak diperbolehkan	- Tetap berusaha melaksanakan kegiatan secara optimal dan berupaya untuk memasukan anggaran dalam anggaran selanjutnya
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.939.610	20doc	10.905.210,	20 doc	-terlambatnya dokumen karena seringnya data dukung dari para PPTK seringkali terlambat	- meningkatkan komunikasi dan koordinasi Intern
Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec. MUARA	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	89.085.600	14 desa	81.540.000	14 Desa	-masih kurangnya koordinasi antar masyarakat desa dalam hal Ketertiban dan keamanan	- memberikan pengarahan kepada masyarakat di desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban desa

	UYA2021-2024		Penugasan Kepala Daerah						
Pembinaan kelembagaan, aparatur dan kewilayahan	Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec. MUARA UYA 2021-2024)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pengendalian pembangunan kecamatan	177.828.854	usulan	161.456.217	usulan	-masih sangat diperlukan koordinasi masyarakat dalam hal peningkatan pembangunan di desa	Adanya rapat koordinasi, musdes, musrenbang sebagai upaya peningkatan pembangunan desa
Penyelenggaraan pemerintahan	Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec. MUARA UYA 2021-2024)	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang – undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bheneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	203.108.247	1 Keg.	155.609.831	1 Keg.	-sangat diperlukan sosialisasi, pelatihan dan peningkatan wawasan bagi pemerintahan desa	- melakukan pembinaan, sosialisasi dan peningkatan wawasan kepada aparat desa dan masyarakat.
Kesejahteraan rakyat	Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec. MUARA UYA 2021-2024)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	173.353.322	1 keg	134.431.202	1 keg	Pemenuhan data sebagai bahan laporan masih terkendala terlebih ada desa yang terpencil	Perlu peningkatan komunikasi dan kesadaran dalam pemenuhan data dari desa sebagai bahan untuk penyusunan laporan

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec. MUARA UYA 2021-2024)	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	59.022.656	14 desa	58.395.100	14 desa	Belum maksimalnya kinerja Aparat pemerintahan desa dalam menjalankan fungsinya dalam menyerap aspirasi masyarakat	- Membantu pemerintah desa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di desa - Melakukan monitoring dan evaluasi

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Kecamatan Muara Uya, Tahun 2024

6) Kecamatan Bintang Ara

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Fungsi Penunjang	Meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.629.000	13 Dokumen	0	13 Dokumen		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.560.687.000	20 Dokumen	2.349.968.629	20 Dokumen		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.813.000	4 Dokumen	0	4 Dokumen		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	260.230.145	100%	254.850.696	97.93%	Standar Satuan Harga yang tidak bulat	Pembuatan SPJ sesuai Tagihan di Bukti Pengeluaran
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	163.284.613	14 Unit	132.477.477	13 Unit		Pembuatan SPJ sesuai Tagihan di Bukti Pengeluaran
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	223.246.225	100 %	202.166.619	90,55 %	Standar Satuan Harga yang tidak bulat	Pembuatan SPJ sesuai Tagihan di Bukti Pengeluaran

			Pemerintahan Daerah						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.996.920	27 Unit	58.778.000	27 Unit	Perubahan Harga BBM Sesuai Standar dari Pemerintah	Pembuatan SPJ sesuai Tagihan di Bukti Pengeluaran
								Kelebihan Satuan Harga Belanja Pajak Kendaraan Dinas	Pembuatan SPJ sesuai Tagihan di Bukti Pengeluaran
Penyelenggaraa n pemerintahan	Penyelenggara an kegiatan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	121.32.1493	80 %	91.881.622	80 %	Penyesuaian Pagu Kegiatan dikarenakan Pelaksanaan Peringatan HUT RI sesuai arahan dari pemerintah daerah	Pelaksanaan Peringatan HUT RI sesuai arahan dari pemerintah daerah
									Pelaksanaan Peringatan HUT Tabalong sesuai arahan dari pemerintah daerah
Kesejahteraan rakyat	Penyelenggara an kegiatan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	134.400.318	80%	109.482.298	80%		
								☐ Pagu Kegiatan menyesuaikan Renja, sehingga ada satuan belanja yang gajil (tidak bulat)	☐ Pembulatan Nilai Belanja sesuai SPJ Real
Pembinaan kelembagaan, aparatur dan kewilayahan	Pengendalian Kegiatan Pembangunan Daerah di Kecamatan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.511.000	9 Desa	20.725.000	9 Desa	☐ Pagu Kegiatan menyesuaikan Renja, sehingga ada satuan belanja yang gajil (tidak bulat)	☐ Pembulatan Nilai Belanja sesuai SPJ Real
		Program Pemberdayaan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.620.000	80%	9.400.000	80%	☐ Pagu Kegiatan menyesuaikan Renja, sehingga ada satuan	☐ Pembulatan Nilai Belanja sesuai SPJ Real

		Masyarakat Desa Dan Kelurahan						belanja yang gaji (tidak bulat)	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	48.561.246	9 Desa	27.403.000	9 Desa		
Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	54.124.000	12 Patroli Terpadu	21.172.703	12 Patroli Terpadu	wilayah kerja sangat Luas sedang kan salah satu tim koordinasi masih tergabung dengan kec haruai dan upau (koramil)	Memaksimalkan personil yg ada dan lebih mengintensifkan pelaksanaan kegiatan
J U M L A H				3.994.632.115		3.516.197.901			

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Kecamatan Bintang Ara, Tahun 2024

7) Kecamatan Jaro

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Penyelenggaraa n Pemerintahan	Penyelenggaraa n kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec. Jaro 2019-2024)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 4.146.708.000	BB	Rp. 3.967.995.678	-	Belum ada hasil penilaian Sakip dari Inspektorat	Melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat terkait penilaian Sakip Kecamatan
			Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 10.544.000	27 Dok	Rp. 9.877.400	27 Dok	Waktu penganggaran jumlah perhitungannya tidak dibulatkan (pakai koma) dan SPJ menggunakan harga riil	Untuk kedepan supaya perhitungan anggarannya dibulatkan atau tidak ganjil.

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.861.168.683	12 Dok	Rp. 2.764.301.728	12 Dok	Serapan anggaran sudah maksimal karena realisasi untuk belanja pegawai sesuai dengan jumlah pegawai kec.Jaro	Akan lebih cermat lagi dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk rekening belanja tersebut
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp. 1.913.752	14 Dok	Rp. 1.854.800`	14.Dok	Waktu penganggaran jumlah perhitungannya tidak dibulatkan (pakai koma) dan SPJ menggunakan harga riil	Untuk kedepan supaya perhitungan anggarannya dibulatkan atau tidak ganjil.
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 318.720.437	100 %	Rp. 307.469.160	12 Dok	Waktu penganggaran jumlah perhitungannya tidak dibulatkan (pakai koma) dan SPJ menggunakan harga riil	Untuk kedepan supaya perhitungan anggarannya dibulatkan atau tidak ganjil.
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 115.028.795	100%	Rp109.766.600	95,18%	Pelaksanaan kadang tidak sesuai dengan perencanaan semula karena penjadwalan tidak sesuai dengan kas yang ada	Dilakukan pengawasan melekat membuat edaran supaya saling mengingatkan agar penjadwalan yang ditetapkan untuk dilaksanakan secara konsisten
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 218.430.542	100%	Rp.193.783.895	88,72%	Realisasi air, listrik dan internet sudah sesuai dengan jumlah tagihan tiap bulannya	Dalam penyusunan anggaran untuk rekening belanja tersebut akan lebih mendekati dengan realisasi tiap bulannya

			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang	Rp. 122.063.000	25 Unit	Rp. 110.006.695	25 Unit	Ada beberapa barang yang belum terakomodir	Memetakan kebutuhan barang dan meminta penambahan anggaran untuk disesuaikan pada kegiatan selanjutnya
Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	Penyelenggaraa n kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec. Jaro 2019-2024	Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 94.004.501	9 desa	Rp. 82.147.500	9 desa	Pelaksanaan kadang tidak sesuai dengan perencanaan semula karena penjadwalan tidak sesuai dengan kas yang ada,sebagian kegiatan belum dilaksanakan	Dilakukan pengawasan melekat membuat edaran supaya saling mengingatkan agar penjadwalan yang ditetapkan untuk dilaksanakan secara konsisten
Pembinaan kelembagaan, aparatur dan kewilayahan	Penyelenggaraa n kegiatan pemerintahan umum (Renstra Kec. Jaro 2019-2024	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 21.000.000	9 desa	Rp. 20.057.300	9 desa	Pelaksanaan kadang tidak sesuai dengan perencanaan semula karena penjadwalan tidak sesuai dengan kas yang ada	Kembali menganggarkan Kegiatan tersebut di Tahun Berikutnya
Pembinaan kelembagaan, aparatur dan kewilayahan	Penyelenggaraa n kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec. Jaro 2019-2024	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi, dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Rp. 62.756.000	9 desa	Rp58.289.800	9 desa	Pelaksanaan kadang tidak sesuai dengan perencanaan semula karena penjadwalan tidak sesuai dengan kas yang ada	Dilakukan pengawasan melekat membuat edaran supaya saling mengingatkan agar penjadwalan yang ditetapkan untuk dilaksanakan secara konsisten
Penyelenggaraa n pemerintahan	Penyelenggaraa n kegiatan pemerintahan umum (Renstra	Penyelenggaraa n Urusan pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai dengan	Rp.124.538.257	2 keg	Rp.122.268.200	2 keg	Pelaksanaan kadang tidak sesuai dengan perencanaan semula karena penjadwalan	Dilakukan pengawasan melekat membuat edaran supaya saling

	kec. Jaro 2019-2024		Penugasan Kepala daerah					tidak sesuai dengan kas yang ada	mengingatkan agar penjadwalan yang ditetapkan untuk dilaksanakan secara konsisten
Kesejahteraan rakyat	Penyelenggaraa n kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec. Jaro 2024-2024	Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Rp184.330.033	2 keg	Rp.176.107.600	2 keg	Ada beberapa rincian belanja yang belum terakomodir untuk kegiatan	Tetap berusaha melaksanakan kegiatan secara optimal dan berupaya untuk memasukkan rincian belanja dimaksud pada pagu selanjutnya
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp. 12.210.000	2 keg	Rp. 12.065.000	2 keg	Ada beberapa rincian belanja yang belum terakomodir untuk kegiatan	Tetap berusaha melaksanakan kegiatan secara optimal dan berupaya untuk memasukkan rincian belanja dimaksud pada pagu selanjutnya

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Kecamatan Jaro, Tahun 2024

8) Kecamatan Upau

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Fungsi Penunjang	Peningkatan kinerja aparatur kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	8 Dokumen	6.300.000	8 Dokumen	Satuan harga barang yang tidak sesuai dengan SBU	membuat daftar rencana usulan penyesuaian harga dalam SBU

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.294.504.000,00	18 Dokumen	2.087.202.649	18 Dokumen	Realisasi untuk Belanja Pegawai Sesuai dengan jumlah pegawai kec.Upau	Akan Lebih Cermat lagi dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk rekening belanja tersebut
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	544.411.390,00	100 %	500.677.278	100 %	Realisasi rekening Belanja makan dan minum harian pegawai sesuai dengan jumlah pegawai kecamatan Upau	Akan Lebih Cermat lagi dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk rekening belanja tersebut
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.087.500,00	100 %	223.112.942	100 %	Realisasi Rekening Air,Listrik,Internet sesuai dengan Jumlah Tagihan	Akan Lebih Cermat lagi dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk rekening belanja tersebut
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.159.034,00	17 Unit	128.890.970	12 Unit	Besaran Tagihan untuk STNK sehingga diperlukan penyesuaian satuan harga yang ada di SBU .	Terus melakukan Updating dan penyesuaian harga dalam SBU sesuai dengan perkembangan tingkat kenaikan harga yang berlaku.
Penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kinerja aparatur kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	224.632.332,00	1 Laporan	195.684.000	1 Laporan	Pelaksanaan HUT RI yang terlaksana dengan baik dan lancar.	Memaksimalkan dengan anggaran yang tersedia namun tidak mengurangi

									outcome/target capaian
Kesejahteraan rakyat	Peningkatan kinerja aparatur kecamatan	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	126.880.000,00	1 Laporan	121.978.000	1 Laporan	pelaksanaan MTQ yang dilaksanakan sesuai dengan harapan	Memaksimalkan dengan anggaran yang tersedia namun tidak mengurangi aoutcome/target capaian
Pembinaan kelembagaan, aparatur dan kewilayahan	Peningkatan Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	16.540.000,00	13 Lembaga Kemasyar akatan	4.040.000	13 Lembaga Kemasyar akatan	wilayah kerja kecamatan Upau sangat Luas sedang kan SDM di Kecamatan Upau terbatas, sehingga diperlukan peningkatan SDM.	Memaksimalkan personil yang ada dan lebih mengintensifkan pelaksanaan kegiatan
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	69.568.000,00	650 Keluarga	66.706.810	650 keluarga	wilayah kerja kecamatan Upau sangat Luas sedang kan SDM di Kecamatan Upau terbatas, sehingga diperlukan peningkatan SDM.	Memaksimalkan personil yang ada dan lebih mengintensifkan pelaksanaan kegiatan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH N DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.098.238,00	6 Desa/ Dokumen	0,00	6 Desa/Dok umen	Keterbatasan SDM	Memaksimalkan dengan anggaran yang tersedia namun tidak mengurangi aoutcome/target capaian

Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat	Perbaikan forum koordinasi pimpinan kecamatan dalam pencegahan konflik wilayah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	113.190.000,00	12 Patroli Terpadu/ 12 Laporan	104.290.000	12 Patroli Terpadu/ 12 Laporan	Masih banyak kegiatan yg belum terakomodir dalam kegiatan yg memerlukan anggaran dalam pelaksanaannya	Tetap berusaha melaksanakan kegiatan secara optimal dan berupaya untuk memasukkan anggaran dalam anggaran selanjutnya
J U M L A H				. 3.817.070.494		3.438.882.649			

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Kecamatan Upau, Tahun 2024

9) Kecamatan Muara Harus

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Fungsi penunjang	Peningkatan kinerja aparatur kecamatan	Penunjang urusan pemerintahan daerah/kota	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9.523.860,-	8 dok	8.125.800,-	8 dok	Harga barang tidak sesuai dengan standar harga SSH/SBU	Menyesuaikan dengan standar harga dalam SSH / SBU
			Administrasi keuangan perangkat daerah	2.906.399.768,-	20 lap	2.708.686.167,-	20 lap	Ada Rekening dalam Belanja Gaji PNS yang tidak terealisasi.	Penyusunan perencanaan anggaran untuk rekening belanja Gaji PNS lebih cermat
			Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1.805.976,-	3 dok	1.580.100,-	3 dok	Harga barang tidak sesuai dengan standar harga SSH/SBU	Penyesuaian harga dengan standar harga dalam SSH/SBU
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.650.000,-	15 paket	16.200.000,-	15 paket	Harga barang tidak sesuai dengan standar harga SSH/SBU	Penyesuaian harga dengan standar harga dalam SSH/SBU

			Administrasi Umum perangkat daerah	259.278.577,-	100 %	241.093.727,-	100%	- Harga barang di lapangan tidak sesuai dengan standar harga SSH - Ada Rekening dalam Belanja Gaji PNS yang tidak terealisasi.	Menyesuaikan dengan standar harga yang ada dalam SSH Penyusunan perencanaan anggaran untuk rekening belanja lebih cermat
			Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.209.226,-	8 unit	60.866.666,-	8 unit	Harga barang yang tidak sesuai dengan SSH	Menyesuaikan dengan standar Harga yang ada dalam SSH
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	214.371.052,-	100%	169.320.192,-	100%	Realisasi Rekening Air, Listrik, Internet sesuai dengan Jumlah Tagihan	Penyusunan perencanaan anggaran untuk rekening belanja tersebut lebih mendekati harga standar dalam SBU
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	162.939.069,-	38 unit	138.317.300,-	38 unit	Besaran Tagihan untuk STNK dan satuan harga yang ada di SBU tidak sesuai.	membuat daftar rencana usulan penyesuaian harga dalam SBU
Kesejahteraan rakyat	Peningkatan kinerja aparatur kecamatan	Penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	130.820.378,-	4 laporan	117.783.000,-	4 laporan	- Harga satuan makanan dan minuman rapat tingkat kecamatan pada SBU yang ditetapkan kabupaten lebih tinggi daripada harga satuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,	Merealisasikan harga satuan makan dan minum rapat menjadi harga satuan tingkat Kecamatan

								sehingga yang direalisasikan menyesuaikan sebagaimana harga satuan makanan dan minuman rapat pada SBU yang ditetapkan oleh pemerintah pusat	
Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	Perbaikan forum koordinasi pimpinan kecamatan dalam pencegahan konflik wilayah	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	88.170.000,-	12 patroli	71.790.000,-	12 patroli	a. ering terjadinya pencurian hasil perkebunan dan pertanian masyarakat	Koordinasi dengan Polsek dan Koramil serta Kepala Desa supaya mengaktifkan Siskamling.
Penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kinerja aparatur kecamatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	145.291.633,-	12 dok	131.437.000,-	12 dok	Kekeliruan dalam perencanaan (ada belanja yang tidak teranggarkan)	Memperbaiki/menyesuaikan pada saat perubahan anggaran
Pembinaan kelembagaan, aparatur dan kewilayahan	Peningkatan Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah kecamatan	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	123.166.730,-	7 desa	85.469.500,-	7 desa	- Harga satuan makanan dan minuman rapat tingkat kecamatan pada SBU yang ditetapkan kabupaten lebih tinggi daripada harga satuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga yang direalisasikan menyesuaikan sebagaimana harga satuan makanan dan minuman rapat pada SBU yang	- Merealisasikan harga satuan makan dan minum rapat menjadi harga satuan tingkat Kecamatan - Membantu penyusunan RAB - Membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan secara matang Melaksanakan monitoring dan evaluasi

								ditetapkan oleh pemerintah pusat Dokumen perencanaan anggaran desa belum terencana dengan baik	
Pembinaan kelembagaan, aparatur dan kewilayahan	Peningkatan Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah kecamatan	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	58.000.000,-	7 desa	36.000.000,-	7 desa	- Harga satuan makanan dan minuman rapat tingkat kecamatan pada SBU yang ditetapkan kabupaten lebih tinggi daripada harga satuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga yang direalisasikan menyesuaikan sebagaimana harga satuan makanan dan minuman rapat pada SBU yang ditetapkan oleh pemerintah pusat b. elum maksimalnya kinerja Aparat pemerintahan desa dalam menjalankan fungsinya dalam menyerap aspirasi masyarakat - Merealisasikan harga satuan makan dan minum rapat menjadi harga satuan tingkat Kecamatan - Membantu pemerintah desa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di desa c. Melakukan monitoring dan evaluasi	

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Kecamatan Muara Harus, Tahun 2024

10)Kecamatan Kelua

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec. Kelua 2021-2024)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.734.220	15 Dok	25.130.495	15 Dok	Pengumpulan Data yang masih satu arah	Lebih memaksimalkan pengumpulan data dukung dengan berkoordinasi semua kasi terkait program dan kegiatan.
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.109.255.000	14 bulan	4.067.854.896	14 Bulan	Kelebihan pada Belanja Tunjangan Fungsional PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Akan lebih teliti lagi dalam penyusunan anggaran untuk rekening belanja tersebut
			Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.226.138	1 Paket	9.990.000	1 Paket	Belum maksimalnya belanja modal melalui pengadaan pihak ke 3 /LS	Kedepannya aku lebih berkoordinasi dengan pihak ke 3 untuk pengadaan LS

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.771.456	5 paket	26.533.463	5 paket	masih terdapat barang yg belum tercukupi volumenya	Memetakan kebutuhan barang dan meminta penambahan anggaran pada kegiatan ybs, untuk mencukupi volume kebutuhan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.680.000	2 Dok.	4.680.000	2 Dok.	Keterlambatan koran yang datang	Di usahakan koran datang tepat waktu
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	434.573.000	50 Laporan	434.573.000	50 Laporan	Masih merujuk pada undangan bimtek/sosialisasi/workshop yang masuk ke kecamatan	Akan lebih banyak berkoordinasi dan konsultasi serta keikutsertaan terkait undangan yang ada
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Pengadaan Mebel	22.709.593	6 unit	20.250.000	6 unit	Belum maksimalnya belanja modal melalui pengadaan pihak ke 3 /LS	Kedepannya akan lebih berkoordinasi dengan pihak ke 3 untuk pengadaan LS
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.800.000	12 Laporan	40.177.217	12 Laporan	Realisasi air, listrik dan internet sudah sesuai dengan jumlah tagihan tiap bulannya	Dalam penyusunan anggaran untuk rekening belanja tersebut akan lebih mendekati dengan realisasi tiap bulannya

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	450.855.227	12 Laporan	427.531.195	12 Laporan	Banyak barang yang harga tidak sesuai dengan SBU	Membuat daftar rencana usulan penyesuaian harga dalam SBU
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.826.000	13 Unit	130.791.063	13 Unit	Masih terdapat barang yg belum tercukupi volumenya	Memetakan kebutuhan barang dan meminta penambahan anggaran pada kegiatan ybs, untuk mencukupi volume kebutuhan
			Pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya	20.947.871	30 Unit	20.947.871	30 Unit	Untuk pelaksanaan rehab gedung masih terkendali lambatnya kelengkapan dokumen pihak ke 3 yang di minta	Kedepannya akan lebih berkoordinasi dengan pihak ke 3 untuk pengadaan rehab terkait kelengkapan dokumen
Kewilayahan		Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	296.568.240	1 Laporan	277.720.000	1 Laporan	Ada beberapa rincian belanja yang belum terakomodir untuk kegiatan MTQ	Tetap berusaha melaksanakan kegiatan secara optimal dan berupaya untuk memasukan rincian belanja di maksud dalam pagu selanjutnya

		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	77.494.086	12 Laporan	76.304.415	12 Laporan	Tidak semua kader PKK dapat terkumpul karena masing2 ada kesibukan	Meningkatkan koordinasi dengan semua kader PKK agar pelaksanaan kegiatan PKK dapat berjalan
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.863.276	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.863.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	Tidak semua usulan dalam musrenbang kelurahan dapat diakomodir	Menetapkan usulan2 prioritas dan benar benar urgent
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						
			Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	72.200.000	150 Keluarga	64.505.000	150 Keluarga	Tidak semua usulan dalam musrenbang kelurahan dapat diakomodir	Menetapkan usulan2 prioritas dan benar benar urgent
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	206.032.344	1 Keg	206.032.344	1 keg	Tidak semua usulan dalam musrenbang kelurahan dapat diakomodir	Menetapkan usulan2 prioritas dan benar benar urgent

			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80.453.111	1 Keg	72.510.200	1 Keg	Ada beberapa rincian belanja yang belum terakomodir untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Tetap berusaha melaksanakan kegiatan secara optimal dan berupaya untuk memasukan rincian belanja di maksud dalam pagu selanjutnya
		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20.007.400	12 Laporan	15.755.480	12 Laporan	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	102.303.083	1 Dok	100.271.251	1 Dok	Tidak tentu nya jadwal rakor Forkopimca	Menyusun jadwal rakor dengan forkopimca tiap bulan nya
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	215.782.534	25 Orang	215.673.500	25 Orang	Upacara HUT RI masih dilaksanakan secara sederhana , minimalis, dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Perayaan nya pun masih	Dengan mulai berkurangnya covid 19, ditahun depan menambah pagu anggaran supaya pelaksanaan Upacara dan perayaan HUT RI bisa lebih

			Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K					dilaksanakan terbatas	maksimal dan meriah
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	55.999.773	1 Dok	46.297.200	1 Dok	Masih kurangnya pagu anggaran untuk pembinaan ke desa	Menambah pagu anggaran untuk pembinaan ke desa
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	50.160.000	1 Dok	50.160.000	1 Dok	Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan	Melakukan koordinasi dengan aparat desa dalam rangka penyusunan APBDes

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Kecamatan Kelua, Tahun 2024

11)Kecamatan Pugaan

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum (Renstra)	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.9.823.240	8 Dokumen	Rp.4.140.000	8 Dokumen	- masih terdapat barang yg belum tercukupi volumenya -	- memetakan kebutuhan barang dan meminta penambahan

	kec. Pugaan 2024-2024)								anggaran pada kegiatan ybs, untuk mencukupi volume kebutuhan
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp.2.978.946.000	14 bulan	Rp.2.666.486.212	14 Bulan	Kelebihan pada Belanja Tunjangan Fungsional PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Akan lebih teliti lagi dalam penyusunan anggaran untuk rekening belanja tersebut
			Administrasi umum perangkat daerah	Rp.384.139.311	24 item	Rp.347.589.429	24 item	- masih terdapat barang yg belum tercukupi volumenya	- memetakan kebutuhan barang dan meminta penambahan anggaran pada kegiatan ybs, untuk mencukupi volume kebutuhan
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp.174.742.505	10 buah	Rp.106.025.261	10 buah	- masih terdapat barang yg belum tercukupi volumenya	- Tetap berusaha melaksanakan kegiatan secara optimal dan berupaya untuk memasukan anggaran dalam anggaran selanjutnya
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp.223.105.090	12bulan	Rp.212.102.206	12 bulan	- Realisasi air, listrik dan internet sudah sesuai dengan jumlah tagihan tiap bulannya	- Dalam penyusunan anggaran untuk rekening belanja tersebut akan lebih mendekati dengan realisasi tiap bulannya

Koordinasi Upaca Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban umum	Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec. Pugaan 2024-2024)	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp.54.570.000	7 desa	Rp.48.421.802	7 desa	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec. Pugaan 2024-2024)	Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi/sinergi Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp.125.180.823	1 Keg	Rp.120.314.504	1 Keg	Ada beberapa rincian belanja yang belum terakomodir untuk kegiatan MTQ	Tetap berusaha melaksanakan kegiatan secara optimal dan berupaya untuk memasukan rincian belanja di maksud dalam pagu selanjutnya
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	Rp.18.913.276	2 Dokumen	Rp.14.850.000	2 Dokumen	Banyak kendala dalam pemesanan lewat e-catalog	Tetap berusaha melaksanakan kegiatan secara optimal dan berupaya untuk memasukan rincian belanja di maksud dalam pagu selanjutnya
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan n Desa	Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec. Pugaan 2024-2024)	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.17.256.260	7 Desa	Rp.9.758.085	7 Desa	Banyak kendala dalam pemesanan lewat e-catalog	Tetap berusaha melaksanakan kegiatan secara optimal dan berupaya untuk

									memasukan rincian belanja di maksud dalam pagu selanjutnya
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec. Pugaan 2024-2024)	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Rp.66.202..960	7 Desa	Rp.54.480.216	7 Desa	Banyak kendala dalam pemesanan lewat e-catalog	Tetap berusaha melaksanakan kegiatan secara optimal dan berupaya untuk memasukan rincian belanja di maksud dalam pagu selanjutnya
Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec. Pugaan 2024-2024)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Pembinaan Wawasan Keangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Rp.172.251.960	1 Laporan	Rp.162.515.450	1 Lap	Kekeliruan dalam perencanaan (ada belanja yang tidak teranggarkan)	Memperbaiki/menyesuaikan pada saat perubahan anggaran
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp.14.807.280	1 Dokumen	Rp.14.800.000	1 Dokumen	-	-
Pembinaan dan pengawasan	Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum (Renstra	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa	Rp.47.721.101	7 Dokumen	Rp.32.539.000	7 Dokumen		- Membantu penyusunan RAB

Pemerintahan Desa	kec. Pugaan 2024-2024	pengawasan Pemerintahan Desa							- Membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan secara matang - Melaksanakan monitoring dan evaluasi
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp.7.888.008	7 Dokumen	Rp.4.750.000	7 Dokumen	Harga satuan makanan dan minuman rapat tingkat kecamatan pada SBU yang ditetapkan kabupaten lebih tinggi daripada harga satuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga yang direalisasikan menyesuaikan sebagaimana harga satuan makanan dan minuman	- Merealisasikan harga satuan makan dan minum rapat menjadi harga satuan tingkat Kecamatan - Membantu penyusunan RAB - Membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan secara matang - Melaksanakan monitoring dan evaluasi- a.

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Kecamatan Pugaan, Tahun 2024

12)Kecamatan Banua Lawas

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
Otonomi dan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraa n kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec. Banua Lawas 2020-2024)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 10.500.000	8 dok	Rp.9.849.125	8 dok.	-- Proses Pengumpulan Data-data kegiatan yang lambat	- Berusaha membuat jadwal kegiatan dan mengkoordinir terhadap pengumpulan data – data tersebut
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.3.222.886.000	20 Dokumen	Rp.2.932.887.249	20 Dokumen	- pagu pembayaran gaji dan tunjangan telah ditetapkan - Ada Rekening dalam Belanja Gaji PNS yang tidak terealisasi.	- Berusaha untuk melakukan pembayaran gaji secara optimal - Penyusunan perencanaan anggaran untuk rekening belanja Gaji PNS lebih cermat
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.373.042.059	100%	Rp.363.617.868	100%	- Terdapat Barang yang harganya tidak sesuai SSH	Menyesuaikan dengan standar harga yang ada dalam SSH
			Pengadaan Peralatan dan Mesin	Rp 117.154.106	20 unit	Rp 100.878.380	20 unit	-- Masih terdapat sisa Pagu anggaran - Harga barang yang tidak sesuai dengan SSH	- berusaha menyesuaikan dengan standar harga yang ada dalam SSH
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.284.705.524	100%	Rp 258.298.634	100%	- Realisasi Rekening Air, Listrik, Internet sesuai dengan Jumlah Tagihan - untuk pagu dana pembayaran listrik dan air telah di tetapkan 1 paket sehingga banyak	Penyusunan perencanaan anggaran untuk rekening belanja tersebut lebih mendekati harga standar dalam SBU

								pagu dana yang tidak terpakai	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 124.050.000	38 Unit	Rp. 117.327.508	38 Unit	Besaran Tagihan untuk STNK dan satuan harga yang ada di SBU tidak sesuai	membuat daftar rencana usulan penyesuaian harga dalam SBU
Kesejahteraan Rakyat	Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec.Banua Lawas 2020-2024	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 150.526.372	1 Lap	Rp146.726.963	1 Lap	- Harga satuan makanan dan minuman rapat tingkat kecamatan pada SBU yang ditetapkan kabupaten lebih tinggi daripada harga satuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga yang direalisasikan menyesuaikan sebagaimana harga satuan makanan dan minuman rapat pada SBU yang ditetapkan oleh pemerintah pusat	Merealisasikan harga satuan makan dan minum rapat menjadi harga satuan tingkat Kecamatan
Kesejahteraan Rakyat	Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec.Banua Lawas 2020-2024	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Rp 26.350.000	1 kegiatan	Rp 26.350.000	1 kegiatan	a. semua kegiatan telah dilaksanakan,	Menyesuaikan antara penganggaran dan kebutuhan serta kegiatan yang dilaksanakan
		Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 18.075.000	15 desa	Rp 18.075.000	15 desa	b. Banyak nya jumlah desa yang	- Berusaha Melaksanakan kegiatan dengan

		Desa dan Kelurahan						dilakukan pembinaan dan diberdayakan	membuat jadwal pembinaan tiap desa
		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 102.445.247	15 PKK	Rp. 87.827.063	15 PKK	c. Banyaknya jumlah TP PKK Desa yang dilakukan pembinaan dan diberdayakan	- Berusaha Melaksanakan kegiatan dengan membuat jadwal pembinaan tiap desa
Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	Penyelenggara kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec.Banua Lawas 2020-2024	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 110.610.000	12 Patroli Terpadu	Rp.103.635.000	12 Patroli Terpadu	d. ilayah kerja sangat Luas dengan tim korrdinasi yang terbatas	Memaksimalkan personil yg ada dan lebih mengintensifkan pelaksanaan kegiatan
Penyelenggaraan pemerintahan	Penyelenggara kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec.Banua Lawas 2020-2024	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp.161.420.692	1 Laporan	Rp.147.136.847	1 Laporan	e. Banyaknya Kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum yang harus dilaksanakan	Tetap berusaha melaksanakan kegiatan secara optimal dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia
Pembinaan kelembagaan, aparatur dan kewilayahan	Penyelenggara kegiatan pemerintahan umum (Renstra kec.Banua Lawas 2020-2024	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.19.400.000	15 desa	Rp. 16.980.000	15 desa	f. Banyaknya jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	- Berusaha Melaksanakan kegiatan dengan membuat jadwal pembinaan tiap desa

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Kecamatan Banua Lawas, Tahun 2024

B. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Tabel III.5.
Kebijakan Strategis yang Ditetapkan Tahun 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Menindak lanjuti ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<u>Tujuannya:</u> Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Meningkatkan Pendapatan Daerah, dan Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga mempercepat pembangunan Daerah. <u>Masalah yang diselesaikan:</u> sebagai Dasar Hukum atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.	Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	<u>Tujuannya:</u> Dalam rangka pengoptimalan penyelenggaraan ketenagakerjaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan daerah sebagai upaya demi mewujudkan tenaga kerja daerah yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, serta berkeadilan <u>Masalah yang diselesaikan:</u> Pemerintah Daerah memiliki acuan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan ketenagakerjaan khususnya bagi Tenaga Kerja yang berada di Kabupaten Tabalong.

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
3.	Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	<u>Tujuannya:</u> - Dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran Perangkat Daerah guna meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan perubahan tipologi BPBD. - menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kebijakan nasional yang mewajibkan adanya penyesuaian nomenklatur Bappedalitbang menjadi Bapperida. <u>Masalah yang diselesaikan:</u> - Dengan mengubah tipologi BPBD, organisasi dapat lebih responsif terhadap bencana dan dapat mengelola sumber daya secara lebih efektif, memperkuat sistem peringatan dini, mitigasi, serta pemulihan pascabencana. - Dengan perubahan nomenklatur menjadi Bapperida, maka dapat memperkuat peran riset dan inovasi sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan, sehingga lebih mendukung upaya pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi.
4.	Berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali	Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban	<u>Tujuannya:</u> untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
	diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi <u>Masalah yang diselesaikan:</u> menjadi aturan yang jelas mengenai pertanggungjawaban anggaran yang harus disampaikan secara terbuka kepada publik, adanya pelaporan yang lebih akuntabel tentang bagaimana anggaran digunakan sesuai dengan rencana, serta evaluasi hasilnya.
5.	Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak	<u>Tujuannya:</u> - Dalam rangka memperbaiki, penyempurnaan dan menyesuaikan kebijakan pusat atas Pasal-pasal terkait pemenuhan hak-hak anak. - untuk memperkuat landasan hukum, menyesuaikan kebijakan dengan tantangan terkini, dan memastikan hak anak dapat terpenuhi secara lebih optimal. <u>Masalah yang diselesaikan:</u> - mempertajam dan lebih memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak. - untuk memastikan anak-anak yang berada dalam situasi rentan mendapatkan perlindungan maksimal dan terpenuhi hak-haknya.

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
6.	Berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	<u>Tujuannya:</u> merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD <u>Masalah yang diselesaikan:</u> penyesuaian anggaran daerah dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang aktual. Perubahan ini mencakup penyesuaian pendapatan dan belanja daerah agar lebih efektif dalam mendukung program-program pemerintah daerah.
7.	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Perda Kab. Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	<u>Tujuannya:</u> sebagai arahan dan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Daerah dalam waktu jangka panjang 20 (dua puluh) tahun sesuai visi dan misi Daerah. <u>Masalah yang diselesaikan:</u> untuk menjamin terjadinya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah dalam mewujudkan visi, misi daerah serta arah kebijakan dan sasaran

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
			pokok daerah yang disepakati bersama.
8.	Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik	Perda Kab. Tabalong Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong	<u>Tujuannya:</u> - untuk menyesuaikan perubahan Peraturan di tingkat pusat yang menjadi acuan penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal di daerah. - memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan penyiaran publik lokal di Kabupaten Tabalong, sehingga informasi yang disampaikan lebih akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. <u>Masalah yang diselesaikan:</u> Melalui perubahan ini regulasi lebih diakomodasi dengan kebijakan terbaru dan dapat meningkatkan kualitas penyiaran publik lokal di daerah.
9.	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Perda Kab. Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	<u>Tujuannya:</u> sebagai perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD Kab. Tabalong. <u>Masalah yang diselesaikan:</u> Dengan adanya APBD, pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengalokasikan dana untuk berbagai program pembangunan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, sehingga membantu menciptakan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
			pengelolaan keuangan daerah yang lebih terarah, efisien, dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10.	Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Bupati Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan	<u>Tujuannya:</u> untuk menjaga kesesuaian harga dengan kondisi pasar, memastikan efisiensi pengelolaan anggaran dan mencegah terjadi penyimpangan dalam perhitungan biaya untuk barang dan/atau jasa. <u>Masalah yang diselesaikan:</u> sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
11.	Dalam rangka meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 Tata Naskah Dinas	<u>Tujuannya:</u> untuk mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten Tabalong . <u>Masalah yang diselesaikan:</u> Sebagai acuan untuk penyelenggaraan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
12.	Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024	Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026	<u>Tujuannya:</u> Untuk memberikan arah, pedoman, dan prioritas pembangunan di tingkat daerah selama periode Penjabat Bupati. <u>Masalah yang diselesaikan:</u> Sebagai dasar bagi Daerah yang memiliki periode berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
			Tahun 2024 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 dan pedoman bagi Penjabat (Pj) Bupati untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.
13.	Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026	Perbup Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026	<u>Tujuannya:</u> Untuk memberikan arah, pedoman, dan prioritas pembangunan pada Perangkat Pemerintah Kabupaten Tabalong selama periode Penjabat Bupati. <u>Masalah yang diselesaikan:</u> Sebagai dasar kepada Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan Kabupaten Tabalong yang memiliki periode berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024 untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah setelah Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 ditetapkan.
14.	Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, dan guna mengoptimalkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan organisasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan penyesuaian sistem kerja	Peraturan Bupati Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi	<u>Tujuannya:</u> Untuk mewujudkan proses kerja efektif dan Efisien, memastikan pencapaian tujuan, srategi dan kinerja organisasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
			<u>Masalah yang diselesaikan:</u> Sebagai pedoman dalam penyesuaian Sistem Kerja pada Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan penyederhanaan birokrasi.
15.	Agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tabalong dapat berjalan efektif, efisien, tertib, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu adanya Pedoman Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	<u>Tujuannya:</u> Sebagai pedoman secara teknis bagi Pemerintah Desa dalam penerapan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBDesa. <u>Masalah yang diselesaikan:</u> Sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam penerapan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBDesa.
16.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025	<u>Tujuannya:</u> Untuk perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong dan Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tabalong serta Rancangan prioritas dan plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tabalong <u>Masalah yang diselesaikan:</u> Sebagai Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
17.	Berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan	Peraturan Bupati Tabalong Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025	<u>Tujuannya:</u> Dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
	Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah		kan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. <u>Masalah yang diselesaikan:</u> Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
18.	Bahwa dengan adanya perubahan kebijakan Nasional maupun Daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan, sehingga perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024	Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024	<u>Tujuannya:</u> Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 merupakan penyesuaian atas Dokumen Perencanaan Daerah yang berisi program dan kegiatan untuk periode satu tahun dari tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 <u>Masalah yang diselesaikan:</u> adanya Dasar Hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyesuaikan perubahan kebijakan Nasional maupun Daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan.
19.	Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan Desa di wilayah Kabupaten Tabalong dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah	Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengadaan Tanah Kas Desa	<u>Tujuannya:</u> untuk menyediakan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa dan dimanfaatkan untuk meningkatkan penda-

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
	Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		patan, kesejahteraan, kemakmuran Pemerintah Desa serta masyarakat dengan tetap menjamin kepastian hukum. <u>Masalah yang diselesaikan:</u> sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan belanja Pengadaan Tanah Kas Desa.
20.	Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa	Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Hortikultura Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2025	<u>Tujuannya:</u> untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif sehingga pada akhirnya diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembangunan kota-desa yang akhirnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan <u>Masalah yang diselesaikan:</u> Untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, luas kawasan hortikultura yang ditetapkan minimal 1.000 ha (seribu hektar) sehingga perlu menambah 5 (lima) Desa dalam 1 (satu) hamparan yang sama di Dalam Perubahan Peraturan Bupati ini.
21.	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	<u>Tujuannya:</u> Memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
			menyusun Laporan Keuangan baik Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong maupun Laporan Keuangan Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas, dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi Pemerintah Daerah <u>Masalah yang diselesaikan:</u> sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
22.	Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tabalong	Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	<u>Tujuannya:</u> Dalam rangka penyempurnaan Pasal terkait Pemberian TPP ASN bagi ASN yang sedang berhalangan sementara lebih dari 12 (dua belas hari berturut-turut, bagi ASN yang merangkap jabatan sebagai Pj, Plt atau Plh, TPP ASN bagi PPPK, dan Cuti Tahunan bagi ASN. <u>Masalah yang diselesaikan:</u> mempertajam dan lebih memberikan kepastian hukum terhadap TPP ASN dan Cuti Tahunan ASN.

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah, 2024

C. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tabel III.6.

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Komisi I

SKPD	CATATAN STRATEGIS	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1. DINAS SOSIAL	- Terkait peningkatan kualitas hidup, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam kinerja program menunjukkan masih terjadi tumpang tindih, tindakan kegiatan antara program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga ketika intervensi daerah terhadap upaya peningkatan kualitas hidup PPKS. Sebagian data yang digunakan tersebut sudah menjadi bagian dari data yang ada di Pemerintah Pusat. Oleh karena itu ketika target yang dialokasikan Dinas Sosial untuk meningkatkan kualitas hidup PPKS sebanyak 3.146 jiwa ternyata hanya bisa direalisasikan sebanyak 2.433 jiwa karena sebanyak 713 jiwa menjadi program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.	- Memvalidasi kembali data kemiskinan dengan mensinkronkan data olahan BPS dengan data yang dihimpun oleh Dinas Sosial Kabupaten Tabalong. - Monitoring dan verifikasi data terhadap hasil musyawarah desa melalui pendekatan kemanusiaan. - Bahwa kegiatan-kegiatan yang realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan dilakukan dengan cara : a. Memperluas jangkauan layanan PPKS di Kabupaten Tabalong b. Memaksimalkan kinerja OPD, TSKS dan dukungan dana yang cukup dalam memberikan layanan PPKS. - Memperkuat kerjasama kegiatan lintas sektoral terkait dalam penanggulangan kemiskinan, tentunya Dinas Sosial tidak mampu bekerja secara sendiri, tetapi harus mendapat dukungan dari Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan OPD lainnya. Sangat diperlukan pemetaan dan distribusi kebijakan strategis di masing-masing OPD untuk	- Sudah ada dilakukan dengan BPS tetapi karena terdapat perbedaan antara data dari Dinsos dan BPS. Untuk Dinsos selama ini menggunakan data mikro sedangkan BPS menggunakan data makro dengan metode sampling sehingga tidak ada BNBA orang miskin hasil dari pendataan oleh BPS. - Untuk hasil musdes yang sudah dilakukan sudah diupayakan untuk dilakukan monitoring maupun validasi kelengkapan isiannya sehingga lebih meminimalisir data yang error sehingga pada saat dilapangan petugas bisa melakukan pendekatan kepada petugas ditingkat desa (aparatur desa) untuk dilakukan perbaikan. - Untuk Dinas Sosial sudah memperluas jangkauan layanan PPKS dengan melakukan musyawarah disemua Desa/Kelurahan agar semua PPKS disetiap Desa/Kelurahan terdata sehingga

			melakukan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tabalong.	dapat mendapatkan pelayanan yang sesuai kebutuhan PPKS tersebut. Yang ditindaklanjuti oleh TKSK dan Fasilitator Desa/Kelurahan. Dinas Sosial sudah bekerjasama dengan berbagai dinas dan lembaga untuk penentasan kemiskinan di Kabupaten Tabalong, yang sudah didukung oleh Kepala Daerah melalui program Bansos Pangan Daerah (Rasda) dan juga sekarang bekerjasama dengan Bappedalitbang agar pemetaan pengentasan kemiskinan dapat merata kepada setiap OPD melalui anggaran yang terdapat pada masing-masing OPD terkait.
2.	DINAS TENAGA KERJA	1. Permasalahan ketenagakerjaan sering terjadi dan cukup kompleks, sehingga membutuhkan penyelesaian lama dan mendalam antara pekerja dan pihak perusahaan, sehingga pekerja melakukan pengaduan masalah ketenagakerjaan kedinas terkait (dinas ketenagakerjaan) permasalahan ketenagakerjaan tersebut disebabkan : a. Kualitas pekerja yang relatif rendah	1. Dinas ketenagakerjaan Kabupaten Tabalong perlu mengadakan pelatihan ketenagakerjaan secara intensif agar para calon tenaga kerja memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja. Memperbanyak mendirikan SMK. Membuat kebijakan mengenai gaji ketenagakerjaan di Kabupaten Tabalong sesuai ketentuan yang berlaku dan mengembangkan sektor usaha informal dikawasan terpencil serta mengembangkan	Pemerintah Kabupaten Tabalong menjadikan penanganan pengangguran terbuka menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Daerah. Data statistik menunjukkan tren positif, dengan penurunan angka pengangguran terbuka dari 4,46% pada tahun 2022 menjadi 3,60% pada tahun 2023. Angka ini berasal dari total angkatan kerja sebanyak 140.493 orang berdasarkan data BPS Kabupaten

		disebabkan rendahnya pendidikan dan tidak mempunyai keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaan. b. Jumlah tenaga kerja yang banyak, sedangkan lapangan pekerjaan yang terbatas. c. Gaji pekerja yang rendah dibanding dengan negara lain. d. Persebaran tenaga kerja yang belum merata. e. Pertumbuhan lapangan kerja yang lambat. Berkaitan dengan hal tersebut diatas adalah : Tugas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tabalong untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tingkat pengangguran terbuka tahun 2021-2023 sebanyak 3,60% dan penduduk pencari kerja sebanyak 5,502 jiwa.	usaha industri yang padat karya.	Tabalong Tahun 2023. Tahun 2023 menandai pula populasi usia produktif/usia kerja di Kabupaten Tabalong yang mencapai 182.437 orang dari total penduduk sebanyak 262.631 jiwa berdasarkan data kependudukan. Meski demikian, analisis data mengungkapkan ketidak seimbangan dalam tingkat pendidikan diantara angkatan kerja. Mayoritas angkatan kerja didominasi oleh lulusan SD sebanyak 66.454 orang, diikuti oleh lulusan SLTP sebanyak 40.526 orang, dan lulusan SLTA sebanyak 68.534 orang. Namun, individu dengan pendidikan tinggi mulai dari Diploma 1 hingga Strata 3 hanya mencapai 29.294 orang sedangkan penduduk yang tidak tamat SD / tidak bersekolah sebanyak 18.172 orang. Penurunan angka pengangguran terbuka pada tahun 2023 dapat diatribusikan kepada berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja. Upaya tersebut mencakup penyelenggaraan Job Fair, pencetakan 10.000 wirausaha baru, serta pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan dalam menghadapi Digitalisasi. Pelatihan

				ini memberikan kesempatan kepada pencari kerja untuk bertemu dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja atau menjadi tenaga kerja mandiri. Keberhasilan program dan kegiatan ini tahun 2023 mendorong Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong untuk terus mengembangkan program serupa pada tahun-tahun berikutnya, dengan tujuan konsisten : menekan angka pengangguran terbuka dan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Tantangan tambahan muncul dalam menginterpretasikan data pengangguran. Meskipun terdapat sekitar 8.965 individu yang tidak bekerja serta 79.458 orang bukan angkatan kerja (data kependudukan berdasarkan KTP tahun 2023). Sebagian besar dari mereka mungkin adalah ibu rumah tangga, anak-anak bersekolah/kuliah atau pensiunan. Namun, untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja, Pemerintah Daerah telah mengambil langkah-langkah konkret. Langkah-langkah yang diambil dalam melalui bidang penempatan tenaga kerja dan erluasan kesempatan kerja

				dengan memberikan bimbingan teknis wirausaha baru. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ibu rumah tangga di desa dan kelurahan. Pada triwulan pertama tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan dan pelatihan guna menanggulangi pengangguran terbuka antara lain : a. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja telah melaksanakan Bimbingan Teknis wirausaha baru bagi 64 orang di 4 Desa, meliputi pelatihan menjahit dan pembuatan kue. Pemerintah Kabupaten Tabalong telah secara aktif mencetak wirausaha baru sejak tahun 2014 menggunakan dana APBN/APBD dan dana CSR dari perusahaan. Capaian jumlah wirausaha baru yang diberikan pelatihan sejak tahun 2014 hingga triwulan I 2024 mencapai 23.565 orang. b. Balai Latihan Kerja Tanjung pada tahun 2024 juga memberikan pelatihan bagi pencari kerja menggunakan dana APBN dan dana CSR. Balai Latihan Kerja

				(BLK) Tabalong tahun 2024 total akan melaksanakan 22 paket pelatihan, yang terdiri dari 7 paket menggunakan APBD institusional dan 15 paket menggunakan APBD Non Institusional (MTU). Jenis pelatihan tersebut antara lain pelatihan pemeliharaan dan perawatan Ac rumah tangga, desain grafis, kelistrikan dan servis ringan kendaraan. Triwulan I 2024 BLK Tabalong sudah melakukan 4 paket pelatihan menggunakan dana APBN terdiri dari Pembuatan Kue dan Roti, Pemeliharaan dan Perbaikan AC rumah tangga, Desainer Grafis Muda, Pemasangan Instalasi Listrik dan 2 paket pelatihan menggunakan dana CSR. Pelatihan Bengkel Sepeda Motor dan Pelatihan Practical Office Advance (POA) atau Operator Komputer. c. Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Tenaga Kerja juga berencana untuk membeli 2 unit alat berat pada tahun 2024, dengan tujuan untuk

				program pelatihan operator alat berat. Dinas Tenaga Kerja telah mengalokasikan anggaran sebesar 3,5 milyar rupiah untuk pengadaan satu unit excavator dan 1 unit dump truck. Pengadaan alat berat ini merupakan aspirasi masyarakat yang masuk melalui DPRD Tabalong tahun lalu. Dengan adanya alat berat tersebut, program pelatihan operator di Balai Latihan Kerja dapat dilakukan secara lebih efisien. d. Tahun 2024 beberapa pelatihan yang akan dilaksanakan oleh Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja berupa pelatihan menjahit, membuat kue, membuat hampers, pelatihan ahli K2, Satpam Gada Pratama, Konten Kreator dan kewirausahaan digital Dasar dalam menghadapi revolusi industri 4,0 menuju Revolusi Industri 5,0. Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Tenaga Kerja akan lebih peka terhadap perubahan dan perkembangan lapangan kerja di era digital. Dengan memahami tren dan

				kebutuhan lapangan kerja yang berkembang, pemerintah akan mengambil langkah-langkah proaktif untuk memberikan pelatihan sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini akan memastikan bahwa para pencari kerja dilengkapi dengan keterampilan yang relevan dan dibutuhkan dalam ekonomi digital yang terus berkembang. Dengan demikian, pemerintah daerah berkomitmen untuk tidak hanya menekan angka pengangguran terbuka, tetapi juga memastikan bahwa tenaga kerja lokal siap bersaing dan beradaptasi dengan perubahan global yang terjadi melalui kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat Kabupaten Tabalong akan terus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan di era digital. Dalam era digital yang ditandai oleh revolusi industri 4.0, konten kreator telah menjadi salah satu profesi yang paling menonjol dan diminati. Perkembangan platform-platform media sosial, situs web berbagi konten dan aplikasi konten lainnya telah membuka pintu bagi individu untuk mengekspresikan kreatifitas mereka dan

				berbagi informasi dengan audiens global. Kkonten kreator, baik itu dalam bentuk artikel, video, podcast atau gambar memiliki peran penting dalam membangun merek pribadi (Personal Branding), mempengaruhi opini dan membangun komunitas online yang berpengaruh, mereka bertanggungjawab untuk menciptakan konten yang menarik, informatif dan berharga bagi audiens mereka. Revolusi Industri 4.0 juga telah menciptakan peluang kewirausahaan digital yang luas. Perkembangan teknologi digital seperti e-commerce, layanan online dan aplikasi mobile telah membuka pintu bagi individu untuk memulai bisnis mereka sendiri dengan biaya yang relatif rendah dan jangkauan global yang luas. Kewirausahaan digital mencakup berbagai bidang, termasuk penjualan online, pemasaran digital, pengembangan aplikasi dan layanan konsultasi online. Individu dengan keterampilan teknologi dan jiwa kewirausahaan dapat menciptakan peluang baru dalam ekonomi digital yang terus berkembang. Revolusi Industri 4.0 juga telah

				menciptakan permintaan yang tinggi akan ahli pemasaran digital dan analisis data. Perusahaan-perusahaan memanfaatkan teknologi digital dan data untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Para ahli pemasaran digital dan analisis data memiliki peran kunci dalam mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data untuk mengidentifikasi tren pasar, mengukur kinerja kampanye pemasaran dan menyusun strategi pertumbuhan yang efektif. Revolusi Industri 4.0 juga telah menciptakan peluang bagi ahli desain grafis, pengembang web berperan dalam merancang dan mengembangkan situs web, aplikasi mobile dan konten visual lainnya yang menarik dan berinteraksi dengan audiens.
		2 Program pelatihan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja pada kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi tidak ada kegiatan dan anggaran yang disediakan oleh dinas ketenagakerjaan padahal kegiatan ini	2. Agar dilakukan kegiatan pelatihan tenaga kerja secara intensif.	Pada tahun 2023 terdapat sekitar 8.965 individu yang tidak bekerja serta 79.458 orang bukan angkatan kerja (data kependudukan berdasarkan KTP tahun 2023) untuk dapat memberikan pelatihan berbasis kompetensi memerlukan biaya yang cukup besar

		sangat penting untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menunjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk modal bagi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.		untuk 1 orang, sebagai contoh pelatihan Satpam menelan biaya Rp. 4.500.000,- dan pelatihan Ahli K3 Rp. 5.000.000,- sedangkan pelatihan Operator Alat Berat minimal memakan biaya Rp. 21.000.000,- per orang untuk tingkat dasar sehingga anggaran pelatihan tenaga kerja menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan minat dan bakat para pencari kerja di Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan pelatihan Dinas Tenaga Kerja akan lebih peka terhadap perubahan dan perkembangan lapangan kerja di era digital. Dengan memahami tren dan kebutuhan lapangan kerja yang berkembang, pemerintah akan mengambil langkah-langkah proaktif untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini akan memastikan bahwa para pencari kerja dilengkapi dengan keterampilan yang relevan dan dibutuhkan dalam ekonomi digital yang terus berkembang. Dengan demikian Pemerintah Daerah berkomitmen untuk tidak hanya menekan angka pengangguran terbuka, tetapi juga memastikan bahwa tenaga kerja lokal siap bersaing dan

				beradaptasi dengan perubahan global yang terjadi. Melalui kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat Kabupaten Tabalong akan terus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di era digital. Ekonomi kreatif menjadi komponen penting dalam pemahaman tren dan kebutuhan lapangan kerja di era digital. Dengan pertumbuhan ekonomi kreatif yang pesat, seperti industri desain, media digital, seni digital dan lainnya, pemerintah akan lebih peka terhadap potensi lapangan kerja baru yang muncul. Dengan memahami peran ekonomi kreatif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, pemerintah akan mengambil langkah-langkah proaktif untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan permintaan pasar. Melalui investasi dalam pelatihan keterampilan yang relevan dengan ekonomi kreatif, pemerintah daerah akan memastikan bahwa para pencari kerja dilengkapi dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam industri ini yang terus berkembang, ini tidak hanya akan membantu menekan angka pengangguran

				terbuka, tetapi juga akan memastikan bahwa tenaga lokal siap bersaing dan beradaptasi dengan perubahan global yang terjadi. Dengan demikian, melalui kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat Kabupaten Tabalong akan terus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di era digital, dengan memperhatikan serta mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi kreatif dalam strategi pengembangan tenaga kerja.
3.	DINAS PENDIDIKAN	- Pengelolaan pendidikan dasar sebagian sekolah kondisi rusak tentu memerlukan perencanaan secara maksimal yang berkriteria sebagai sekolah penggerak.	- Pemetaan sekolah dasar yang mengalami rusak berat, sedang, dan ringan.	1 Survey dan penyusunan buku master Pemetaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar sedang berjalan. Setelah lengkap akan dibukukan sebagai bahan penyusunan program pengelolaan pendidikan jenjang Sekolah Dasar.
			- Perencanaan dan penganggaran bertahap masing-masing sekolah yang berkriteria sebagai sekolah penggerak.	2 Sekolah Dasar yang berstatus sebagai sekolah penggerak sudah dipetakan kondisi sarana prasarananya dan dilakukan proses pemenuhan kebutuhannya. a. Tahun 2023 : Seluruh Sekolah penggerak jenjang SD berikan bantuan mebeler meja kursi siswa, laptop kantor dan Chromebook

				b. Tahun 2024 : - SDN Mahe Seberang mendapat rehab berat ruang kelas - SDN 1 Usih mendapat Pembangunan Pagar Sekolah dan Paving Halaman - SDN Seradang mendapat Pembangunan Perpustakaan dan WC/Toilet Siswa - SDN Randu, perencanaan Pembangunan Ruang Kelas dan dilaksanakan pada induk 2025
4.	DINAS KESEHATAN	1 Penunjang urusan . Pemerintahan Daerah Kabupaten pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Terget anggaran rp. 71.492.000. Realisasi kinerja anggaran rp. 41.600.000, maka realisasi kinerja anggaran 58%. Pada kolom rincian permasalahan tertulis masih kurang maksimalnya penyusunan perencanaan kolompemecahan masalah tertulis koordinasi lebih lanjut antara sekretariat dengan bidang-bidang	- Pemerintah Daerah perlu melakukan bimbingan teknis penyusunan program dan perencanaan.	1 Penjadwalan waktu . rapat yang lebih tepat lagi sehingga pelaksanaan dapat berjalan lancar, mendorong lebih proaktifnya kepala bidang dan subkoordinator menghadiri rapat yang sudah dijadwalkan.
		2 Pada kegiatan . pelayanan dan		2 Terlambatnya . pelaporan realisasi

		penunjang pelayanan BLUD, dengan target anggaran rp. 20.968.944.500 dengan target kinerja jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan (18 puskesmas). Sedangkan realisasi anggaran "o" pada kolom realisasi kinerja jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan penunjang pelayanan (15 puskesmas) pada kolom rincian permasalahan tidak tertulis dan tidak dilaksanakan. Hal ini pada kolom pemecahan masalah tertulis tidak dilakukan menunjukkan lemahnya dan kurangnya akuratnya perencanaan.		dari bidang Yankes dan subbag keuangan untuk dana BLUD sehingga laporan kinerja tahunan telah disampaikan sesuai deadline waktu yang telah ditetapkan Pemda.
		3 . Pada kegiatan pembangunan rumah sakit beserta sarana pendukungnya. Target anggaran Rp. 1.741.157.800. Realisasi kinerja anggaran rp. 1.352.489.465, maka realisasi kinerja anggaran 77 %. Pada kolom rincian permasalahannya tertulis ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kurang maksimal. Pada kolom upaya pemecahan masalah tertulis melakukan review		3 . Terlambatnya pelaporan realisasi dari bidang Yankes dan subbag keuangan untuk dana BLUD sehingga laporan kinerja tahunan telah disampaikan sesuai deadline waktu yang telah ditetapkan Pemda.

		pelaksanaan kegiatan sebelumnya.		
		4 Kegiatan pembangunan Puskesmas target anggaran Rp. 1.658.100.000 realisasi kinerja anggaran Rp. 1.025.145.542, maka realisasi kinerja anggaran 62%. Permasalahan tertulis ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal. Pemecahaan masalah melakukan review pelaksanaan kegiatan sebelumnya.		4 Meningkatkan pengawasan waktu pelaksanaan pembangunan Puskesmas.
		5 Pada kegiatan pengadaan obat vaksin target anggaran Rp. 2.463.025.200, realisasi kinerja anggarannya Rp. 1.814.644.200, maka realisasi kinerja anggaran 74%. Permasalahan tertulis kekosongan stok dipenyedia. Pemecahan masalah tertulis koordinasi lebih lanjut dengan penyedia		5 Koordinasi lebih intensif dengan pihak penyedia obat-obatan
		6 Pada kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan target anggaran Rp. 82.751.000 , realisasi kinerja anggaran Rp. 30.218.000, maka realisasi kinerja anggaran 36%. permasalahan tertulis balita tidak mendapatkan		6 Meningkatkan Promosi kesehatan terlebih kepada orang tua yang memiliki anak bayi dan balita, meningkatkan kemampuan dan keahlian petugas dalam hal penanganan imunisasi.

		pelayanan karena setelah selesai imunisasi balita tidak berkunjung lagi ke posyando sehingga petugas dan kader melakukan sweping penimbangan, pencatatan dan pelaporan belum maksimal pemecahan masalah penpenigkatan gerakan masyarakat (germas) dan peningkatan kapasitas petugas. berkenaan dengan hal tersebut diatas pada poin 1,2,3,4,5 dan 6 menunjukkan terdapat perencanaan dan program yang kurang matang serta program yang tidak tepat sasaran. Dalam menyajikan lkpj pemerintah daerah masih banyak laporan yang belum dilengkapi dengan data data serta penjelasan yang dihadapi oleh opd serta solusi yang diambil dalam pemecahan masalah.		
5.	DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Pada program Panjang urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Masih kurangnya pemahaman terkait dengan dokumen yang dibuat karena banyaknya aturan baru, sehingga tidak tersusunnya dokumen perencanaan,	1. Untuk itu sangat diperlukan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik guna mencapai suatu perencanaan yang berkualitas. Setiap ada perubahan yang baru dilakukan sosialisasi melalui bimtek.	1. Melakukan peningkatan kualitas dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melakukan pelatihan/Bimtek untuk meningkatkan SDM di DPMD.

		penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan baik.		
		2 Program pembinaan administrasi Pemerintahan Desa capaian kinerja masih 80% seperti: persentase desa dengan perencanaan yang baik, persentase desa dengan pengelolaan keuangan dan asset desa yang baik, persentase desa dengan administrasi umum desa yang baik, dan persentase desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa dengan baik.	2. Perlu ditingkatkan capaian kinerja di atas 80% sehingga jalannya pemerintahan tertib tidak menimbulkan masalah-masalah dan rakyat terlayani dengan baik. Perlu dilakukan pembinaan-pembinaan secara berkala untuk Aparat Desa dan Kepala Desa.	2 Akan dilakukan peningkatan capaian kinerja untuk persentase desa dengan perencanaan yang baik, persentase desa dengan pengelolaan keuangan dan asset desa yang baik, persentase desa dengan administrasi umum desa yang baik dan persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik dengan melaksanakan pembinaan melalui pelatihan/bimtek bagi Pemerintahan Desa serta melakukan monitoring dan evaluasi ke desa-desa secara berkala dan berkelanjutan.
		3 Program penataan desa dengan kegiatan menata batas desa program ini tidak dilaksanakan di tahun 2023 termasuk penyelesaian batas desa yang bersengketa	3. Untuk pemberian pelanggaran yang efektif perlu adanya kepastian batas wilayah desa yang sudah disepakati kepada penduduk. Penyesuaian tapal batas desa segera dilaksanakan lebih-lebih pada batas desa yang bersengketa dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat atau desa setempat ataupun kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan.	3 Tapal Batas Desa yang sekarang disebut Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 45 Tahun 2016, untuk Kabupaten Tabalong Penetapan dan Penegasan Batas Desa sejumlah 121 Desa sudah di Tetapkan dan di Tegaskan Batas Desa nya, hanya saja Legalitas yang di Perbup kan Tahun 2024 berjumlah 7 Desa, dan Sudah berproses menjadi PERBUP. Kemudian masih ada 7 Desa lagi sebelum PERMENDAGRI Nomor 45 Tahun

				2016 terbit yang berupa Surat Keputusan (SK) Bupati, yang sedang di verifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk dijadikan PERBUP Batas Desa.
6.	DINAS PERPUS TAKAAN DAN KEARSIPAN	- Pelaksanaan program pembinaan perpustakaan dengan kegiatan pemberdayaan gemar membaca. Tingkat Daerah Kabupaten Tabalong masih belum menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat. Secara progres program tidak dapat diketahui secara jelas ketercapaian pelaksanaan program tersebut, karena data yang disajikan dalam LKPJ Bupati tidak memadai.	- Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat menarik anak-anak untuk gemar membaca sehingga bisa membuat mereka senang untuk berkunjung ke Perpustakaan, maka diharapkan bisa menumbuhkan minat baca mereka sedari dini. - Melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk dilakukannya kunjungan rutin ke Perpustakaan dalam rangka untuk menumbuhkan minat baca. - Sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada di Perpustakaan lebih ditingkatkan lagi agar bisa menarik minat baca masyarakat.	1 Melaksanakan layanan Story Telling, Penyediaan Bahan Pustaka Anak serta APE (Alat Permainan Edukasi). 2 Melaksanakan layanan Perpustakaan Keliling, Layanan Baca di tempat. 3 Penyediaan perabot layanan, penyediaan dan pemeliharaan, layanan internet gratis bagi Pemustaka, penyediaan bahan Pustaka Analog dan Digital.

Komisi II

SKPD		CATATAN STRATEGIS	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	- DPMPTSP sebagai OPD yang diberi kewenangan memberikan pelayanan perijinan dan meningkatkan investasi, agar terus berinovasi, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak agar pelayanan publik	- Dari hasil penelaahan tadi kami memberikan catatan agar ditindak lanjuti kedepannya ;	1 DPMPTSP selama ini telah melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan OPD teknis secara optimal, terutama dalam hal penerbitan rekomendasi dan pertimbangan teknis untuk penerbitan izin, dalam hal ini kelengkapan persyaratan sudah terpenuhi.

		dibidang perizinan semakin berkualitas, mudah, aman, nyaman dan investasi meningkat. Berdasarkan laporan kinerja DPMPTSP 2023 berharap capaian kinerja yang sudah baik, seperti mampu mempertahankan ststus pelayanan prima, mendapat predikat status tingkat kepatuhan yang tertinggi yang berstatus baik agar di pertahankan dan ditingkatkan.		2 DPMPTSP . sesegeranya membuat surat permohonan rekomendasi dan pertimbangan teknis untk disampaikan kepada OPD terknis, karena sesuai dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong pada BAB IV Pasal 4 Ayat (3) yang berbunyi “Mekanisme proses penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari OPD terkait’. Untuk rekomendasi teknis perizinan bidang kesehatan sudah dilakukan melalui aplikasi PALIAT ONLINE sehingga waktu yang diperlukan untuk penerbitan rekomtek bisa lebih cepat. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalitas petugas pelayanan DPMPTSP telah melakukan bimbingan teknis pelayananprima (Service Excelent, Diklat Dasar PTSP,

				TOT OSS, RBA Capacity Building serta Diklat Teknis lainnya. Untuk Tahun 2024 rencanya akan dilaksanakan pelatihan bahasa Isyarat bagi petugas pelayanan untuk melayani pemohon yang berkebutuhan khusus. Kegiatan ini dilakukan agar petugas pelayanan publik memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya serta profesional dengan sikap atau budaya
				Kolaborasi dan koordinasi dengan OPD teknis terkait, dengan instansi vertikal dan pihak terkait, agar semakin ditingkatkan, sehingga proses pelayanan perizinan berjalan lancar sehingga investasi juga akan meingkat. Kapasitas SDM agar terus ditingkatkan agar semakin profesional, termasuk sarana dan prasarananya. Jajaran DPMPTSP mesti siap menyongsong dampak positif keberadaan IKN dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, aman dan nyaman kepada investor. Kami berharap DPMPTSP mampu melakukan terobosan, inovasi dalam rangka percepatan kepemilikan NIB (Nomor Induk

				Berusaha) untuk UMKN di Tabalong. Hal ini penting mengingat peran UMKN yang turut menentukan perekonomian daerah. Penyerapan tenaga kerja dan daya tahan ekonomi nasional, sementara berdasarkan data yang ada, UMKN yang telah memiliki NIB sebagai bukti legalitas usahanya baru sekitar 205 dari jumlah UMKN yang ada di Tabalong. Kami berharap DPMPTSP bisa dalam kurun waktu tertentu, meningkatkan bahkan menuntaskan 100% UMKN di Tabalong telah memiliki NIB sebagai bukti legalitas usahanya
				melayani dengan setulus hati, sehingga diharapkan tidak ada lagi keluhan-keluhan atas pelayanan yang diberikan. 3 Sejak akhir Tahun 2022 DPMPTSP telah melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan salah satunya adalah inovasi JEMPOL IBU atau "Jemput bola pelayanan perizinan berusaha ". Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat menghidupkan semangat pelaku usaha khususnya UMKN untuk dapat mengurus dan mendaftarkan usahanya secara

				legal, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong, sehingga untuk jangka panjang semua UMKM yang tersebar di Kabupaten Tabalong sudah memiliki NIB. Pada tahun 2021 realisasi penerbitan NIB sebanyak 284 NIB, Tahun 2022 : 1.203 NIB, Tahun 2023 : 2.469 NIB, untuk Tahun 2024 sampai dengan bulan April : 934NIB dan ditargetkan pada Tahun 2028 seluruh pelaku usaha UMKM di Kabupaten Tabalong sudah memiliki NIB. Untuk mencapai target tersebut kami mohon dukungan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana dan anggaran pendukung lainnya. Pada Tahun 2024 akan dilakukan bimbingan teknis OSS RBA bagi aparat Kecamatan, Kelurahan dan Desa, agar nantinya aparat Kecamatan, Kelurahan dan Desa dapat melakukan pendampingan penerbitan NIB bagi pelaku UMKM diwilayahnya.
2.	DINAS PERKE- BUNAN DAN PETERNAKAN	- Perlu memaksimalkan pengendalian dan penanggulangan	- Perlu adanya obat-obatan, pelayanan aktif service yang memadai untuk mengoptimalkan	- Dinas Perkebunan dan Peternakan melalui program Pengendalian Kesehatan Hewan

		penyakit hewan dan Zoonosis.	pengendalian penanggulangan penyakit hewan dan Zoonosis.	dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada T.A 2024 sebesar Rp. 461.921.365,00 dan pada T.A 2025 sebesar Rp. 1.172.402.000,00 yang mana diperuntukan untuk pengadaan obat-obatan hewan, bahan kimia, vaksinasi dan vitamin, sehingga ada kenaikan anggaran sebesar 254% untuk mendukung pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan Zoonosis. Untuk pelayanan kesehatan hewan gratis pada Dinas Perkebunan dan Peternakan melalui UPT Puskesmas pada T.A 2024sebesar Rp. 147.015.163,00 dan pada T.A 2025 sebesar Rp. 673.000.000,00, sehingga ada kenaikan anggaran 458% yang mana diperuntukan untuk pelayanan ternak besar dan Unggas serta vaksinasi Jembrana, PMK, ND/Flu Burung dan Rabies.
3.	BADAN PENDA-PATAN DAERAH	- Kami mengapresiasi terhadap Target Kinerja dalam layanan dan konsultasi pajak daerah yang sudah melebihi target kinerja.	- Untuk kedepannya terget kinerja dapat ditingkatkan dari target tahun sebelumnya dan perlu adanya perhitungan perencanaan penganggaran.	- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi pendapatan daerah pada tahun sebelumnya. - Menetapkan target pendapatan yang spesifik, terukur dan dapat dicapai dan relevan.

				Mencari dan mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial. Mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dengan memperbaiki sistem administrasi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak serta mengimplementasikan teknologi informasi untuk mempermudah proses pemungutan dan mengurangi kebocoran pendapatan. Meningkatkan kapasitas aparat pengelola pendapatan dengan memberikan pelatihan guna memastikan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola pendapatan dengan efektif. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi pendapatan daerah. Membuat laporan berkala tentang realisasi pendapatan daerah dan sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan guna transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat, sektor swasta dan masyarakat untuk

				optimalisasi pendapatan daerah. Meninjau kembali dan perbarui regulasi serta kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah serta memastikan regulasi tersebut mendukung upaya peningkatan pendapatan dan tidak menghambat potensi pemasukan daerah.
4.	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	- Dalam bidang perdagangan masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha.	- Perlu meningkatkan fasilitas sekaligus pengawasan perihal perizinan usaha di Tabalong serta perlu meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha terkait.	- Akan direncanakan identifikasi pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha perdagangan. - Akan dilakukan pengawasan serta sosialisasi masalah izin usaha perdagangan.
		- Perlu memaksimalkan pelaksanaan metrologi legal berupa tera ulang dan pengawasan.	- Perlu dilakukan sosialisasi tentang layanan tera ulang.	- Akan melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang layanan tera ulang . - Akan meningkatkan pengawasan kemetrologian.
5.	DINAS KETANAHAN PANGANPERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	- Pada Tabel III -42 tahun 2021 – 2022 kondisi awal 2018 ke 2021 dan ke 2022 berdasarkan laporan LKPJ dan LPPD dinas KP2TPH 2022 masih belum sempurna untuk dijadikan evaluasi untuk pencapaian target (merupakan kelemahan untuk dijadikan estimasi target yang hendak dicapai) dan tidak bisa dijadikan indikator kinerja	- Dalam membuat estimasi capai target untuk dapat lebih baik lagi dan perlunya tanggungjawab lebih dari KP2TPH sebagai pelaksanan kegiatan	Akan dilakukan evaluasi dan koreksi terhadap data pada Tabel III – 42, Tabel III - 53 pada LKPJ dan LPPD Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sehingga target – targetnya lebih sempurna untuk dievaluasi maupun dijadikan indikator kinerja.

		Pada tabel III 53 .Tahun 2021 – 2022 kondisi awal 2018 ke 2021 dan ke 2022 berdasarkan laporan LKPJ dan LPPD dinas KP2TPH 2022 masih belum sempurna untuk dijadikan evaluasi untuk pencapaian target (merupakan kelemahan untuk dijadikan estimasi target yang hendak dicapai) dan tidak bisa dijadikan indikator kinerja Pada Tabel III 54 2021 – 2022 Memang sudah ada peningkatan tetapi hendaknya lebih disempurnakan lagi dalam penyediaan data mulai dari kondisi awal 2018 sampai dengan 2020 ada diuraikan dalam table.		
6.	BAGIAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN TABALONG	- Perekrutan direksi BUMD lebih terbuka dan memperhatikan usia dan kapasitas - Pelaksanaan pasar murah	- Pelaksanakan seleksi dengan transparan, akuntabel dan independen - Untuk lingkup pelaksanaan pasar murah dapat diperluas hingga mencakup ke wilayah pedesaan	
7.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN TABALONG	- Untuk kebijakan fasilitasi dan konsultasi, pendataan dan dokumentasi serta sosialisasi semua kegiatan dapat disimpulkan baik anggaran maupun kinerja dapat	- Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan lagi target kinerja pada tahun mendatang sesuai dengan tingkat kemampuan anggaran	-

		dicapai diatas 90%. - Tidak ada masalah dan kendala yang berarti		
8.	BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN TABALONG	- Perlu dioptimalkan dalam pengamanan barang milik daerah / aset daerah baik yang didalam Tabalong maupun diluar Tabalong	- Perlu terinventarisirnya kelengkapan dokumen pengamanan barang milik daerah.	- Terinventarisasi aset Pemerintah Daerah baik dalam daerah maupun luar daerah.

Komisi III

SKPD		CATATAN STRATEGIS	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	- Dari beberapa program dan kegiatan yang direalisasikan masih ada kesenjangan dan tidak ada keseimbangan antara capaian target dengan tingkat realisasi, baik dari aspek anggaran dan tingkat kinerja, hal tersebut dikarenakan : a. Ketidak sesuaian harga satuan yang tidak terpenuhi. b. Realisasi kinerja tercapai, namun realisasi anggaran tidak terpenuhi. c. Belanja barang dan perjalanan dinas tidak sepenuhnya	- Perlu dilakukan prediksi dan estimasi anggaran belanja yang lebih terukur sehingga sesuai dengan kebutuhan belanja baik untuk belanja barang dan perjalanan dinas untuk tercapainya efisiensi. Setuju upaya memaksimalkan serapan anggaran agar terealisasi target. Perlu mengoptimalkan koordinasi dengan pihak badan pertanahan.	- Ketidak sesuaian Harga Satuan yang tidak terpenuhi, hal ini disebabkan penetapan standar harga satuan ditetapkan diawal perencanaan dan penganggaran, sementara harga pasar terjadi fluktuasi harga tiap bulannya. Hal ini akan menjadi perhatian dalam penyusunan standar harga kedepannya. - Realisasi Kinerja Tercapai, namun realisasi anggaran tidak terpenuhi, hal ini terjadi kaena dalam realisasi terjadi efisiensi belanja sesuai dengan kebutuhan real. Untuk Belanja Perjalanan Dinas tidak terserap, selain dalam pelaksanaannya lebih selektif dan sesuai kebutuhan,

		diserap karena anggaran lebih besar dari kebutuhan.		juga ada beberapa kegiatan perjalanan dinas yang tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2023, sehingga penyerapan anggaran perjalanan dinas tidak maksimal. Untuk belanja Barang dan Jasa yang melibatkan pihak Badan Pertanahan dikarenakan adanya regulasi baru dimana proses pembuatan sertifikat untuk tanah milik Pemda tidak lagi dikenakan biaya sehingga menyebabkan tidak terserapnya anggaran untuk belanja tersebut. Untuk belanja barang jasa dan jasa lainnya dari Belanja Tidak Terduga (BTT) secara target sudah terpenuhi 100% sesuai dengan permintaan untuk belanja Bantuan Sosial (Kematian dan Kebakaran). Dikarenakan tidak ada bencana alam yang berskala besar sehingga tidak ada permintaan untuk penanganan bencana alam yang mengakibatkan anggaran tidak terserap secara maksimal. Untuk belanja Barang dan Jasa lainnya yang bersumber dari DID (Dana Insentif Fiskal) yang masuknya pada akhir tahun tidak dapat terserap, dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan dan akan dianggarkan

				kembali pada Tahun Anggaran 2024.
2.	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	- Sesuai Dengan PP.Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan masih dirasa kurang, Hal ini di sebabkan masih minimnya Pelatihan Pelatihan Kepimpinan dan Kewirausahaan yang dilaksanakan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata , masih sedikitnya jumlah sarana yang dapat menunjang Pelatihan Kepemudaan, mengakibatkan tidak memiliki keahlian yang cukup untuk bersaing dengan pemuda pemuda yang berasal dari Kabupaten lain dalam mendapatkan pekerjaan.	- Perlu melakukan pembinaan dan Pelatihan - Pelatihan Kepemudaan sebagai wujud Pemberdayaan Pemuda, Program Pelatihan yang didapat dikembangkan dapat berbentuk Pelatihan Kepimpinan Organisasi serta Pelatihan Kewirausahaan yang dapat meningkatkan kemampuan Pada Pemuda. Perlu Pembangunan Sarana Olahraga Secara Merata Ditiap Kecamatan Untuk Mengembangkan Bakat Olahraga . Memberikan Dispensasi Kepada Atlet yang berprestasi yang tidak dipungut biaya dalam menggunakan sarana olahraga, Seperti Bulu tangkis dan Kolam renang	- Menambah anggaran - Mencari Nara sumber yang kompeten Mencari/menghadirkan pemuda pemudi yang telah berhasil untuk dijadikan aspirasi dan motivasi bagi pemuda/pemudi yang belum berhasil Melakukan survey ke daerah/ wilayah lain yang jumlah pemuda pemudinya banyak berhasil - mengembangkan potensi kearifan lokal - Mengadakan kegiatan forum seminar untuk pemuda Mengadakan kegiatan lomba-lomba untuk pemuda - Melaksanakan lintas sektor dan lintas program dengan SKPD lain dalam kegiatan kepemudaan Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pengembangan SDM pemuda di daerah kabupaten Membangun sarana/ prasarana untuk kegiatan/wadah menyalurkan hobby dan bakat (gedung Pemuda) baik tingkat kecamatan/ kabupaten untuk pemuda

		- Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Tabalong belum optimal , hal ini terlihat kurangnya jumlah kunjungan wisata ke Tabalong.	- Perlunya perhatian dan komitmen dari Pemerintah Daerah utama dukungan pendanaan untuk meningkatkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana objek wisata baik infrastruktur Jalan dan pembangunan sarana objek wisata.	- Monitoring dan mengevaluasi sarana dan prasarana objek wisata baik infrastruktur jalan dan sarana obyek wisata - Mengevaluasi anggaran sarana prasarana baik infrastruktur jalan dan sarana obyek wisata - Membuat analisis kebutuhan dan anggaran terkait pengembangan sarana dan prasarana obyek wisata baik infrastruktur jalan dan Pembangunan sarana obyek wisata - Perencanaan <i>cross cutting</i> dengan SKPD terkait Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana obyek wisata baik infrastruktur jalan dan Pembangunan sarana obyek wisata. - Menganggarkan Pembangunan sarana prasarana obyek wisata baik infrastruktur jalan dan sarana obyek wisata. - Melaksanakan Program (kegiatan dan sub kegiatan) yang sudah direncanakan untuk pengembangan kepariwisataan di kabupaten Tabalong.
3.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	- Anggaran PJU Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024	- Anggaran Penerangan Jalan Umum TA 2023 pada	- pada program Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pada prasarana

	KABUPATEN TABALONG		program Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi..	Utilitas Umum yaitu sebesar : Rp. 45.903.603.734,- , dengan paket pekerjaan yaitu sebagai berikut : a. Pemeliharaan n (Unit Lampu) : 14.463 b. Pengadaan (Unit Lampu) : 10.928 c. Pengadaan (Tiang) : 353
		- Anggaran Penerangan Jalan Umum T.A 2024	- Anggaran Penerangan Jalan Umum T.A 2024 Program Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pada Prasarana Utilitas Umum	untuk anggaran Penerangan Jalan Umum T.A 2024 Program Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pada Prasarana Utilitas Umum yaitu sebesar Rp. 34.754.518.061,- dengan pekerjaan yaitu sebagai berikut : a. Pemeliharaan n (Unit Lampu) : 14.610 b. Pengadaan (Unit Lampu) : 3.572 c. Pengadaan (Tiang) : 631
		- Anggaran Belanja Modal kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan T.A 2023	- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk m enunjang fungsi hunian yaitu sebesar : Rp. 117.493.679.8 72,	- Realisasi Pekerjaan fisik 61.723 M jalan Lingkungan tertangani dan 5.968 M drainase lingkungan tertangani.
		- Anggaran Belanja Modal Kegiatan Urusan Penyelenggaraan	- Pada program Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan	- Target realisasi Pekerjaan fisik 46.866 M jalan lingkungan dan

		PSU Perumahan T.A 2024	Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian yaitu sebesar Rp. 89.514.039.892,-	4.532 M drainase lingkungan. - Pada Triwulan I proses pelaksanaan kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan T.A 2024 pada program Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian masih dalam tahap perencanaan, pada akhir Triwulan II sudah mulai dilaksanakan realisasi pekerjaan fisik dan akan berlanjut sampai Triwulan III dan IV.
		- Anggaran Pembangunan / Relokasi rumah korban bencana untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) T.A 2024.	- Program pengembangan Perumahan dengan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana.	- Sebanyak 40 Unit rumah x @ Rp. 50.000.000,- dengan total sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Pada Triwulan I dan II proses pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah korban bencana sejumlah 26 Unit dengan anggaran Rp. 1.300.000.000,-. Untuk sisa 14 unit akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV menyesuaikan jumlah susulan calon penerima bantuan korban bencana.
4.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	- Masih ada titik lokasi di Tabalong yang masih BLANK SPOT.	- Menambah Spot Jaringan Internet pada kawasan yang sulit dijangkau dan memastikan Tower berfungsi dengan baik.	- Melakukan survei dan verifikasi titik blankspot serta melakukan pengusulan untuk diberikan bantuan titik internet oleh BAKTI serta pengusulan Pembangunan BTS komersial oleh

				Perusahaan provider telekomunikasi.
		- Belum maksimalnya pelayanan Internet gratis untuk masyarakat.	- Penambahan anggaran untuk memenuhi kekurangan kuota jaringan.	- Diperlukan tambahan personal teknis atau pihak ketiga yang sanggup bekerja ke tempat terpencil dan ketersediaan peralatan. - Diperlukan akses ke router utama / atau pisah router dengan bidang egov sehingga bisa memantau dengan akses yg lebih luas. - Diperlukan aplikasi alat bantu monitoring jaringan.
5.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- Kesejahteraan Tenaga kebersihan Non ASN masih belum maksimal.	- Memberikan kebijakan sesuai payung hukum pada penambahan penghasilan tenaga kebersihan non ASN.	- Bahwa status tenaga kebersihan DLH adalah tenaga kontrak dengan jam kerja yaitu 3-6 jam perhari dimana perhitungan upah perjamnya disesuaikan dengan UMK yang berlaku. - Bahwa akan diberikan penambahan upah sebesar Rp. 100.000/bulan dalam rangka apresiasi penghargaan Adipura ke 5 kalinya dalam APBDP T.A 2024. - Bahwa akan diberikan uang penggantian makan minum sebesar Rp. 7.500,- x 26 hari kerja dengan total penambahan penghasilan sebesar Rp. 195.000/bulan yang akan melekat dalam upah dalam APBDP T.A 2024.
		- Belum maksimalnya pengelolaan	- Penambahan tenaga ahli pemenuhan	1. Telah melakukan pembaharuan sumber daya

		pungsi dan kinerja Laboratorium dalam pencegahan pengendalian dan pantauan pencemaran lingkungan pada titik titik perusahaan yang ada ditabalong.	kebutuhan alat alat penunjang serta program pelayanan yang terintegritas dan terpublikasi pada masyarakat terutama pihak pihak yang melakukan usaha yang bersentuhan langsung dengan lingkungan termasuk perusahaan dan pelaku usaha lainnya.	peralatan baik itu peralatan pengujian kualitas air maupun peralatan pengukuran kualitas udara yang termutakhir dan modern dimulai dari tahun 2023 akhir sampai dengan akhir tahun 2026. 2. Telah tercatat sebagai Laboratorium yang terakreditasi sejak Maret 2023 dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian 3. Lingkungan Hidup sejak April 2023 dan segera dilaksanakan Surveilent I (Pertama) untuk masa Akreditasi pada bulan Agustus 2024. Layanan Pengujian Laboratorium Lingkungan telah dilakukan secara online melalui aplikasi SI UJI TEPAT (Sistem Layanan Pengujian Laboratorium 4. Lingkungan yang Transparan, Cepat, Profesional, Akurat dan Terakreditasi), aplikasi ini sudah terintegrasi pada aplikasi TABALONGPEDIA milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong (Diskominfo). Pihak UPTD Laboratorium Lingkungan terus berupaya dalam melakukan publikasi ke masyarakat khususnya pihak-pihak yang

				melakukan usaha yang bersentuhan langsung dengan lingkungan termasuk perusahaan dan pelaku usaha lainnya melalui media sosial yang dimiliki oleh UPTD. Laboratorium Lingkungan sendiri seperti Instagram, Facebook, Youtube bahkan juga pernah bekerjasama dengan TV Tabalong, Radio Suara Tabalong dan Media-media cetak dan elektronik di Kabupaten Tabalong. Selain itu UPTD Laboratorium Lingkungan juga melakukan sosialisasi atau publikasi secara jemput bola ke beberapa perusahaan di Tabalong seperti PT Adaro Indonesia, PT. TPI, PT. Bumi Jaya dan PT. Conch Kalimantan Semen. Namun masih terdapat kendala yang dihadapi terutama Sumber Daya Manusia yang dimiliki khususnya tenaga ahli, sampai saat ini UPTD Laboratorium Lingkungan hanya memiliki 3 orang tenaga ASN dan 8 orang tenaga kontrak yang belum berstatus P3K. Harapannya UPTD Laboratorium Lingkungan bisa memiliki tenaga ahli dengan status ASN baik itu melalui formasi CPNS ataupun P3K.

		- Pengelolaan sampah perkotaan serta pengelolaan lingkungan masih belum terkoordinasi dengan baik	- Perlu adanya pendekatan dan Program yang bisa menarik minat masyarakat dalam mengelola lingkungan terutama pengelolaan sampah hingga menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan lebih baik hingga kesehatan lingkungan masyarakat meningkat.	- Dinas Lingkungan Hidup selalu melakukan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat baik dalam program Bank Sampah, TPS 3R dan Bumdes - pengelola persampahan dan kebersihan. - Program Bank Sampah kekurangannya adalah pasar pelapak/pengepul belum siap karena harga sampah yang cenderung jatuh pasca covid 19 kemampuan pelapak dalam membayar sampah yang telah diambil. Pemda perlu membuat pasar khusus untuk menampung sampah-sampah terpilah dari Bank Sampah dan TPS 3R dalam bentuk Pusat Daur Ulang Sampah (PDU). - Program TPS 3R banyak diminati oleh Pemerintah Desa akan tetapi syaratnya memiliki lahan desa dalam bentuk SHM, ada lembaga pengelola dan masyarakat siap iuran. Pemerintah Desa harus mampu menganggarkan biaya operasional untuk TPS 3R diajukan oleh Pemda melalui mekanisme hibah dana APBN Kementerian PU & PR. - Pembentukan Bumdes pengelolaan

				sampah dilaksanakan oleh beberapa desa, akan tetapi Bumdes yang biaya operasionalnya hanya dari iuran masyarakat banyak yang sulit beroperasi untuk upah petugas pengelola sampah. Masih diperlukan kolaborasi dana desa dalam membantu operasional petugas Bumdes pengelolaan sampah, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab mengangkut sampah-sampah dari TPS Desa ke TPA.
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	- Program infrastruktur pembangunan penataan dan Rehabilitasi serta infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan sistem di Daerah Selatan (Kec. Pugaan, Banua lawas, Kelua dan Muara Harus) perlu lebih ditingkatkan dan menjadi perhatian. Infrastruktur jalan dan jembatan banyak kerusakan, dan untuk daerah persawahan di saat curah hujan tinggi, air di persawahan tergenang dan mengakibatkan petani banyak yang gagal panen.	- Penyusunan perencanaan teknis infrastruktur pembangunan (Jalan, jembatan, irigasi, bangunan gedung) disusun secara terpadu dan terintegrasi dengan semua instansi terkait.	- Akan melakukan peningkatan program Pembangunan/ peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan. irigasi serta bangunan gedung di wilayah selatan yang terintegrasi
		- Program penyelenggaraan jalan dan jembatan serta	- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait	- Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait sehubungan dengan

		pengembangan sistem penyediaan air minum (PDAM) di harapkan dapat terintegrasi dengan pengurangan area kumuh di Kabupaten tabalong, dimana titik titik kumuh yang menjadi kewenangan Dinas PUPR dapat dilaksanakan upaya penanganannya	(DISPERKIM) untuk pengurangan areal kumuh di Kab. Tabalong.	sanitasi dan air minum guna meningkatkan kesehatan masyarakat. - Dalam hal program penyelenggaraan jalan / jembatan, juga akan meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait.
		- Pelaksanaan infrastruktur /Konstruksi (jalan, jembatan, jaringan irigasi, bangunan gedung dan infrastruktur lainnya) bisa dilaksanakan lebih awal (Triwulan I) sehingga proses finishingnya tidak kerjar kejaran dengan waktu (kontrak dan akhir tahun anggaran), sehingga bisa mempercepat dan meningkatkan aspek ekonomi masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan mempermudah kelancaran transformasi masyarakat	- Melaksanakan pengadaan barang dan jasa lebih tepat dimana proses tender/lelang dapat di laksanakan pada awal tahun (mengacu pada Perpres nomor. 16 tahun 2018, pasal 18 ayat 1, 2 dan 3).	- Akan mengusahakan proses pelelangan di triwulan pertama agar pelaksanaan konstruksi bisa cepat selesai.
7.	DINAS PERHUBUNGAN	- Kurangnya Fasilitas Keselamatan (FASKES) Jalan di Tabalong	- Agar Pihak Dinas Perhubungan Melakukan Pengadaan dan Pemeliharaan dalam rangka Manajemen	- Pada Tahun 2024 telah dianggarkan pengadaan FASKES Jalan berupa rambu, cermin cekung, zona Selamat Sekolah (ZOSS) serta pemeliharaan warning light dan

			Rekayasa Lalu Lintas Seperti, Rambu, Traffic Cone, Water Barrierapill , Cermin Cembung , dan Speed Bum, Rumber Strip masih belum terpenuhi secara maksimal	pemeliharaan lainnya kurang lebih sebesar Rp.1.138.000.000,- dan akan terus dianggarkan pada tahun berikutnya untuk memenuhi kebutuhan FASKES jalan di Kabupaten Tabalong.
		- Marka Jalan Diruas Jalan Di Tabalong Masih Kurang	- Agar jalan-jalan di Tabalong baik di Wilayah Utara , Tengah dan Selatan yang belum tersedia atau perlu di Rehabilitas Fasilitas Keselamatan Rambu, Apill dan Marka Jalan untuk memberikan Penanda Batas Jalan Berselamatan dalam Rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan.	- Dikarenakan pada pagu Anggaran Tahun 2024 tidak mencukupi untuk Menganggarkan Rehabilitasi atau Penyediaan Fasilitas Keselamatan Rambu,Apill dan Marka Jalan Untuk Memberikan Penanda Batas Jalan Berselamatan dalam Rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan, maka akan dianggarkan pada APBDP Tahun 2024. Dan apabila belum terpenuhi maka akan dianggarkan Kembali pada Tahun Anggaran 2025.
		- Masih kurangnya Jumlah SDM dan peningkatan kapasitas SDM khususnya terkait perhubungan	- Penambahan Jumlah Tenaga Teknis dan Peningkatan Kapasitas SDM yang sudah sangat diperlukan untuk menunjang kinerja dan hasil di bidang perhubungan.	- Akan dipenuhi dengan Pola Rekrutmen Pembibitan. - Pada Tahun 2024 diterima Penempatan sebanyak 3 (tiga) Orang CPNS dari STTD. - Pada Tahun 2025 Akan diterima Kembali Penempatan CPNS sebanyak 5 (Lima) orang dari STTD

				Formasi P3K diusulkan sebanyak 7 Orang
		- Tabalong masih belum Memiliki Mobil Derek/ Mobil Crane	- Tabalong Sebagai Penyangga IKN hendaknya memiliki fasilitas keselamatan yang mumpuni seperti Mobil Derek/Crane sebagai Fasilitas Keselamatan Guna Keamanan, Keselamatan, Kelancaran dan Ketertiban lalu lintas.	- Akan dianggarkan pada APBDP Tahun 2024, Apabila waktu pelaksanaan tidak memungkinkan untuk pengadaan tersebut maka akan dianggarkan Kembali Pada Tahun 2025.
8.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN TABALONG	- Masih kurangnya koordinasi antar SKPD	- Jalin komunikasi yang lebih intens dengan SKPD	- Bagian Prokopim Setda Tabalong akan meningkatkan dan memaksimalkan koordinasi dengan SKPD terkait.
9.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	- Kurangnya alat-alat kelengkapan keselamatan.	- Perlunya perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik dan tepat.	- Dilakukan inventarisir alat-alat kelengkapan keselamatan yang belum tersedia dan akan dianggarkan pada APBDP T.A 2025 dan APBD 2025
		- Masih kurangnya kualitas SDM	- Perlunya kerja sama dengan pihak terkait BPBD Provinsi – BPBD sebanua 6, BASARNAS dan perusahaan yang ada di Tabalong.	- Dilaksanakan pelatihan potensi SAR dengan BASARNAS pada Tahun 2024.

D. Capaian Kinerja Makro Atas Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2024

1. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah. IPM disusun dari tiga komponen yaitu tingkat kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup pada saat lahir (lama hidup), tingkat pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka harapan lama sekolah (EYS) dan rata-rata lama sekolah (MYS) dan tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP).

Tabel III.7.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabalong
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	73,99	74,09	74,45	74,63	74,76
2.	Indeks Pendidikan					
	a. EYS (Rata-rata harapan lama sekolah	12,72	12,89	12,90	12,91	12,92
	b. MYS (Rata-rata lama sekolah	9,10	9,11	9,12	9,14	9,15
3.	Pengeluaran riil per kapita (PPP) (x Rp.1000,-)	11.283	11.470	11.914	12.507	13.097
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		73,84	74,25	74,82	75,43	75,97

Sumber : BPS Kab.Tabalong, Tahun 2025

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Tabalong dari tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 menjadi 73,99 tahun, pada tahun 2021 menjadi 74,09 tahun, pada tahun 2022 menjadi 74,45 tahun, pada tahun 2023 menjadi 74,63 dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 74,76. AHH ini dapat menggambarkan kualitas hidup masyarakat disuatu daerah yang dikaitkan dengan status kesehatan, pendidikan dan tingkat ekonomi.

Salah satu keberhasilan program pendidikan di Kabupaten Tabalong ditunjukkan dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tabalong juga selalu mengalami

peningkatan. Pada tahun 2020 sebesar 12,72, pada tahun 2021 meningkat menjadi 12,89 tahun, pada tahun 2022 menjadi 12,90 tahun, pada tahun 2023 menjadi 12,91 serta menjadi sebesar 12,92 tahun pada tahun 2024. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tabalong juga selalu mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 sebesar 9,10 tahun menjadi 9,11 tahun pada tahun 2021, menjadi sebesar 9,12 tahun pada tahun 2022 dan sebesar 9,14 tahun pada tahun 2023 serta sebesar 9,15 tahun pada tahun 2024.

Pengeluaran riil per kapita per tahun merupakan pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan untuk menggambarkan daya beli masyarakat. Untuk Kabupaten Tabalong, pengeluaran riil per kapita mengalami peningkatan dari Rp11.283.000,00 pada tahun 2020, menjadi Rp11.470.000,00 pada tahun 2021, meningkat lagi menjadi Rp11.914.000,00 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp12.507.000,00 dan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi Rp13.097.000,00.

Berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM), pencapaian IPM Kabupaten Tabalong memperlihatkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2024 IPM Kabupaten Tabalong sebesar 75,97, terjadi peningkatan sebesar 0,54 point dibandingkan dengan tahun 2023 yang besarnya 75,43. Pada tahun 2022 yang hanya sebesar 74,82, tahun 2021 sebesar 74,25 dan pada tahun 2020 sebesar 73,84. Rata-rata pertumbuhan IPM per tahun sejak tahun 2020-2024 adalah sebesar 0,426 point.

Menurut konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), IPM Kabupaten Tabalong masuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Sejak tahun 2016 capaian angka IPM Kabupaten Tabalong di atas 70. Kondisi ini merupakan kebanggaan tersendiri untuk Kabupaten Tabalong karena pada tahun-tahun sebelumnya hanya berada pada kategori sedang, yaitu dikasaran angka IPM antara 60-70. Kabupaten Tabalong telah berhasil merubah statusnya dari “sedang” menjadi “tinggi”.

Apabila dilihat dari peringkat IPM seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, maka sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 IPM Kabupaten Tabalong berada di urutan ke-3.

Tabel III.8.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	IPM	Rank	IPM	IPM	IPM	Rank	IPM	Rank		
1	6	7	4	5	6	7	10	11	12	13
Tanah Laut	69,38	6	69,87	6	70,35	6	70,98	7	71,43	7
Kotabaru	68,86	8	69,13	8	69,74	8	70,18	9	70,61	9
Banjar	69,18	10	69,89	10	70,72	10	71,46	6	71,87	6
Barito Kuala	66,22	12	66,64	12	67,37	12	68,11	12	68,84	12
Tapin	70,11	5	70,1	5	71,02	5	72,00	5	72,51	5
Hulu Sungai Selatan	68,85	7	69,21	9	69,76	9	70,50	8	71,21	8
Hulu Sungai Tengah	68,85	9	69,05	9	69,70	10	70,13	11	70,69	11
Hulu Sungai Utara	65,59	13	66,12	13	66,84	13	67,66	13	68,28	13
Tabalong	73,84	3	74,25	3	74,82	3	75,43	3	75,97	3
Tanah Bumbu	70,71	4	71,00	4	71,79	4	72,31	4	72,95	4
Balangan	68,82	11	69,11	11	69,73	11	70,49	10	71,34	10
Banjarmasin	77,10	2	77,57	2	77,97	2	78,50	2	79,05	2
Banjarbaru	79,10	1	79,26	1	79,68	1	80,11	1	80,51	1
Kalimantan Selatan	70,91	22	71,28	22	71,84	22	72,50	22	73,03	22

Sumber : BPS Kab. Tabalong, Tahun 2025

2. Angka Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrument tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel III.9.
Indikator Kemiskinan Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Indikator (Keterangan)	2020	2021	2022	2023	2024*)
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	531.180	542.800	573.018	615.912	637.132
Penduduk Miskin	14.695	16.128	15.243	15.153	14.968
Persentase Penduduk Miskin (%)	5,72	6,27	5,87	5,77	5,64

Sumber : BPS Kab. Tabalong Tahun 2025

Catatan : *) Angka sangat-sangat sementara

Apabila dilihat dari perkembangannya selama beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin selama periode 2020-2024 berfluktuasi dengan garis kemiskinan yang semakin meningkat. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin meningkat dibandingkan tahun 2020, yang semula sebesar 14.695 jiwa menjadi 16.128 jiwa, seiring dengan meningkatnya garis kemiskinan dari Rp531.180,00/kapita/bulan menjadi Rp542.800,00/kapita/bulan. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk dari 16.128 jiwa pada tahun 2021 menjadi 15.243 jiwa pada tahun 2022, sedangkan garis kemiskinan mengalami peningkatan yang semula pada tahun 2021 sebesar Rp542.800,00/kapita/bulan menjadi Rp573.018,00/kapita/bulan. Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin kembali menurun lagi menjadi 15.153 jiwa, meskipun garis kemiskinan semakin meningkat menjadi Rp615.912,00/perkapita/bulan, Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin kembali turun menjadi 14.968 jiwa, padahal angka garis kemiskinan meningkat menjadi Rp637.132,00/perkapita/bulan.

3. Angka Pengangguran

Sudah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Tabalong bahwa salah satu target dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Tabalong adalah dengan upaya menurunkan angka pengangguran.

Dalam pandangan masyarakat awam, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sehingga pengangguran merupakan momok yang menakutkan bagi setiap orang. Namun demikian yang dimaksud pengangguran dalam konsep ketenagakerjaan adalah penduduk yang tidak bekerja dengan kegiatan seperti :

a. Sedang mencari pekerjaan, atau

- b. Sedang mempersiapkan usaha, atau
- c. Penduduk yang tidak mencari pekerjaan, karena alasan merasa atau tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau
- d. Sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran suatu daerah dapat diketahui dari angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan perbandingan antara penduduk yang mencari kerja dengan angkatan kerja pada suatu daerah. Pengangguran terbuka adalah masalah yang sering timbul dalam ketenagakerjaan, yang merupakan akibat dari meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan peningkatan lapangan kerja. Lapangan kerja semakin sempit sehingga banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja. Angka pengangguran di Kabupaten Tabalong periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.10.
Angka Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten
Tabalong Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024*)
1.	Angka Pengangguran (Jiwa)	3,991	4.666	6.219	5.052	5.000
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,07	3,43	4,46	3,60	3,44

Sumber : BPS Kab. Tabalong Tahun 2025

Catatan : *) Angka sangat-sangat sementara.

Dari data di atas terlihat bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2022 TPT di Kabupaten Tabalong terus mengalami peningkatan yang semula sebesar 3,07% tahun 2020 menjadi 4,46% pada tahun 2022. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi penduduk yang semula bukan angkatan kerja bergeser menjadi angkatan kerja yang merupakan salah satu penyebab meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka, karena peningkatan angkatan kerja tidak diiringi oleh peningkatan ataupun perluasan lapangan kerja. Lapangan kerja yang terbatas membuat sebagian angkatan kerja tidak terserap. Besarnya angka pengangguran selama periode tahun 2020 – 2024 berfluktuasi, dimana pada tahun 2020 sebesar 3.991 jiwa naik menjadi 4.666 jiwa pada tahun 2021, pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 6.219 jiwa. Namun pada tahun 2023 dan 2024 angka pengangguran terus mengalami penurunan menjadi 5.052 jiwa dan 5.000 jiwa.

Demikian juga dengan persentase tingkat pengangguran terbuka terjadi fluktuasi, yaitu pada tahun 2020 sebesar 3,07 persen meningkat menjadi 3,43 persen pada tahun 2021 dan meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 4,46 persen. Namun pada tahun 2023 dan 2024 turun menjadi 3,60 persen dan 3,44 persen.

Menurut penjelasan BPS Kabupaten Tabalong, diketahui bahwa jumlah penduduk bukan angkatan kerja menurun dari 54.244 orang pada tahun 2021 menjadi 53.422 orang pada tahun 2022. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi penduduk yang semula bukan angkatan kerja bergeser menjadi angkatan kerja yang merupakan salah satu penyebab meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka, karena peningkatan angkatan kerja tidak diiringi oleh peningkatan ataupun perluasan lapangan kerja. Lapangan kerja yang terbatas membuat sebagian angkatan kerja tidak terserap.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai sektor ekonomi. Angka ini dapat diartikan sebagai kemampuan daerah/region tersebut dalam jangka panjang untuk menyuplai berbagai unit/jasa yang terus meningkat kepada penduduknya atau dengan kata lain proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Tingkat pertumbuhan ini ditentukan oleh pertambahan riil berbagai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.11.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024*)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,50	3,27	5,29	4,90	4,87

Sumber : BPS Kab. Tabalong Tahun 2025

Ekonomi Kabupaten Tabalong tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,7%, meningkat tinggi setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,50% menjadi 3,27% pada tahun 2021. Pada tahun 2022

pertumbuhan ekonomi meningkat lagi menjadi 5,29%. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 4,90%, sedangkan pada tahun 2024 turun sebesar 0,03% menjadi 4,87%.

Laju pertumbuhan ekonomi menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah, yang diukur dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan, karena semata-mata hanya dicerminkan oleh pertumbuhan barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tertentu sebab pengaruh perubahan harga telah dihilangkan.

Ritme ekonomi global membawa dampak yang menyebar ke berbagai negara/wilayah. Hal ini disebabkan semakin terintegrasinya perekonomian antar negara sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya perekonomian negara di dunia. Perekonomian Kabupaten Tabalong sebagai salah satu bagian integral perekonomian nasional juga tidak lepas dari dampak pergerakan ekonomi global. Kategori lapangan usaha pertambangan (batubara dan minyak bumi) menjadi lapangan usaha dominan dalam perekonomian Kabupaten Tabalong. Oleh karena itu, jalur perdagangan (ekspor) menjadi rentan terhadap dampak perekonomian global, yang mempengaruhi pergerakan ekonomi Kabupaten Tabalong.

Tabel III.12.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Tabalong
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020 – 2024 (persen)

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1	2	5	6	7	8	9
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-1,99	2,71	2,88	2,51	2,79
2.	Pertambangan dan Penggalian	-4,13	1,38	5,57	4,76	4,37
3.	Industri Pengolahan	-3,50	5,30	5,00	0,73	3,72
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,71	4,74	7,85	8,29	5,91
5.	Pengadaan Air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	7,52	4,46	3,34	4,63	4,46
6.	Konstruksi	-1,83	5,34	4,49	7,93	7,75
7.	Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi	-2,30	8,80	8,13	7,61	4,62
8.	Transportasi dan Pergudangan	-4,47	4,45	5,74	7,74	8,68
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,91	7,59	7,42	9,83	7,48
10.	Informasi dan Komunikasi	8,02	8,41	8,66	6,96	6,67
11.	Jasa Keuangan dan asuransi	2,52	2,46	1,38	5,36	5,20
12.	Real Estate	3,16	5,24	6,26	6,12	7,92

13.	Jasa Perusahaan	-1,35	7,85	5,06	8,15	6,13
14.	Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	-0,77	0,47	-0,28	4,83	6,86
15.	Jasa Pendidikan	-0,78	3,04	4,27	3,50	5,79
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,22	9,71	7,30	5,53	5,54
17.	Jasa Lainnya	-2,53	5,86	6,88	7,45	8,45
	PDRB	-2,50	3,27	5,29	4m90	4,87

Sumber : BPS Kab. Tabalong Tahun 2024

Catatan :

*) Angka sementara. **) Angka sangat sementara

Pada tahun 2020 pertumbuhan positif hanya terjadi pada 6 (enam) kategori ekonomi, yaitu pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,02%, sektor pengadaan air sebesar 7,52% dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,22%. Namun pada tahun 2021, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa Kesehatan dan kegiatan sosial, yaitu sebesar 9,71%.

Selama periode tahun 2020 sampai 2024 pertumbuhan PDRB berfluktuasi. Pada tahun 2024 lapangan usaha yang mengalami kenaikan, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang pada tahun 2023 sebesar 2,51 menjadi 2,79 pada tahun 2024, sektor industri yang pada tahun 2023 sebesar 0,73 menjadi 3,72 pada tahun 2024, sektor transportasi dan pergudangan yang pada tahun 2023 sebesar 7,74 menjadi 8,68 pada tahun 2024, sektor real estate yang pada tahun 2023 sebesar 6,12 menjadi 7,92 pada tahun 2024, sektor administrasi pemerintahan yang pada tahun 2023 sebesar 4,83 menjadi 6,86 pada tahun 2024, sektor jasa Pendidikan yang pada tahun 2023 sebesar 3,50 menjadi 5,79 pada tahun 2024, sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial yang pada tahun 2023 sebesar 5,53 menjadi 5,54 pada tahun 2024, dan sektor jasa lainnya yang pada tahun 2023 sebesar 7,45 menjadi 8,45 pada tahun 2024.

Sedangkan lapangan usaha yang pada tahun 2024 mengalami penurunan adalah : sektor pertambangan dan penggalan yang pada tahun 2023 sebesar 4,76 menjadi 4,37 pada tahun 2024, sektor pengadaan Listrik dan gas yang pada tahun 2023 sebesar 8,29 menjadi 5,91 pada tahun 2024,

sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang pada tahun 2023 sebesar 4,63 menjadi 4,46 pada tahun 2024, sektor konstruksi yang pada tahun 2023 sebesar 7,93 menjadi 7,75 pada tahun 2024, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang pada tahun 2023 sebesar 7,61 menjadi 4,62 pada tahun 2024, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang pada tahun 2023 sebesar 9,83 menjadi 7,48 pada tahun 2024, sektor informasi dan komunikasi yang pada tahun 2023 sebesar 6,96 menjadi 6,67 pada tahun 2024, sektor jasa keuangan yang pada tahun 2023 sebesar 5,36 menjadi 5,20 pada tahun 2024, dan sektor jasa Perusahaan pada tahun 2023 sebesar 8,15 menjadi 6,13 pada tahun 2024.

5. Pendapatan Per Kapita

PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk selama satu tahun akibat dari adanya aktivitas produksi. Sedangkan pendapatan regional perkapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi.

Data tersebut diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB/pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (karena penyebarannya dianggap lebih merata). Kedua indikator tersebut biasanya digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas dan tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Apabila data tersebut disajikan secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan kualitas sumber daya manusia dan perubahan tingkat kemakmuran. Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita juga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan kemampuan dari suatu region untuk memperluas atau mempertinggi output/keluaran pada tingkat yang lebih cepat dari pada tingkat pertumbuhan populasinya. PDRB perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu.

Negara maju rata-rata memiliki PDB perkapita yang lebih besar dibandingkan dengan negara sedang berkembang. Menurut klasifikasi World Bank, negara yang berpendapatan perkapita kurang dari \$1.005 dikategorikan sebagai negara berpendapatan rendah. Sementara negara yang

berpendapatan perkapita antara \$1.006 - \$3.955 termasuk negara berpendapatan menengah bawah, negara yang memiliki pendapatan perkapita antara \$3.956- \$12.235 dikategorikan sebagai Negara yang berpendapatan menengah tinggi, dan negara yang memiliki pendapatan perkapita lebih dari \$12.235 termasuk negara berpendapatan perkapita tinggi.

Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada Tabel III.12. Selama tahun 2020-2024, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Tabalong rata-rata semakin meningkat setiap tahunnya dari 11,283 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 13,097 juta rupiah pada tahun 2024, atau tumbuh rata-rata 36,28% setiap tahunnya. PDRB perkapita Tabalong masih termasuk dalam kategori berpendapatan menengah tinggi.

Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.13.
PDRB Perkapita Tahun 2020 – 2024

PDRB	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	3	4	5	6	7
PDRB perkapita (ADHB) (ribu rupiah)	11.283	11.470	11.914	12.507	13.097

Sumber : BPS Kab. Tabalong Tahun 2024

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Pentingnya pembahasan ketimpangan bagi pemerintah tentu saja terkait dengan besarnya peran pemerintah dalam pengambilan kebijakan, yang akan berdampak besar terhadap jalannya roda pembangunan. Informasi tentang ketimpangan di antara kelompok penduduk, adalah sesuatu yang sangat berarti ketika pemerintah ingin mendesain program intervensi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, mengukur dan menganalisis ketimpangan secara berkala juga akan sangat membantu dalam mengetahui sifat dari perubahan ketimpangan itu sendiri. Diantaranya, kelompok-kelompok mana yang banyak mengalami perubahan dalam distribusi pendapatan sebagai akibat dari kebijakan ekonomi dan juga sektor-sektor ekonomi mana yang mengalami perubahan ketimpangan yang signifikan sebagai akibat dari kebijakan ekonomi yang diterapkan.

Distribusi pendapatan merupakan gambaran tentang pemerataan atau terjadi ketimpangan pembagian pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh seseorang dipengaruhi oleh kepemilikan faktor-faktor produksi. Besaran balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor ekonomi seperti keahlian, modal dan tanah, serta investasi akan berbeda satu sama lain. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara menyeluruh. Semakin tinggi nilai angka Gini Ratio (GR) mengindikasikan bahwa ketimpangan semakin tinggi. Pengelompokan nilai koefisien Gini dibedakan menjadi 5 kelompok:

- GR = 0 : Pemerataan Sempurna
- $0 < GR < 0,3$: Ketimpangan Rendah
- $0,3 \leq GR \leq 0,5$: Ketimpangan Sedang
- $0,5 < GR < 1$: Ketimpangan Tinggi
- GR = 1 : Ketimpangan Sempurna

Penghitungan Gini Ratio dilakukan oleh Badan Pusat Statistik setiap tahunnya dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Variabel pendapatan sendiri, diproxy dengan menggunakan data pengeluaran dalam Susenas. Ada beberapa pertimbangan mengenai pemilihan variabel pengeluaran sebagai proxy yang tepat, beberapa literatur menyebutkan diantaranya bahwa pengeluaran lebih stabil dibandingkan pendapatan (beberapa lapangan usaha sangat rentan perubahan musim yang berimbas pada volatilitas pendapatannya), serta keterbukaan responden terhadap pengeluaran daripada pendapatannya.

Tabel III.14.
Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No.	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini Ratio)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Tabalong	0,346	0,286	0,337	0,284	-

Sumber : BPS Kab. Tabalong Tahun 2025

Tabel III.15.
Persentase Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Kabupaten Tabalong
Tahun 2020-2024 (Menurut Bank Dunia)

No.	Persentase Pengeluaran Rata-Rata Perkapita	Tahun				
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1.	20% ke atas	3.506.526	2.549.332	3.310.906	2.823.919	3.293.900
2.	40% Menengah	1.474.722	1.330.804	1.529.990	1.367.697	1.627.370
3.	40% Terbawah	805.416	740.120	784.840	851.176	916.424

Sumber : BPS Kab. Tabalong Tahun 2025

Pada Tahun 2020-2024 ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten Tabalong masih dalam kategori ketimpangan rendah. Angka Gini Ratio tahun 2023 sebesar 0,284 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 dan 2022. Untuk tahun 2021 gini ratio sebesar 0,288 mengalami penurunan dibanding tahun 2020 yang besarnya 0,346.

Pengeluaran rata-rata per kapita di Kabupaten Tabalong berfluktuasi, baik yang 20% ke atas, 40% menengah maupun 40% terbawah.

E. Capaian Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Capaian makro atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan adalah pada upaya pencapaian Misi III yakni Mewujudkan kemandirian daerah yang dilakukan melalui Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas pendidikan murah dan berkualitas, dengan program prioritas :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Termasuk didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang memadai dengan memanfaatkan semua potensi pembiayaan yang tersedia baik dari peran serta masyarakat maupun dari unsur pemerintahan yang lebih tinggi.

Melalui program-program tersebut diharapkan terjadi peningkatan partisipasi pendidikan di semua jenjang serta peningkatan angka melek huruf/pengurangan angka buta aksara.

Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.16.
Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Pendidikan
Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas pendidikan murah dan berkualitas	Pengelolaan Pendidikan	Persentasi Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	94,32	83,70	88,00	88,10	88,25	88,50	88,50
			Persentasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	105,94	109,68	106,10	106,20	106,22	106,23	106,23
			Persentasi Angka Partisipasi Murni (APM) SD	99,75	98,96	99,83	99,90	99,95	100,00	100,00
			Persentasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	92,65	97,02	111,25	111,29	111,32	111,36	111,,36
			Persentaasi penduduk usia ≥ 15 Tahun melek huruf (tidak buta Aksara)	99,48	99,45	99,51	99,52	99,53	99,54	99,54
			Persentasi Sarana dan Prasarana PAUD dalam kondisi baik.	-	77,83	89,80	89,90	90,00	90,10	90,10
			Persentasi Sarana dan Prasarana SD dalam kondisi baik.	-	44,54	58,41	63,50	68,00	74,50	74,50
			Persentasi Sarana dan Prasarana SMP dalam kondisi baik.	-	45,65	46,44	49,49	52,49	55,49	55,49
			Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	63,70	73,43	68,41	73,25	78,10	82,95	82,95
			Persentasi pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi S1- D.IV							

			Persentasi pendidik SD yang memiliki kualifikasi S1- D.IV	89,22	87,00	94,22	94,70	97,17	99,65	99,65
			Persentasi pendidik SMP yang memiliki kualifikasi S1- D.IV	90,35	92,46	97,86	97,87	98,93	100	100
			Persentasi pendidik PAUD yang memiliki Sertifikat Pendidik	42,02	42,46	13,57	15,50	25,50	60,79	60,79
			Persentasi pendidik SMP yang memiliki Sertifikat Pendidik	42,05	61,27	57,16	60,71	66,38	70,22	70,22

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.17.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Pendidikan
Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
				2019	2023	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas pendidikan murah dan berkualitas	Pengelolaan Pendidikan	Persentasi Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	94,32	88,25	96,03	88,50	95,42
			Persentasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	105,94	106,22	110,60	106,23	101,04
			Persentasi Angka Partisipasi Murni (APM) SD	99,75	99,95	79,91	100,00	97,57
			Persentasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	92,65	111,32	101,58	111,36	91,22
			Persentasi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	97,03	99,53	86,77	90,00	84,39
			Persentase penduduk usia ≥ 15 Tahun melek huruf	99,48	90,00	99,55	99,54	97,91

			(tidak buta Aksara)					
			Persentasi Sarana dan Prasarana PAUD dalam kondisi baik.	-	68,00	99,10	90,10	99,20
			Persentasi Sarana dan Prasarana SD dalam kondisi baik.	-	52,49	69,98	74,50	70,00
			Persentasi Sarana dan Prasarana SMP dalam kondisi baik.	-	78,10	96,25	55,49	56,50
		Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentasi pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi S1- D.IV	63,70	73,25	76,32	82,95	68,35
			Persentasi pendidik SD yang memiliki kualifikasi S1- D.IV	89,22	94,70	93,86	99,65	93,,03
			Persentasi pendidik SMP yang memiliki kualifikasi S1- D.IV	90,35	97,87	97,69	100	94,63
			Persentasi pendidik PAUD yang memiliki Sertifikat Pendidik	42,02	15,50	18,63	80,79	20,83
			Persentasi pendidik SD yang memiliki Sertifikat Pendidik	43,63	53,12	54,77	50,00	54,79
			Persentasi pendidik SMP yang memiliki Sertifikat Pendidik	42,05	60,71	61,88	70,22	46,27

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja utama bidang Pendidikan pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.18.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Bidang Pendidikan Tahun 2023-2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
		2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,57	9,13	-	9,15
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,53	12,91	-	12,92

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Pendidikan, 2024

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Pendidikan pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.19.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Angka Melek Huruf	Persen	99,36	97,91	90	97,91
2	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,62	9,14	-	9,15
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,86	12,91	-	12,92
4	APK SD	Persen	109,42	102,41	106,23	101,04
5	APK SMP/MTs	Persen	96,27	104,17	111,36	91,22
6	APK SMA/SMK/MA	Persen	85,21	107,74	100	116,03
7	Angka pendidikan yang ditamatkan:	Persen				
	- SD	Persen	24,98	17,62	100	99,64
	- SMP/MTs	Persen	16,35	49,70	100	96,55
	- SMA/SMK/MA	Persen	18,30	108	100	91,42
8	APM SD/SDLB/MI	Persen	98,70	98,45	100	98,45
9	APM SMP	Persen	78,98	85,37	90,00	84,39
10	Jumlah Grup Kesenian	Buah	40	42		
11	Jumlah gedung kesenian	Buah	1	1	1	1
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Fokus Layanan Urusan Wajib					
a	Pendidikan					
1)	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S-1	Persen	84,78	84,86	84,75	85,33
2)	Persentase tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	52,16	56,04	53,00	40,63
3)	Persentase APK PAUD, SD, SMP dan DIKMAS	Persen		94,70	100	101,33
4)	Persentase APM PAUD, SD, SMP dan DIKMAS	Persen		91,91	100	90,98
b	Kebudayaan					
1)	Jumlah Penyelenggaraan Even Tradisi dan adat Budaya Daerah	Jumlah		8	8	72,74%

2)	Jumlah Situs cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah		10	10	91,01 %
3)	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	Festival	5	5	15	93,73%

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

2. Dinas Kesehatan

Capaian makro atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan adalah pada upaya pencapaian Misi III yakni Mewujudkan kemandirian daerah yang dilakukan melalui:

- 1) Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat, dengan program prioritas :
 - a) Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
 - b) Program Peningkatan kapasitas SDM kesehatan.
 - c) Program Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.
- 2) Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan murah dan berkualitas, dengan program prioritas:
 - a) Program penyediaan sarana dan prasarana Kesehatan
 - b) Program penyediaan obat dan pelayanan kefarmasian
 - c) Program Penyediaan dana JKN dan Jamkesda
 - d) Program standarisasi pelayanan Kesehatan
 - e) Program perawatan dan pengembangan SDM

Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.20.
Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Kesehatan
Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya	Angka Kematian Ibu (AKI)	130/ 100.000 Kelahiran hidup	146/ 100.000 Kelahiran hidup	125/ 100.000 Kelahiran hidup	140/ 100.000 Kelahiran hidup	135/ 100.000 Kelahiran hidup	130/ 100.000 Kelahiran hidup	130/ 100.000 Kelahiran hidup

		kesehatan masyarakat								
			Angka Kematian Bayi (AKB)	6/ 100.000 Kelahiran	10/ 100.000 Kelahiran	6/ 100.000 Kelahiran	9/ 100.000 Kelahiran	9/ 100.000 Kelahiran	8/ 100.000 Kelahiran	8/ 100.000 Kelahiran
			UHC	90	80	90	95	95	100	100
			Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita	11	12	11,5	10,5	10	9,5	9,5
		Peningkatan kapasitas SDM kesehatan	Rasio dokter terhadap jumlah penduduk	1 ; 6.178	1 : 4.500	1: 4.000	1 : 3.500	1 : 3.000	1 : 2.500	1 : 2.500
		Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase faskes dgn ketersediaan obat essensial	75	80	85	90	95	100	100
2.	Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan murah dan berkualitas	Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	70	80	85	90	95	100	100
		Penyediaan obat dan pelayanan kefarmasian	Jumlah Sarana Toko obat berizin dan Apotek dilakukan pemeriksaan	34	41	48	53	58	62	62
		Penyediaan dana JKN dan Jamkesda	Persentase masyarakat yang menjadi peserta JKN KIS	86,7%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akreditasi Puskesmas	94,4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Perawatan dan Pengembangan SDM	Persentase nakes yg mengikuti diklat kes	3.1%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Kesehatan, 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.21.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Kesehatan Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
					2023	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	130/ 100.000 Kelahiran hidup	135/ 100.000 Kelahiran hidup	93/ 100.000 Kelahiran hidup	130/ 100.000 Kelahiran hidup	161/ 100.000 Kelahiran hidup
			Angka Kematian Bayi (AKB)	6/ 100.000 Kelahiran	9/ 100.000 Kelahiran	10/ 100.000 Kelahiran	8/ 100.000 Kelahiran	12/ 100.000 Kelahiran
			UHC	90	95	98	100	98,81

			Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita	11	10	7,45	9,5	7,49
		Peningkatan kapasitas SDM kesehatan	Rasio dokter terhadap jumlah penduduk	1 ; 6.178	1 : 3.000	104/ 100.000	1 : 2.500	1 : 3.975
		Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase faskes dgn ketersediaan obat essensial	75	95	97,5	100	93
2.	Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan murah dan berkualitas	Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	70	95	95	100	93,3
		Penyediaan obat dan pelayanan kefarmasian	Jumlah Sarana Toko obat berizin dan Apotek dilakukan pemeriksaan	34	58	46	62	17
		Penyediaan dana JKN dan Jamkesda	Persentase masyarakat yang menjadi peserta JKN KIS	86,7	95	99,70	95	98,81
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akreditasi Puskesmas	94,4	100	100	100	100
		Perawatan dan Pengembangan SDM	Persentase nakes yg mengikuti diklat kesehatan	3.1	20	21	20	12,89

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Kesehatan, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Capaian target indikator kinerja utama yang menjadi wewenang Dinas Kesehatan pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.22.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Bidang Kesehatan Tahun 2023-2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
		2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,12	74,63	72	75,97

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Kesehatan, 2024

b. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Kesehatan pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.23.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1)	Angka Kematian Bayi/Angka kelangsungan hidup bayi	Jiwa	5/1.000	10/1.000	8/ 100.000 Kelahiran	12/ 100.000 Kelahiran
2)	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,47	74,63	72	75,97
3)	Persentase Balita Gizi buruk	Persen	0,00	0,83	1	0,77
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1)	UHC	Persen	95	98	100	98,81
2)	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	140/ 100.000 kelahiran hidup	93/ 100.000 kelahiran hidup	130/ 100.000 Kelahiran hidup	161/ 100.000 Kelahiran hidup
3)	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	9/1000 kelahiran	10/1000 kelahiran	8/ 100.000 Kelahiran	12/ 100.000 Kelahiran
4)	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Persen	10,5	7,45	9,5	7,49
5)	Rasio Dokter terhadap jumlah penduduk	Rasio	1 : 3500	104/ 100.000	1 : 2.500	1 : 3.975
6)	Persentase Faskes dengan ketersediaan Obat Esensial	Persen	90	97,5	100	93

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Kesehatan, 2024

3. RSUD

Capaian makro atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan RSUD H. Badaruddin Kasim adalah pada upaya pencapaian Misi II yang dilakukan melalui Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat, dengan program prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD. Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.24.
Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Kesehatan (RSUD)
Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1.	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Standarisasi pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,37 (B)	3.4 (B)	3.43 (B)	3.48 (B)	3.5 (B)	3.59 (A)	3.59 (A)
			Akreditasi	Madya	Madya	Madya	Madya	Utama	Paripurna	Paripurna
			Standar Pelayanan Minimal (SPM)	84,14 %	85,75	88,30	90,50	95,50	100	100

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD RSUD H. Badaruddin Kasim, 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.25.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Kesehatan (RSUD) Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
				2019	2023	2023	2024	2024
1.	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Standarisasi pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,37 (B)	3,50	3,39	3.59 (A)	3,35
			Akreditasi	Madya	Utama	Paripurna	Paripurna	Paripurna
			Standar Pelayanan Minimal (SPM)	84,14 %	95,50	83	100	83

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD RSUD H. Badaruddin Kasim, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Tidak ada target indikator kinerja utama yang menjadi wewenang RSUD H. Badaruddin Kasim.

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Kesehatan pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.26.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2019	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	IKM	Indeks	3,37 (B)	3.59 (A)	3,50	3,33
	Akreditasi	Status	Madya	Paripurna	Paripurna	Paripurna
	SPM	Persen	84,14 %	100	100	83

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD RSUD H. Badaruddin Kasim, 2024

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian makro atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

- 1) Upaya pencapaian Misi II yakni Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang dilakukan melalui:
 - a) Revitalisasi pemanfaatan kawasan/area lumbung pangan daerah, dengan program prioritas:
 - (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif
 - (2) Pengendalian banjir
 - (3) Penyediaan sarana dan prasarana pengairan yang mendukung peningkatan produksi dan produktifitas bahan pangan
 - b) Optimalisasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur multifungsi, dengan program prioritas Optimalisasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur multifungsi.
 - c) Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur ekonomi, dengan program prioritas :
 - (1) Pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan untuk membuka akses wilayah-wilayah potensial pertanian, perkebunan dan pariwisata

- (2) Penataan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- 2) Upaya pencapaian Misi III yakni Menuwujudkan kemandirian daerah, yang dilakukan melalui:
- Optimalisasi aktivitas pendukung penyelenggaraan pendidikan, dengan program prioritas Penyediaan prasarana jalan dan jembatan menuju fasilitas pendidikan yang memadai.
 - Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan murah dan berkualitas, dengan program prioritas Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan menuju fasilitas kesehatan.

Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.27.
Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Upaya pencapaian Misi II Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat										
1	Revitalisasi pemanfaatan kawasan/ area lumbung pangan daerah	Pengembangan Daerah Irigasi	Jumlah panjang Saluran Irigasi terbangun	4.466 m	750 m	750 m	750 m	1.000 m	1.000 m	4.250 m
			Jumlah panjang Saluran Irigasi terpelihara	3.878,98 m	600 m	600 m	600 m	900 m	900 m	3.600 m
		Pengendalian banjir	Jumlah panjang Tanggul terbangun	2.302,69 m	700 m	700 m	700 m	1.000 m	1.000 m	4.100 m
			Jumlah panjang Tanggul yang terpelihara	961 m	400 m	400 m	400 m	700 m	700 m	2.600 m
			Jumlah panjang sungai yang dirmolisasi	4.600 m	5.000 m	5.000 m	5.000 m	5.500 m	5.500 m	26.000 m
		Penyediaan sarana dan prasarana pengairan yang mendukung peningkatan produksi dan produktifitas bahan pangan	Jumlah Pintu Air terbangun	3 buah	4 buah	4 buah	4 buah	6 buah	6 buah	30 buah
			Jumlah Pintu Air yang terpelihara	2 buah	4 buah	4 buah	4 buah	7 buah	7 buah	26 buah
2	Optimalisasi pembangunan dan pengembangan	Optimalisasi pembangunan dan pengembangan infra-	Pengguna Ruang terbuka untuk	Pembentukan ruang terbuka	Pengembangan ruang	Pemeliharaan Ruang terbuka	Sosialisasi Ruang terbu-	Menciptakan ruang ter-	Membuka ruang untuk	Pemanfaatan Ruang terbuka

	gan infrastruktur multifungsi	struktur multi-fungsi	masyarakat umum	untuk umum	terbuka		ka untuk multifungsi	buka yg menarik bagi masyarakat umum	masyarakat beraktifitas di tempat umum	untuk kegiatan masyarakat umum
3	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi	Pembangunan dan peningkatan (penguatan/peleluasan) jalan dan jembatan	Jumlah panjang Jalan Usaha Tani terbangun	-	900 m	900 m	900 m	1.200 m	1.200 m	5.100 m
		untuk membuka akses wilayah-potensial pertanian, perkebunan dan pariwisata	Jumlah panjang Jalan Usaha Tani yang terpelihara	-	1.600 m	1.600 m	1.600 m	1.900 m	1.900 m	8.600 m
4		Penataan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun untuk mendukung pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (RDTR, RTBL dan Masterplan)	-	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	5 buah
			1. Pembangunan jalan strategis		0,150 km	-	4,2 km	-	-	4,2 km
			2. Penataan Trotoar dalam kota		0,469 km	0,96 km	0,50 km	0,50 km	0,50 km	2,93 km
Upaya Pencapaian Misi III Mewujudkan Kemandirian Daerah										
1	Optimalisasi aktivitas pendukung penyelenggaraan pendidikan	Penyediaan prasarana jalan dan jembatan menuju fasilitas pendidikan yang memadai	Panjang Jalan yang ditingkatkan dan Dipelihara	-	29,5 km	31 km	27 km	27 km	27 km	141,5 km
			Jumlah jembatan yg dibangun/ diganti dan direhabilitasi	-	18 buah	20 Buah	28 buah	25 buah	28 buah	97 buah
2	Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan murah dan berkualitas	Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan menuju fasilitas kesehatan	Panjang Jalan yang ditingkatkan dan Dipelihara	-	29,5 km	31 km	27 km	27 km	27 km	141,5 km
			Jumlah jembatan yang dibangun/diganti dan direhabilitasi	-	18 buah	20 Buah	28 buah	25 buah	28 buah	97 buah

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas PUPR, 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.28.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
				2019	2023	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Upaya Pencapaian Misi II Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat								
1	Revitalisasi pemanfaatan kawasan/area lumbung pangan daerah	Pengembangan Daerah Irigasi	Jumlah panjang Saluran Irigasi terbangun	4.466 m	1.000 m	1.572 m	1.000 m	1.601,6 m
			Jumlah panjang Saluran Irigasi terpelihara	3.878,98 m	900 m	1.600 m	900 m	3.649 m
		Pengendalian banjir	Jumlah panjang Tanggul terbangun	2.302,69 m	1.000 m	650 m	1.000 m	415 m
			Jumlah panjang Tanggul yang terpelihara	961 m	700 m	700 m	700 m	486 m
			Jumlah panjang sungai yang diromolisasi	4.600 m	5.500 m	6.200 m	5.500 m	22.980 m
		Penyediaan sarana dan prasarana pengairan yang mendukung peningkatan produksi dan produktifitas bahan pangan	Jumlah Pintu Air terbangun	3 buah	6 buah	3 buah	6 buah	2 buah
			Jumlah Pintu Air yang terpelihara	2 buah	7 buah	7 buah	7 buah	10 buah
2	Optimalisasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur multifungsi	Optimalisasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur multifungsi	Pengguna Ruang terbuka untuk masyarakat umum	Pembentukan ruang terbuka untuk umum	Menciptakan ruang terbuka yg menarik bagi masyarakat umum	Bukan Kewenangan Dinas PUPR	Membuka ruang untuk masyarakat beraktifitas di tempat umum	Bukan Kewenangan Dinas PUPR
3	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi	Pembangunan dan peningkatan (penguatan/ perluasan) jalan dan jembatan untuk membuka akses wilayah-wilayah potensial pertanian, perkebunan dan pariwisata	Jumlah panjang Jalan Usaha Tani terbangun	-	1.200 m	0	1.200 m	Kewenangan DKP2TPH
			Jumlah panjang Jalan Usaha Tani yang terpelihara	-	1.900 m	0	1.900 m	Kewenangan DKP2TPH
4		Penataan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun untuk mendukung pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (RDTR, RTBL dan Masterplan)	-	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah
			1.Pembangunan jalan strategis 2.Penataan Trotoar dalam kota		0,50 km	-4,308 km	-0,50 km	1. 27,62 km 2. 3,85 km

5	Optimalisasi aktivitas pendukung penyelenggaraan pendidikan	Penyediaan prasarana jalan dan jembatan menuju fasilitas pendidikan yang memadai	Panjang Jalan yang ditingkatkan dan Dipelihara	-	27 km	85,07 km	1 buah	129,74 km
			Jumlah jembatan yang dibangun/diganti dan direhabilitasi	-	25 buah	69 buah	0,50 km	56 buah
6	Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan murah dan berkualitas	Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan menuju fasilitas kesehatan	Panjang Jalan yang ditingkatkan dan Dipelihara	-	27 km	85,07 km	1 buah	129,74 km
			Jumlah jembatan yang dibangun/diganti dan direhabilitasi	-	25 buah	69 buah	-0,50 km	56 buah

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas PUPR, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja utama bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.29.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023-2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
		2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase desa yang bisa diakses dengan mudah (%)	80	98,35	100	98,35
2	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (%)	64,89	80,59	80,80	80,91
3	Persentase penduduk berakses air minum (%)	79,80	82,41	83,00	85,36

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas PUPR, 2024

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel III.30.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	78,43	82,41	83,00	85,36
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	99,98	94,58	96,43	95,05
3	Persentase bangunan fasilitas publik yang terpelihara	Persen	40	100	65	117
3	Cakupan bangunan untuk fasilitas publik yang laik fungsi	Persen	66,77	100	80	84,50
4	Persentase penerapan manajemen mutu konstruksi	Persen	3,5	100	100	100
5	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	5,45	6,39	6,42	6,72
6	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	69,00	74,61	75	75,07

7	Persentase kawasan terbangun	Persen	1,57	1,99	2,07	2,07
8	Persentase desa yang bisa diakses dengan mudah	Persen	-	100	100	98,35
9	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen		98,35	80,80	80,91
B.	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	100/84	100	100	100

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas PUPR, 2024

5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Upaya pencapaian Misi III yakni Menuwujudkan kemandirian daerah, yang dilakukan melalui Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi, dengan program prioritas Penataan pembangunan perumahan berwawasan lingkungan.

Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.31.

Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1.	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi	Penataan pembangunan perumahan berwawasan lingkungan	Rasio rumah layak huni	1 : 3,50	1 : 2,85	1 : 2,41	1 : 2,04	1 : 1,73	1 : 1,46	1 : 1,46

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Perkim, 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.32.

Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
				2019	2023	2023	2024	2024
1.	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi	Penataan pembangunan perumahan berwawasan lingkungan	Rasio rumah layak huni	1 : 3,50	1 : 1,73	1 : 3,79	1 : 1,46	1 : 3,84

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Perkim, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Target indikator kinerja utama tidak ada yang menjadi wewenang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.33.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	1 : 3,91	1 : 3,79	1 : 1,46	1 : 3,84
2	Persentase pemukiman yang tertata	Persen		82,99	100	84,12
3[	Persentase Kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Persen	40	48,58	85	74,44
4	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	46	52,27	100	71,00

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Perkim, 2024

Tabel III.34.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Persentase luas lahan bersertifikat (tanah aset pmda)	Persen	100	50	100 (5 Ha)	11,32
2	Prosentase penetapan tanah untuk pembangunan kepentingan umum (aset Pemda)	Persen		54,92	100	54,92
3	Jumlah kasus sengketa lahan yang tertangani	Kasus		3	3	1
4	Luas Tanah Kosong terkelola	Dokumen		8	17	14

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Perkim, 2024

6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Upaya

pencapaian Misi I yakni Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih agamis yang dilakukan melalui Peningkatan kesadaran berbudaya dan tertib hukum, dengan program prioritas :

- 1) Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
- 2) Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.35.
Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Peningkatan kesadaran berbudaya dan tertib hukum	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Penyelesaian K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman)	100%	80%	83%	90%	95%	100%	100%
			Persentase Penyelesaian K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan)	100%	80%	83%	90%	95%	100%	100%
		Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	80%	83%	90%	95%	100%	100%

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Satpol PP dan Damkar, 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.36.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
				2019	2023	2023	2023	2024
1.	Peningkatan kesadaran berbudaya dan tertib hukum	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Penyelesaian K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman)	100%	95	95	100	100
			Persentase Penyelesaian K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan)	100%	95	95	100	100

		Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	95	95	100	100

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Satpol PP dan Damkar, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja utama bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.37.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023-2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
		2018	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Angka Kriminalitas	13,0	10,5	10	10

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Satpol PP dan Damkar, 2024

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.38.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satpol PP) Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1.	Angka kriminalitas yang tertangani	Persen	87,88	100	100	100
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM				100	100
1	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen		95	100	100
2	Persentase penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persen		90	100	100
3	Persentase pencegahan penanggulangan kebakaran	Persen		96	100	100
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran	Unit		5	6	6
5	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Kenyamanan)	Persen		95	100	100

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Satpol PP dan Damkar, 2024

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, tidak ada yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Capaian indikator kinerja utama

Indikator kinerja utama yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong tahun 2019-2024, tidak ada yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2023 dan 2024 yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.39.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (BPBD) Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Persentase Cakupan Penanggulangan Korban Bencana	Persen	-	99	100	100

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD BPBD, 2024

8. Dinas Sosial

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah Upaya pencapaian Misi III yakni Mewujudkan kemandirian daerah yang dilakukan melalui :

- 1) Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat dengan program prioritas pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
- 2) Pemantapan peningkatan perlindungan sosial masyarakat, dengan program prioritas :
 - a) Pemberdayaan sosial
 - b) Rehabilitasi sosial

- c) Penanganan bencana
- d) Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) daerah
- e) Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).

Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.40.
Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Sosial
Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1.	Pemantapan peningkatan perlindungan sosial masyarakat	Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Penanganan Bencana	Persentase PPKS (Korban Bencana) yang mendapatkan Layanan sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) daerah	KUBE di ganti dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).	Pembentukan Puskesmas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Sosial, 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.41.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Sosial
Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
					2023	2023	2024	2024
1.	Pemantapan peningkatan perlindungan sosial masyarakat	Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	100	96,30	100	100
			PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100	100	95,74	100	100
		Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100	100	91,45	100	100
		Penanganan Bencana	Persentase PPKS (Korban Bencana) yang mendapatkan Layanan sosial	100	100	100	100	100
		Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) daerah	KUBE di ganti dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	100	100 (200 KPM)	100 (200 KPM)	100 (120 KPM)	100 (120 KPM)
		Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).	Pembentukan Puskesmas	100	100	95,41	100	95,41

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Sosial, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja utama bidang Sosial pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.42.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Bidang Sosial Tahun 2023-2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase PPKS yang dilayani (%)	83,45	96,30	100	90,75

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Sosial, 2024

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Sosial pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.43.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	-	95,74	100	100
2	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Persen	-	91,45	100	100
3	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Jaminan Sosial	Persen	-	96,3	100	100
4	Persentase Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Sosial	Persen	-	100	100	100
5	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persen	-	100	100	100

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Sosial, 2024

9. Dinas Tenaga Kerja

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja adalah Upaya pencapaian Misi III yakni Mewujudkan Kemandirian Daerah yang dilakukan melalui Tenaga kerja yang andal, terampil dan terlatih, dengan program prioritas:

- 1) Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2) Penempatan Tenaga Kerja
- 3) Hubungan Industrial

Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.44.
Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Ketenagakerjaan
Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tenaga kerja yang andal, terampil dan terlatih	Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan, Keterampilan dan Produktivitas Kerja	140 orang	171 orang	171 orang	171 orang	292 orang	292 orang	292 orang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Kesempatan Kerja dan WUB	160 orang	64 orang	64 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang
		Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Terhadap Pencari Kerja	19,67%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan HI	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Peningkatan Kelembagaan HI dan Pengupahan	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Tenaga Kerja 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.45.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
				2019	2023	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tenaga kerja yang andal, terampil dan terlatih	Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan, Keterampilan dan Produktivitas Kerja	140 orang	292 orang	313 orang	292 orang	398 orang
			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Kesempatan Kerja dan WUB	160 orang	80 orang	144 orang	80 orang	336 orang
		Penempatan tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Terhadap Pencari Kerja	19,67%	95%	82,58%	95%	44%
		Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan HI	80%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Peningkatan Kelembagaan HI dan Pengupahan	80%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Tenaga Kerja, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja utama bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.46.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Ketenagakerjaan
Tahun 2023-2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
		2018	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,09	3,60	3,00-4,00	3,44

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Tenaga Kerja, 2024

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.47.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan
Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	96,15	96,40	96.55	96.55
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja dan Database Ketenagakerjaan	Dokumen		1	1	1
2	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam negeri	Orang		93	192	138
3	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	Orang		90	120	90
4	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	Orang		1.481	500	1.217
5	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.	Orang		76,14	82,19	78,89

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Tenaga Kerja, 2024

10. Dinas P3AP2KB

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja adalah Upaya pencapaian Misi III yakni Mewujudkan Kemandirian Daerah yang dilakukan melalui peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat dengan program prioritas :

- 1) Pengendalian penduduk
- 2) Pembinaan Keluarga Berencana

Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.48.
Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat	Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,49	1,48	1,47	1,46	1,45	1,44	1,44
			Indeks Pembangunan Keluarga	-	-	58,2	60,32	60,44	64,55	64,55
			Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (Age Sfsicific Fertility Rate/ASFR 15-19	-	-	38	34	32	29	29
			Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR) Per WUS usia 15-49 Tahun	-	-	2,23	2,19	2,16	2,12	2,12
		Pembinaan Keluarga Berencana	Persentasi Pencapaian Peserta KB MKJP	12,25	13	14,50	15,25	17,50	20	20
			Cakupan Peserta KB yang Aktif	81,97%	-	82,05	82,11	82,19	82,28	82,28
			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ modern Contraceptive (mCPR)	-	-	82,05	82,11	82,19	82,28	82,28
			Persentasi Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	-	-	8,16%	7,96%	7,75%	7,57%	7,57%
		Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Keluarga Sejahtera	Cakupan anggota bina keluarga yang ber KB (BKB, BKR, BKL)	72,5	72,75	73,80	75,83	77,90	80	80
			Cakupan anggota UPPKS berk-KB	83,40	84,2	84,24	91,60	91,75	92,00	92,00

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas P3AP2KB, 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.49.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
					2019	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat	Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,49	1,45	1,37	1,44	1,32
			Indeks Pembangunan Keluarga	-	60,44	66,24	64,55	67,10
			Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (Age Sfsific Fertility Rate/ASFR 15-19	-	32	29,37	29	12,6
			Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR) Per WUS usia 15-49 Tahun	-	2,16	2,23	2,12	1,54
		Pembinaan Keluarga Berencana	Persentasi Pencapaian Peserta KB MKJP	12,25	17,50	13,50	20	13,58
			Cakupan Peserta KB yang Aktif	81,97%	82,19	79,30	82,28	79,32
			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ modern Contraceptive (mCPR)	-	82,19	79,26	82,28	79,32
			Persentasi Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	-	7,75%	7,58	7,57%	5,70
		Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Keluarga Sejahtera	Cakupan anggota bina keluarga yang ber KB (BKB, BKR, BKL)	72,5	77,90	78,65	80	89,61
			Cakupan anggota UPPKS ber KB	81,97%	91,75	91,89	92,00	92,02

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas P3AP2KB, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja utama bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.50.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
		2018	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,84	74,60	75,12	72,54
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,20	86,06	86,1	86,47

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas P3AP2KB, 2024

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.51.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	70,84	74,60	75,12	72,54
2	Indeks Pembangunan gender (IPG)	Point	85,20	86,06	86,10	86,47
3	Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Nindya	Utama	Evaluasi Lapangan akan dilaksanakan Tahun 2025 Jika Evaluasi Mandiri Memenuhi Syarat "Penghargaan KLA akan diserahkan Tahun 2025
4	Prosentasi SKPD yang responsif Gender	Persen	-	100	100	100
5	Prosentase Perempuan Korban Kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu	Persen	-	100	100	100
6	Prosentase SKPD yang memiliki Data terpilah gender	Persen	-	100	100	100
7	Prosentase Anak Korban Kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu	Persen	-	100	100	100

8	Persentase ARG pada Belanja APBD	Persen	-	18	30	52,38
9	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	-	Angka yang tersedia Baru untuk Provinsi Kal-Sel, sementara angka untuk Kabupaten Belum Tersedia	68,03	Angka yang tersedia Baru untuk Provinsi Kal-Sel, sementara angka untuk Kabupaten Belum Tersedia

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas P3AP2KB, 2024

Tabel III.52.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Persentase Pencapaian Peserta KB MKJP	Persen	12,25	13,50	20	13,58
2	Cakupan Anggota Bina Keluarga yag ber-KB (BKB,BKR, dan BKL)	Persen	72,50	78,65	80	89,61
3	Cakupan anggota UPPKS yang Ber-KB	Persen	83,04	91,89	92	92,02
4	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,49	1,37	1,44	1,32
5	Total Fertility Rate (TFR)	Rate		2,23	2,16	2,23
6	Cakupan Peserta KB yang aktif	Persen		79,3	82,28	79,32
7	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks		66,24	64,55	67,10
8	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (age sfscific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Angka		29,37	29	12,6
9	Angka Kelahiran Total (total Fertility Rate/TFR) Per WUS usia 15-49 Tahun.	Angka		2,23	2,12	1,54
10	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ modern Contraceptive (mCPR)	Angka		79,26	82,28	79,32
11	Persentase kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	Persen		7,58	7,57	4,79

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas P3AP2KB, 2024

11. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, tidak ada yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

b. Capaian indikator kinerja utama

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja utama bidang Pangan pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.53.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Pangan
Tahun 2023-2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
		2018	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Ketahanan Pangan	81,11	79,79	84,72	85,91

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas KP2TPH, 2024

Tabel III.54.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Pertanian
Tahun 2023-2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
		2018	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Kontribusi pertanian terhadap PDRB (%)	11	7,71	-	7,76

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas KP2TPH, 2024

d. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Pangan pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.55.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	87,5	86,6	89,9	92,65
2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah (IKP)	Indeks		79,79	84,72	85,94
3	Meningkatnya diversifikasi dan cadangan pangan masyarakat	Ton		215,515	60	182,85
4	Meningkatnya Desa Tahan Pangan	Persen		97,71	100	100
5	Tingkat keamanan pangan segar Asal Tumbuhan	Persen		100	90	100

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas KP2TPH, 2024

Tabel III.56.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (Sektor Perikanan) Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Jumlah Produksi Perikanan budidaya	Ton	13.522,3	17.124,22	18.053,2	18.075,69
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang ramah Lingkungan	Ton		2.041,03	2.163,41	2.163,41
3	Jumlah Kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan	Kegiatan		7 kali	0 kali	4 kali
4	Jumlah Produksi Pengolahan hasil perikanan	Ton		33,4	32	37,10

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas KP2TPH, 2024

Tabel III.57.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (Sektor Hortikultura) Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Produktivitas Pertanian per hektar pertahun					
	- Padi	Ton/ha		4,75	4,80	5,00
	- Jagung	Ton/ha		4,02	4,05	4,20
	- Kedelai	Ton/ha		1,12	1,15	1,05
	- Bawang Merah	Ton/ha		7,20	7,30	7,20
	- Cabai Rawit			4,90	5,50	5,00
	- Cabai besar			8,70	8,80	8,80
	- Lada (biji kering)	Kg/ha				
2	Persentase cakupan yang dapat dilayani oleh prasarana pertanian	Persen		73,8	70,00	73,80
3	Persentase cakupan pencegahan bencana pertanian	Persen		31,2	40	42,20
4	Persentase peningkatan jumlah kelompok tani yang naik nilai kemampuannya	Persen		54,7	35	35

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas KP2TPH, 2024

12. Dinas Lingkungan Hidup

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup adalah Upaya pencapaian Misi II yakni Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang dilakukan melalui optimalisasi terwujudnya aktivitas pembangunan yang ramah lingkungan, dengan program prioritas:

- 1) Perencanaan lingkungan hidup
- 2) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
- 3) Pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
- 4) Pengendalian B3 dan limbah B3
- 5) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
- 6) Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
- 7) Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
- 8) Penanganan pengaduan lingkungan hidup
- 9) Pengelolaan persampahan

Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.58.
Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Optimalisasi terwujudnya aktivitas pembangunan yang ramah lingkungan	Perencanaan lingkungan hidup	Adanya dokumen perencanaan LH yang updating	2 dok.	2 dok.	2 dok.	2 dok.	2 dok.	2 dok.	2 dok.
		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Indeks kualitas air (IKA)	63,68	65,98	58	59	60	61	75,58
			indeks kualitas udara (IKU)	85,98	91,28	89	89,2	89,4	89,5	98,08
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks kualitas tutupan lahan	62	62,5	66	66,5	67	67,5	67,5
		Pengendalian B3 dan limbah B3	Persentase ketaatan pelaku usaha / kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3	-	-	40%	50%	60%	70%	70%
		Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan	Persentase Pelaku usaha kegiatan yang taat terhadap kebijakan dan	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%

		dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	peraturan lingkungan							
		Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan Hak MHA terkait PPLH	Adanya penetapan pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal dan hak MHA terkait PPLH	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok
		Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase sekolah yang berwawasan lingkungan (Adiwiyata)		50%	60%	70%	75%	80%	80%
		Penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase jumlah pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		Pengelolaan persampahan	Persentase Pengurangan sampah	0,6	22	24	26	27	30	30
			Persentase Penanganan sampah	57,53	75	74	73	72	70	70

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.59.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
				2019	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Optimalisasi terwujudnya aktivitas pembangunan yang ramah lingkungan	Perencanaan lingkungan hidup	Adanya dokumen perencanaan LH yang updating	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	2 dok.	3 dokumen
		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Indeks kualitas air (IKA)	63,68	60	55,19	61	52,26
			indeks kualitas udara (IKU)	85,98	89,4	93,79	89,5	96,78
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks kualitas tutupan lahan	62	67	69,85	67,5	69,08

		Pengendalian B3 dan limbah B3	Persentase ketaatan pelaku usaha / kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3	-	60%	60%	70%	70%
		Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Pelaku usaha kegiatan yang taat terhadap kebijakan dan peraturan lingkungan	50%	90%	100%	100%	107,5%
		Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan Hak MHA terkait PPLH	Adanya penetapan pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal dan hak MHA terkait PPLH	1 kelompok	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase sekolah yang berwawasan lingkungan (adiwiyata)	50%	75%	79,36	80%	100%
		Penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase jumlah pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	90%	100
		Pengelolaan persampahan	Persentase Pengurangan sampah	0,6	72%	94,67%	30%	16,76%
			Persentase Penanganan sampah	57,53	27%	24%	70%	79,70%

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Lingkungan Hidup, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja utama bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.60.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2023-2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
		2018	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,10	74,03	72	73,98

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Lingkungan Hidup, 2024

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.61.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Persentase pengurangan sampah	Persen	5,44	24	30	16,76
3	Penanganan Sampah	Persen	30,35	94,67	70	79,70
4	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	62	69,85	67,5	69,08
5	Persentase pelaku usaha kegiatan yang taat terhadap kebijakan dan peraturan lingkungan	Persen	50	100	100	107,5
6	Indeks kualitas air	Indeks	63,68	55,19	61	52,26
7	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,58	93,79	89,5	96,78
8	Dokumen Perencanaan LH yang Updating	Dokumen		3	2	3
9	Persentase Jumlah Pengaduan Lingkungan yang di tindaklanjuti	Persen		100	100	100
10	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Persen		100	100	100
11	Penetapan pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal dan hak MHA terkait PPLH	Perda/Perbub		1	1	1
12	Persentase sekolah yang berwawasan lingkungan (Adiwiyata)	Persen		86,8	80	100
13	Tingkat Ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan Limbah B 3	Persen		60	70	70
14.	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota atau perkotaan	Hektar	651.622	825,45	666,622	829,33
15.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Persen	1:0,0053	67	50	76,97

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Lingkungan Hidup, 2024

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, tidak ada yang menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Capaian indikator kinerja utama

Target indikator kinerja utama tidak ada yang menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.62.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Nilai survey kepuasan masyarakat	Kriteria	B (72,10)	Sangat Puas	Puas	Sangat Puas
2	Cakupan perangkat daerah yang melakukan kerjasama pemanfaatan data	Persen	93,50	22,22	100	26,82
3	Persentase kepemilikan KTP Elektronik	Persen	-	99,28	100	99,75
4	Persentase kepemilikan kartu keluarga	Persen	-	100	100	99,64
5	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	Persen	-	70,27	100	78,90
6	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persen	-	61,89	70,00	63,89
7	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun	Persen	-	100	100	99,11
8	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	-	100	100	100
9	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari perceraian yang dilaporkan	Persen	-	100	100	100
10	Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persen	-	100	100	100
11	Persentase validitas database kependudukan	Persen	-	100	100	100
12	Persentase SKPD yang telah memanfaatkan database kependudukan	Persen	-	22,22	100	26,83
B.	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1.	Jumlah lulusan S1/S2/s3	Orang	9.646	13.535		14.423

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Dukcapil, 2024

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Upaya pencapaian Misi II yakni Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

yang dilakukan melalui Optimalisasi penerapan Gerakan Pembangunan Masyarakat dalam pembinaan desa, dengan program prioritas :

- 1) Penataan desa
- 2) Peningkatan Kerjasama desa
- 3) Administrasi Pemerintahan Desa
- 4) Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat
- 5) Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- 6) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.63.
Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Optimalisasi penerapan Gerakan Pembangunan Masyarakat dalam pembinaan desa	Penataan Desa	Jumlah desa yang ditetapkan batas administrasi wilayah desa	93 Desa	114 Desa	116 Desa	118 Desa	120 Desa	121 Desa	121 Desa
			Jumlah sarana transportasi desa yang dibangun	2 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah
			Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk	-	-	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	4 kawasan
		Peningkatan Kerjasama desa	Jumlah Kerjasama antar desa	-	-	1 Kerjasama	1 Kerjasama	1 Kerjasama	1 Kerjasama	4 Kerjasama
		Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	30%	40%	50%	60%	70%	80%	80%
		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga	Persentase Pembinaan Kelembagaan, Aparatur dan penataan Kewilayahan	30%	40%	50%	60%	70%	80%	80%

		adat dan masyarakat hukum adat								
		Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	30%	40%	50%	60%	70%	80%	80%
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30%	40%	50%	60%	70%	80%	80%

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.64.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
				2019	2023	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Optimalisasi penerapan Gerakan Pembangunan Masyarakat dalam pembinaan desa	Penataan Desa	Jumlah desa yang ditetapkan batas administrasi wilayah desa	93 Desa	120 Desa	121 Desa	121 Desa	121 Desa
			Jumlah sarana transportasi desa yang dibangun	2 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah
			Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk	-	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan
		Peningkatan Kerjasama desa	Jumlah Kerjasama antar desa	-	1 Kerjasama	12 Kerjasama	2 Kerjasama	12 Kerjasama
		Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	30%	70%	70%	80%	80%
		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Pembinaan Kelembagaan, Aparatur dan penataan Kewilayahan	30%	70%	70%	80%	80%

		Pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	30%	70%	70%	80%	80%
		Pembinaan dan Penga- wasan Pe- merintahan Desa Pem- binaan dan Pengawas-an Pemerin-tahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pe- merintahan Desa Pem-binaan dan Pengawas-an Pemerin-tahan Desa	30%	70%	70%	80%	80%

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja utama bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.65.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023-2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
		2018	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks desa membangun	0,59	0,78	0,79	0,83

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.66.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Jumlah desa yang telah ditetapkan batas wilayahnya	Persen		114	100	100
2	Jumlah sarana transportasi di desa yang dibangun	Jumlah		2	2	2
3	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen		100	100	100
4	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk	Jumlah		-	1	1
5	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah		42	60	90
5	Jumlah Kerjasama antar Desa	Persen		-	2	12

6	Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	Persen		70	80	80
7	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Rata-rata		70	80	80

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

15. Dinas Perhubungan

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan adalah :

- 1) Upaya pencapaian Misi II yakni Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi, dengan program prioritas :
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan.
 - b) Peningkatan pelayanan angkutan agar dapat menjangkau semua kecamatan.
- 2) Upaya pencapaian Misi III yakni Mewujudkan kemandirian daerah yang dilakukan melalui Optimalisasi aktivitas pendukung penyelenggaraan pendidikan, dengan program prioritas Peningkatan penyediaan prasarana angkutan yang murah dan berkualitas.

Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.67.
Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Perhubungan
Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Optimalisasi aktivitas pendukung penyelenggaraan pendidikan	Peningkatan penyediaan prasarana angkutan yang murah dan berkualitas	Terlaksananya Peningkatan penyediaan prasarana angkutan yang murah dan berkualitas dengan adanya pengadaan dan pemeliharaan ANGKOT (Angkutan Kota)	33	35	35	37	39	41	41
2	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi	Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terpeliharanya fasilitas keselamatan jalan dan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)	385	510	510	510	510	510	2.935
			Terlaksananya Peningkatan	40%	42%	44%	60%	80%	100%	100%

			Pengelolaan dan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe C.	28 fasilitas utama di 3 terminal sudah terlaksana dari 69 fasilitas utama di 3 terminal	29 fasilitas utama di 3 terminal sudah terlaksana dari 69 fasilitas utama di 3 terminal	31 fasilitas utama di 3 terminal sudah terlaksana dari 69 fasilitas utama di 3 terminal	Diharapkan pada tahun 2022 ada peningkatan fasilitas utama sebanyak 16 % dari tahun sebelumnya yakni mengamati penambahan 11 fasilitas utama dari tahun sebelumnya di 3 terminal yang mana totalnya menjadi 42 fasilitas utama dari 69 fasilitas di 3 terminal	Diharapkan pada tahun 2023 ada peningkatan fasilitas sebanyak 20 % dari tahun sebelumnya yakni mengamati penambahan 13 fasilitas utama dari tahun sebelumnya di 3 terminal yang mana totalnya menjadi 55 fasilitas utama dari 69 fasilitas di 3 terminal	Diharapkan pada tahun 2024 ada peningkatan fasilitas sebanyak 20 % dari tahun sebelumnya yakni mengamati penambahan 14 fasilitas utama dari tahun sebelumnya di 3 terminal yang mana totalnya menjadi 69 fasilitas utama dari 69 fasilitas di 3 terminal	Diharapkan pada tahun 2024 Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe C sudah tercapai hingga 100% yakni tercapainya 69 fasilitas utama dari 69 fasilitas utama yang ada
			Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang izinnya diterbitkan dengan terlaksananya peningkatan , pengelolaan dan penataan titik (lokasi) parkir di 5 (lima) Kecamatan	5 Kec 23 Titik Parkir	5 Kec 23 Titik Parkir	5 Kec 12 Titik Parkir	5 Kec 13 Titik Parkir	5 Kec 14 Titik Parkir	5 Kec 15 Titik Parkir	5 Kec 15 Titik Parkir
		Peningkatan pelayanan angkutan agar dapat menjangkau semua kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang dapat Menjangkau Semua Kecamatan	3	5	7	9	10	12	12

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Perhubungan, 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.68.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Perhubungan
Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
					2023	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Optimalisasi aktivitas pendukung penyelenggaraan pendidikan	Peningkatan penyediaan prasarana angkutan yang murah dan berkualitas	Terlaksananya Peningkatan penyediaan prasarana angkutan yang murah dan berkualitas dengan adanya pengadaan dan pemeliharaan ANGKOT (Angkutan Kota)	33	39	57	41	57
2	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi	Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terpeliharanya fasilitas keselamatan jalan dan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)	385	510	510	510	325
			Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe C.	40,00%	80%	57 %	100%	60%
				28 fasilitas utama di 3 terminal sudah terlaksana dari 69 fasilitas utama di 3 terminal	Diharapkan pada tahun 2023 ada peningkatan fasilitas sebanyak 20 % dari tahun sebelumnya yakni mengalami penambahan 13 fasilitas utama dari tahun sebelumnya di 3 terminal yang mana totalnya menjadi 55 fasilitas utama dari 69 fasilitas di 3 terminal	Realisasi belum mencapai target namun diharapkan di tahun berikutnya realisasi tahu ini bisa di capai.	Diharapkan pada tahun 2024 ada peningkatan fasilitas utama sebanyak 20 % dari tahun sebelumnya yakni mengalami penambahan 14 fasilitas utama dari tahun sebelumnya di 3 terminal yang mana totalnya menjadi 69 fasilitas utama dari 69 fasilitas utama di 3 terminal	Realisasi belum mencapai target namun diharapkan di tahun berikutnya realisasi tahu ini bisa di capai.
			Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang izinnya diterbitkan dengan terlaksananya peningkatan , pengelolaan dan penataan titik	5 Kec 23 Titik Parkir	5 Kec 14 Titik Parkir	5 Kec 14 Titik Parkir	5 Kec 15 Titik Parkir	5 Kec 14 Titik Parkir

			(lokasi) parkir di 5 (lima) Kecamatan					
		Peningkatan pelayanan angkutan agar dapat menjangkau semua kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang dapat Menjangkau Semua Kecamatan	3	10	12	12	12

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Perhubungan, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Target indikator kinerja utama pada tahun 2023 dan 2024 tidak ada yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan.

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang perhubungan pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.69.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Meningkatnya kelaikan Operasional Kendaraan Umum/ Pribadi Di Jalan Raya	KBWU (Kendaraan Umum Wajib Uji)	4000	4.097	4.500	4.320
2	Persentase Layanan Jasa Sarana dan Prasarana fasilitas keselamatan Perhubungan	Persen		57	90	100
3	Meningkatnya pergerakan Orang dan Barang yang melalui Bandara Warukin	Jumlah		200 Orang/ PPU 1.400 Barang/ Kuli	3.500 Orang/4 3.000 barang/kuli	81 orang/465 barang/kuli
4	Menurunnya Angka Kecelakaan dan Pelanggaran	Angka		54 laka 1.063 Tilang	20 Laka 930 Tilang	54 Laka 1.339 Tilang

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Perhubungan, 2024

16. Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik adalah Upaya pencapaian Misi III yakni Mewujudkan kemandirian daeran, yang dilakukan melalui Pemantapan terwujudnya pemerintah yang melayani masyarakat, dengan program prioritas Pengembangan smart city.

Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.70.
Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1.	Pemantapan terwujudnya pemerintah yang melayani masyarakat	Pengembangan Smart City	Nilai Smart City	-	2,61	2,98	3,20	3,60	4,00	4,00

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Kominfo, 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.71.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
					2023	2023	2024	2024
1.	Pemantapan terwujudnya pemerintah yang melayani masyarakat	Pengembangan Smart City	Nilai Smart City	-	3,60	3,38	4,00	3,55

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Kominfo, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Target indikator kinerja utama pada tahun 2022 dan 2023 tidak ada yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik.

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.72.

**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN REALISASI			
				2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen		100	94	100	100
2	Terlaksananya E-Government	Persen		100	100	100	100

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Kominfo, 2024

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Statistik pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.73.

**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Kabupaten Tabalong
Tahun 2023-2024**

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Persentase penyelenggaraan Statistik sektoral lingkup Kabupaten	Persen		100	100	100
B.	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Ribu rupiah	1.033.847/ 11.106	1.590.294	-	1.677,7
2.	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Ribu rupiah	1.242.601/ 46,99%	739.410/ 62,10%	-	801,272/ 47,76
3.	Jumlah dan jenis Bank dan Cabang	Jumlah	9	31	-	28
4.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	Jumlah	1	4	-	-
5.	Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel	Jumlah	19	30	-	32

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Kominfo, 2024

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Persandian pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.74.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Kabupaten
Tabalung Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persen		100	100	100

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Kominfo, 2024

17. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah Upaya pencapaian Misi II yakni Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui :

- 1) Memperkuat daya saing produk UMKM, dengan program prioritas Memperkuat daya saing produk UMKM.
- 2) Pengembangan inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, terutama/termasuk pola Syariah, dengan program prioritas Meningkatkan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah.
- 3) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi, dengan program prioritas Penataan dan modernisasi pasar-pasar mingguan.

Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel III.75.
Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Koperasi dan UKM
Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024
1.	Memperkuat daya saing produk UMKM	Memperkuat daya saing produk UMKM	Peningkatan kualitas produk	30	30	30	30	60	60	60	60
2.	Pengembangan inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, terutama/termasuk pola Syariah	Meningkatkan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah	Akses langsung pelaku usaha mikro dan kecil terhadap dana bergulir melalui skim syariah tanpa perantara	2	2	5	5	10	15	15	15

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Koperasi, UKM PP, 2024

Tabel III.76.
Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Memperkuat daya saing produk UMKM	Memperkuat daya saing produk UMKM	peningkatan kualitas produk	30	30	30	60	60	60	250	
			fokus dan konsisten terhadap jenis produk yang dihasilkan	10	15	20	30	50	70	195	
			pemanfaatan teknologi informasi	10	100	100	120	140	160	600	
2	Pengembangan inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, terutama/termasuk pola Syariah	Meningkatkan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah	Akses langsung pelaku usaha mikro dan kecil terhadap dana bergulir melalui skim syariah tanpa perantara	2	2	5	5	10	15	37	
3	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi Pembangunan pengembangan infrastruktur ekonomi	Penataan dan modernisasi pasar-pasar mingguan	Akses pasar yang layak dan nyaman serta Manajemen Pengelolaan Pasar Berbasis Elektronik	5	5	5	5	5	5	5	

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Koperasi, UKM PP, 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.77.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Koperasi dan UKM Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
					2023	2023	2024	2024
1.	Memperkuat daya saing produk UMKM	Memperkuat daya saing produk UMKM	Peningkatan kualitas produk	30	30	30	60	60
2.	Pengembangan inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, terutama/termasuk pola Syariah	Meningkatkan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah	Akses langsung pelaku usaha mikro dan kecil terhadap dana bergulir melalui skim syariah tanpa perantara	2	5	2	15	2

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Koperasi, UKM PP, 2024

Tabel III.78.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
				2019	2023	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Memperkuat daya saing produk UMKM	Memperkuat daya saing produk UMKM	peningkatan kualitas produk	30	30	60	60	60
			fokus dan konsisten terhadap jenis produk yang dihasilkan	10	20	20	70	70
			pemanfaatan teknologi informasi	10	100	95	160	93
2	Pengembangan inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, terutama/termasuk pola Syariah	Meningkatkan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah	Akses langsung pelaku usaha mikro dan kecil terhadap dana bergulir melalui skim syariah tanpa perantara	2	59,97	59,97	15	15
3	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi	Penataan dan modernisasi pasar-pasar mingguan	Akses pasar yang layak dan nyaman serta Manajemen Pengelolaan Pasar Berbasis Elektronik	5	46	46	5	5

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Koperasi, UKM PP, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja utama bidang Penanaman Koperasi dan UKM pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.79.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Koperasi dan UKM Tahun 2023-2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
		2018	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase koperasi aktif (%)	67	59	59	53

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Koperasi, UKM PP, 2024

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja utama bidang Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.80.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Perindustrian dan
Perdagangan Tahun 2023-2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
		2018	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB (%)	8,61	7,51	-	7,61
2.	Persentase UKM Aktif (%)	66	79	82	73,82

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Koperasi, UKM PP, 2024

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Koperasi dan UKM pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.81.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM
Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Pertumbuhan UMK	Persen		0,26	0,27	0,27
2	Jumlah Koperasi yang dibina, diawasi dan dinilai	Persen		59	80	80
3	Jumlah anggota koperasi yang dilatih	Jumlah		272	360	180
4	Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Usaha Koperasi	Persen		3	3	3
5	Terlaksananya pembinaan usaha mikro menjadi usaha kecil	Jumlah		30	30	30
6	Jumlah Pelaku Usaha yang dilatih Wirausaha	Jumlah		90	90	90

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Koperasi, UKM PP, 2024

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.82.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen		7,51	-	7,61
2	Terkendalnya inflasi harga kebutuhan Bapokting	Persen	-	2,93	1,14	2,24
3	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	Dokumen	-	85	86	50
4	Persentase pemenuhan indikator pasar tipe A kriteria SNI 8152-2015	Persen	-	84,17	100	90
5	Jumlah produk unggulan daerah yang siap ekspor	Persen	-	60	75	50
6	Persentase jumlah alat UTTP di pasar dan SPBU yang di tera/tera ulang	Persen	-	70	80	69
7	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	WUB	-	5,91	-	5,96
8	Pertambahan industri baru	Persen	-	35	40	40
9	Persentase jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi dengan yang dikeluarkan oleh instansi terkait secara elektronik	Persen	-	60	70	70
10	Tersedianya informasi industri	Persen	-	100	100	100

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Koperasi, UKM PP, 2024

18. Dinas Penanaman Modal dan PTSP

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Upaya pencapaian Misi III yakni Mewujudkan kemandirian daerah yang dilakukan melalui Pemantapan terwujudnya pemerintah yang melayani masyarakat, dengan program prioritas Pembangunan mal pelayanan publik.

Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel III.83.
Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1.	Pemantapan terwujudnya pemerintah yang melayani masyarakat	Pembangunan mall pelayanan publik	Persentase Operasional Mall Pelayanan Publik	0	75	85	90	95	100	100

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.84.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
				2019	2023	2023	2024	2024
1.	Pemantapan terwujudnya pemerintah yang melayani masyarakat	Pembangunan mall pelayanan publik	Persentase Operasional Mall Pelayanan Publik	0	95	95	100	100

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja utama bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.85.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2023-2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
		2018	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	80,00	91,06	90	95,76

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2024

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.86.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Rupiah		2.545.942.661.632	1,01 T	1.130.877.791
2	Jumlah Investor yang berminat menanamkan modal	Investor		20	20	20
3	Nilai Skor Standar Kepuasan Masyarakat	Skor		91,06	90	95,76
4	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan Informasi PM	Persen		161%	82	100
5	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Persen		-22,75	20	55,58

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2024

Realisasi Investasi PMDN dan PMA pada Tahun 2024 realisasinya adalah Rp1.130.877.037.791,00 dengan capaian 112,20% dari target Rp1.010.0000.000.000,00 dengan rincian realisasi investasi PMDN sebesar Rp812.346.613.709,00 dengan target Rp860.000.000.000,00 dan untuk realisasi investasi PMA sebesar \$19.647.188,02 (Rp320.858.227.570,00) dengan target \$10.000.000,00 dengan predikat sangat baik.

Jumlah investor yang berminat menanamkan modal indikator dari kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/kota dengan target 20 investor terealisasi 20 investor yang berminat menanamkan modal atau 100 % dengan predikat berhasil. Sebanyak 313 orang pelaku usaha di Kabupaten Tabalong untuk Sumber Dana yang berasal dari DAK Non Fisik FPM dan APBD Tahun 2024, dan terbagi dalam 9 kelompok angkatan, masing-masing angkatan terdiri dari 35 dan 36 orang pelaku usaha yang terdiri dari Perusahaan perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Tabalong, sedangkan untuk capaian tingkat kehadiran peserta 98,72%, dan 136 kegiatan usaha dengan capaian fisik 170% berhasil dilakukan pengawasan.

Persentase peningkatan investasi dengan target 20 % dengan realisasi capaian -55,58% karena berdasarkan hasil perhitungan capaian tahun 2024 dikurang capaian tahun 2023 dibagi tahun 2023 dikali 100% , sedangkan angka realisasi tahun 2023 lebih besar dari angka tahun 2024, hal ini disebabkan **Pada**

tahun 2024 realisasi investasi sebesar Rp. 1.130.877.037.791,- (Satu Triliyun Seatus TigaPuluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) sedangkan tahun **2023** Realisasi Investasi yang masuk di Kabupaten Tabalong adalah **Rp. 2.545..942.661.632,- (Dua Triliyun Lima Ratus EmpatPuluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)** yang mana angka tersebut perolehan dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sepanjang tahun 2023 dan 2024.. Data ini adalah data yang didapat dari semua laporan yang sudah masuk di sistem OSS dengan status disetujui oleh Kabupaten Tabalong.

19. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata adalah Upaya pencapaian Misi III yakni Mewujudkan kemandirian daerah yang dilakukan melalui Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas Pendidikan murah dan berkualitas, dengan program prioritas:

- 1) Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
- 2) Pengembangan kapasitas kepramukaan

Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel III.87.
Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Kepemudaan
Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1.	Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas Pendidikan murah dan berkualitas	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	86	87	88	91	96	100	100
		Pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase peningkatan kapasitas dan peran aktif kepramukaan	-	-	88	93	96	100	100

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Porapar, 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.88.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Kepemudaan
Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
					2023	2023	2024	2024
1.	Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas Pendidikan murah dan berkualitas	Pengembangan kapasitas daya saing kepe-mudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	86	96	96	100	82,66
		Pengembangan kapasitas ke-pramukaan	Persentasi peningkatan kapasitas dan peran aktif kepramukaan	-	96	96	100	100

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Porapar, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Target indikator kinerja utama tidak ada yang menjadi kewenangan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata.

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.89.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1.	Jumlah klub olahraga	Buah	76	128	80	158
2.	Jumlah Gedung olahraga	Buah	27	36	36	43
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	86	96	100	82,66
2	Jumlah atlet berprestasi	Orang	24	98	50	46
3.	Persentase peningkatan kapasitas dan peran aktif kepramukaan	Persen	-	96	100	100

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Porapar, 2024

Tabel III.90.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kabupaten
Tabalung Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Jumlah Kunjungan Wisata	orang	794.144	3.851.766	1.020.000	1.023.390
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten	Persen	-	1,37	4	menunggu rilis BPS

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Porapar, 2024

20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Upaya pencapaian Misi III yakni Mewujudkan kemandirian daerah yang dilakukan melalui:

- 1) Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas Pendidikan murah dan berkualitas, dengan program prioritas Pembinaan perpustakaan
- 2) Optimalisasi aktivitas pendukung penyelenggara pendidikan, dengan program prioritas pengembangan perpustakaan

Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.91.
Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Perpustakaan
Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas pendidikan murah dan berkualitas	Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Pengunjung			18,66 %	19,16 %	19,66 %	20,16 %	20,16%
			Rasio Keterse-diaan Koleksi Buku bahan pustaka			0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
			Persentase Perpustakaan yang dibina			22%	30%	40%	53%	53%
			Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan Daerah			64.188 eks	64.688 eks	65.188 eks	65.688 eks	65.688 eks

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.92.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Perpustakaan Tahun 2023 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
					2023	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas pendidikan murah dan berkualitas	Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Pengunjung		19,66	21,81	20,16	19,61
			Rasio Ketersediaan Koleksi Buku bahan pustaka		0,25	0,28	0,25	0,281
			Persentase Perpustakaan yang dibina		40	40	53	55
			Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan Daerah		65.188 eks	70.153 eks	65.688 eks	76.318 eks

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Target indikator kinerja utama tidak ada yang menjadi kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.93.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Persentase Jumlah Pengunjung	Persen		21,81	20,16	19,61
2	Rasio ketersediaan koleksi bahan pustaka	Rasio		0,28	0,25	0,281
3	Persentase perpustakaan yang dibina	Persen		40	53	55
4	Persentase Pengelolaan Arsip di OPD	Persen		45	45	55
5	Jumlah Perlindungan, Penyelamatan Arsip, Aumentifikasi Arsip Statis dan Alih Media	Dokumen		1.385	500	500

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

21. Dinas Perkebunan dan Peternakan

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Upaya pencapaian Misi II yakni Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui Pemantapan pelaksanaan Gemas Mekar, dengan program prioritas Gerakan Masyarakat Meningkatkan Mutu Karet (Gemas Mekar)

Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.94.
Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Perkebunan
Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	Pemantapan pelaksanaan Gemas Mekar	Pemantapan pelaksanaan Gemas Mekar	Produksi BOKAR bersih UPPB (ton)	341	500	750	1.000	1.250	1.500	1.500
			Bertambahnya UPPB olahan karet	20	30	35	40	43	50	50

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.95.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Perkebunan
Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
					2023	2023	2024	2024
1	Pemantapan pelaksanaan Gemas Mekar	Pemantapan pelaksanaan Gemas Mekar	Produksi BOKAR bersih UPPB (ton)	341	1.250	904	1.500	937
			Bertambahnya UPPB olahan karet	20	43	52	50	54

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Indikator kinerja utama bidang perkebunan dan peternakan masuk dalam bidang pertanian, jd tidak ada indikator kinerja utama khusus bidang pertanian.

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Perkebunan dan Peternakan pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.96.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1.	Jumlah UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar) yang difasilitasi	UPPB	-	52	56	54
2	Persentase angka mortalitas hewan strategis	Persen		0,005	≤3%	0,54
3	Persentase Penyediaan Daging Asuh	Persen		74,2	75	75

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2024

Penjelasan:

Untuk indikator kinerja persentase angka mortalitas hewan strategis adalah harus menurun setiap tahunnya, dengan target setiap tahun adalah harus kurang dari atau sama dengan 3% (≤3%).

22. Bapperida

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riset dan Inovasi Daerah adalah Upaya pencapaian Misi III yakni Mewujudkan kemandirian daerah yang dilakukan melalui Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas Pendidikan murah dan berkualitas dengan program prioritas Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.97.
Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	2	3	a. 4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas Pendidikan murah dan berkualitas	Penelitian dan Pengembangan Daerah	b. Persentase implementasi rencana kelitbangan c. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan d. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah e. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	- 2019 belum ada Program Penelitian dan Pengembangan	100% 100% 100% 100%					Pada Perubahan Rentstra dan Perubahan RPJMD 2019-2024 yang berlaku mulai tahun 2021 Indikator Program di rubah menjadi Persentase hasil kelitbangan yang ditindak lanjuti
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang menghasilkan inovasi			12	17	20	20	20

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Bappedalitbang, 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.98.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
					2023	2023	2024	2024
1	Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas Pendidikan murah dan berkualitas	Penelitian dan Pengembangan Daerah	a. Persentase implementasi rencana kelitbangan b. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan c. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan	- 2019 belum ada Program Penelitian dan Pengembangan		Pada Perubahan Rentstra dan Perubahan RPJMD 2019-2024 yang berlaku mulai tahun 2021 Indikator Program di	20	20

			inovasi daerah d. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah			rubah menjadi Persentase hasil kelitbangan yang ditindak lanjuti		
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang menghasilkan inovasi		17	17	20	17

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Bappedalitbang, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Target indikator kinerja utama bidang Penelitian dan Pengembangan tidak ada yang menjadi kewenangan Bappedalitbang.

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.99.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Persentase Indikator Kinerja sasaran daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah	Persen		100	100	100
2	Persentase keselarasan program pada dokumen perencanaan SKPD terhadap program pada Dokumen Perencanaan Daerah	Persen		100	100	100
3	Persentase hasil kelitbangan yang menghasilkan inovasi	Persen		17	20	20
B.	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1.	Rasio Ketergantungan	Persen	47,43	42,77	45,00	43,17

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Bappedalitbang, 2024

23. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Upaya pencapaian Misi III yakni Mewujudkan Kemandirian Daerah yang dilakukan melalui :

- 1) Optimalisasi pemanfaatan dana transfer dengan program prioritas Optimalisasi pemanfaatan dana transfer
- 2) Memanfaatkan alternatif pembiayaan, dengan program prioritas Pemanfaatan pinjaman daerah
- 3) Peningkatan kapasitas manajemen pemanfaatan dan pemeliharaan aset daerah dengan program prioritas Peningkatan kapasitas manajemen pemanfaatan dan pemeliharaan aset daerah
- 4) Perbaikan tunjangan aparat pemerintah daerah, khususnya yang bertugas di daerah terpencil, serta aparat dan pamong praja dengan program prioritas peningkatan kesejahteraan aparat pemerintah daerah.

Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.100.
Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Optimalisasi pemanfaatan Dana Transfer	Optimalisasi pemanfaatan Dana Transfer	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Memanfaatkan alternatif pembiayaan	Pemanfaatan pinjaman daerah	Terpenuhinya Pembangunan Infrastruktur Daerah	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
3	Peningkatan kapasitas manajemen pemanfaatan dan pemeliharaan aset daerah	Peningkatan kapasitas manajemen pemanfaatan dan pemeliharaan aset daerah	Pelaksanaan Pemanfaatan BMD berupa Kerjasama pemanfaatan & Sewa	5.129.360.000	5.129.360.000	5.200.260.800	5.200.260.800	5.200.260.800	5.254.748.625	5.254.748.625
4	Perbaikan tunjangan aparat pemerintah daerah khususnya yang bertugas di daerah terpencil, serta aparat dan pamong desa	Peningkatan Pengelolaan & Kinerja Pemerintahan Daerah serta kualitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	1.414.762.500,-	2.026.425.000,-	2.069.475.000,-	1.882.125.000,-	1.976.231.250,-	1.976.231.250,-	1.976.231.250,-

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD BPKAD, 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.101.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
					2023	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Optimalisasi pemanfaatan Dana Transfer	Optimalisasi pemanfaatan Dana Transfer	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	Masih proses audit
2	Memfaatkan alternatif pembiayaan	Pemanfaatan pinjaman daerah	Terpenuhinya Pem-bangunan Infrastruktur Daerah	Rp. 0	Rp. 0	0,00	Rp. 0	Rp. 0
3	Peningkatan kapasitas manajemen pemanfaatan dan pemeliharaan aset daerah	Peningkatan kapasitas manajemen pemanfaatan dan pemeliharaan aset daerah	Pelaksanaan Pemanfaatan BMD berupa Kerjasama pemanfaatan & Sewa	5.129.360.000	5.200.260.800	5.254.748.624	5.254.748.625	5.256.748.624
4	Perbaikan tunjangan aparat pemerintah daerah, khususnya yang bertugas di daerah terpencil, serta aparat dan pamong desa	Peningkatan Pengelolaan & Kinerja Pemerintahan Daerah serta kualitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	1.414.762.500,-	1.976.231.250,-	1.600.784.120,00	1.976.231.250,-	1.917.244.527,00

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD BPKAD, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja utama bidang Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.102.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2023-2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
		2018	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Opini BPK (predikat)	WTP	WTP	WTP	Masih proses audit

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD BPKAD, 2024

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.103.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Persentase Ketepatan waktu Penyusunan dan Penetapan APBD	Persen		100	100	100
2	Persentase waktu penyelesaian SP2D berdasarkan SPM yang dinyatakan sah dan lengkap sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persen		100	100	100
3	Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100
4	Persentase kesesuaian nilai aktiva tetap BMD dengan Neraca keuangan Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD BPKAD, 2024

24. Badan Pendapatan Daerah

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah adalah Upaya pencapaian Misi III yakni Mewujudkan Kemandirian Daerah yang dilakukan melalui Optimalisasi peningkatan PAD, dengan program prioritas Optimalisasi peningkatan PAD

Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.104.

Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Pendapatan Daerah Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Optimalisasi peningkatan PAD	Peningkatan dan Pengelolaan PBB dan BPHTB	Persentase kontribusi PBB dan BPHTB terhadap PAD	20	21	22	23	24	25	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Peningkatan dan Pengelolaan Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Transfer	Persentase kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD	20	21	22	23	24	25	25
		Program Pengendalian Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	20	21	22	23	24	25	25

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Bapenda, 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.105.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Pendapatan Daerah
Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
					2023	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Optimalisasi peningkatan PAD	Peningkatan dan Pengelolaan PBB dan BPHTB	Persentase kontribusi PBB dan BPHTB terhadap PAD	20	24	6,85	25	4,58
		Peningkatan dan Pengelolaan Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Transfer	Persentase kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD	20	24	35,85	25	69,35
		Program Pengendalian Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	20	24	11,13	25	8,60

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Bapenda, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja utama bidang Pendapatan Daerah pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.106.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Pendapatan Daerah
Tahun 2023-2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
		2018	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Tingkat Kemandirian Daerah	10,70%	11,13%	9,32%	8,60%

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Bapenda, 2024

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Pendapatan Daerah pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.107.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	16	6,85	34,48	33,68
2	Persentase Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	18	35,85	45,19	40,26
3	Persentase SKPD pengelola PAD yang mencapai target (%)	Persen	18	11,13	54	46

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Bapenda, 2024

Realisasi Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 unaudited adalah 40,02%, sedangkan realisasi dari angka audited adalah 41,83% dari target setelah perubahan 36,29% atau sebesar 115,27%. Pada tahun 2023 juga terjadi perubahan target kinerja dari 43,54 menjadi 36,29% dikarenakan adanya penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah dan target Pendapatan Daerah. Jumlah realisasi Pajak Daerah pada tahun 2023 adalah Rp. 92.607.474.468,00 terhadap target Pendapatan Asli Daerah Rp. 221.366.950.012,00.

Pada tahun 2024 ini, terjadi perubahan cara perhitungan untuk indikator Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun sebelumnya, angka untuk indikator ini diperoleh dari Realisasi Pajak Daerah

terhadap Target Pendapatan Asli Daerah, sedangkan mulai tahun 2024, perhitungannya menggunakan rumus (Halim dan Roro: 2015) Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Untuk realisasi capaian kinerja Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 adalah 33,688% dari target setelah perubahan 34,48%% atau sebesar 97,68%. Pada tahun 2024 juga terjadi perubahan target kinerja dari 43,54 menjadi 34,48% dikarenakan penetapan target pada saat penyusunan Renstra terlalu tinggi. Jumlah realisasi Pajak Daerah pada tahun 2024 adalah Rp. 89.702.895.585,00 terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp. 266.370.383.337,76.

Capaian kinerja tahun 2024, terlihat lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023, meskipun realisasi Pajak Daerah tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Penyebabnya dikarenakan persentase kenaikan Pajak Daerah lebih kecil dibandingkan dengan presentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah. Angka untuk tahun 2024 masih menggunakan angka unaudited.

Realisasi Persentase Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 untuk angka unaudited adalah 2,68%, sedangkan untuk angka audited adalah sebesar 2,77% dari target setelah perubahan 2,55% dengan capaian 108,63%. Pada tahun 2023 juga terjadi perubahan target kinerja dari 5,1% menjadi 2,55% adanya penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah dan target Pendapatan Daerah. Jumlah realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2023 adalah Rp. 6.124.300.181,00 terhadap target Pendapatan Asli Daerah Rp. 221.366.950.012,00.

Untuk realisasi capaian kinerja Persentase Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 adalah 40,26% dari target setelah perubahan 45,19% atau 89,09%. Pada tahun 2024 juga terjadi perubahan target kinerja, meningkat secara signifikan dari 5,1% menjadi 45,19% dikarenakan adanya penambahan target penerimaan retribusi, khususnya Retribusi Pelayanan Kesehatan. Jumlah realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2024 adalah Rp. 107.240.699.089,21 terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp. 266.370.383.337,76.

Pada tahun 2024 ini, terjadi perubahan cara perhitungan untuk indikator Persentase Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun sebelumnya, angka untuk indikator ini diperoleh dari Realisasi Retribusi Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah, sedangkan mulai tahun 2024, perhitungannya menggunakan rumus Halim (2004:163) Realisasi Retribusi Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Realisasi Persentase SKPD Pengelola PAD yang Mencapai Target pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 adalah sebesar 61,53% dari target setelah perubahan 60% atau 102,55%. Pada tahun ini terjadi peningkatan target kinerja, dari 14% menjadi 60% dikarenakan jumlah SKPD pengampu/ yang mengelola retribusi dan melakukan rekonsiliasi ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong berkurang dari 29 SKPD menjadi 15 SKPD.

Untuk Realisasi Persentase SKPD Pengelola PAD yang Mencapai Target pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 adalah sebesar 46% dari target setelah perubahan 54% atau 85,19%. Pada tahun ini terjadi penurunan target kinerja, dari 60% menjadi 54% dikarenakan jumlah SKPD pengampu/ yang mengelola retribusi dan melakukan rekonsiliasi ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong berkurang dari 15 SKPD menjadi 13 SKPD. Berkurangnya jumlah SKPD pengampu/ yang mengelola retribusi dikarenakan puskesmas yang sebelumnya melaporkan langsung ke Badan Pendapatan Daerah, sekarang laporan BLUDnya melalui Dinas Kesehatan.

Persentase Kontribusi PBB dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2023 untuk angka unaudited adalah sebesar 6,85% dan untuk angka audited adalah sebesar 7,24% dari target 25% atau sebesar 28,96%, diperoleh dari jumlah realisasi PBB dan BPHTB Rp. 9.900.596.302 terhadap jumlah target Pendapatan Asli Daerah Rp. 221.366.950.012. Sedangkan Persentase Kontribusi PBB dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2024 adalah sebesar 4,58% dari target 25% atau sebesar 18,32%, diperoleh dari jumlah realisasi PBB dan BPHTB Rp. 12.206.797.431 terhadap jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp. 266.370.383.337,76. Data yang digunakan untuk tahun 2024 ini masih belum memuat seluruh penerimaan dengan belum diaudit oleh BPK RI (unaudited). Penetapan target awal yang tercantum

dalam Renstra untuk indikator ini terlalu tinggi, sehingga realisasinya tidak tercapai pada tahun 2023 dan 2024.

Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong mengalami perubahan nomenklatur, dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. Dengan berubahnya nomenklatur ini, berubah juga proses bisnis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong, dari sebelumnya pembagian bidangnya berdasarkan hasil, berubah menjadi berdasarkan proses. Dengan berubahnya nomenklatur dan adanya perubahan Renstra 2019-2024, indikator Persentase Kontribusi PBB dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak digunakan lagi dan berubah menjadi Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Persentase Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Persentase Realisasi Pajak Daerah (9 Pajak daerah selain Pajak PBB dan BPHTB) dan Retribusi Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2023 Persentase Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan data unaudited adalah 35,85%, sedangkan menurut data audited, sebesar 37,36% dari target 24%, dengan capaian kinerja yang melebihi target, sebesar 155,67%, diperoleh dari realisasi Pajak Daerah selain Pajak PBB dan BPHTB dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 82.705.037.168 terhadap Target Pendapatan Asli Daerah Rp.221.366.950.012.

Pada tahun 2024 Persentase Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 69,35% dari target 25%, dengan capaian kinerja yang melebihi target, sebesar 277,4%, diperoleh dari realisasi Pajak Daerah selain Pajak PBB dan BPHTB ditambah realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp. 184.736.797.243,21 terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp. 266.370.383.337,76. Pada tahun 2024 ini, realisasi Retribusi Daerah meningkat signifikan, dari yang realisasi pada tahun 2023 sejumlah Rp. 5.933.600.575, pada tahun 2024 realisasinya meningkat menjadi Rp. 107.240.699.089,21 dikarenakan adanya penambahan target penerimaan retribusi, khususnya Retribusi Jasa Umum.

Dikarenakan pada tahun 2022 adanya perubahan nomenklatur dan adanya perubahan Renstra 2019-2024, Indikator Persentase Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah ini tidak di pergunakan lagi dan berubah menjadi Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pendapatan Asli Daerah.

Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2023 untuk data unaudited adalah sebesar 11,13%, sedangkan untuk angka audited sebesar 11,74% dari target 23% dengan capaian kinerja 51,04% dengan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp. 256.804.852.375,79 terhadap target Pendapatan Daerah Rp. 2.188.119.555.579,00. Pada tahun berjalan 2021, terdapat Perubahan Renstra 2019-2024 yang menurunkan target kinerja Indikator Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dari 23% menjadi 15,65%. Penurunan target kinerja, dikarenakan adanya penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah dan target Pendapatan Daerah.

Untuk 2024, Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah adalah sebesar 8,60% dari target 25% dengan capaian kinerja 34,4% dengan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp. 266.370.383.337,76 terhadap realisasi Pendapatan Daerah Rp. 3.098.573.311.629,76. Perubahan Renstra 2019-2024 juga merubah target kinerja Indikator Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah ini dari 23% menjadi 17,17% dan pada waktu APBDP 2024 berubah lagi menjadi 9,32% sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 92,27%. Ada beberapa komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang realisasinya melebihi dari target, yaitu penerimaan Pajak Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, tidak ada yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

b. Capaian indikator kinerja utama

Target indikator kinerja utama bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM tidak ada yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.108.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Persentase kualitas pelayanan administrasi Kepegawaian daerah	Persen	75	90,74	90	91,32
2.	Persentase Penyusunan Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persen	100	100	100	100
3	Persentase penempatan ASN sesuai analisis jabatan	Persen	90	90	90	90
4	Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Persen	100	100	100	100
5	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	100	100	100	100

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD BKPSDM, 2024

26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Upaya pencapaian Misi I yakni Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih agamais yang dilakukan melalui Peningkatan kesadaran berbudaya dan tertib hukum, dengan program prioritas:

- 1) Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
- 2) Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi konflik sosial

Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.109.
Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan kesadaran berbudaya dan tertib hukum	Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Ideologi Wawasan Kebangsaan	65%	65%	70%	74%	75%	80%	80%
		Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi konflik sosial	Persentase Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial dengan Forum-Forum di Kab.Tab	65%	65%	70%	74%	75%	80%	80%

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Kesbangpol, 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.110.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
				2019	2023	2023	2024	2024
1	Peningkatan kesadaran berbudaya dan tertib hukum	Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Ideologi Wawasan Kebangsaan	65%	75	70	80	100
		Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi konflik sosial	Persentase Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial dgn Forum-Forum di Kab. Tabalong	65%	75	70	80	100

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Kesbangpol, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Target indikator kinerja utama bidang Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023 dan 2024 tidak ada yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.111.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	50	75,06	100	79,25
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	Jumlah	-	24	12	24
3	Persentase penanganan konflik dengan forum- forum di Kabupaten Tabalong terpenuhi	Persen	50	100	100	100
4	Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Persen	50	97	100	100
5	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	Jumlah	8	14	10	14
6	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Ideologi Wawasan Kebangsaan	Persen	65	100	80	100
7	Persentase Pemantauan Politik Daerah dan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Persen	70	100	80	100
8	Persentase Pelaksanaan Pembinaan LSM dan Ormas	Persen	70	100	80	100
9	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi	Persen	65	97	80	100
10	Persentase Pelaksanaan Penanganan Konflik sosial dengan Forum-forum di Kabupaten Tabalong	Persen	65	100	80	100
B.	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1.	Jumlah demo	Kali	0	3	0	3

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Badan Kesbangpol, 2024

27. Sekretriati Daerah

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah adalah:

- 1) Upaya pencapaian Misi I yakni Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih agamis, yang dilakukan melalui:
 - a) Peningkatan kesadaran berbudaya dan tertib hukum dengan program prioritas Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b) Pemantapan implementasi nilai-nilai dasar keagamaan dalam aktivitas pembangunan, dengan program prioritas Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Upaya pencapaian Misi III yakni Mewujudkan Kemandirian Daerah, yang dilakukan melalui Optimalisasi pemanfaatan dana transfer, dengan program prioritas Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- 3) Upaya pencapaian Misi III yakni Mewujudkan Kemandirian Daerah yang dilakukan melalui Melanjutkan dan menyempurnakan proses pembentukan dan pelaksanaan DANA ABADI, dengan program prioritas Perekonomian dan pembangunan

Dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Target-target dari program tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.112.
Target Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Administrasi Pemerintahan
Tahun 2020 sampai 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan kesadaran berbudaya dan tertib hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Sosialisasi Produk Hukum Daerah	-	2	2	3	2	2	11
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang telah disosialisasikan (Perda&Perbup)	-	81	81	81	81	81	405
			Jumlah Peserta Sosialisasi	-	40	40	90	80	80	330
2	Pemantapan implementasi nilai-nilai dasar keagamaan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Perangkat Daerah yang	43	43	43	43	43	43	43

	dalam aktivitas pembangunan		melaksanakan Tausiah Bulanan							
3	Optimalisasi pemanfaatan Dana Transfer	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	3,1750	3,1750	3,1950	3,2010	3,2035	3,2050	3,2050
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	65,00	65,00	66,25	67,55	68,85	70,15	65,00
4	Melanjutkan dan menyempurnakan proses pembentukan dan pelaksanaan DANA ABADI	Program Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah, 2024

Sedangkan capaian realisasi dari target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.113.
Realisasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bidang Administrasi Pemerintahan Daerah Tahun 2023 dan 2024

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023		Tahun 2024	
				2019	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
					2023	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan kesadaran berbudaya dan tertib hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Sosialisasi Produk Hukum Daerah	-	2	4	2	2
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang telah disosialisasikan (Perda&Perbup)	-	81	87	81	38
			Jumlah Peserta Sosialisasi	-	80	160	80	80
2	Pemantapan implementasi nilai-nilai dasar keagamaan dalam aktivitas pembangunan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Tausiah Bulanan	43	43	41	43	41
3	Optimalisasi pemanfaatan Dana Transfer	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	3,1750	3,2035	2,91	3,2050	2,91

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	64,66	68,85	67,48	70,15	BB (75,85)
4	Melanjutkan dan menyempurnakan proses pembentukan dan pelaksanaan DANA ABADI	Program Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	-	-	-

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah, 2024

b. Capaian indikator kinerja utama

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja utama bidang Administrasi Pemerintahan pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.114.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Administrasi Pemerintahan Tahun 2023-2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
		2018	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	50	56,06	70,15	Belum Keluar
2.	Nilai SAKIP (predikat)	B	B	BB	BB
3.	Indeks Gini	0,320	0,284		Belum rilis

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah, 2024

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Administrasi Pemerintahan pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.115.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan Kabupaten Tabalong (Pada Sekretariat Daerah) Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
	Laju inflasi	Persen	3,82	2,39	3,1	2,11
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	Persen	-	100	100	100

2	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	Persen		100	100	100
3	Persentase pembentukan produk hukum	Persen		100	100	90
4	Persentase tingkat sinkronisasi dan penyelarasan sector ekonomi dan sumberdaya alam	Persen		100	100	100
5	Persentase tingkat pelayanan pengadaan barang dan jasa	Persen		100	100	100
6	Persentase perda yang terselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100	50
7	Nilai AKIP : Indeks Pelayanan Kesekretariatan	Persen		73,3; 88,35	71,88	70,31 87,65
8	Persentase tingkat pelayanan protokol dan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persen		100	100	100
9	Persentase SAKIP SKPD yang berpredikat BB	Persen		73,30	25	68,29
10	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	Persen		100	100	100
C.	ASPEK DAYA SAING USAHA					
1.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	perda	5	4	5	3

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah, 2024

Daftar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mendukung iklim usaha sampai tahun 2024 :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ditetapkan tanggal 9 Januari 2024
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, ditetapkan tanggal 15 Maret 2024.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, ditetapkan tanggal 25 November 2024.
- 4) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024, ditetapkan tanggal 4 Juni 2024.

28. Sekretaris DPRD

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, tidak ada yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah.

b. Capaian indikator kinerja utama

Target indikator kinerja utama bidang pengawasan tidak ada yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah.

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Pengawasan pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.116.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan Kabupaten Tabalong (Pada Sekretariat DPRD) Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Persentase tingkat pelayanan persidangan, kehumasan dan legislasi DPRD	Persen		98,87	100	93,13
2	Persentase tingkat pelayanan anggaran, pengawasan dan aspirasi/reses	Persen		97,34	100	96,25

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Sekretariat DPRD, 2024

29. Inspektorat Daerah

a. Capaian pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD, tidak ada yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah.

b. Capaian indikator kinerja utama

Target indikator kinerja utama bidang pengawasan tidak ada yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah.

c. Capaian indikator kinerja daerah

Capaian realisasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Pengawasan pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.117.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	
			2018	Realisasi	Target	Realisasi
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Tabalong	Persen		70	100 (level 3)	100 (level 3)
2	Jumlah Perangkat Daerah dengan predikat WBK	Jumlah		1	1	1

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Inspektorat Daerah, 2024

F. Penghargaan Yang Diterima Selama Tahun 2024

Selama tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tabalong menerima beberapa penghargaan baik dari Kementerian, Lembaga, maupun dari Pemerintah Provinsi, sebagai bukti bahwa kerja keras dan kerja cerdas serta kerja bersama antar semua stakeholder di Kabupaten Tabalong.

Penghargaan-penghargaan tersebut dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel III.118.

Daftar Penghargaan Yang Diterima Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No.	Nama Penghargaan	SKPD Pengampu	Pemberi Penghargaan	Predikat/Kategori
1.	Baznas Award 2024	Baznas Tabalong	Baznas Republik Indonesia	Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik di Indonesia
2.	Adipura	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kota Kecil
3.	Pembangunan Daerah Tahun 2024 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Terbaik II
4.	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP Ke-10)	Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah	BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Peringkat ke-4
6.	Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Kabupaten/Kota tahun 2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu &	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Peringkat ke-2

No.	Nama Penghargaan	SKPD Pengampu	Pemberi Penghargaan	Predikat/ Kategori
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
7.	Kategori Indeks Berakhlak terbaik se-Kalimantan Selatan.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Peringkat ke-3
8.	Penghargaan Kekayaan Intelektual	Pemerintah Kabupaten Tabalong	Kementerian Hukum dan HAM RI	Terbaik ke-3 Tahun 2022-2023
9.	Penghargaan UHC Awards Kategori Madya	Dinas Kesehatan	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia	Kategori Madya
10.	Piagam Pembinaan Proklamasi Pemerintah Kabupaten (Mendorong Percepatan Pembangunan Desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia	Mandiri, Maju dan Berkembang
11.	Piagam Pembinaan Proklamasi Pemerintah Kabupaten (Capaian Realisasi Investasi Terbesar di Kalimantan Selatan Tahun 2023)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia	Terbesar ke -3
12.	Penghargaan Wahana Tata Nugraha	Dinas Perhubungan	Kementerian Perhubungan RI	Kota Kecil

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan

1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Pusat

1) Dinas Tenaga Kerja

1) Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan sebagai berikut Peraturan Presiden no. 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN dan Peraturan Presiden no. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Ketenagakerja Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian ketenagakerjaan.

2) Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

UPTD BLK Tanjung melaksanakan kegiatan pelatihan setiap tahunnya dengan 2 dana yaitu Dana APBD dan Dana APBN, Adapun dana APBD diterima dari Pemerintah Daerah dan Dana APBN yang diterima dari Pemerintah Pusat dalam hal ini melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda.

Tabel IV.1
Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	Urusan yang ditugas pembantuankan	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda	- Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue (2 Paket) - Pelatihan Pemeliharaan dan Perbaikan AC untuk rumah tangga (1 Paket) - Pelatihan Pemasangan Listrik Bangunan Sederhana (1 Paket) - Pelatihan Service Sepeda Motor Sistem Injeksi (1 Paket) - Pelatihan Desainer Grafis Muda (2 Paket) - Pelatihan Menjahit Pakaian Wanita Dewasa (1 Paket) - Pelatihan Plate Welder SMAW 4G-UP PF (1 Paket) - Pelatihan Plate Welder SMAW 3G-UP PF (1 Paket)	Pelatihan Berbasis Kompetensi (10 Paket)	982.124.000

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Tenaga Kerja, 2024

3) Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten. UPTD BLK Tanjung merupakan Binaan dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda

a. Target Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri No. 190/PMK-05/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Realisasi

Pelatihan Berbasis Kompetensi Dana APBN Tahun 2024 terdiri dari 10 Paket.

Tabel IV.3
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan Output dan Rincian Kegiatan	Kab/ Kota	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Bidang :	PMK no. 210/PMK.05/2022 ttg tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan apbn	Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi Kegiatan : Pelatihan Berbasis Kompetensi Output : Pencari Kerja Terlatih Rincian Kegiatan : Pelatihan	Kabupaten Tabaong	Dinas Tenaga Kerja UPTD BLK Tanjung	982.124.000	929.973.915	95%	10 Paket	100

Sumber : Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Tenaga Kerja, 2024

4) Hambatan/Permasalahan dan Upaya Penyelesaian (saran dan tindak Lanjut)

a) Permasalahan yang dihadapi :

- (1) Permasalahan pada jumlah instruktur yang masih kurang pada beberapa kejuruan menyebabkan peserta yang diterima terbatas, yang mana jumlah pendaftar sangat banyak

- (2) kendala yang dihadapi kurangnya peralatan pada UPTD BLK Tanjung pada beberapa kejuruan,
- (3) Tidak adanya staf khusus yang menangani masalah keuangan pada saat pelaksanaan teknis kegiatan
- (4) Seringnya peserta pelatihan berhenti di tengah-tengah pelatihan sedang berlangsung dengan berbagai alasan.

b) Saran dan Tindak Lanjut :

- (1) Adanya penambahan instruktur pada UPTD BLK Tanjung
- (2) Bantuan penambahan alat untuk kelancaran pelatihan
- (3) Serta mengingatnya banyaknya pendaftar yang berminat untuk mengikuti pelatihan agar dapat dipertimbangkan untuk menambah paket pelatihan pada dana pembantuan ke depan

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan paparan pada beberapa bab terdahulu, kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong selama tahun anggaran 2023 menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.876.285.635.126,64 atau mencapai 107,90% dari estimasi pendapatan yang dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp2.665.576.702.436,00. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp264.607.523.905,64 dari estimasi pendapatan setelah perubahan sebesar Rp247.404.526.277,00 atau sebesar 106,95%. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD Yang Sah.
 - b. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 sebesar Rp2.611.678.111.221,00 dari estimasi pendapatan setelah perubahan sebesar Rp2.278.172.176.159,00 atau 114,64%. Pendapatan transfer tersebut bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.
 - c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan pendapatan hibah dan pendapatan lainnya, dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp0,00 dari estimasi pendapatan setelah perubahan sebesar Rp140.000.000.000,00 atau sebesar 0,00%.

2. Realisasi belanja pada tahun 2024 sebesar Rp2.718.184.089.048,70 dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp3.183.167.179.768,00 atau sebesar 85,39%. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer, dengan realisasi sebagai berikut :
- a. Realisasi belanja operasi tahun 2024 sebesar Rp1.550.436.515.684,78 atau 86,89% dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp1.784.448.643.144,00. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, bantuan bantuan sosial.
 - b. Realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp846.763.080.563,92 atau 79,24% dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp1.068.567.900.118,00. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan Gedung, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal aset tetap lainnya.
 - c. Realisasi belanja tidak terduga tahun 2024 sebesar Rp1.985.000.000,00 atau 17,80% dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp11.151.143.706,00
 - d. Realisasi transfer tahun 2024 sebesar Rp318.999.492.800,00 atau 100,00% dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp318.999.492.800,00. Belanja transfer terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan.
 - 1) Realisasi transfer bagi hasil pendapatan tahun 2024 sebesar Rp20.968.300.000,00 atau 100,00% dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp20.968.300.000,00. Transfer bagi hasil pendapatan terdiri dari transfer bagi hasil pajak daerah dan transfer bagi hasil retribusi daerah.
 - 2) Realisasi transfer bantuan keuangan tahun 2024 sebesar Rp298.031.192.800,00 atau 100,00% dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp298.031.192.800,00. Transfer

bantuan keuangan terdiri dari transfer bantuan keuangan ke desa dan transfer bantuan keuangan lainnya.

3. Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Realisasi penerimaan daerah tahun 2024 sebesar Rp560.285.979.793,00 atau sebesar 100,00% dari rencana penerimaan setelah perubahan sebesar Rp560.285.979.793,00. Penerimaan Daerah pada tahun 2024 merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Penerimaan Pinjaman Daerah.
 - b) Realisasi Pengeluaran daerah tahun 2024 sebesar Rp42.695.502.461,00 atau sebesar 100,00% dari rencana pengeluaran daerah setelah perubahan sebesar Rp42.695.502.461,00.
4. Pencapaian IPM Kabupaten Tabalong memperlihatkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2024 IPM Kabupaten Tabalong sebesar 75,97 terjadi peningkatan sebesar 0,54 point dibandingkan dengan tahun 2023 yang besarnya 75,43. Pada tahun 2022 yang hanya sebesar 74,82, tahun 2021 sebesar 74,25 dan pada tahun 2020 sebesar 73,84. Rata-rata pertumbuhan IPM per tahun sejak tahun 2020-2024 adalah sebesar 0,426 point. Sejak tahun 2016 capaian angka IPM Kabupaten Tabalong di atas 70, yang berarti Kabupaten Tabalong telah berhasil merubah statusnya dari “sedang” menjadi “tinggi”.
5. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Tabalong dari tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 menjadi 73,99 tahun, pada tahun 2021 menjadi 74,09 tahun, pada tahun 2022 menjadi 74,45 tahun, pada tahun 2023 menjadi 74,63 dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 74,76. AHH ini dapat menggambarkan kualitas hidup masyarakat disuatu daerah yang dikaitkan dengan status kesehatan, pendidikan dan tingkat ekonomi.

6. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tabalong juga selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebesar 12,72, pada tahun 2021 meningkat menjadi 12,89 tahun, pada tahun 2022 menjadi 12,90 tahun, pada tahun 2023 menjadi 12,91 serta menjadi sebesar 12,92 tahun pada tahun 2024.
7. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tabalong juga selalu mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 sebesar 9,10 tahun menjadi 9,11 tahun pada tahun 2021, menjadi sebesar 9,12 tahun pada tahun 2022 dan sebesar 9,14 tahun pada tahun 2023 serta sebesar 9,15 tahun pada tahun 2024.
8. Pengeluaran riil per kapita per tahun merupakan pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan untuk menggambarkan daya beli masyarakat. Untuk Kabupaten Tabalong, pengeluaran riil per kapita mengalami peningkatan dari Rp11.283.000,00 pada tahun 2020, menjadi Rp11.470.000,00 pada tahun 2021, meningkat lagi menjadi Rp11.914.000,00 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp12.507.000,00 dan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi Rp13.097.000,00.
9. Jumlah penduduk miskin selama periode 2020-2024 berfluktuasi dengan garis kemiskinan yang semakin meningkat. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin meningkat dibandingkan tahun 2020, yang semula sebesar 14.695 jiwa menjadi 16.128 jiwa, seiring dengan meningkatnya garis kemiskinan dari Rp531.180,00/kapita/bulan menjadi Rp542.800,00/kapita/bulan. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk dari 16.128 jiwa pada tahun 2021 menjadi 15.243 jiwa pada tahun 2022, sedangkan garis kemiskinan mengalami peningkatan yang semula pada tahun 2021 sebesar Rp542.800,00/kapita/bulan menjadi Rp573.018,00/kapita/bulan. Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin kembali menurun lagi menjadi 15.153 jiwa, meskipun garis kemiskinan semakin meningkat menjadi Rp615.912,00/perkapita/bulan, Pada tahun 2024 jumlah penduduk

miskin kembali turun menjadi 14.968 jiwa, padahal angka garis kemiskinan meningkat menjadi Rp637.132,00/perkapita/bulan.

11. Dari tahun 2020 sampai tahun 2022 TPT di Kabupaten Tabalong terus mengalami peningkatan yang semula sebesar 3,07% tahun 2020 menjadi 4,46% pada tahun 2022. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi penduduk yang semula bukan angkatan kerja bergeser menjadi angkatan kerja yang merupakan salah satu penyebab meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka, karena peningkatan angkatan kerja tidak diiringi oleh peningkatan ataupun perluasan lapangan kerja. Lapangan kerja yang terbatas membuat sebagian angkatan kerja tidak terserap. Besarnya angka pengangguran selama periode tahun 2020 – 2024 berfluktuasi, dimana pada tahun 2020 sebesar 3.991 jiwa naik menjadi 4.666 jiwa pada tahun 2021, pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 6.219 jiwa. Namun pada tahun 2023 dan 2024 angka pengangguran terus mengalami penurunan menjadi 5.052 jiwa dan 5.000 jiwa.
12. Ekonomi Kabupaten Tabalong tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,7%, meningkat tinggi setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,50% menjadi 3,27% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi meningkat lagi menjadi 5,29%. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 4,90%, sedangkan pada tahun 2024 turun sebesar 0,03% menjadi 4,87%.
13. Selama tahun 2020-2024, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Tabalong rata-rata semakin meningkat setiap tahunnya dari 11,283 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 13,097 juta rupiah pada tahun 2024, atau tumbuh rata-rata 36,28% setiap tahunnya. PDRB perkapita Tabalong masih termasuk dalam kategori berpendapatan menengah tinggi.
14. Pada Tahun 2020-2024 ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten Tabalong masih dalam kategori ketimpangan rendah. Angka Gini Ratio tahun 2023 sebesar 0,284 menurun jika

dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 dan 2022. Untuk tahun 2021 gini ratio sebesar 0,288 mengalami penurunan dibanding tahun 2020 yang besarnya 0,346. Pengeluaran rata-rata per kapita di Kabupaten Tabalong berfluktuasi, baik yang 20% ke atas, 40% menengah maupun 40% terbawah.

15. Capaian indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel V.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator	Kondisi Awal	2023	2024	
		2018	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks kerukunan umat beragama				
2	Angka Kriminalitas	13,0	10,5	10	10
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,40	75,43	74,33	75,97
4	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,12	74,63	72	71,46
5	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,57	9,14	9,69	9,15
6	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,53	12,91	14,11	12,92
7	Persentase penduduk miskin (%)	5,95	5,77	5,60	5,64
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,09	3,60	3,00-4,00	4,44
9	Persentase PPKS yang dilayani (%)	83,45	96,30	100	90,75
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,84	74,60	75,12	72,54
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,20	86,06	86,1	86,47
12	Pertumbuhan ekonomi (%)	3,82	4,90	2,2-3,0	4,87
13	Indeks gini	0,320	0,284	0,28 – 0,31	Belum rilis
14	Kontribusi pertanian terhadap PDRB (%)	11	7,71	-	7,76
15	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB (%)	8,61	7,51	-	7,61
16	Indeks Ketahanan Pangan	81,11	79,79	84,72	85,91
17	Persentase UKM Aktif (%)	66	79	82	73,82
18	Persentase koperasi aktif (%)	67	59	59	53
19	Persentase desa yang bisa diakses dengan mudah (%)	80	98,35	100	98,35
20	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (%)	64,89	80,59	80,80	80,91
21	Persentase penduduk berakses air minum (%)	79,80	82,41	83,00	85,36
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,10	74,03	72	73,98
23	Indeks desa membangun	0,59	0,78	0,79	0,83
24	Indeks Reformasi Birokrasi	50	77,53	70,15	Belum Keluar
25	Nilai SAKIP (predikat)	B	B	BB	BB
26	Opini BPK (predikat)	WTP	WTP	WTP	Masih proses audit
27	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	80	84,47	90	95,76
28	Tingkat Kemandirian Daerah	10,70	11,13%	9,32%	8,60%



PEMERINTAH KABUPATEN
T A B A L O N G